
Partai Aceh:

TRANSFORMASI GAM?

Arya Budi

Partai Aceh:

TRANSFORMASI GAM?



Partai Aceh:
Transformasi GAM?

Arya Budi

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Right Reserved

Penulis: Arya Budi
Editor: Wigke Capri Arti
Sampul dan Tata Letak: Oryza Irwanto

Research Centre for Politics and Government
Jurusan Politik dan Pemerintahan
Universitas Gadjah Mada
Jl. Socio Yusticia 2 Bulaksumur, Yogyakarta 55281
www.jpp.fisipol.ugm.ac.id
email: polgov.ugm@gmail.com
Telp: +62 274 563365 ext.212

286 + xvi halaman
140 x 210 mm
ISBN 978-602-96762-7-3
© 2012

Daftar Isi

Daftar Isi	v
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	xi
Kata Pengantar Penerbit	xiii
Dari Penulis	xv
Pendahuluan	1
Aceh: Struktur Peluang Politik	3
Problema Transformasi	6
Teorisasi	9
Genealogi: Menanyakan “Mengapa”	10
Alasan Kelahiran Partai Politik: Sebuah Genealogi	12
Transformasi: Keniscayaan dalam Demokrasi	18
Gerakan Senjata, Perang dalam <i>Informal Organization</i>	22
Partai Politik: Sebuah Organisasi	25
Partai Lokal: Sebuah Definisi	29
Metode Penelitian	31
Jenis Penelitian	31
Jenis Data	32
Metode Pengumpulan Data	33
Metode Analisis Data	35
Sistematika Penulisan	36

Aceh: Lantai Dasar Cleavage	39
Kesultanan Aceh: "Unsur Hara" Genealogi	41
Perang Sabil	45
Diplomasi	47
Darul Islam: Eksperimentasi Local Cleavage	49
Berperang untuk Islam:	
Sebuah Motif Pembeda	51
Self-Government:	
Kausalitas Gagasan yang Tersembunyi	56
Kesimpulan	58
GAM: Kristalisasi Local Cleavage	61
Meramu Alasan Dasar Gerakan.....	62
Hasan Tiro, Seorang Warlord.....	64
Aceh Bukan Bagian dari Hindia Belanda.....	72
Kesenjangan Sosial dari Fakta Eksploitasi	77
Perjalanan GAM sebagai Organisasi	82
Fase Konsolidasi (1976-1979)	85
Struktur "Negara"	88
Membership	90
Gerakan Gerilya	92
Keterbatasan Teritori	94
Fase Ketenangan (1980-1985)	97
Fase Militerisasi (1986-1999)	101
Pelatihan Militer	103
Basis Teritori	104
Variasi Pasukan dan Struktur Militer	106
Rekrutmen dan Membership	108
"Kandidasi"	109
Lahirnya Faksi	110
Fase Demiliterisasi (2000-2005)	113
Perlawanan Sipil, Mencoba Beradaptasi ..	114
Perundingan: Jalan Baru	116

Reformasi Gerakan: Sebuah Reorientasi...	119
Kesimpulan	124
Titik Balik Transformasi	129
Dampak Status Darurat Militer	130
Alam yang Menyeru Perubahan	134
Proses Helsinki, Sebuah Kanal Transformasi ..	137
Perundingan pertama, Sikap yang Sama	138
Perundingan kedua, Sebuah Turning Point	139
Perundingan Ketiga:	
'Mengamankan' Partai Lokal	142
Perundingan keempat, 'Barter' Kepentingan	144
Perundingan Kelima: Keharusan Partai Lokal ..	145
Kesimpulan	148
Partai Aceh: Penerjemahan <i>Local cleavage</i> dalam	
Sistem Politik	151
UUPA: Ramuan Kepentingan	155
Turbulensi Internal	161
Partai Lokal	167
Partai Aceh: Bukti Transformasi	172
Dari 'GAM' ke 'Partai Aceh':	
Sebuah Kompromi	177
Kesimpulan	181
Partai Aceh:	
Transformasi untuk Sebuah Kerja Politik	183
Pengorganisasian Partai,	
Menerawang Bentuk Transformasi	186
Transformasi Kultural	187
Kepemimpinan: Ambiguitas Transformasi...	187
Pengorganisasian	192
Keanggotaan: Sebuah Inklusivitas?	194

Transformasi Struktural	197
Struktur Kepengurusan, Sebuah Logika Kepemimpinan	204
Pengorganisasian: Keharusan Administratif	206
Keanggotaan: Keterbukaan Struktur	208
Menguji Kemampuan Partai	211
Kesimpulan	218
Penutup	221
Kesimpulan	221
Proyeksi	229
Partai Aceh Esok Hari	230
Prospek Demokrasi di Aceh	233
Menggagas Partai Lokal di Indonesia?	170
Daftar Referensi	243
Lampiran	259
Maklumat Ulama Aceh Menyambut Kemerdekaan RI	259
Silsilah Keluarga Hasan Tiro	260
Deklarasi GAM	261
Foto dan Gambar	270
Perbandingan Peta Aceh	271
Peta era Kesultanan Aceh	271
Peta Aceh Era Republik Indonesia (Berdasarkan Departemen Pertahanan 2009)	271
Lambang Partai dan Nama Partai Pada Awal Transformasi GAM	272
Bendera (Lambang) Dan Nama Partai Setelah GAM Bertransformasi Final Dalam Kontestasi Pemilu 2009	272

Pidato Malik Mahdud Pada Pertemuan Pimpinan Partai Aceh	273
Tentang Penulis	279

Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Model Garis Genealogi Partai berdasarkan ruang relasi Lipset dan Rokkan (1967)	16
Gambar 2.1	Peta Kesultanan Aceh pada Era Perlawanan Belanda	44
Gambar 3.1.	Visualisasi Motif Kemunculan GAM	81
Gambar 3.2.	Hierarki struktur komando GAM 1976-1982	87
Gambar 3.3.	Struktur Pemerintahan (Sipil) GAM Fase Konsolidasi	89
Gambar 4.1.	Skema Genealogi Partai Aceh	153
Gambar 5.1.	Skema Pemetaan Faksi Dalam GAM Dalam Menghadapi Pilkada 2006	165
Gambar 5.2.	Skema alur verifikasi partai lokal di Aceh menuju Pemilu 2009	171
Gambar 5.3.	Perbandingan Bendera (Atribut) Atas Transformasi GAM Menjadi Partai Aceh	173
Gambar 6.1.	Visualisasi transformasi paradigmatik dari GAM menjadi Partai Aceh	185
Gambar 6.2.	Visualisasi Kerangka Analisis Transformasi GAM Menjadi Partai Aceh Sebagai Sebuah Organisasi....	186
Gambar 6.3.	Visualisasi relasi struktur eksternal Partai Aceh	198
Gambar 6.4	Skema Struktur Kelembagaan Partai Aceh	202

Daftar Tabel

Tabel 3.1	Total dana yang kembali ke Aceh berdasarkan DIP	80
Tabel 3.2.	Periodisasi GAM ala Moch. Nurhasim dan Isa Sulaiman	84
Tabel 3.3	Perbandingan gerakan Fase Konsolidasi dan Fase Militerisasi	112
Tabel 3.4	Paparan GAM Sebagai Organisasi Yang Berdinamika Dalam Beberapa Fase	124
Tabel 5.1.	Hasil voting rapat besar Duek Pakat ..	163
Tabel 5.2.	Tabulasi Perolehan Suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Aceh	166
Tabel 6.2	Bentuk transformasi organisasi dari GAM menjadi Partai Aceh	210
Tabel 6.3.	Tabulasi Hasil Pemilihan dan Distribusi Kursi Pemilu Legislatif 2009 untuk Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)	213

KATA PENGANTAR

Buku yang diberi judul “Partai Aceh: Transformasi GAM?” ini memaparkan tentang kehadiran satu-satunya partai lokal di Indonesia yaitu Partai Aceh. Sebuah konteks yang tidak pernah dibayangkan kehadirannya baik oleh Pemerintah Indonesia maupun oleh GAM dalam percaturan dunia partai politik di Indonesia. Buku ini berhasil menelusuri bahwa gagasan mengenai partai lokal ini justru tidak diusulkan baik dari pihak Indonesia maupun GAM dalam perundingan perdamaian mereka namun justru dicetuskan oleh Damien Kingsburry, seorang konsultan politik GAM.

Temuan tersebut sangat menarik karena dalam buku ini penulis berusaha mengelaborasi dan melacak terkait dengan implikasi “asal usul” usulan dibentuknya partai lokal di Aceh. Partai lokal yang seharusnya menjadi penyambung antara partai dan konstituen tidak berjalan sebagaimana semestinya. Penulis menekankan bahwa praktik partai lokal di Aceh justru tidak menjadi penyambung lidah partai kepada konstituen yang selama ini absen. Sementara itu, partai lokal ‘Partai Aceh’ menjadi satu-satunya kanal politik bagi GAM untuk berkancah di perpolitikan lokal dan nasional.

Buku penting tentang partai politik lokal di Indonesia yang melacak tentang transformasinya dari gerakan aceh merdeka menjadi partai lokal tersebut

merupakan salah satu karya skripsi terbaik mahasiswa Jurusan Politik dan Pemerintahan (JPP) Fisipol UGM dalam minat studi 'Partai Politik dan Pemilu'. Selain buku ini, JPP telah menerbitkan buku-buku yang termasuk dalam 3 skope minat studi yang lain yaitu Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Reformasi Birokrasi dan Sistem Integritas serta Hak Asasi Manusia dan Demokrasi. Meskipun dicetak dengan jumlah terbatas, skema penerbitan buku ini telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Praksis, JPP telah melaksanakan publikasi ini selama kurang lebih 5 tahun.

Penerbitan serial karya mahasiswa ini menjadi salah satu indikator dari keberhasilan dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa JPP Fisipol UGM. Keberhasilan ini tidak saja mencakup dimensi pengajaran namun juga penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan amanat Tri Dharma Universitas Gadjah Mada. Penerbitan serial karya mahasiswa ini juga dirancang demi berkembangnya budaya intelektual di kalangan mahasiswa sehingga dapat mendorong mahasiswa untuk melahirkan karya-karya akademik yang berkualitas yang layak diterbitkan dan disebarluaskan sehingga dapat dinikmati oleh para pembaca yang budiman.

Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan dan referensi para pembaca dalam memahami dunia pemerintahan, sosial dan politik di Indonesia. Selamat membaca!

Yogyakarta, Oktober 2012

Penerbit

DARI PENULIS

Untuk Ibuku, Ibuku, dan Ibuku;
Bapakku;
Dan kalian para kaum yang terpinggirkan

PENDAHULUAN

*“Kebenaran dihubungkan dalam relasi sirkular
dengan sistem-sistem kuasa yang menghasilkan dan
mempertahkannya
dan dihubungkan pada efek-efek kuasa yang dipengaruhi
dan meluaskannya...”
Michael Foucault*

Partai politik lokal menjadi sebuah aktualisasi politik alternatif sekaligus sebagai sebuah institusi yang diasumsikan mampu merekatkan relasi konstituen dan elit. Oleh karena itu munculnya partai lokal di Aceh dalam pemilu legeslatif 2009 menjadi sebuah fenomena politik yang menarik untuk dikaji. Karena selain absennya kajian kepartaian yang dimaksudkan untuk membidik partai politik lokal, melihat lebih jauh tentang aktivisme dan dinamika partai lokal adalah cara baru untuk melihat politik Indonesia yang sekarang terdesentralisasi dengan kuat ke daerah-daerah.

Selain secara ontologis kajian ini adalah hal baru dalam studi kepartaian, secara epistemologis, melihat bagaimana sebuah partai (lokal) lahir dan implikasi yang dibawanya adalah hal yang hampir tidak pernah dilacak. Studi kepartaian selama ini berada pada titik dimana partai tersebut sudah *sustainable* ada dan menjalankan

aktivitas kepartaiannya. Sehingga yang selama ini ditelusuri adalah tema-tema seputar kepemimpinan, kandidasi, ideologi, aktivis-keanggotaan, pembiayaan, faksionalisasi, rekrutmen politik, komunikasi politik, dan seputar marketing politik. Oleh karena itu, melihat bagaimana sebuah partai dapat dan mungkin lahir yang kemudian melakukan aktivitas politiknya dalam pemilu adalah hal baru dan penting untuk ditelusuri lebih jauh.

Untuk merealisasikan kekosongan studi kepartaian tersebut, membaca lebih cermat tentang fakta partai lokal yang ada di Aceh sebagai sebuah realitas kekinian wajah kepartaian Indonesia menjadi relevan di sini. Secara khusus, studi ini mengambil objek kajian Partai Aceh atau dapat kita sebut PA sebagai refleksi partai lokal yang ada dan eksis dalam peta politik tingkat lokal. Hal ini didasarkan pada fakta pemilu legislatif 2009 bahwa PA menguasai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA dengan perolehan suara sebesar 46,91 persen atau 1.007.173 dari total 2.146.845 suara, dan dominan di hampir seluruh DPR kabupaten/kota di Aceh (serambinews.com 2010). Partai Aceh mampu menempatkan anggotanya sebanyak 33 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Namun sumber lain mengatakan bahwa dari kursi yang didapat terlihat bahwa Partai Aceh memperoleh suara 48 persen suara dari 69 kursi yang diperebutkan (Rifai, A. 2009).

Sehingga dari kedua sumber ini kita hanya menemukan perbedaan peroleha suara Partai Aceh yang hanya berselisih kurang lebih 1 persen, artinya hal ini tidak cukup signifikan kita diskusikan di sini. Perolehan ini baru disusul ditempat kedua yaitu Partai Demokrat dengan 10 kursi atau 15 persen suara dan di tempat ketiga

yaitu Partai Golkar dengan 8 kursi atau 12 persen suara, sedangkan sisa kursi yang ada diperoleh oleh partai lokal dan partai nasional lainnya yang perolehannya tidak lebih dari 5 persen. Sehingga baru ketiga partai tersebut yaitu Partai Aceh, Demokrat, dan Golkar yang dapat membentuk fraksi sendiri di DPRA. Perolehan suara Partai Aceh yang begitu dominan—khususnya jika dibandingkan dengan partai nasional—cukup merubah peta politik NAD karena hasil survei sebelum pemilihan umum dari *Demos* menunjukkan partai nasional memperoleh 22 persen dan hasil survei IFES hanya menunjukkan angka lebih rendah bagi partai nasional yaitu 17 persen, bagi penduduk Aceh yang pada saat itu akan memilih partai nasional.

Sehingga atas dasar fakta *electoral* tersebut, menjadi relevan untuk mengambil Partai Aceh sebagai objek kajian representasi dari realitas partai lokal di Indonesia yang selanjutnya kita lihat dari dimensi eksternalitas dan internalitas partai tersebut. Oleh karena itu melihat lebih jauh sebuah daerah bernama Aceh menjadi hal penting untuk kita elaborasi terlebih dahulu sebagai sebuah prakondisi terhadap studi ini. Selain juga untuk mengetahui relasi kausal dan benturan-benturan aktor yang memungkinkan partai ini hadir, sebagai bentuk cara pandang genealogis.

Aceh: Struktur Peluang Politik

Aceh adalah sebuah daerah di Indonesia yang mempunyai konsekuensi desentralisasi cukup signifikan pasca reformasi. Hal ini selain karena kultur Islam yang dominan di sana juga karena kondisi konflik yang menegangkan terus terjadi, yaitu konflik separatisme

Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang juga menjadi motif kenapa daerah ini perlu diperlakukan khusus. Perlakuan khusus inilah yang kemudian memunculkan kebijakan otonomi khusus di Aceh, atau *self-government* dalam perspektif GAM.

Namun jauh sebelum episode desentralisasi dan pembahasan otonomi khusus tersebut, sejarah Aceh tidak terlepas dari alur panjang sejarah konflik pemberontakan (perlawanan terhadap otoritas 'pusat') yang seolah turun temurun terwariskan menjadi semacam *folklore* politik bagi masyarakat Aceh. Sehingga memang untuk melacak genealogi munculnya Partai Aceh tidak terlepas dari rentetan panjang konflik pusat-daerah yang berlangsung secara militeristik yang kemudian menjadi latar belakang konstelasi politik di Aceh saat ini. Artinya hal ini menjadi urgen jika narasi konflik Aceh kita paparkan di sini.

Sebagaimana hasil penelusuran konflik, sentimen antara 'bangsa' Aceh dan Jakarta sudah ada sejak tahun 1953. Dalam catatan studi Cornelis van Dijk (1983), dibawah pimpinan Teungku Muhammad Dawud Beureueh, pemberontakan kaum Republikan Aceh terhadap Jakarta meledak pada tahun tersebut, namun akhirnya berakhir dengan dialog damai pada tahun 1962 dimana Aceh kembali bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akan tetapi konflik kembali muncul pada bulan Desember 1976 dengan tokoh baru adalah Teungku Hasan Muhammad di Tiro. Dalam hal ini, Edward Aspinall (2005) telah melakukan studi tentang konflik—khususnya konflik vertikal antara pusat dan daerah—di Aceh. Dimana pelaku atas hal ini dia bagi dalam dua

cakupan besar aktor yaitu Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan Government of Indonesia atau GOI—untuk menyebut Pemerintah RI—termasuk militer di dalamnya. Hasan Tiro menjadi aktor sentral bagi GAM yang mendasarkan semangat *secession insurgency* pada relasi dan imaji Aceh era Kesultanan. Artinya garis genealogi hadirnya Partai Aceh tidak terlepas dari sebuah zaman pra-republik yang membentuk identitas Acehnese. Era kesultanan (pra-republik) ini bahkan berimplikasi pada karakter gerakan perlawanan sesudahnya, Negara Islam Indonsia Aceh dan Gerakan Aceh Merdeka.

Namun, pada dasarnya pemberontakan yang muncul di rezim Soeharto—sebelumnya adalah muncul dan berakhir di rezim Soekarno—ini berbeda dengan generasi sebelumnya yang cenderung Republikan atau tetap setia dengan penggunaan kata 'Indonesia' untuk menunjukkan garis-garis batas komunitas politik dari Sabang sampai Merauke. Tgk. Hasan Tiro menyuarakan tuntutan Aceh merdeka yang kemudian membentuk Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, dengan mengeliminasi 'Indonesia' dalam narasi perjuangan. Rezim Orde Baru di bawah Soeharto lantas menumpasnya dengan cara militeristik—karenan GAM pada dasarnya bergerak secara militeristik pula—yang kemudian menyebabkan para pimpinan melarikan diri ke luar negeri termasuk Tgk. Hasan Tiro.

Setelah lebih dari satu dekade GAM lenyap dari peta separatisme pemberontakan RI, dia muncul kembali pada tahun 1989 di pimpin para deserter TNI/Polri dan para tokoh lokal setelah kemenangan kembali Golkar pada pemilihan umum 1987—yang dikenal sangat represif dan opresif. Babak baru rute perjalanan GAM

kemudian direkam oleh Michael Morfit (2007) dalam *The Road to Helsinki: The Aceh Agreement and Indonesia's Democratic Development*. Bahwa tumbangnya orde baru menjadi sebuah alur pungkasan dari aktivisme pemberontakan berdarah menuju sebuah aktivisme politik yang tanpa (minimal) senjata dan pertumpahan darah.

Problema Transformasi

Sehingga menjadi wajar bahwa sejak kemunculannya—jika dilihat dari nomenklatur namanya—nama Partai Aceh yang pada pemilu legislatif terdapat di lembar surat suara daerah Aceh tersebut sudah tiga kali berganti nama. Yaitu dari Partai GAM kemudian menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri, yang merepresentasikan sebuah metamorfosa dari Gerakan Aceh Merdeka yang turun dari rimba medan tempur menuju rimba bilik suara. Pada fase selanjutnya hingga saat ini, hasil transformasi gerakan tersebut menggunakan nama Partai Aceh, dengan substansi personal yang sama. Sementara itu secara yuridis-politis transformasi Partai Aceh terdapat dalam sebuah kesepakatan yang tertuang dalam *Master of Understanding* antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki Finlandia, 15 Agustus 2005—sebagai sebuah episode pungkasan gerakan pemberontakan disintegrasi di Aceh—seperti termaktub dalam butir 1.2.1. MoU Helsinki:

Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-

partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Departemen Komunikasi dan Informatika RI 2005:3).

Sehingga dari persepektif historis, politis, dan terakhir adalah yuridis—dengan adanya klausul terkait partai lokal dalam MoU Helsinki sebagaimana di atas—lantas apakah menjadi jelas bahwa genealogi Partai Aceh adalah sebuah transformasi dari organisasi pemberontakan dengan tujuan kemerdekaan menjadi sebuah organisasi politik yang berada dalam bingkai demokrasi formal yang berlaku di Indonesia yaitu sebuah partai politik lokal.

Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan pengorganisasian sebuah partai yang merupakan transformasi dari sebuah organisasi pemberontakan separatis-militeristik? Apakah mempunyai formasi struktur dan kultur yang sama atau berputar seratus delapan puluh derajat sama sekali berbeda?

Sebagaimana data dan korespondensi yang ada, bahwa penumpasan GAM yang muncul pada tahun 1976 menuju 1980-an dilakukan dengan cara militeristik oleh rezim Soeharto. Hal ini mengakibatkan para petinggi GAM seperti Farid Husain, Malik Mahmud, dan terutama Teungku Hasan Muhammad di Tiro melarikan diri ke luar negeri khususnya di daratan Eropa seperti di Swedia. Ekses atas hilangnya tokoh-tokoh tersebut, serta-merta gerakan dari organisasi tersebut mati seketika walaupun dengan jelas para kombatan masih banyak yang 'tersisa' di tanah Aceh—hingga muncul kembali pada tahun 1989 dengan stimulator para aktor-aktor baru. Hal ini menjelaskan bahwa model leadership dari gerakan tersebut adalah *dependent*, artinya bahwa pemimpin komunitas atau gerakan menjadi kunci dalam pasang surutnya organisasi. Sehingga ketika sang pemimpin tidak ada, maka para anggota tidak mampu mengorganisasikan dirinya secara mandiri.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan *package* berbentuk partai politik dalam hal ini adalah Partai Aceh, dimana pemimpin atau elit partai yang berada di aras atas struktur kepartaian menjadi kunci dan motor bagi anggota atau aktor yang ada dibawahnya. Sedangkan secara eksternal hal ini tidak lepas dari kharisma yang dimiliki oleh elit pimpinan tersebut. Artinya selain secara struktural pimpinan memegang kendali atas otoritas yang dimiliki, tetapi secara kultural juga menjadi modal bagi para ex-kombatan GAM yang memperoleh aktualisasi politiknya melalui Partai Aceh.

Namun, realitas kepemimpinan komando tersebut menemui sebuah problema baru ketika format partai politik membuka peluang bagi masuknya para

aktor diluar ex-kombatan GAM dan percobaan kelembagaan partai yang dikelola secara demokratis-formalistik. Sehingga asumsi bahwa setiap orang berhak untuk dipilih dan memimpin, telah meredefinisi format kepemimpinan semenjak Partai Aceh melakukan kerja politiknya pada pemilihan legislatif tahun 2009 lalu. Hal ini memaksa format kepemimpinan berdasarkan pada loyalitas pengikut dan disiplin yang berlaku di dalam partai. Sehingga akses yang sangat mungkin ditimbulkan atas adanya problema ini adalah muncul-berkembangnya faksi dalam partai (Partai Aceh).

Teorisasi

Pada bagian ini saya akan mendudukan perihal landasan konseptual atas beberapa redaksi dalam pertanyaan studi ini sebagai dasar pemahaman atas substansi pengertiannya. Lebih lanjut, terkait dengan pemahaman terhadap genealogi, maka Michel Foucault (1994, 1996) menjadi *standing point* dalam studi ini karena selain menjelaskan pemaknaan terkait hal tersebut, Foucault mendudukan genealogi sebagai sebuah pendekatan dan di titik inilah studi ini akan bergerak lebih jauh. Setelah mendudukan genealogi sebagai sebuah pendekatan, maka kerangka teoritik terkait dengan genealogi dalam studi kepartaian kita akan merujuk pada karya Seymour Martin Lipset dan Stein Rokkan (1967) dalam *Cleavage Structure, Party System, and Voters Alignment*. Walaupun studi Lipset dan Rokkan tercipta sebagai *output* atas hubungan konfigurasi kepartaian dengan pembilahan sosial pada awal abad akhir abad ke-19 sampai era 1960-an di Eropa, kerangka teoritik terkait garis konflik nasional-lokal adalah yang paling relevan untuk melihat munculnya Partai Aceh

secara khusus dan Partai Lokal pada umumnya. Bahkan garis konflik Lipset-Rokkan yang mendasarkan pada etnisitas menjadi fondasi analisis terbaik untuk melihat formasi partai dan perilaku memilih di Africa (Gero, E. 2007).

Sedangkan terkait dengan transformasi, studi ini akan meramu beberapa pemahaman dan makna terminologis atas hal tersebut sehingga menghasilkan kerangka analisis transformasi dua bentuk organisasi yang berbeda: organisasi gerakan pemberontakan dan organisasi kepartaian. Sementara itu, gerakan senjata dan lembaga kepartaian kita bedah melalui beberapa penelusuran makna yang mendasari subyek politik dalam studi ini. Sehingga hal pertama yang perlu kita letakkan sebagai kerangka analisis studi adalah menjawab pertanyaan: atas dasar apa sebuah partai politik dapat lahir dan *survive* di luar alasan konsekuensi yuridis yang mengitari ruang relasi elektoral.

Genealogi: Menanyakan “Mengapa”

Genealogi dapat kita terjemahkan sebagai cara pikir *ex post facto*—meminjam istilah Mochtar Buchori (1994: 148)—yaitu memikirkannya *setelah* dihadapkan pada *kenyataan* sekarang, dengan kata lain hal tersebut diawali dari pertanyaan ‘mengapa’. Sehingga dengan mengetahui relasi kausal dari realitas sekarang dan sejarah kelahiran sebuah partai politik tersebut kita akan berada pada deskripsi yang disebut dengan genealogi.

Dalam studi-studi sejarah dan antropologi tradisional, genealogi biasa didefinisikan sebagai studi mengenai evolusi dan jaringan dari sekelompok orang

sepanjang beberapa generasi (Latif, Y 2005). Sehingga di titik inilah melacak alur sebab sejarah kemunculan Partai Aceh yang berada pada penggal-penggal generasi gerakan pemberontakan, gerakan separatisme, dan menjadi gerakan politik—dari Daud Beureh, Hasan di Tiro, dan pasca reformasi—menjadi relevan dalam studi ini. Dengan kata lain, dalam hal ini genealogi pada akhirnya juga mengidentifikasi titik-titik krusial sebuah transformasi dalam alur sejarah latar kemunculan partai lokal sebagai fenomena politik yang menunjukkan sebuah kontinuitas. Genealogi adalah bukan melihat masa lalu untuk membangun metafora tentang masa lalu, namun melihat masa lalu untuk ‘membongkar’ masa kini.

Sedangkan dalam pandangan Foucault, genealogi merupakan sejarah yang ditulis dengan perspektif masa kini. Oleh karena itu, genealogi mencoba menjawab pertanyaan kenapa realitas kini bisa terjadi dan muncul, atau kenapa Partai lokal di Aceh bisa muncul. Singkat kata genealogi berangkat dari realitas kini dan kemudian mundur ke dalam logika kausal di masa lalu. Lebih lanjut bagi Foucault, bahwa yang ditanyakan dalam genealogi bukanlah ‘*what is the political subject?*’ melainkan ‘*How are political subject formed?*’.

Sehingga genealogi tidak mempunyai pretensi untuk kembali ke masa lalu dengan tujuan untuk memulihkan sebuah kontinuitas yang tidak terputus, genealogi berusaha mengidentifikasi hal-hal yang menyempal atau *accident*, mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan yang kecil (*the minute deviations*), Foucault (1994). Di titik inilah penulis sepakat pada elaborasi Michel Foucault lebih lanjut, bahwa genealogi pada saat yang sama adalah sebuah metode,

sebuah cara pandang dalam menemukan 'kebenaran'. Hal ini menjadi relevan dalam studi ini, karena genealogi memfokuskan diri pada ratakan-retakan, pada kondisi-kondisi sinkronik dan pada tumpang-tindihnya pengetahuan yang bersifat akademis dengan kenangan-kenangan yang bersifat lokal (Foucault 1994, 1996; Lechte, 1995:110-115).

Dalam studi ini, benturan kuasa yang terjadi adalah antara gerakan (pemisahan) gerilya dengan Pemerintah RI. Dengan bahasa yang lain Kevin E Grisham dan Briyan Martin (2008:23) menyebutkan lima asumsi atas hasil perbenturan tersebut: kemacetan atau kebuntuan; pemerintah menang secara menentukan; gerakan gerilya menang secara menentukan; kemenangan yang tidak menentukan dimana pemerintah memperoleh keuntungannya; kemenangan yang tidak menentukan dimana gerakan gerilya memperoleh keuntungan.

Alasan Kelahiran Partai Politik: Sebuah Genealogi

Sebelum meletakkan standing point kerangka teoritik dalam studi ini, menjadi penting untuk pertamanya kita menjelajahi beberapa pendapat terkait dengan alasan kelahiran partai politik, sehingga narasi teoritik tersebut dapat kita ramu sebagai sebuah kerangka teoritik studi ini.

Terkait dengan hal ini, dalam konteks sejarah kepartaian di Barat, Maurice Duverger (1984) menunjukkan bahwa partai-partai politik di Eropa lahir karena adanya 'pertentangan dasar'. Umumnya basis

konflik adalah pertentangan kelas yang bersifat ideologis—seperti konservatif versus liberal, dan kapitalis versus sosialis—dan karena dimensi agama (kasus Belanda), faktor-faktor institusional dan sejarah (kasus Perancis), serta partai nasionalis yang menuntut kemerdekaan bangsanya dari kekuasaan negara/ bangsa lain—seperti di Spanyol, Inggris, dan negara-negara Balkan. Duverger menjelaskan lebih lanjut bahwa ada juga partai kelas yaitu partai petani di negara-negara Skandinavia (seperti di Finlandia), yang muncul tanpa konflik dengan kelas borjuis atau feodal (Duverger, M. 1984: 22).

Namun lebih dalam, Duverger (1954) pertama-tama mengkategorikan partai politik dalam dua bentuk yang didasarkan pada pembentukannya: *direct party* dan *indirect party*. Apa yang disebut *direct party* adalah ketika setiap individu mempunyai kesadaran membentuk organisasi partai dan berinteraksi satu sama lain di dalamnya dalam adanya elemen mediator. Sedangkan *indirect party* adalah ketika partai politik terbentuk karenan adanya sebuah kesepakatan antarbeberapa organisasi untuk mengakomodasi kepentingannya, sehingga anggota pada dasarnya ditentukan oleh elemen organisasi tersebut bukan berpapasan langsung dengan partai politik.

Setelah Perang Dunia I dan diakuinya hak pilih universal (termasuk untuk budak dan wanita), pertentangan dasar tersebut telah menjadi konstelasi yang mapan, membentuk sistem kepartaian di Eropa yang mengakar pada struktur sosial yang ada. Sehingga, perilaku memilih dalam memberikan dukungan kepada suatu partai politik ditentukan oleh faktor status sosial,

agama, urban-rural, dan kedaerahan dari seorang pemilih. Sekalipun menjadi rujukan teoritik dalam beberapa dekade, hampir semua elaborasi Duverger sudah tidak relevan dengan fakta politik saat ini. Namun yang mempunyai relevansi dengan studi ini adalah seperti kasus di Spanyol, Inggris, dan negara-negara Balkan dimana partai nasionalis yang menentukan kemerdekaan dari kekuasaan negara atau bangsa lain tereksprei dalam kelembagaan partai. Sehingga kita memerlukan penjelasan konseptual yang lebih matang untuk melihat kemunculan partai politik.

Pendapat yang lain adalah bahwa partai politik muncul karena realitas karakteristik daerah baik secara kultural, sosial, maupun politik. Terkait dengan hal ini Gabriel A. Almond (dalam Ahmad Farhan Hamid, 2008) berpendapat bahwa pengalaman-pengalaman kesejarahan mampu menstimulasi terbentuknya partai politik karena munculnya kesadaran politik dari satu atau beberapa kelompok masyarakat. Hal ini terjadi karena realitas sosial seperti dominasi satu suku terhadap suku lain, adanya konflik-konflik yang sudah berjalan lama antarkelompok-kelompok keagamaan, adanya suatu kelompok budaya untuk memaksakan pemakaian bahasanya pada kelompok lain, atau dominasi dari sebuah aristokrasi atau kelas industrialis atas buruh dan petani kecil, dan sebagainya, menurut Almond merupakan situasi-situasi yang dapat mempengaruhi pola pembentukan partai politik (Mas'ood, M.; Mcandrews, C. 1984). Inti sari dari konseptualisasi Almond adalah bahwa partai politik muncul dari adanya kesadaran politik sebuah kelompok masyarakat. Identifikasi ini belum cukup untuk mengerangakai

munculnya partai lokal di Aceh karena apa yang dimaksud 'kelompok masyarakat' memerlukan penjelasan yang lebih rigit.

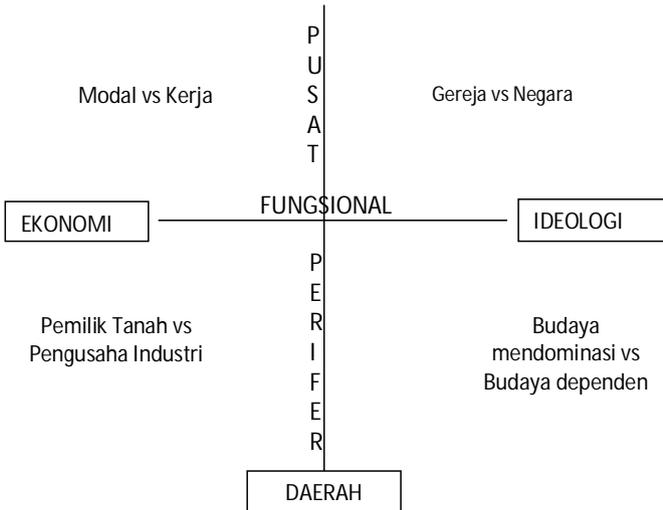
Sedangkan Seymour Martin Lipset (2007) menyatakan bahwa pembentukan partai khususnya di daratan Eropa adalah karena *social cleavages* atau pemilahan sosial yang telah mengakar. Sedangkan yang dimaksud dengan *social cleavages*—sebagaimana konseptualisasi Lipset—di sini tidak sekedar bermakna pada pemilahan sosial berdasarkan agama, bahasa, etnisitas, dan kelas. Tetapi lebih lanjut, *cleavage* merupakan struktur dasar dalam pemilahan antara kelompok-kelompok sosial yang bertentangan (Hanspeter Kriesi 1998:167). Kriesi lebih lanjut menjelaskan bahwa di dalam *cleavage* terdiri dari dua elemen pokok yaitu kelompok yang mempunyai kesadaran kolektif atas identitasnya dan mempunyai kamauan untuk mengaktualisasikan kelompoknya berdasarkan basis identitas tersebut.

Namun dalam kerangka genealogis, ketegangan sosial dan munculnya pemilahan sosial tersebut berakar pada dua revolusi besar di Eropa (Lipset, S.M.; Rokkan, S. 1967), sebagaimana dielaborasi ulang oleh Kuskridho Ambardi (2009). Revolusi yang pertama adalah revolusi nasional yang terjadi di Perancis abad ke-18 sehingga revolusi ini menghasilkan kelompok masyarakat yang mendukung kebudayaan nasional yang tersentralisasi dan kelompok masyarakat yang mendukung kebudayaan lokal. Sedangkan revolusi kedua adalah revolusi industri yang terjadi di Inggris abad ke-19 sehingga menghasilkan ketegangan sosial berdasarkan penguasaan struktur ekonomi, yaitu kelas pengusaha

yang baru muncul dan kelas tuan tanah yang telah lama ada serta kelas buruh dalam konteks tatanan masyarakat industri, atau dalam bahasa Marxisme sering disebut kelas borguise dan kelas proletar atau buruh.

Studi Lipset dan Rokkan menjadi rujukan penting untuk menjawab dua pertanyaan dasar dalam studi kepartaian: pertama adalah terkait dengan asal-usul sistem dalam komunitas nasional dan kedua terkait dengan 'penerjemahan' (*translation*) cleavage dalam sistem kepartaian yang stabil (Dix, R.H. 1989). Kata *translation* mempunyai pemkanaan yang dekat dalam bahasa Indonesia dengan artikulasi atau perwujudan. Sehingga studi ini merupakan varian atas pertanyaan kedua sehingga dengan demikian relevan terhadap kerangka teoritik Lipset dan Rokkan. Visualisasi kerangka teoritik genealogi partai politik ala Lipset dan Rokkan adalah sebagai berikut.

Gambar 1.1. Model Garis Genealogi Partai berdasarkan ruang relasi Lipset dan Rokkan (1967)



Fakta adanya pembilahan sosial ini akhirnya menghasilkan ketegangan-ketegangan sosial-kultural antara pusat dan daerah, negara-agama, tuan tanah-industriawan, dan pengusaha-buruh. Dalam ketegangan sosial ini orang akan melakukan identifikasi diri dan pada akhirnya memilih suatu representasi politik bagi kepentingannya, yang berhadapan dengan representasi kepentingan yang lain, seperti dalam rangka pemilahan umum (Mas'ood, M.; Mcandrews, C. 1984). Model tersebut menunjukkan empat konflik utama yang memungkinkan lahirnya partai politik. Pertama adalah konflik antara kelompok masyarakat yang memiliki barang produksi dan kaum pekerja. Kedua adalah konflik antara kepentingan agraris dan kepentingan industri komersial. Konflik ketiga adalah antara kelompok yang menuntut hadirnya kekuasaan negara yang sekuler dengan kelompok agamawan—dalam tradisi Eropa direpresentasikan oleh privileg Gereja. Dan yang terakhir adalah konflik antara kelompok elit pusat yang berkuasa dengan kelompok masyarakat daerah yang tergantung secara etnis, bahasa atau agama (pembahasan oleh Dieter Roth 2008). Garis konflik yang terakhir inilah—garis konflik canter-perifer—yang kemudian saya sebut sebagai ruang relasi konflik nasional-lokal sebagai kerangka teoritik untuk melihat Partai Aceh.

Di titik inilah kerangka teoritik dalam studi ini untuk melihat hadirnya partai politik (lokal) adalah dengan memahami partai politik muncul akibat hadirnya ketegangan sosial atau dalam banyak kasus terjadi dari adanya konflik. Konflik sendiri dalam pengalaman Eropa berada dalam tiga ruang relasi: pertama adalah ruang relasi ekonomi seperti elaborasi Lipset dan Rokkan (1967) pada revolusi industri; kedua adalah ruang relasi

kesadaran sosial seperti suku, etnis, atau agama; dan ketiga adalah ruang relasi nasional-lokal seperti pada revolusi nasional di Perancis. Sehingga ruang relasi konflik yang terakhir inilah yang mendasari analisis dalam studi kemunculan partai lokal di Indonesia.

Dalam pemahaman selanjutnya, ruang relasi konflik yang pada akhirnya menyebabkan—atau sebagai struktur peluang politik—bagi lahirnya partai politik akan berpengaruh pada karakter kerja dan arah kebijakan partai tersebut. Seperti partai buruh yang lahir dari konflik kelas maka mempunyai karakter dan arah kebijakan pada isu-isu *social justice*, atau partai agama yang muncul karena kesadaran sosialnya maka juga akan mewarnai orientasi politiknya berdasarkan preferensi agama. Dengan kata lain, partai lokal yang muncul dalam ruang relasi konflik dengan nasional atau pusat maka akan mempunyai karakter dan orientasi kebijakan ‘menentang’ pusat.

Artinya, terdapat benturan-benturan relasi kuasa dalam genealogi, yang pada dasarnya benturan tersebut berkonsekuensi pada perubahan. Sehingga dalam konteks organisasi—dalam hal ini adalah GAM—perubahan inilah yang kemudian kita sebut transformasi.

Transformasi: Keniscayaan dalam Demokrasi

Dalam perspektif yang paling dasar, membicarakan apa yang disebut dengan transformasi dalam konteks ini adalah sebuah proses perubahan atau *organization change*. Secara implementatif, perubahan tersebut berada pada ranah fungsi atau apa yang dikerjakan, cara mengerjakannya, mekanisme kerjanya,

pergantian atasan/bawahan, sampai pada manajemen organisasi (Djojosoekarto, A.; Sanjaya, U. (ed.), 2008: 61). Sehingga jika kita memasukkan transformasi dalam konteks sebuah gerakan (pemberontakan) menjadi partai politik—secara internal organisasi—maka kita akan membincangkan beberapa hal seperti reorientasi terhadap eksistensinya, cara kerja yang dibangun, keanggotaan, mekanisme dari sirkulasi elit atau pimpinan partai, sampai pada tata regulasi yang mengkonstruksi bentuk dan kultur partai politik. Artinya dalam konteks *insurgency organization*, transformasi menjadi keniscayaan untuk beradaptasi dalam tatanan demokrasi. Karena “transformasi tidak hanya mencakup kebijakan, institusi dan proses, tetapi juga nilai dan sikap yang didukung juga dengan adanya perubahan lingkungan”, (Aliabbas, A. dalam Ikrar Nusa Bakti 2008: 136).

Namun demikian transformasi tidak serta-merta dapat ditafsirkan sebagai proses penggantian materi atau tradisi yang lama, karena pada saat yang sama dalam transformasi tetap mempertahankan materi yang lama karena masih relevan dengan pembaruan tersebut. Secara lebih spesifik membicarakan transformasi menurut Mochtar Buchori (1994: 196) harus membicarakan kadernisasi. Transformasi apakah diawali dari pemimpin/*transforming leadership*—meminjam istilah James McGregor Burns—atau sebuah semangat kolektif? Sehingga kader atau regenerasi elit dan bentuk kepemimpinan menjadi salah satu sebab transformasi secara internal.

Di sisi lain dalam hal transformasi kepartaian tidak bisa kita lepaskan dari konteks sistem partai yang ada, menurut Agung dan Utama (2008), alur sistem

kepartaian di Indonesia mengikuti alur dari *atomized party system* pada masa orde lama (1950an), menuju *hegemonic party system* pada masa orde baru, dan sekarang kembali lagi pada *atomized party system*. Lebih tepatnya jika mendasarkan realitas sistem kepartaian saat ini pada pemetaan sistem kepartaian yang dirancang oleh Giovanni Sartori (1984), sistem kepartaian saat ini berada pada sistem pluralism terbatas. Hal ini berpengaruh pada transformasi kelembagaan partai baik secara radikal maupun gradual berikut juga struktur komunitas politik yang ada sebelumnya.

Sehingga dalam perbincangan transformasi menuju partai politik sebagai organisasi, pun faktor eksternal dalam hal ini berpengaruh terhadapnya. Pengalaman di timur tengah khususnya Lebanon yang direkam oleh Kevin Grisham dan Byran Martin (2008) menunjukkan bahwa transformasi sebuah gerakan bersenjata ke dalam bentuk lembaga kepartaian tidak bisa dilepaskan dari peluang akses politik dan kondisi-kondisi yang memungkinkan mereka untuk tetap bertahan. Di sisi lain, eksternalitas dalam hal ini adalah juga menyangkut bentuk tata pemerintahan yang berubah dari mekanisme sentralistis menjadi era desentralisasi. Konteks sistem pemerintahan dari *top-down* menjadi *bottom-up* menjadi perihal eksternal dari bentuk transformasi partai politik. Di titik inilah transformasi (partai politik) menjadi sebuah keniscayaan dalam sebuah rezim yang tengah mengalami transisi demokratisasi karena *environment* politik yang berubah memaksa partai untuk menyesuaikan diri.

Sedangkan Eric Shaw (1994:153) —dalam konteks analisis transformasi Partai Buruh di Inggris— membedakan tiga tipe penentu sebuah transformasi (*Labour Party* sebagai refleksi partai politik): *pertama, external environmental factors* (politik dan ekonomi); *kedua, the leadership's frame of reference* (pemikiran strategis baru); *ketiga, internal party considerations* (struktur kekuasaan, pengaturan internal partai, dan budaya partai). Lebih lanjut, sependapat dengan Eris Shaw, bahwa transformasi partai (sebagaimana dengan Partai Buruh) mempunyai kecenderungan digiring oleh logika maksimalisasi suara, sehingga hal ini membimbing pada kecenderungan struktur dan pengorganisasi partai yang semakin pragmatis, sentralistis, dan 'penyesuaian' lainnya untuk mengikuti *social trends*¹.

Alan Ware (2004) menggambarkan sebuah transformasi kepartaian di Amerika Serikat karena konsekuensi atas *ballot system* yang ada, sehingga menandai sistem nominasi kandidat dalam partai secara langsung atau *direct primary system* sebagai sebuah bentuk transformasi kepartaian pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Artinya, perubahan pengorganisasi dalam level yang partikular (seperti *direct primary*) sebagai kerangka sistem pemilu dapat dilihat sebagai bentuk sekaligus sebab sebuah transformasi partai politik.

¹ Terkait dengan hal ini Eric Shaw menyatakan bahwa "*Most theories of party behaviour would interpret Labour's metamorphosis into a more centrist, pragmatic, voter-oriented and disciplined party as a functionally necessary response either to the pressure of evolutionary social trends or as the product of a party's rational vote-maximising behaviour. However these theories tend, mistakenly, to assume that the political significance of environmental trends are self-evident and to assume that the key to the pursuit of an optimal vote-getting course is the ability of office-seeking leaders to overcome internal opposition from a more ideological or purposive-minded rank and file* (see, for example, Strom, 1990; Schlesinger, 1984). Lihat dalam Eric Shaw 1994

Elaborasi tersebut akhirnya bermuara pada tiga elemen pokok untuk melihat sebuah transformasi dari sebuah komunitas komunal yang tidak berurusan dengan sistem demokrasi menjadi sebuah 'komunitas' partai politik yang harus beradaptasi dengan demokrasi. Tiga komponen tersebut—dalam perspektif institusionalis—adalah elit atau pimpinan (dan kepemimpinan), organisasi (dan pengorganisasian), dan anggota (dan keanggotaan). Tiga elemen inilah yang menjadi sari pati transformasi dari sebuah gerakan informal dalam sebuah kondisi konfliktual menjadi sebuah 'gerakan' yang melembaga dalam tatanan demokrasi yang kemudian disebut partai politik.

Sehingga kita perlu melihat sebuah organisasi atau komunitas politik yang mendasari terbentuknya partai politik. Dalam studi ini, gerakan pemberontakan adalah sebuah basis komunitas politik yang mendasarinya, yaitu Gerakan Aceh Merdeka.

Gerakan Senjata, Perang dalam *Informal Organization*

Dalam konteks Aceh, Gerakan Aceh Merdeka atau GAM sebagai sebuah gerakan militeristik-politik kita lihat berada pada posisi asimetris jika kita konfrontasikan dengan pemerintah Indonesia. Yaitu ketidakseimbangan antara dua pasukan yang sedang berperang atau bertikai karena GAM tidak mungkin menang berperang melawan pemerintah Indonesia. Sehingga metode dan strategi gerakan GAM secara gerilya menemukan urgensinya, sebagai sebuah gerakan bersenjata. Gerilya, sebetulnya

strategi berperang, dan perang adalah hal yang paling klasik dari apa yang disebut politik (Foucault 1994).

Kata 'gerilya' diciptakan di Spanyol dengan kata asli *guerrillero* untuk menggambarkan taktik yang digunakan untuk menentang rezim Prancis yang dipimpin Napoleon Bonaparte. Istilah *-illa* berarti pertarungan yang tidak seimbang antara sipil melawan tentara negara yang terorganisir. Perang gerilya dilakukan oleh kelompok kecil yang terus bergerak dan fleksibel tanpa garis depan, yang disebut sel. Perang gerilya tidak memfokuskan serangan utamanya kepada sipil karena mereka ingin mendapatkan dukungan sebanyak mungkin dari penduduk.

Gerilya adalah faktor amat penting untuk menyusun tentara yang besar (Suryohadiprojo, S. 2005: 35). Lebih lanjut Von Clausewitz (dalam Suryohadiprojo, S. 2005) merumuskan definisi perang sebagai sebuah tindakan kekerasan untuk memaksa musuh tunduk kepada kehendak kita. Sehingga di sini menjadi jelas bahwa perang bukan sekedar sebuah tumbukan kekerasan berdarah, tetapi lebih-lebih adalah tabrakan kemauan atau kehendak, untuk menundukkan kehendak lawan (Mas'ood, M.; Mcandrews, C. 1984: 36).

Perang gerilya dikelompokkan menjadi dua kategori utama yaitu gerilya di daerah perkotaan dan gerilya di daerah pedalaman. Gerilyawan akan mengandalkan penduduk sekitar untuk menyediakan perbekalan dan informasi. Gerilyawan pedalaman akan lebih suka beroperasi di wilayah yang menyediakan perlindungan dan persembunyian, khususnya daerah hutan dan pegunungan. Sedangkan gerilyawan

perkotaan sangat senang berbaur dengan penduduk dan juga bergantung pada bantuan dasar diantara warga masyarakat (DEFENDER, 2008: 36).

Oleh karena itu organisasi pemberontakan dan separatisme adalah manifestasi dari sebuah organisasi informal yang mempunyai tendensi menuju terbentuknya oligarkhi yang secara nyata ditemukan pada hampir semua organisasi suka rela dimana di sana terdapat gap atau jarak yang besar antara anggota dan pimpinannya dalam penghormatan-penghormatan atau penghargaan yang diterima (Hall, R.H. 1991:152).

Secara lebih khusus fungsi pokok dari organisasi adalah meningkatkan perasaan aman terhadap anggotanya. Sedangkan secara instrumentatif *informal organization* menyediakan tambahan *channel* komunikasi. Sehingga dalam praktiknya organisasi jenis ini melibatkan peluang-peluang informal seperti masyarakat yang dalam strategi perang disebut dengan perang semesta. Perang yang bersifat semesta membawa seluruh elemen rakyat turut serta dalam pertahanan negara. Tidak hanya para *combatant* atau pemegang senjata tempur saja yang melakukan pertahanan 'negara', melainkan juga para petani, buruh, pelayan telepon bahkan ibu rumah tangga. Inilah siasat perang sejak abad ke-20 (DEFENDER: 143), sebagai sebuah manifestasi dari bentuk pengorganisasian gerakan bersenjata. Namun, gerakan dan organisasi bersenjata muncul bukan tanpa relasi kausalitas dan benturan-benturan stimulatif, sehingga di titik inilah kita perlu menelusuri kembali jejak GAM sebagai sebuah gerakan bersenjata—atas 'bentuk asal' Partai Aceh—dan *informal organization*. GAM yang

akhirnya tidak sekedar sebagai sebuah organisasi dan gerakan tetapi mengkristal menjadi *local cleavage* karena persistensi dirinya akhirnya memobilisasi kesadaran dan tindakan masyarakat Aceh. Namun eksistensinya berakhir anti-klimaks sebagai partai politik.

Partai Politik: Sebuah Organisasi

Konsepsi partai politik sebagai pilar demokrasi sebagaimana argumen klasik Edmund Burke (1729-1797) tetap menjadi relevan sampai saat ini karena partai politik telah menjadi sebuah keniscayaan dalam tatanan demokrasi. Titik urgen atas eksistensi partai politik di alam demokrasi adalah kemampuan dirinya sebagai *linkage* antara *citizen* dan *state* (Lawson, K. 1988: 41), lebih lanjut partai politik memerankan dirinya sebagai *linkage* baik secara langsung maupun tidak langsung (Poguntke, T. 2002). Sehingga partai politik mempunyai kemampuan penetrasi (penguasaan jabatan publik) tidak hanya dalam konteks orientasi jabatan publik atau yang kemudian disebut *office*, melainkan juga dalam orientasi *to drive public policy*, sehingga hal ini relevan dengan skema sistem politik ala David Easton (1953) dimana partai pada titik tertentu berada di lajur *input* (tuntutan dan dukungan) dan pada titik yang lain berada di *black box* (*decision making*).

Namun nyawa naluriah partai politik sebagai organisasi *power seeking oriented* sering kali berbenturan dengan nilai representasi yang juga melekat padanya. Penetrasi di sini mempunyai arti tidak berbeda dengan *power seeking oriented*. Karena penetrasi sendiri mempunyai dua motivasi berbeda yaitu untuk memperoleh jabatan publik (eksekutif maupun legeslatif)

dan untuk mengendalikan-mempengaruhi kebijakan publik (Clark, A. 2003; Poguntke, T. 2002, Lawson, K. 1988). Sehingga partai politik sebagai sebuah organisasi politik formal, menjadi keniscayaan membentuk mekanisme organisasinya sebagai jalan penetrasi jabatan dan dalam rangka mempengaruhi kebijakan publik.

Membership dan mekanisme pengelolaannya pun wajib kita lihat sebagai sebuah kerangka acuan untuk memenuhi fungsi dan mencapai orientasi partai tersebut. Dalam hal ini Knut Heidar (2006) membagi keanggotaan partai menjadi tiga: *individual*, *auxiliary*, dan *collective*. Keanggotaan *individual* adalah ketika seseorang mendaftarkan diri hanya melalui via surat atau datang untuk mengisi formulir keanggotaan yang biasanya berada di partai tingkat cabang. Sedangkan keanggotaan *auxiliary* adalah ketika sekelompok orang dalam sebuah organisasi juga melekatkan dirinya sebagai anggota partai sehingga dia mempunyai dua keanggotaan atau *dual memberships* baik di partai maupun organisasinya. Dan *collective* atau *corporate memberships* berbicara pada ranah ketika sebuah organisasi—walaupun tidak total semua anggotanya—adalah melekatkan dirinya kedalam partai politik karena memang sebelumnya mempunyai kedekatan dengan partai tersebut. Dalam bahasa yang lain Rhichard Katz dan Peter Mair (1994) mengatakan hal ini sebagai *affiliated membership*. Bagaimanapun juga bentuk-bentuk instrument keanggotaan tersebut menjadi penting karena partai berusaha bagaimana memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam pemilihan umum.

Karena memang tidak bisa dinafikan bahwa motivasi berkuasa untuk memperoleh jabatan publik atau *office* merupakan keniscayaan bagi partai politik maupun

politisi yang ada di dalamnya sebagaimana John A. Jacobsohn (1998), menyatakan bahwa *the primary function of any political party is to win elections*. Sehingga dari fungsi dan tujuan kodrat tersebut, organisasi partai yang diformat-dibangun-dipertahankan baik itu dalam hal sistem maupun elemen juga secara formal maupun kultural untuk memenuhi fungsi dan kebutuhan tersebut. Akhirnya hal ini bermuara pada konklusi bahwa gerombolan bersenjata yang ingin memberontak atau keluar dari kesatuan negara mempunyai bentuk organisasi yang berbeda dengan partai politik yang mempunyai tujuan memenangi pemilihan umum untuk berkuasa maupun sebagai usaha *policy seeking*.

Lebih lanjut Richard Katz dan Peter Mair (1994) menyatakan bahwa partai politik mempunyai tiga wajah berupa partai di parlemen atau *party in public office*, partai di tingkat masyarakat akar rumput atau *party on the ground*, dan partai di tingkatan pusat pemerintahan atau *party in central office*. Sedangkan secara empirik partai lebih dominan menggunakan wajah *party in public office* dan *party in central office*. Namun peran ketiga wajah dan orientasi tersebut tidak akan terwujud jika partai sebagai sebuah organisasi politik formal tidak mempunyai perangkat lembaga yang memungkinkan dirinya *survive* atau bahkan berkembang, seperti adanya pimpinan dan anggota, dua proponent pokok yang mempunyai fungsi relasi resiprokal. Di sisi lain, staf profesional juga menjadi sebuah kebutuhan penting dalam partai politik (Webb, P.; Kolodny, R. 2006: 337-347). Oleh karena itu berbicara partai tidak hanya berbicara pengurus dan anggota, melainkan juga berbicara beberapa aktor sebagai *supporting instrument* yang memungkinkan partai bisa bertahan dan berkembang. Sehingga pada dasarnya

terdapat perbedaan yang cukup kontras antara partai politik sebagai sebuah organisasi formal-profesional dengan gerakan pemberontakan-separatisme sebagai sebuah organisasi perang yang informal.

Sedangkan dalam sebuah *framework* partai lokal, secara kasat mata partai politik nasional mempunyai jaringan dan struktur di daerah-daerah yang bisa jadi sangat berbeda dengan partai lokal dimana eksistensinya berada pada cakupan wilayah yang sangat kecil—terutama dalam kasus ini adalah pengalaman partai lokal di Aceh. Namun dalam perspektif organisasi partai multi-level atau *multi-level organizations*, Pieter van Hiouten (2009) menyatakan bahwa sebuah kemungkinan adalah rantai ‘demokratik’ penuh dari sebuah delegasi, yang akan dimulai dari anggota atau aktivis partai sebagai hal yang pokok bagi pemimpin partai lokal, pemimpin partai regional, dan pemimpin partai nasional. Sehingga jika kita bahasakan dalam terminologi Indonesia, *multi-level organizations* dimanifestasikan ke dalam bentuk Dewan Pimpinan Pusat atau DPP, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD, dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC, sehingga pertanyaannya adalah bagaimana dengan mekanisme multi-level bagi partai lokal yang hanya mempunyai cakupan wilayah politik di tingkat provinsi?

Namun, dalam perspektif organisasi yang kita lihat diatas sebagai sebuah lembaga politik formal dan profesional bisa jadi terdapat banyak anomali khususnya dalam pengelolaan partai secara kultural. Hal ini beralasan ketika kita menggunakan perspektif genealogis untuk melihat bentuk pengorganisasian partai politik, sebagai misal adalah kultur patron-klien dan pengambilan keputusan yang terpusat adalah warisan

budaya bentuk pengorganisasian yang melekat sebelum sebuah komunitas atau kelompok mengorganisasi dirinya menjadi partai politik. Atau apakah mempunyai relevansi ketika melihat partai politik dari pengertian skope konstituen yang kecil dan terbatas pada sebuah wilayah dan berada pada ruang geopolitik yang partikular mempengaruhi bagaimana dirinya dikelola. Partai politik sebagai sebuah organisasi tentunya juga perlu penjelasan yang matang ketika dia hanya berada dalam sebuah kawasan tertentu, di titik inilah kita perlu untuk meletakkan definisi atas apa yang disebut dengan partai lokal.

Partai Lokal: Sebuah Definisi

Kajian tentang partai lokal kembali lagi muncul dan menguat dalam diskursus kepartaian Indonesia—sejak lebih dari empat dasawarsa pasca pemilu 1955 absen—pada tahun 2006 bertepatan dengan diundangkannya Undang Undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang di dalamnya juga mengatur penyelenggaraan partai lokal untuk pertama kalinya di Indonesia. Sehingga hal ini menstimulasi hadirnya beberapa partai lokal di Aceh.

Pada tahun yang sama Syamsudin Haris (2006) mengajukan pengertian partai lokal dalam logika simpel melalui metafora lokal dan pusat. Bahwa partai-partai nasional yang tidak memenuhi syarat Undang Undang untuk mengikuti pemilu nasional otomatis menjadi partai yang bersifat lokal dan hanya berhak mengikuti pemilu di daerah, tetapi jika dukungan partai lokal menyebar ke nasional atau meluas ke daerah lain sehingga memenuhi syarat sebagai partai nasional, maka ia bisa

naik status menjadi partai nasional. Selanjutnya dia mengatakan bahwa partai nasional dan partai lokal bukanlah suatu dikotomi. Artinya, definisi ini hanya mendasarkan pada kualifikasi yuridis dalam pemilihan umum, dan belum cukup untuk meletakkan partai lokal sebagai entitas politik di tingkat lokal.

Partai politik lokal yang dalam terminus bahasa Inggris diistilahkan dengan *state party*, *regional party*, atau *local political party* mendapati redaksi sedikit berbeda—jika diperbandingkan dari definisi Syamsudin Harris—dari Ahmad Farhan Hamid (2008: 33-34) yang menyatakan bahwa partai politik lokal adalah partai politik yang jaringannya terbatas pada suatu daerah (propinsi atau negara bagian) atau beberapa daerah, tetapi tidak mencakup semua provinsi (nasional). Sehingga partai lokal di sini berbeda dengan bentuk-bentuk organisasi kepartaian yang ada di daerah baik itu organisasi sayap partai (nasional) maupun organisasi cabang atau mekanisme hierarki partai yang ada di daerah. Di titik inilah kita meletakkan definisi partai lokal sebagai entitas politik yang tidak sekedar ditentukan oleh kualifikasi yuridis dalam verifikasi pemilihan umum.

Dengan kata lain partai politik lokal kita identifikasi sebagai partai yang hanya mempunyai lingkup di daerah baik dalam otoritas politik, keanggotaan, maupun dukungan massa. Sehingga secara substansial, ideologi maupun platform atas dirinya tidak bisa disamakan dengan organisasi politik lainnya baik tingkat lokal maupun sebuah percabangan dari organisasi (partai) nasional.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk menjawab atas masalah yang telah dirumuskan. Studi kasus atau *case study* merupakan bentuk dari penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri menurut Bodgan dan Taylor (dalam Moleong, L.J. 1998) merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif menggunakan kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara menyeluruh. Namun dalam penelitian ini kita tidak sekedar meletakkan data untuk dideskripsikan sebuah kasus, tetapi lebih pada penggalian data mendalam yang selanjutnya kita hubungkan sebagai sebuah kontinuitas dari beberapa variable yang pada akhirnya menghasilkan Partai Aceh saat ini.

Sedangkan studi kasus itu sendiri adalah bentuk penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian berkenaan dengan *how* atau *why* (Yin, R.K. 2006). Sehingga di titik inilah penggunaan studi kasus dalam penelitian ini menjadi relevan karena penelitian ini berusaha menunjukkan sebuah proses dari realitas kekinian akibat kontinuitasnya. Di sisi lain studi kasus adalah sebuah jenis pendekatan dalam penelitian dengan penelaahan satu kasus yang dilakukan secara intensif, mendalam, dan komprehensif (Sanapiah Faisal 2001: 22). Oleh karena itu kita akan melihat Partai Aceh sebagai sebuah kasus dari praktik partai politik lokal di Indonesia

yang bisa jadi genealogi dan corak pengorganisasiannya menarik untuk ditelusuri lebih jauh.

Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini—sebagai sebuah sumber bukti—adalah dokumen atau arsip dan hasil wawancara. Bentuk-bentuk data berupa dokumen meliputi: dokumen-dokumen administrative (proposal, laporan), agenda atau kesimpulan-kesimpulan pertemuan, surat, rancangan atau bentuk jadi sebuah regulasi, dan rubrik-rubrik dalam media cetak maupun internet. Lebih operasional, kita akan mengkaji studi-studi dan hasil penelitian perihal Gerakan Aceh Merdeka dan arsip-arsip intelegen—yang mungkin diakses—baik yang dibuat oleh internal GAM maupun hasil laporan, hal ini untuk memastikan bentuk pengorganisasian berikut alur detail sejarah gerakan tersebut. Di sisi lain kita juga akan mengkaji notulensi yang dihasilkan oleh DPRA sebagai rekaman orientasi politik Partai Aceh berikut dokumen internal partai dan artikel-artikel pemberitaan mengenai partai lokal tersebut.

Sedangkan sumber data kedua adalah didasarkan pada hasil wawancara dengan narasumber sesuai dengan arahan atau orientasi penelitian. Namun karena keterbatasan operasional—berdasarkan orientasi penelitian—narasumber dalam hal ini adalah aktor-aktor yang tidak secara langsung terlibat dalam Partai Aceh. Secara teknis aktor-aktor tersebut adalah lembaga dan person yang melakukan pendampingan terhadap GAM, Partai Aceh, dan pengawalan demokratisasi di Aceh; aparat penegak hukum; aktivis pro-demokrasi Aceh. Hal ini untuk mengetahui bentuk pengorganisasi partai baik secara struktural maupun kultural. Kedua untuk

memahami (perubahan) motif dan persepsi terhadap pengorganisasi partai dan dirinya. Ketiga, untuk memahami kembali alur sejarah berikut mekanisme pengorganisasian gerakan tersebut. Dan jenis data yang terakhir adalah hasil wawancara dengan masyarakat Aceh diluar GAM maupun Partai Aceh yang berguna untuk membangun objektifitas narasumber terdahulu sekaligus mengetahui GAM dan Partai Aceh dari 'luar'.

Secara teknis bentuk-bentuk data dokumen studi adalah sebagai berikut, untuk Aceh era kesultanan penulis mencari arsip dari Anthony Reid, Denys Lombard, Alfian Ibrahim. Untuk Aceh era Darul Islam penulis mencari arsip dari hasil studi Cornelis van Dijk. Sedangkan GAM fase konsolidasi dan fase tenang penulis mencari Sri Mastuti, Neta S.Pane, dan catatan harian Hasan Tiro. GAM fase militerisasi penulis mencari Neta S.Pane dan arsip laporan militer dari situs GAM, sedangkan GAM fase demiliterisasi penulis mencari dari berbagai sumber. GAM di titik transformasi penulis mencari Moch.Nursalim. Akhirnya untuk pembahasan Partai Aceh dilakukan wawancara dengan lembaga pendamping GAM/PA, masyarakat Aceh, dan politisi Aceh, didukung dengan data-data hasil studi Olle Tornquist dan Ikrar Nusa Bakti.

Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode pengumpulan data berupa sumber data internal dan sumber eksternal (Adi, R. 2004: 56). Sumber data internal dalam hal ini adalah dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang telah ditentukan, dan juga berdasarkan sumber eksternal yang dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen dan studi

pustaka. Oleh karena itu hal pertama yang dilakukan adalah menelusuri jejak arsip perihal GAM di situs resmi GAM dan beberapa media yang mewartakan perihal Aceh dan juga dokumen-dokumen kepolisian negara. Sedangkan untuk dokumen terkait partai Aceh kita mengawali dari sumber internal partai lalu berlanjut penelusuran dokumen di DPR—melalui *cyber media*. Di sisi lain kita tetap menghimpun hasil studi dan artikel pemberitaan perihal GAM maupun Partai Aceh.

Untuk sumber data wawancara kita melakukan dengan mekanisme *bottom up* yang diawali dari menjajaki pendapat dari masyarakat Aceh, kemudian ke aktivis Aceh yang sedang melakukan studi di Jogjakarta, dan terakhir adalah aktor pendamping demokratisasi Aceh khususnya pendampingan transformasi GAM. Mekanisme ini kami lakukan untuk membangun efektifitas pengumpulan data, fisibilitas (preventif untuk narasumber yang sulit diakses), dan memungkinkan adanya sumber-sumber data baru berdasarkan rekomendasi dari narasumber-narasumber tersebut.

Sehingga memang pada akhir kita menghimpun bentuk data sekunder. Sedangkan jika kita melihat dalam perspektif waktu pengumpulan data maka metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *time series data* atau tidak membatasi data pada sebuah jangka waktu tertentu sehingga diperoleh rentetan kronologi yang menjadi pokok tema penelitian ini. Sehingga melalui multisumber bukti (Yin, R.K. 2006: 119) tersebut selanjutnya akan menjaga rangkaian bukti atau data yang diperoleh berdasarkan sekuen yang telah dibayangkan sebelumnya.

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini sekaligus hendak menggabungkan dua strategi umum yang digariskan oleh Robert K. Yin (2006:136) yaitu mendasarkan pada proposisi teoritis dan mengembangkan deskripsi kasus. Namun dalam hal ini, yang paling pokok adalah deskripsi terhadap kasus atau data yang diperoleh sehingga proposisi teoritis tidak serta merta membimbing pada data, tetapi justru pertanyaan penelitianlah yang membimbing analisis data. Sehingga data akan kita bangun dalam sebuah alur genealogi yang memberi konsekuensi pada bentuk-bentuk transformasi pengorganisasi dari GAM menjadi Partai Aceh. Pada saat yang sama, data yang diperoleh kita analisis dengan menggunakan analisis deret waktu berupa kronologi. Pembentangan peristiwa-peristiwa ke dalam suatu kronologi memungkinkan peneliti untuk menentukan peristiwa-peristiwa kausal lebih dari waktu biasa, karena urutan pokok dari suatu sebab dan akibat terkadang tidak dapat dibalik (Yin, R.K. 2006:157).

Sedangkan analisis kajiannya kita lakukan dengan melakukan metode analisis naratif atau *narrative analysis*. Metode analisis ini menjadi cukup relevan karena mempunyai relevansi yang kuat dengan tema pokok penelitian, yaitu berbicara tentang sebuah kronologi dan bentuk-bentuk transformasi atau perubahan dari setiap penggalan-penggalan fase kronologi tersebut. Lebih lanjut Kristin G Esteborg (2001: 183) mengatakan bahwa kita bisa menganggap analisis naratif adalah semacam penulisan cerita yang dituturkan oleh orang dengan sebuah awalan (*a beginning*), tengah (*a middle*), dan sebuah akhiran (*an end*). *Narrative analysis*

juga mendasarkan pada struktur-struktur cerita (*stories*) yaitu berupa sebuah abstrak, orientasi, complication, evaluasi, dan berakhir pada sebuah *coda* yang membuat pembaca mengetahui akhir dari sebuah cerita. Sehingga hasil penelitian yang kita sajikan pada akhirnya tidak serta-merta kaku dan terperangkap dalam redaksi maupun retorika formal.

Jika kita letakkan dalam analisis deret waktu, maka data yang kita analisis sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah sampai pada 2010 atau satu tahun setelah dilaksanakannya pemilu 2009. Pemberian batasan analisis di sini penting karena untuk menghindari kesalahpahaman atas hasil studi dengan fakta subyek politik yang terus bergerak secara dinamis.

Sistematika Penulisan

Penulisan atas studi ini didasarkan pada pertanyaan penelitian dan pilihan analisis yang digunakan sehingga tersusun pembabagan analisis secara kronologis. Penuangan hasil studi ini dibagi ke dalam tujuh bab pokok. Yaitu, bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi perihal latar belakang yang menyebabkan penelitian ini penting dikaji, rumusan pertanyaan penelitian sebagai sebuah orientasi penelitian, dan tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan ini, serta pilihan metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan studi ini. Di sisi lain dalam bab pertama juga berisi pemaparan tentang konsep dari apa yang disebut partai lokal, motif kemunculannya, dan beberapa makna dari apa yang disebut dengan genealogi dan pengorganisasian.

Bab kedua berisi Aceh *pra-GAM* yang pada dasarnya membangun orientasi gerakan sebagai sebuah motivasi imajiner dan karakter dominan atas gerakan. Artinya Aceh sebagai sebuah kesatuan politik dan daerah konflik menjadi latar atas bergolaknya Aceh pada periode berikutnya sebagai bagian dari NKRI. Sedangkan bab ketiga menjelaskan bagaimana bentuk organisasi Gerakan Aceh Merdeka berikut mekanisme bergeraknya dengan menelusuri beberapa detail di dalamnya termasuk identifikasi atas motif gerakan.

Untuk menelusuri sebab, motif, aktor, dan proses transformasi dari GAM sampai akhirnya menjadi Partai Aceh maka kita memerlukan dua bab dengan fokus bahasan berbeda. Bab keempat akan banyak berbicara terkait sebab dan motif transformasi sehingga kita mengetahui fakta partikular atas transformasi GAM. Hal tersebut kita teruskan dengan membahas proses transformasi pada Bab kelima hingga munculnya Partai Aceh sebagai sebuah praktik penyelenggaraan partai lokal di Indonesia setelah empat dasawarsa era 1955 yang lalu.

Sedangkan bab keenam akan banyak berbicara tentang transformasi bentuk pengorganisasi kelompok (dari informal menjadi formal) yang bertautan dengan konteks historis dan struktur sosio-politik masyarakat Aceh dalam partai lokal Aceh. Bab ini juga secara particular membedah penyesuaian-penyesuaian secara organisatoris yang dilakukan oleh sebuah partai lokal yang berangkat dari kondisi konfliktual. Pada bab ini kita juga akan menguji pengorganisasian partai Aceh dalam pemilihan kepala daerah di Aceh dan pemilu legislatif 2009 untuk melihat efektifitas sebuah transformasi dari

pengorganisasian sebuah partai lokal. Sehingga bab terakhir kita tutup dengan kesimpulan dan saran yang mungkin dilakukan dalam proses pembangunan dan pendewasaan partai politik Indonesia

ACEH: LANTAI DASAR *CLEAVAGE*

"The people of Aceh have a long and proud tradition of resisting aggression from outsiders. And we have a long and proud tradition of justice".

(Malik Mahmud, 2005)²

Pernyataan *manthra* Malik (mantan PM GAM) tersebut menunjukkan relasi historis yang mendasari semangat perjuangan GAM sebagai sebuah *secession movement*. Artinya, Aceh menjadi basis identitas atas hadirnya GAM sebagai sebuah *cleavage* dalam ruang relasi konflik nasional-lokal atau *center-periferi* dalam terminologi Lipset-Rokkan. Perlawanan terhadap siapapun yang dianggap 'pihak luar'—termasuk pihak nasional atau Pemerintah Pusat RI—ditafsirkan menjadi sebuah tradisi sejak era kesultanan di Aceh. Sehingga tradisi inilah yang perlu kita lacak sebagai sebuah lantai dasar terbentuknya *social cleavage* dalam ruang relasi nasional-lokal setelah hadirnya Indonesia pada 1945. Di titik inilah kita juga perlu memahami *Acehnese* sebagai

² Statemen Malik Mahmud (Perdana Menteri GAM) dalam pidato penandatanganan MoU Helsinki 15 Agustus 2005. Diunduh dari situs <http://asnlf.net> pada 28 April 2011. Malik Mahmud menjadi orang nomor dua di GAM setelah Hasan Tiro, sehingga kematian Hasan Tiro membawa dirinya menjadi orang nomor satu di GAM.

proses kristalisasi Aceh era kesultanan yang membentuk logika *local cleavage* bagi hadirnya partai lokal pada era demokratisasi Indonesia pasca Soeharto.

Namun pada dasarnya garis demargasi genealogy Partai Aceh adalah cukup sampai pada proklamasi GAM 1976 oleh Teungku Muhammad Hasan Tiro, di sisi lain sedikit menunjukkan latar Aceh sebelum kemunculan GAM juga menjadi kebutuhan studi ini. Hal ini penting karena identifikasi dari kemunculan gerakan pemberontakan di Aceh adalah karena faktor historis perihal imaji sejarah kesultanan Aceh yang membentuk struktur identitas dan faktor eksternalitas yang dalam hal ini banyak dimainkan oleh 'pusat'. Walaupun demikian, hal ini tidak menutup adanya fakta perbenturan horizontal—perang sipil—antara kelompok ulama dengan *uleebalang*³ seputar periode 1945-1949. Otonomi yang dimiliki uleebalang sebagai penguasa sebuah daerah (dalam lingkup Aceh) pada akhirnya mereduksi perannya sebagai pemimpin menjadi seorang aristokrat di daerah sehingga para ulama yang juga merepresentasi umat (rakyatnya) melakukan perlawanan terhadap uleebalang. Alhasil, selain juga karena determinasi kepemimpinan di Aceh, arah kebijakan pusat atau dimensi eksternal komposisi politik Aceh berimplikasi pada muncul-tenggelamnya *insurgency* di Aceh beserta motif dan karakter yang melekat pada setiap fasenya.

³ *Uleebalang* sudah dikenal sejak masa Kesultanan Aceh (Sultan Iskandar Muda). Tgk. Jakobi menyatakan bahwa istilah *Uleebalang* sendiri tidak mengacu pada pengertian Kepala Laskar, melainkan lebih berarti sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Otonom dan Pemangku Hukum Adat di daerahnya. *Uleebalang* yang disebut juga kalangan bangsawan ini karena kekuasaannya yang sangat besar sering bertindak sebagai penguasa tunggal, sedangkan kekuasaan sultan hanyalah formalitas saja. Kedudukan *Uleebalang* diwariskan secara turun temurun dan ditandai dengan pemberian gelar kebangsawanan. Untuk pria

Kesultanan Aceh: “Unsur Hara” Genealogi

Sebagai sebuah studi genealogis, membaca Partai Aceh saat ini memang tidak bisa kita lepaskan dari melihat Aceh sebagai sebuah kesatuan struktur sosial-politik perlawanan yang sudah mentradisi sejak sebelum ‘hadirnya’ Indonesia pada Agustus 1945. Pelacakan dokumen yang dilakukan Anthony Reid (2005) menemukan bahwa sejak tahun 1511 Aceh—bersatunya kerajaan-kerajaan dibawah komando Kerajaan Samudra Pasai—sudah melakukan perlawanan terhadap kedatangan Portugis⁴. Walaupun demikian, menurut A.Hasmy (dalam Djami, M. J. 1980: 203), Perang Aceh berakar jauh ke masa silam sejak Kerajaan Islam Peureulak yang diproklamirkan pada hari Selasa 1 Muharram 225 H (840 M) sebagai awal mula Kerajaan Aceh Darussalam yang diprokamirkan pada 12 Zulkaidah 916 H (1511) yang menyatakan perang terhadap buta huruf dan buta ilmu.

Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada 1511 membuat para pedagang berpindah ke Aceh dan Kerajaan Aceh berkembang. Sementara itu Kerajaan Pasai ditaklukkan oleh Sultan Ali Mughayat Syah sebagai daerah taklukan kerajaan Aceh pada 1520. Kerajaan Pasai mempunyai pergaulan internasional karena kedudukan strategisnya di Selat Malaka (Ismail, M.G. 1997: 16-24).

disebut “*Teuku*” dan untuk wanita disebut “*Cut*”, “*Cut Nyak*” atau “*Pocut*”. *Uleebalang* yang berkuasa di suatu daerah otonomi sendiri sering disebut “*Teuku Chik*” (Jakobi, A.K. 1998: 297).

⁴ Catatan ini sebenarnya agak berbeda dengan William Marsden (1999: 239-244). Diceritakan bahwa Sultan Pidie dan Sultan Aru bahkan mengajak bekerja sama dengan Portugis yang dipimpin oleh Alfonso d’Albuquerque. Namun orang-orang Pasai adalah yang paling frontal melawan kedatangan Portugis sejak pertama kali.

Artinya, Aceh sebagai sebuah kesatuan identitas sosial politik telah mendasarkan pada ethno-nationalismenya⁵ sejak masa kesultanan (Reid 2005; Lombard 1991; Alfian 1999; Jakobi 1998), yang kemudian dipakai sebagai landasan perlawanan terhadap *outsider* yang dalam hal ini adalah (yang dianggap) pihak kolonial. Sehingga apa yang disebut 'tradisi' dalam kutipan Malik Mahmud diawali titik picunya sejak abad ke-16 ketika Portugis menjelma sebagai *the outsider* bagi Aceh.

Walaupun dalam inskripsi dan jejak antropologis ditemukan Islam masuk Aceh (Kerajaan Samudera Pasai) seputar Abad ke-13, namun sebenarnya identitas keAcehan—yang melekat pada tradisi dan kultur Islam—dapat kita tarik garis simpulnya dimulai pada seputar abad ke-15 di bawah Sultan Iskandar Muda. Hal ini didasarkan pada ungkapan yang dikenal dengan *Adat bak Po Teumeureuhom, Hukum bak Teungku Syiah Kuala*, artinya 'dalam masalah adat, pemerintahan, ekonomi, politik, dan sebagainya orang merujuk pada Sultan Iskandar Muda, sedangkan dalam hal hukum agama orang merujuk pada Teungku Syah Kuala atau Syaikh Abd al-Rauf al Singkili' (Kutakarang, T.C. 1889; Alfian, T.I 1999). Struktur identitas sosial inilah yang menjadi basis identitas bagi Aceh sebagai sebuah kelompok yang mempunyai pertentangan dengan dominasi 'pusat' baik Batavia di bawah Ratu Elizabeth Belanda maupun Jakarta di bawah Soekarno dan Jakarta di bawah Soeharto.

⁵ Identitas politik ini sangat mungkin juga dipengaruhi oleh struktur administrasi adat seperti Gampong, Mukim, Sagoe—pejabatnya seperti Geuchik di teritorial terkecil dan *Uleebalang* sebagai kepala daerah otonom—yang dimulai dan dipertahankan sejak zaman kesultanan abad XV. Hal ini direkam oleh Anthony Reid (2005).

Sehingga titik perlawanan Aceh terhadap kolonial adalah bentuk semangat pembebasan, sedangkan perlawanan terhadap pemerintah pusat setelah hadirnya negara Indonesia adalah bentuk pemberontakan sebagai ekspresi ketidaksetujuan terhadap kebijakan baik ideologis maupun praksis. Artinya ruang relasi konflik center-periferi dalam model Lipset-Rokkan yang terjadi pada era kesultanan berbeda dengan ruang relasi konflik era republik Indonesia pasca proklamasi 1945. Sehingga apa yang dapat kita ambil dari penelusuran sejarah ini adalah proses kristalisasi basis identitas Aceh sebagai cleavage yang mendasari 'pembedaan' diri atas dominasi pusat di Jakarta pada periode selanjutnya. Karena jika kita merujuk pada konseptualisasi cleavage yang didalamnya terdapat kesadaran kolektif atas basis identitasnya dan adanya kemauan untuk bertindak atas basis identitas tersebut, maka Aceh era kesultanan memenuhi syarat sebagai sebuah sosial cleavage. Hal ini ditunjukkan dengan batas geopolitik kawasan Aceh yang dibentuk dan dipertahankan sejak era kesultanan sebagaimana gambar di bawah.

Gambar 2.1. Peta Kesultaran Aceh pada era perlawanan Belanda⁶



Peta ini menunjukkan batas-batas kekuasaan kesultanan Aceh yang kemudian menjadi batas-batas Aceh sebagai sebuah identitas politik yang diperjuangkan GAM di kemudian hari. Walaupun, pada era ini yang terjadi adalah relasi imperialisme, bukan pada relasi dominasi layaknya otoritas pemerintah pusat terhadap daerah. Pertahanan Aceh sebagai sebuah kesadaran kolektif di dalam bingkai peta inilah yang kemudian menghasilkan dua fakta penting yang membangun relasi genealogis dengan gerakan perlawanan selanjutnya dalam ruang relasi pusat-daerah atau nasional-lokal: perang sabil atau perang suci dan strategi diplomasi atau politik luar negeri. Sekalipun dua hal terakhir ini tidak

⁶ Gambar Peta ini diunduh dari <http://koleksitempodoele.blogspot.com/2009/11/peta-kuno-sultanat-atschin-kesultanan.html>, pada 14 Maret 2011 pukul 17.00.

cukup relevan bagi kristalisasi kesadaran identitas Aceh sebagai unsur cleavage, perlu kita lihat sebagai sebuah struktur peluang politik kristalisasi tersebut.

Perang Sabil

Konsolidasi identitas politik masyarakat Aceh pada era kesultanan⁷ terus mengkristal ketika Belanda mendeklarasikan perang sebagai bentuk kolonisasi terhadap Aceh. Perang yang memakan waktu 40 tahun (1873-1912) ini dimulai pada 26 Maret 1873 yang kemudian secara kultural mereproduksi pemahaman sebagai perang suci yang kemudian disebut *perang sabil* atau perang yang didasari semangat beragama (Rheid, A. 2005: 2-3; Ishak, O.S. 2001:33)⁸. Sehingga terminus 'kafir' menjadi pengganti yang cukup dominan dipakai jika dibandingkan dengan 'kolonial'. Hal ini terlihat seperti ketika kita menyimak film *Tjoet Nja' Dhien* (1988), maka kita akan sering menemui umpatan "para kafir Belanda" dalam film tersebut.

Dalam hal ini Teungku Chiek Di Tiro Muhammad Saman (1836–1919) adalah orang yang dikenal sebagai penggerak Perang Sabil melawan Belanda (Departemen Pendidikan dan kebudayaan 1991). Sedangkan Hikayat Perang Sabil sendiri dikarang oleh Teungku Chiek Pante Kulu (Teungku Haji Muhammad)

⁷ Penduduk wilayah utara garis katulistiwa hampir tidak tersentuh oleh peradaban besar Sriwijaya dan Majapahit. Namun dari sudut pandang Islam, Sumatra bagian utara adalah titik pusat kepulauan Indonesia selama lima abad. Pedagang India dan Arab sudah mendirikan pos perdagangan sejak abad ke-11. Sedangkan kerajaan Samudra Pasai tumbuh pesat (terutama dibawah Sultan Iskandar Muda) pada abad 14.

⁸ Lebih lanjut Otto Syamsudin Ishak menyatakan bahwa Aceh ditundukkan Belanda secara politik pada 1903. Namun pada masa itu, perlawanan rakyat yang berkelompok bermetamorfosa menjadi perjuangan secara individu.

sekitar tahun 1880M. Isinya terdiri dari empat bagian, yaitu: kisah Ainul Mardhiah, kisah pasukan gajah, kisah Sa'id Salmy, dan kisah seorang anak yang mati hidup kembali. Intisari buku ini adalah menunjukkan nilai hakiki hidup muslim dalam pandangan kekinian dan keabadian hidup serta hubungannya dengan beramal dan berjuang di jalan Allah. Digambarkan secara puitis mengenai tanggungjawab seorang muslim di bidang kenegaraan serta surga sebagai imbalan dari mati syahid, dan jalan yang paling mudah untuk mencapainya adalah melalui peperangan dan membunuh *kaphee* (Belanda) (Departemen Pendidikan dan kebudayaan 1991:133).

Perang Sabil telah mendasari semangat akhirat dalam peperangan, terbitnya Hikayat Perang Sabil yang menemani perlawanan terhadap Belanda mendasari logika transedental sehingga setiap orang memilih mati syahid dalam perjuangan (peperangan) melawan kolonial. Pemahaman yang paling mudah tentang perang sabil adalah bahwa "mereka yang gugur melawan *kaphe* (kafir kolonial) adalah syahid dan akan masuk surga, diampunkan segala dosanya dan memperoleh kenikamatan tiada tara di dalam surga", Teuku Ibrahim Alfian (1999: 235). Singkat cerita, riwayat terkait perang sabil ini berpengaruh kuat terhadap semangat dan karakter gerakan Darul Islam di Aceh di bawah Daud Beureueh, yang kemudian membedakannya dengan gerakan Hasan Tiro.

Diplomasi

Namun secara struktural, perang terhadap Belanda juga membimbing Aceh untuk melakukan diplomasi ke Turki dan kerajaan Islam lain di luar nusantara (Lombard, D. 1991; Reid, A. 1969; Said, M. 1961)⁹. Lebih spesifik terkait dengan hal ini, pada tahun 1850-an Sultan Ibrahim Mansyur Syah mengirim utusan bernama Sidi Muhammad ke Turki. Dengan melalui sepucuk surat, Sultan meminta agar Turki bersedia melindungi Aceh dari imperialisme Inggris dan Belanda.

Dengan diplomasi ini juga Sultan Mansyur Syah mempunyai hubungan baik dengan Perancis sebagai sebuah negara maju di Eropa. Dari hubungan 'luar negeri' ini, Sultan menerima dua surat yang pokok isinya adalah menyatakan sikap bersahabat dengan Kerajaan Aceh. Surat pertama bertanggal 2 Januari 1843 ditandatangani oleh Raja Louis Philippe serta Menteri Luar Negeri Guizot. Surat kedua berasal dari Napoleon III yang juga dibawa ke Aceh oleh Sidi Muhammad pada tahun 1853. Sidi Muhammad sebagai utusan ke Turki juga berkeliling di kota-kota Eropa (1852-1853) dan mengemukakan bahwa adanya praktik-praktik pelanggaran teritorial yang dilakukan oleh Belanda terhadap kerajaan Aceh (Alfian, T.I. 1999: 138-139).

Selain nama Sidi Muhammad sebagai diplomat ulung, dalam catatan Reid (1969) terdapat juga nama Abd ar-Rahman az-Zahir sebagai diplomat yang tidak kalah penting dari Sidi Muhammad. Abd ar-Rahman seputar

⁹ Denys Lombard (1991) bahkan merekam diplomasi yang dilakukan pada masa kesultanan sudah dimulai sejak di bawah Sultan Iskandar Muda dengan ke Turki dan India. Diplomasi ini dimaksudkan untuk memperkuat angkatan bersenjata dan pembangunan kerajaan seperti meterial dan ahli arsitektur.

tahun 1873 juga banyak berputar-putar di Eropa dan bahkan 'membenturkan' Inggris dengan Belanda, dan misi dukungan lain seperti persenjataan bagi perlawanan di Aceh (Rheid, A. 1969: 119-155). Singkat kata, diplomasi internasional yang dilakukan oleh para diplomat Aceh masa kesultanan bahkan mampu memunculkan opini di daratan Eropa melalui kabel-kabel berita Reuter waktu itu. Sekalipun misi diplomatik tersebut tidak hanya berada di bawah satu kesultanan saja, di titik inilah kita menemukan sebuah fakta sejarah bahwa Aceh—baik karena faktor geografis perdagangan dan politik imperialisme—menggunakan strategi diplomasi untuk melakukan respon terhadap kolonial sejak sebelum mengenal konsep negara bangsa dan republikanisme di daratan Nusantara.

Dua poin pokok terakhir inilah—*perang sabil* dan diplomasi—yang menjadi semacam *folklore* politik gerakan perlawanan selanjutnya, baik DI/TII oleh Daud Beureuh (1899-1987) dan GAM oleh Hasan Tiro (1925-2010)¹⁰. Dalam hal ini, gerakan yang dibangun oleh Teungku Daud Beureueh secara dominan menggunakan logika dan karakter perang sabil, sedangkan gerakan oleh Hasan Tiro cenderung lebih mewarisi tradisi diplomasi sekalipun juga mengalami fase militerisasi sejak diberlakukannya Daerah Operasi Militer (DOM) pada 1989. Namun letak perbedaan fundamental kedua gerakan—pasca proklamasi Indonesia 1945 tersebut—bukan hanya berada pada dua diferensiasi tersebut, melainkan juga pada motif atau latar belakang gerakannya.

¹⁰ Sementara cerita tentang peran penting Tgk. Cik di Tiro dalam elaborasi historis tersebut menjadi alasan bagi Hasan Tiro sebagai pewaris perjuangan Aceh yang kemudian disebut Wali Nanggroe. Terkait hal ini akan dibahas lebih jauh pada Bab selanjutnya.

Darul Islam: Eksperimentasi Local Cleavage

Pada dasarnya, Tgk. Daud Beureueh¹¹—yang juga menjadi gubernur sipil/militer Aceh sejak Agresi Belanda I—sebagai ulama besar Aceh adalah termasuk deklarator dalam Maklumat Ulama Aceh pasca proklamasi 1945¹². Naskah ini bernama “Makloemat Oelama Seloeroeh Atjeh” dan ditandatangani oleh empat ulama—Tgk. Hadji Hasan Kroeeng Kale, Tgk. M. Daoed Beureueh, Tgk. Hadji Dja’far Sidik Lamdjabat, Tgk. Hadji Ahmad Hasballah Indrapoeri—atas nama ulama seluruh Aceh pada 15 Oktober 1945 di Kutaraja¹³ (sekarang Banda Aceh).

Hal ini menjadi fakta penting karena memberi penjelasan bahwa Aceh melalui ulama besarnya—implisit Tgk. Daud Beureueh di dalamnya—sebagai pemimpin adat (agama) menyambut baik¹⁴ dengan hadirnya negara Indonesia 17 Agustus 1945. Fakta ini

¹¹ Daud Beureueh adalah salah seorang pendiri Persatuan Ulama-ulama Seluruh Aceh (PUSA) pada Mei 1939 yang kemudian terpilih sebagai ketua umum persatuan ini. Lebih lanjut Van Dijk menjelaskan bahwa PUSA merupakan wahana utama pada ulama Aceh yang menamakan dirinya Tengku (Tgk.) dalam perjuangan melawan elit tradisional (kepala wilayah atau *Uleebalang*) yang menggunakan gelar Teuku (T) (van Dijk, C. 1983: 256).

¹² Lihat lampiran Gambar 1.1., Naskah Maklumat Ulama Aceh tersebut menunjukkan Tgk. Daud Beureueh sebagai ulama besar yang juga menyatakan diri sebagai seorang republikan dan menandai bergabungnya Aceh dalam NKRI di bawah kepemimpinan Ir. Soekarno.

¹³ Ibu kota Aceh sejak jaman Kerajaan Aceh—sebuah federasi dari Kerajaan Darussalam, kerajaan Islam Pidie, dan Kerajaan Islam Jaya pada seputar 1480-an Masehi—dinamakan Banda Aceh. Dan diubah namanya menjadi Banda Aceh Darussalam ketika Sultan Alaidin Ali Mughaiyat Syah memimpin. Namun setelah Belanda merebut Keraton Darud Dunia pada 24 Januari 1874 di bawah Jenderal Agresor van Swieten, Ibukota Negara Banda Aceh Darussalam diubah namanya menjadi Kutaraja. Lalu kemudian pada tahun 1963 nama Banda Aceh dipulihkan kembali. Lihat dalam A. Hamsy (Suny, I. 1980: 205-207).

¹⁴ Bahkan diceritakan kemudian, rakyat Aceh mengumpulkan sumbangan yang akhirnya digunakan untuk membeli sebuah pesawat bernama *Seulawah RI 001* dan *Dakota RI-002*. “...saya (mantan seorang residen) tidak pernah lupa bagaimana suatu malam setelah

terlihat sebagaimana termaktub dalam petikan kalimat dalam naskah berikut: "Sege nap lapisan rakjat telah bersatoe padoe dengan patuh berdiri di belakang maha pemimpin Ir. Soekarno oentoek menoenggoe perintah dan dan kewadajiban jang akan didjalankan" (Naskah Makloemat Oelama Seloeruh Atjeh, 1945). Sehingga ruang tafsir yang dapat kita buka adalah Aceh sebagai bagian dari Indonesia saat itu menerima formasi negara dengan segala pluralitasnya yang kemudian disekularisasi melalui pancasila dan paham negara lainnya oleh Soekarno.

Namun, argumen yang lebih masuk akal atas sikap 'bersatu padu' Aceh adalah pada alasan pembebasan dirinya dari dominasi Belanda yang 'dibantu' dengan proklamasi 17 Agustus, bukan terletak pada penerimanya pada Indonesia sebagai sebuah negara *an sich*. Semangat pertentangan terhadap imperialisme menjadi lebih dominan dibandingkan dengan penerimaan terhadap formasi negara. Sehingga ketika Jakarta berbenah diri sebagai sebuah ibu kota negara pasca pengakuan *de jure* 1949, seperti dengan penataan provinsi dan operasionalisasi penyelenggaraan negara lainnya, maka pertentangan Aceh terhadap formasi negara telah mengganti semangat revolusi anti-imperialisme yang sudah tidak penting lagi. Di titik inilah eksperimentasi Aceh sebagai *local cleavage* dalam ruang relasi konflik pusat-daerah dimulai.

magrib diperintahkan untuk mengumpulkan emas sebanyak mungkin agar Bung Karno merasa yakin bahwa rakyat Aceh dengan sepenuh hati bersedia memenuhi keinginannya supaya kita menyumbang sebuah kapal terbang untuk perjuangan..." (Haris, S. dalam Sihbudi, R. (eds) 2001: 33).

Berperang untuk Islam: Sebuah Motif Pembeda

Sejak tahun 1949 terjadi polemik yang berkepanjangan antara Aceh sebagai bagian dari provinsi Sumatera Utara (sesuai keputusan pemerintah pusat di Jakarta) dan pertahanan Aceh sebagai provinsi otonom yang diperjuangkan oleh Daud Beureueh. Karena yang menjadi pembeda mendasar antara DI/TII dan GAM adalah pada motif pendiriannya—sehingga memotong alur genealogi Partai Aceh cukup sampai 1976—sehingga melihat kajian terhadap beberapa tafsir fakta yang mendasari deklarasi Negara Islam Indonesia 20 September 1953 menjadi penting di sini. Cornelis van Dijk (1981) dalam bukunya *Rebellion Under The Banner of Islam*, menyatakan bahwa DI/TII lebih disebabkan oleh alasan ideologis:

“Dia menjustifikasi pernyataan dan penolakan terhadap Republik Indonesia dengan berpendapat bahwa pemimpin-pemimpin republik di Jakarta telah menyimpang dari kebenaran. Republik belum dikembangkan menjadi sebuah negara yang berdasarkan Islam, yang di dalam pandangannya merupakan satu-satunya implikasi dari prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama dari Pancasila (van Dijk 1981: 311; Danamik 2010:31-32).

Hampir sama dengan temuan van Dijk, Nazaruddin Syamsuddin (dalam Ahmad Taufan Danamik, 2010) mengungkap dua faktor pokok utama munculnya pemberontakan DI/TII, yakni alasan ideologis dan regionalisme. Menurut Syamsuddin, perlawanan ideologi dimunculkan oleh kelompok ulama.

Sementara regionalisme dimunculkan oleh kelompok zuama (kelompok ahli). Kedua kelompok ini bersatu dengan dukungan rakyat Aceh melawan Jakarta.

Di sisi lain, jika kita meletakkan Daud Beureueh dalam *warlodism* ala Clapham (1998, 2007), mobilisasi gerakan yang ada adalah akibat dari *standing point* Beureueh sebagai oposisi pasca keputusan Aceh sebagai provinsi Sumatera Utara—setelah keluarnya Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1950 tentang pembentukan provinsi-provinsi—yang berakibat pada pencabutan dirinya sebagai Gubernur Militer/Sipil di Aceh. Sedangkan jika kita merujuk pada T.Ibrahim Alfian (1982: 3) terkait alur yuridis status Aceh saat itu, keresidenan Aceh yang sebelumnya berada di bawah Propinsi Sumatra Utara berdasarkan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No.8/Des./WPM/1949, tanggal 17 Desember 1949 status Aceh ditingkatkan sebagai Provinsi yang berdiri sendiri. Namun tidak berlangsung lama berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.5 Tahun 1950, yaitu PP No.21 Tahun 1950 tersebut, daerah Aceh kembali menjadi sebuah keresidenan di bawah Propinsi Sumatra Utara.

Sehingga di titik inilah kita melihat motif politis bangkitnya gerakan Negara Islam Indonesia oleh Daud Beureueh selain karena alasan ideologis tersebut. Sedangkan secara politis pertentangan Aceh era Darul Islam distimulasi oleh dominasi 'pusat' sebagai stimulator gerakan. Daud Beureueh membangun kesadaran kolektif-historis masyarakat Aceh atas dasar *syariah* sehingga atas basis kesadaran itulah masyarakat Aceh termobilisasi dalam gerakan perlawanan

menentang otoritas Jakarta dalam logika pusat-daerah. Sehingga Aceh pada periode inilah secara utuh menampakkan dirinya sebagai *local cleavage* yang berada dalam ruang relasi konflik pusat-daerah.

Pada saat yang sama di titik inilah kita melihat perbedaan mendasar dari motif dan latar belakang antara gerakan yang dibangun Daud Beureueh dan gerakan Hasan Tiro yang cenderung karena motif dan latar belakang keadilan sosial maupun *economical disparity* pusat-daerah. Sedangkan karakter *perang sabil* yang cenderung berpengaruh kuat terhadap gerakan Beureueh—dibandingkan GAM yang mengunggulkan diplomasi—terlihat pasca Kongres¹⁵ Alim Ulama se-Indonesia di Medan bulan April 1953 yang juga dipimpin oleh Tgk. M. Daud Beureueh:

Para ulama sekembalinya dari Mukhtar Medan mengadakan rapat-rapat umum terutama di daerah Aceh...beberapa bulan setelah diadakan rapat-rapat umum tumbuhlah laksana cendawan musim hujan Pandu Islam di seluruh Aceh, dari anak-anak, pemuda, malah para orang tua. Ternyata mereka kemudian mendapat latihan ketentaraan, seperti cara-cara menyerang, diberikan oleh tentara-tentara pilihan yang berpengalaman, baik siang-maupun malam. Alat-alat negara mulai tertarik perhatiannya, tetapi mereka tidak berani bertindak (Alfian, T.I. 1999: 220-221).

¹⁵ Keputusan Kongres ini antara lain berbunyi "memperjuangkan dalam pemilihan umum yang akan datang supaya Negara Republik Indonesia menjadi Negara Islam Indonesia".

Pada dasarnya semangat perang suci memang masih melekat kuat pasca proklamasi dan dalam mengiringi gerakan anti-imperialisme. Hal ini terlihat dari sepotong kalimat pernyataan Daud Beureueh bersama dengan tiga ulama besar lain dalam Maklumat Seluruh Ulama Aceh: “Menoeroet keyakinan kami bahwa perdjoeangan ini adalah perdjoeangan soetji jang disebut “PERANG SABIL”, (Naskah Makloemat Oelama Seloeroeh Atjeh, 1945). Pernyataan dalam maklumat ini memberi penjelasan bahwa periode perang melawan Jakarta adalah sekuens dari semangat melawan imperialisme Belanda dalam logika perang sabil. Sehingga hal ini memperjelas alasan kenapa gerakan Negara Islam Indonesia lebih berkarakter militeristik dibandingkan upaya-upaya negosiasi.

Sehingga cukup jelas di sini, bahwa gerakan yang dibangun oleh Daud Beureueh lebih disiapkan untuk berperang, terlihat pada militerisasi gerakan bahkan sebelum diproklamasikan pada September 1953. Karakter gerakan ini pulalah yang menjadi pembeda penting untuk menjawab bahwa genealogi Partai Aceh pada dasarnya hanya sampai dari Hasan Tiro. Walaupun kita tidak bisa menafikan kesamaan dari dua gerakan ini, bahwa Daud Beureueh dan Hasan Tiro menjadi determinasi pokok atas muncul dan berkembangnya kedua gerakan tersebut, sehingga motivasi pengkafiran dan etno-nasionalisme pada masing-masing fase lanjutannya adalah konsekuensi dari peran kedua *warlord* tersebut.

Namun selain dua hal besar—motif gerakan Beureueh yang cenderung ideologis-politis dan karakter gerakan yang militeristik (semangat perang sabil) sejak

awal proklamasi—yang kita pakai untuk mempertegas diferensiasi antara gerakan Daud Beureueh 1953 dengan gerakan Hasan Tiro 1976 tersebut, republikanisme Indonesia yang melekat pada gerakan Daud Beureueh juga membedakan cukup tajam dengan gerakan Hasan Tiro. Tuntutan besar saat itu adalah otonomi bagi Aceh sehingga tetap melekatkan Islam dalam pengelolaan daerah. Sehingga hal ini yang dalam—jika kita menggunakan analisis wacana dari banyak teks yang bercerita tentang gerakan Daud Beureueh—proklamasinya atau klaim atas gerakannya disebut sebagai Negara Islam Indonesia, bukan Negara Islam Aceh. Dan hal ini pula yang menyebabkan Daud Beureueh (PUSA) mengidentifikasi diri sebagai bagian integral dari gerakan Kartosuwiryo (Darul Islam) yang sudah muncul sejak 1947. “Daud Beureueh mengumumkan proklamasi: atas nama masyarakat Aceh, ia menyatakan Aceh dan daerah-daerah sekitarnya menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia...” (Cornelis van Dijk, 1983, h.294). walaupun pada akhirnya dalam struktur Negara Islam Indonesia, Aceh memilih menjadi negara federal dibandingkan sebagai daerah yang diberi otonomi luas (van Dijk 1983: 298-299) ¹⁶.

¹⁶ Konverensi di Batee Kureng di Aceh Besar diselenggarakan beberapa bulan setelah Daud Beureueh diangkat oleh Kartosuwirjo sebagai wakil presiden (yang sebelumnya sebagai gubernur) Negara Islam Indonesia pada Januari 1955. Pada awalnya Daud Beureueh hanya bermaksud mengadakan perundingan terkait hubungan Aceh dengan Negara Islam Indonesia dan struktur pemerintahan daerah Aceh. Di sini dia menganjurkan pembentukan Aceh sebagai negara tersendiri tapi masih dalam kerangka Negara Islam Indonesia (federal). Singkat cerita, Konverensi Batee Kureng mencapai klimaknya dengan dihasilkannya Piagam Batee Kureng yang mengubah status Aceh dari sebuah provinsi menjadi negara dalam Negara Islam Indonesia.

Self-Government: Kausalitas Gagasan yang Tersembunyi

Dalam catatan Awwas (2007), SM. Kartosuriwyo pada 20 Desember 1948 melalui MKT (Maklumat Komandemen Tertinggi) atas nama umat Islam bangsa Indonesia menyatakan negara dalam situasi perang dan diberlakukan hukum Islam di dalamnya. Hal tersebut juga didasari bahwa saat itu telah tertangkap para tokoh nasional sehingga menandai jatuhnya RI oleh Belanda, sehingga revolusi nasional yang sebelumnya diteriakkan oleh Soekarno menjadi revolusi Islam di bawah bendera Tentara Islam Indonesia (TII) yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Lalu kemudian sekitar 9 bulan setelah pernyataan perang suci, proklamasi NII akhirnya disampaikan tepatnya pada 7 Agustus 1949 di Gunung Cupu Tasikmalaya Jawa Bara oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo sebagai Imam Negara Islam Indonesia.

TII sendiri merupakan peleburan atas faksi-faksi militer saat itu yaitu Dewan Mobilisasi Ummat Islam (DEMUI), Pahlawan Darul Islam (PADI), dan Pasukan Elang (Awwas, I.S. 2007: 117-125). TII juga menggunakan doktrin Islam sebagai dasar motivasi revolusi secara militeristik, sebagaimana dijelaskan dalam MKT No.10, Lampiran No.5, PPT.I bahwa TII memiliki empat kedudukan: Tentara Allah, Tentara Ideologi, Tentara Islam, dan Tentara Rakyat (Awwas, I.S. 2007: 127-134). Formasi Negara Islam Indonesia inilah yang diterima Daud Beureueh untuk mengakomodasi kesadaran kolektif-historis Aceh yang tidak diterima Jakarta yang juga terjadi pada tahun 1949.

Namun demikian, catatan sejarah menunjukkan bahwa pada awal deklarasi gerakan 1953 Daud Beureueh menyatakan diri adalah bagian atau bergabung dengan gerakan Darul Islam yang sudah sejak awal dipimpin Sekarmadji Kartosuwiryo, namun pada akhirnya pada 1955 melalui Piagam Batee Kureng di Aceh Besar, Aceh adalah negara sendiri di dalam Negara Islam Indonesia. Lebih jelasnya, Aceh pada periode tersebut mempunyai struktur pemerintahan sendiri (Awwas, I.S. 2007: 300), seperti kepala negara tetap dipegang Daud Beureueh, Perdana Menteri adalah Hasan Aly, Husin Jusuf sebagai Menteri Pertahanan, T.N. Amin sebagai Menteri Urusan Ekonomi dan Kesejahteraan, Zainal Abidin Muhammad Tiro sebagai Menteri Kehakiman, Menteri Pendidikan oleh M.Ali Kasim, dan Abdul Gani Mutiara sebagai Menteri Penerangan. Namun untuk urusan luar negeri mereka menyerahkannya kepada Negara Islam Indonesia.

Di titik ini kita bisa menarik kata simpul bahwa *self-government* sudah dilakukan dalam masa Indonesia membentuk diri. Sebuah gagasan yang tersembunyi dari analisa sejarah sebagai kausalitas gagasan post-konflik era post-Soeharto. Apalagi *self-government* era Beureueh adalah berada dalam koridor Negara Islam Indonesia, bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsepsi *self-governement* inilah yang juga menjadi semangat eksistensi Partai Aceh saat ini. Di sisi lain negara Aceh yang berada di dalam lapis ketiga—setelah NII dan NKRI—ini menjelaskan bahwa Aceh sebagai cleavage yang memang selalu mempunyai pertentangan dengan formasi manapun yang berusaha melakukan dominasi atas basis identitas yang menjadi kesadaran kolektif

sebagai komunitas sosial yang berbeda. Hal ini memberi penegasan bagi Aceh sebagai *local cleavage* yang selalu *inproper* dengan hadinya 'pusat' dalam formasi negara apapun itu baik sekuler maupun agama (Islam).

Dari kemelut panjang antara Negara Islam Aceh di bawah Daud Beureueh dengan Republik Indonesia di bawah Soekarno, pemberontakan di Aceh akhirnya surut setelah Perdana Menteri mengeluarkan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.1/Missi/1959 yang menyatakan bahwa sejak tanggal 26 Mei 1959 Provinsi Aceh dapat menamakan dirinya sebagai Daerah Istimewa Aceh. Sekalipun Daud Beureueh berkeras kepala tanpa kompromi, melalui Peraturan Presiden No.23/1961 memberi pertanda bahwa "...akhir yang sesungguhnya dari pemberontakan-pemberontakan termasuk pemberontakan Darul Islam di Aceh..." (van Dijk: 1983: 317-320). Semakin jelas bahwa akhir dari gerakan Daud Beureueh ditandai dengan adanya Ikrar Blangpadang pada 22 Desember 1962, yang ditandatangani oleh tujuh ratus orang terkemuka di Aceh. Momentum Desember 1962 menjadi momentum bagi Aceh sebagai *Dar al harb* (daerah perang) menjadi *Dar al salam* (daerah damai) (van Dijk: 1983: 320).

Kesimpulan

Aceh era kesultanan telah membentuk identitas kolektif masyarakat Aceh secara sosial, budaya, dan politik sebagai sebuah cleavage dalam relasi pusat-daerah. Di sisi lain Aceh telah mewariskan dua hal penting bagi gerakan perlawanan di Aceh setelah hadirnya republik pada 1945. Hal pertama adalah Aceh sebagai sebuah kesatuan identitas politik (Rheid,A. 2005;

Lombard 1991; Alfian, T., D. . 1999; Jakobi 1998) yang akhirnya ditafsir secara berbeda oleh dua *warlord* dalam konteks waktu yang juga berbeda. Aceh sebagai kesatuan identitas kultural masyarakat Islam menjadi sebuah *core motivation* bagi gerakan Daud Beureueh yang membangun basis gerakan Darul Islam di Aceh sebagai sebuah perjuangan syariaiah. Sedangkan Aceh sebagai sebuah kesatuan identitas kebangsaan—pluralitas masyarakat, kultur yang melekat, dan batas wilayah yang jelas—diterjemahkan oleh Hasan Tiro sehingga melahirkan gerakan *seccession* atas Indonesia sebagai satu komunitas politik melalui Gerakan Aceh Merdeka.

Artinya, sekalipun mempunyai tafsir kesadaran historis berbeda antara Darul Islam dan GAM, kedua *warlord* tersebut telah menciptakan Aceh sebagai *local cleavage* dalam garis konflik puser-daerah ala Lipset dan Rokkan (1967). Sehingga di titiklah kita tidak bisa mengatakan bahwa GAM di bawah Hasan Tiro merupakan kontinuitas gerakan dari Darul Islam di bawah Daud Beureueh. Berdasarkan perspektif genealogis imajinasi kebangsaan ini maka GAM adalah satu entitas gerakan yang sama sekali berbeda dari Darul Islam Aceh.

Hal kedua adalah terletak pada strategi kerja era kesultanan Aceh yang mencirikan dua hal penting dalam sejarah kerajaan Aceh: pertama adalah strategi kerja diplomasi yang dilakukan oleh Sidi Muhammad dan Abd Ar Rahamn sampai di daratan Eropa dan Amerika (Lombard, D. 1991; Rheid, A. 1969; Said, M. 1961); kedua adalah fakta adanya perang sabil atau perang suni melawan kolonialisme Belanda selama hampir 40 tahun sejak 1773. Untuk hal yang pertama, adanya strategi

diplomasi yang cukup intens oleh GAM maka pada dasarnya era kesultanan secara tidak sadar mempengaruhi karakter gerakan Hasan Tiro. Sedangkan untuk hal kedua, perang sabil menjadi sebuah karakter gerakan yang melekat dalam gerakan Darul Islam di bawah Daud Beureueh. Artinya, strategi kerja yang dilakukan oleh kesultanan Aceh untuk berperang melawan Belanda dikonversi oleh Daud Beureueh melalui perang sabil melawan otoritas Jakarta.

Namun Darul Islam yang di pimpin Daud Beureueh di Aceh pada akhir berusaha melepaskan diri sebagai sebuah kawasan otonomi dalam kerangka kebangsaan Negara Islam Indonesia di bawah Kartosuwiryo. Karena pada akhirnya pada 1955 melalui Piagam Batee Kureng di Aceh Besar, Aceh adalah negara sendiri di dalam Negara Islam Indonesia. Fakta sejarah ini mengkonfirmasi gagasan terkait *self-government* yang muncul dan diimplementasikan untuk menyudahi konflik GAM-Pemerintah RI. Artinya, secara tidak sadar, pada dasarnya kerangka pikir *self-government* yang hampir mirip dengan konsepsi negara federang telah dilakukan oleh Darul Islam Aceh era Negara Islam Indonesia dan kemudian diulangi lagi oleh GAM era demokratisasi politik di Indonesia.

GAM: KRISTALISASI *LOCAL CLEAVAGE*

Tidak berselang lebih dari satu dekade setelah Aceh damai¹⁷, sebuah gerakan perlawanan terhadap Pemerintah RI muncul dengan adanya deklarasi kemerdekaan pada tanggal 4 Desember 1976 di bukit Chokan, Aceh Pidie¹⁸. Adalah Teungku Muhammad

¹⁷ Pramodya Ananta Toer mengatakan bahwa kenapa terjadi gerakan separatisme dimanmana adalah karena Indonesia yang maritim dan kepulauan telah dikelola oleh Angkatan Darat sehingga terjadi sentralisasi penguasaan sumberdaya ke Jakarta dan ekspansi eksploitasi ke luar Jawa untuk dibawa ke Jawa. Pidato Pramodya Ananta Toer pada peluncuran ulang Media Kerja Budaya, 14 Juli 1999 di Aula Perpustakaan Nasional.

¹⁸ Nazarrudin dalam Moch. Nurhasim (2008: 5) menyebutkan bahwa proklamasi tersebut diucapkan secara lisan oleh Hasan Tiro. Sedangkan tanggal 4 Desember 1976 dipilih terkait dengan makna simbolis dari sejarah keluarga karena pada 3 Desember 1911 sepupu ibunya Tgk. Maat Tiro meninggal di bawah senapan Belanda di Hutan Tangse. Dan menurut Hasan Tiro, Tgk. Maat adalah penguasa Kesultanan Aceh yang terakhir, sehingga jasanya perlu dikenang. Sedangkan terkait dengan ketepatan tanggal proklamasi GAM, Neta S.Pane (2001: 25-26) menyatakan bahwa pada tanggal 20 Mei 1977 diadakan rapat akbar di kaki Gunung Halimun di Kabupaten Aceh Pidie yang dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pimpinan militer eks-Darul Islam, tokoh-tokoh Republik Islam Aceh, dan pejabat pemerintah yang asli putra Aceh. Akhirnya pada tanggal 20 Mei 1977 tersebut dinyatakan sebagai hari proklamasi dan kelahiran Gerakan Aceh Merdeka, dan empat hari setelah itu (24 Mei 1977) para tokoh sepakat untuk membentuk kabinet pemerintahan GAM. Lebih lanjut Neta S.Pane (2001: 48-49) menjelaskan bahwa tanggal 4 Desember 1976 yang diklaim oleh Hasan Tiro sebagaimana dalam catatan hariannya ditentang oleh para tokoh pendiri GAM yang merasa sudah ikut memproklamasikan GAM pada 24 Mei 1977 di kaki Gunung Halimun yang saat itu juga tidak dihadiri oleh Hasan Tiro. Namun, yang kita rujuk dari penuturan sejarah yang berbeda ini adalah tanggal 4 Desember 1976 sebagai tanggal proklamasi karena GAM dalam tahapan selanjutnya adalah berada dalam determinasi Hasan Tiro, bukan para tokoh eks-Darul Islam era Daud Beureueh.

Hasan di Tiro, seorang proklamator yang berdiri di bukit dan pada tanggal tersebut, yang menandai lahirnya sebuah gerakan kemerdekaan Aceh dengan nama *Aceh-Sumatra National Liberation Front* (ASNLF) yang kemudian disebut dengan *Aceh Freedom Movement* atau Gerakan Aceh Merdeka (GAM)¹⁹. Walaupun secara organisasional dan motif gerakan adalah satu hal yang berbeda dan baru, munculnya GAM menegaskan kembali identifikasi Aceh sebagai *local cleavage* sebagai sebuah sekuen dari garis konflik pusat-daerah yang sebelumnya pernah terjadi. Sehingga hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi alasan dan motif gerakan untuk menemukan basis identitas Aceh pada tahapan selanjutnya sebagai *cleavage* yang berkehendak 'melawan' dengan kesadaran kolektifnya yang baru dan berbeda dengan kesadaran agama pada periode sebelumnya.

Meramu Alasan Dasar Gerakan

Walaupun dalam setiap gerakan *insurgency* seorang tokoh pimpinan (inisiator) menjadi determinasi yang tidak terhindarkan atas gerakan tersebut, penelusuran atas fakta dan bukti-bukti motif Gerakan Aceh Merdeka sangat penting jika kita melihatnya sebagai sebuah perbenturan kekuasaan dalam struktur genealogi Partai Aceh. Sehingga menjadi penting di sini

¹⁹ Pada awalnya GAM mendeklarasikan diri dengan nama National Liberation Front of Aceh-Sumatra atau NLFAS sebagaimana terlihat dalam naskah proklamasi 4 Desember 1976 dan narasi catatan harian Hasan Tiro berjudul *The Price of Freedom* (1984). Sedangkan terkait kata 'Sumatra' menurut Dr. Husain Hasan (dalam Moch. Nurhasim 2008:70) melalui Radio Nikoya-FM Banda Aceh menyatakan bahwa "...ASNLF singkatan dari *Aceh Sumatra National Liberation* yaitu nama GAM dalam bahasa Inggris yang kami gunakan untuk hubungan dengan dunia internasional...perkataan Sumatra (dalam ASNLF) untuk lebih mudah mempresentasikan letak Aceh secara geografis."

untuk melakukan problematisasi atas arsip atau dokumen dan hasil studi terkait motif deklarasi 4 Desember 1976. Secara eksplisit GAM mendeklarasikan tujuan atas gerakannya sebagaimana pernyataan berikut:

*"The supreme aim of the Aceh Sumatra National Liberation Front is the survival of the people of Aceh Sumatra as a nation; the survival of their political, social, cultural, and religious heritage which are being destroyed by the Javanese colonialists; the continued existence of their national homeland which is being confiscated and divided among Javanese colonialists settlers called "transmigrants"; the preservation of their economic and natural resources which are being plundered by the Javanese colonialists and their foreign backers under the guise of "developments" (asnlf.net 2011).*²⁰

Pernyataan tersebut memberi ruang tafsir atas motif kemunculan GAM. Dasar yang paling kuat adalah bahwa Aceh merupakan sebuah kesatuan politik tersendiri, dan perjuangan GAM adalah perjuangan kebangsaan—bukan perjuangan syariah atau agama Islam—karena kultur dan struktur Islam bagi GAM sudah melekat dalam tatanan bangsa Aceh. Tafsir kedua adalah bahwa GAM mengambil oposisi biner antara Aceh dan Jawa. Sehingga hal ini membimbing kita pada faktor sentimen etno-nasionalisme yang dalam kerangka

²⁰ Pernyataan ini menjadi paragraf pertama dalam arsip berjudul *"The Aims of The ASNLF"*, untuk propaganda internasional GAM menggunakan nama Aceh-Sumatra National Liberation Front atau ASNLF. Dokumen tersebut terlampir dalam situs GAM.

teoritik adalah penegasan Aceh sebagai *local cleavage*. Artinya ruang relasi konflik yang terbangun dalam garis konflik pusat-daerah adalah ketidakterimaan lokal terhadap dominasi (politik, budaya, sosial) atas apa yang di sebut pusat yang dalam bahasa GAM disebut kolonialis Jawa. Lebih lanjut, sentimen tersebut didasari pada fakta ketimpangan pembangunan antara Jakarta (Jawa) dan Aceh implisit di dalamnya adalah penguasaan sumber daya alam.

Sehingga terkait dengan motif dan latar kelahiran Gerakan Aceh Merdeka, setidaknya terdapat 3 kerangka dasar yang menjadi alasan kemunculan dan *sustainable existence factors* dari GAM. Tiga hal ini pulalah yang akan membimbing kita untuk selanjutnya mengidentifikasi karakter gerakan, transformasi, dan praktik organisasi dalam kerangka kerja kepartaian. Tiga hal tersebut, pertama adalah logika *warlordism*²¹ atau determinasi elit, kedua adalah GAM sebagai sebuah sekuen gerakan politik identitas, dan ketiga adalah melalui narasi isu *social justice*.

Hasan Tiro, Seorang *Warlord*

Dalam logika *warlord*, maka Hasan Tiro adalah aktor—perspektif *warlord* adalah perspektif aktor—yang akan kita kupas lebih dalam sebagai sebuah alasan eksistensi GAM. Karena *warlord* dalam konteks ini bukan

²¹ Terminologi *warlord*—meminjam istilah Clapham (1998; 2007) ketika membagi gerakan separatis dalam empat bentuk: *liberation movement, separatist insurgencies, reform movements, dan warlord insurgencies* (dalam Sindre, G.M. 2010: 218)—lebih tepat untuk menunjukkan adanya determinasi elit dalam struktur komando gerakan sekaligus juga sebagai inisator gerakan. Karena pada saat yang sama dia lebih merujuk pada personalitas aktor daripada oligarkhi elit gerakan, sehingga motif kemunculan GAM mempunyai relevansi atas hal ini.

bermakna harfiah sebagai sebuah struktur komando tertinggi dalam pertempuran. Lebih jauh, dia mempunyai makna simbolik—aktor sentral—yang membimbing gerakan, simbolisme ini adalah konsekuensi dirinya sebagai seorang inisiator tunggal sebuah gerakan. Artinya, *warlord* dalam logika ini mempunyai determinasi kuat dalam arah dan karakter gerakan selanjutnya. Secara teknis, kata dan pernyataan seorang *warlord* diterjemahkan menjadi sebuah keputusan yang secara sadar harus diamini oleh anggota (pasukan).

Oleh karena itu sebelum jauh bercerita dan mengidentifikasi terkait gerakan ini, maka menuturkan tokoh sentral dari gerakan tersebut akan menghindarkan kita dari *ahistoric-explanation*. Karena pertanyaan dasar yang menggiring kita pada *warlord*-isme sebagai sebuah alasan berdirinya GAM adalah apakah mungkin ada gerakan pemberontakan (separatisme) di Aceh terhadap Jakarta jika tidak ada Hasan Tiro?

Hasan Muhammad Tiro—lahir pada 25 September 1925 di Pidie Aceh—adalah seorang putra dari pasangan Tengku Pocut Fatimah dan Tengku Muhammad Hasan, yang juga merupakan cucu dari Tengku Cik di Tiro. Sebagaimana penjelasan Cornelis van Dijk (1983) pada bab sebelumnya, bahwa kata Teungku (Tgk.) menunjukkan gelar (atau keturunan) ulama di Aceh, berbeda dengan kata Teuku (T.) yang menunjukkan gelar bangsawan (van Dijk, C. 1983)²².

²² Pelacakan terhadap penamaan gelar ini akan bermuara pada kesultanan Iskandar Muda yang juga menginisiasi adanya struktur *ulee balang*—kepala daerah otonom pada masa kesultanan—yang kemudian mengkristal menjadi kelas bangsawana Aceh dengan gelar Teuku.

Sehingga Hasan Tiro pada dasarnya disimbolisasi lebih sebagai seorang ulama—sekalipun pemikiran-pemikirannya tidak menunjukkan Islam sebagai dasar preferensi tunggal—dari pada sebagai seorang bangsawan. Sedangkan kata ‘Tiro’ sendiri dalam tradisi penamaan di Aceh menunjukkan asal kelahirannya, yaitu di daerah (kecamatan)Tiro, Pidie. Dua identifikasi nama inilah yang secara logis menghubungkan dirinya dengan semangat perlawanan kakeknya Tgk Chik Muhammad Saman di Tiro (Teungku Chik di Tiro)—kakek dari ibunya Tgk. Pocut Fatimah—terhadap kolonial (Belanda)²³, yang pada masa hadirnya Indonesia dikonversi menjadi perlawanan terhadap kolonial Jawa.

Dalam catatan van Dijk (1983:302) selanjutnya menyatakan bahwa Hasan Tiro merupakan salah seorang murid Daud Beureueh di Madrasah Blang Paseh di Sigli²⁴. Sedangkan pada masa pendudukan Jepang dia belajar di Perguruan Normal Islam. Sesudah proklamasi kemerdekaan ia berangkat ke Jogjakarta untuk mengambil Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Lalu kembali sebentar untuk bekerja pada Pemerintahan Darurat Sjafruddin Prawiranegara. Kemudian setelah kembali lagi ke Jogjakarta, Hasan Tiro adalah salah seorang dari dua mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) yang menerima beasiswa studi ke Universitas Columbia pada 1950. Di Amerika Serikat Hasan Tiro kemudian bekerja pada Dinas Penerangan Delegasi Indonesia di PBB.

²³ Untuk lebih memahami jalur silsilah keluarga Tiro lihat dalam lampiran pada Gambar. Silsilah Keluarga Hasan Tiro.

²⁴ Pada awalnya struktur pendidikan—madrasah—Islam di Aceh diselenggarakan di *meusanah* yang ada di setiap struktur pemerintah di level *mukim*, dengan jumlah yang cukup banyak. Kemajuan di bidang pendidikan (Islam) di Aceh inilah—selain pusat

Riwayat pendidikan (umum) inilah yang barang kali membedakannya dengan Daud Beureueh—yang hanya mengenyam pendidikan *dayah*—yang cenderung mendasarkan Islam sebagai alasan (penegakan syariah), motif (desentralisasi asimetris), dan karakter gerakannya (perang sabil/suci). Sementara Hasan Tiro—sebagaimana terlihat dalam beberapa tulisannya²⁵—lebih mendasarkan pada alasan-alasan historis dan *sosial justice* sebagai motif gerakan, dan diplomasi dalam karakter gerakannya.

Dalam catatan Cornelis van Dijk (1983: 301) ketika merekam Darul Islam, Hasan Muhammad Tiro adalah orang yang paling aktif dalam mendapat dukungan luar negeri untuk Negara Islam Indonesia. Lalu pada pertengahan 1954 Hasan Tiro mengklaim dirinya sebagai Menteri Berkuasa Penuh dan Duta Besar di PBB dan Amerika Serikat atas Republik Islam Indonesia (sebutannya untuk Negara Islam Indonesia). Dan pada akhirnya Hasan Tiro mengultimatum Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo²⁶ pada awal September 1954. Pemerintahan Ali dianggap melakukan pelanggaran HAM dan mengadukan ke PBB, bahkan pada tahun 1955 Hasan Tiro mengirim surat kepada dua belas negara

perdagangan, pelayaran, dan pemerintahan Islam—yang kemudian membuatnya disebut sebagai Serambi Mekah.

²⁵ Pemikiran dan preferensi politik Hasan Tiro tertuang dalam buku babonnya *Demokrasi untuk Indonesia*, dan terlihat juga dalam *release* gerakan dalam bahasa Inggris pada 4 Desember 1974 (sebagaimana terlampir dalam LAMPIRAN T.3.) yang berjudul *Declaration of Independence of Aceh-Sumatra*. Dan beberapa tulisannya ketika menempuh pendidikan di Universitas Columbia, Amerika Serikat seperti *Masa Depan Politik Dunia Melayu* atau catatan hariannya yang berjudul *The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Tengku Hasan Tiro*.

²⁶ Kabinet Ali Sastroamidjojo adalah kabinet yang di dalamnya tidak terdapat elemen satupun dari Masjumi (partai dan konfederasi kelompok Islam) dan mendapat dukungan penuh dari Partai Komunis Indonesia (PKI) di DPR waktu itu.

Islam anggota Konverensi Asia-Afrika—yang akan diadakan di Bandung—agar diboikot. (Cornelis van Dijk, 1983: 301-303).

Riwayat pendidikan dan peran sentral dirinya di ranah diplomasi—propaganda internasional—ketika era Daud Beureueh itulah yang memungkinkan dirinya sebagai inisiator gerakan. Dari dua ranah ini—latar pendidikan dan (*international*) *political experiences*—akhirnya memungkinkan dirinya mempunyai kewibawaan tradisional yang dulu juga pernah dimiliki oleh Kartosuwiryo ketika menggagas Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII)²⁷.

Bahkan Hasan Tiro secara sadar 'memproklamasikan' dirinya sebagai wali negara Aceh sehingga klaim tersebut memberi arti bahwa dia juga berhak membimbing gerakan yang dibangunnya untuk kemerdekaan Aceh. Hal ini terlihat dari bukunya berjudul *Atjeh Bak Mata Donya* yang menceritakan bahwa dia adalah pewaris Wali Negara Aceh setelah kakeknya Tengku Maat di Tiro. Leluhurnya Tengku Cik Di Tiro M.Saman memperoleh gelar pemimpin perlawanan tahun 1885-1891 oleh Sultan Muhammad Daud Syah yang menurut Hasan Tiro berimplikasi pada beralihnya kekuasaan negara Aceh kepada keturunannya (Pane, N.S 2001: 221).

²⁷ Kewibawaan tradisional sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Karl Jackson (1989: 201-201 dalam Arya Budi 2011: 6)—ketika mengkonseptualisasikan peran Kartosuwiryo dalam Darul Islam—adalah penggunaan kekuasaan personalistik yang dihimpun melalui peranan masa lampau dan masa kini dari yang mempengaruhi sebagai penyedia, pelindung, pendidik, sumber nilai-nilai dan status unggul dari mereka yang mempunyai hubungan ketergantungan yang mapan dengannya.

Masih dalam buku yang sama, Hasan Tiro menuliskan bahwa bangsa Indonesia-Jawa memperoleh daerah Aceh adalah karena ketololan pemimpin Aceh 1945. Pernyataan Hasan Tiro dalam buku tersebut menurut Neta S. Pane (2001) adalah lebih pada kekecewaan dan sentimen pribadi. Karena perusahaan Doral²⁸ miliknya gagal mendapatkan proyek Pertamina. Setelah tugas belajarnya di Amerika Serikat, Hasan Tiro sangat berambisi untuk menggantikan Bechtel Inc sebagai kontraktor pertamina²⁹. Kekecewaan tersebut kemudian *bersambut gayung* dengan kekecewaan sejumlah tokoh Aceh lain terkait dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat sangat timpang di Aceh.

Walaupun demikian, Daud Beureueh mempunyai peran penting dalam mendukung (dan merealisasikan) gagasan Hasan Tiro agar Aceh Merdeka (Pane, N.S 2001: 39-45).

“...dalam pertemuan di tahun 1975, para tokoh eks DI/TII sepakat untuk melanjutkan gagasan Republik Islam Aceh yang mendapat dukungan penuh Tengku Muhammad Daud Beureueh... terbukti pada 24 Mei 1977 para tokoh eks DI/TII ditambah tokoh muda lainnya memproklamasikan gerakan perlawanan dengan

²⁸ Hasan Tiro adalah pebisnis sukses yang mendirikan Doral Internasional Ltd. Di New York, yang bekerja di bidang investasi perbankan, minyak bumi, gas alam, perkapakan, dan industri penerbangan. Lihat dalam biografi Hasan Tiro yang diterbitkan dalam www.asnlf.net dengan judul TENGKU HASAN M. DI TIRO, BA, MA, PhD., LL.D : HEAD OF STATE OF ACHEH-SUMATRA. Diunduh pada tanggal 25 April 2011 pukul 22.06.

²⁹ Terkait dengan hal ini, Neta S.Pane menuliskan bahwa Hasan Tiro sempat menyampaikan perihal perusahaannya tersebut kepada Gubernur Aceh saat itu Muzakkir Walad pada September 1976. Lihat lebih lanjut dalam Neta S.Pane 293-295.

nama Gerakan Aceh Merdeka...dari pertemuan empat hari empat malam setelah proklamasi di kaki Gunung Halimun akhirnya disepakati pembentukan struktur pemerintahan Aceh dengan Pemimpin Tertinggi yang disebut Mufti Empat adalah Daud Beureuh...dan wali negara dipercayakan kepada Hasan Tiro. Daud Beureuh berhasil meyakinkan rekan-rekannya bahwa Hasan Tiro yang sedang berada di Amerika Serikat adalah tokoh muda Aceh yang potensial" (Pane, N.S 2001: 30-55).³⁰

Terlepas dari perbenturan motifasi gerakan dan gagasan perlawanan terhadap Pemerintah Pusat RI, fakta ini menunjukkan bahwa Daud Beureuh menjadi aktor penting dalam memposisikan Hasan Tiro sebagai aktor sentral gerakan dikemudian hari. Sehingga setidaknya terdapat empat poin pokok yang memungkinkan Hasan Tiro 'menciptakan' *insurgency movement* dan sebagai *warlord* di dalamnya:

1. Pengalaman pendidikan yang merekognisi identitas kulturalnya sebagai bangsa Aceh warisan kesultanan Aceh.
2. Kapasitas dirinya sebagai seorang diplomat yang mampu berjejaring secara internasional.
3. Tafsir atas alur genealogi dirinya sebagai pewaris dari nenek moyangnya sehingga wali nanggroe bagi Aceh adalah dirinya sendiri

³⁰ Pane lebih mengisahkan fakta-fakta pertautan antaraktor GAM dalam bentuk narasi jurnalistik, sehingga membimbing kita untuk mengatakan bahwa pada periode awal GAM bukanlah hal yang tunggal bahkan di akhir pemberlakuan DOM.

4. Struktur peluang politik yang diciptakan oleh aktor-aktor ex-DI/TII sehingga menambah modal politik bagi gerakannya.

Singkat kata, dari elaborasi ini adalah bahwa selain faktor personalitas Hasan Tiro, terdapat *political opportunity structur* yang dibangun oleh aktor-aktor eks-Darul Islam di bawah Daud Beureueh³¹. Sehingga struktur peluang politik inilah yang juga memungkinkan GAM—secara redaksional—hadir dan memposisikan Hasan Tiro sebagai orang (paling) penting di dalamnya. Karena Hasan Tiro dipengaruhi oleh *self-determination* yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain seperti Kuba, Iran, Afganistan. Dia juga dipengaruhi oleh buku-buku bernafas Kantian (Nietzsche). Sehingga letak kelahiran GAM bukan pada pengaruh Islam atau *collective will* masyarakat Aceh, melainkan determinisme Hasan Tiro sebagai stimulator dan interpreter atas relasi sejarah dan fakta subordinasi Jakarta.

³¹ Walaupun ada fakta bahwa beberapa elemen dari eks-Darul Islam memilih tidak mendukung gerakan Hasan Tiro yang ditunjukkan oleh Hasan Saleh—panglima Tentara Islam Indonesia di Aceh yang juga menjadi tangan kanan Daud Beureueh—dalam buku kesaksiannya “Mengapa Aceh Bergolak” yang bercerita dari masa pergolakan Darul Islam di Aceh sampai munculnya GAM oleh Hasan Tiro. “Sesekali saya pergi ke Banda Aceh untuk bermusyawarah dengan teman-teman tentang cara terbaik menghambur gerakan Hasan Tiro yang dibantu Tgk. Daud Beureueh ini. Sayang hanya sedikit yang sepaham dengan saya. Banyak diantaranya yang menentang pikiran saya dengan cara halus, walaupun dulu kami sama-sama anggota Dewan Revolusi.” (Hasan Saleh, 1992:379). Hasan Saleh pada era 1970-an sampai 1980-an lebih memilih tinggal di Jawa dan aktif di Golkar.

Aceh Bukan Bagian dari Hindia Belanda

Sedangkan jika kita melihat perspektif politik identitas sebagai alasan munculnya GAM, maka pertanyaan yang perlu kita ajukan adalah apakah GAM pimpinan Hasan Tiro merupakan sekuen atas perjuangan Republik Islam Aceh pimpinan Daud Beureueh atau hal yang sama sekali berbeda? Terkait dengan hal ini, rujukan yang paling valid untuk mengidentifikasinya adalah melalui tulisan Hasan Tiro dalam naskah deklarasi bernama *Declaration of Independen of Aceh-Sumatra*. Salah satu kutipan paragraf dalam deklarasi tersebut adalah

“Kami bangsa Acheh Sumatra, telah melaksanakan hak-hak kami untuk menentukan nasib sendiri, dan melaksanakan tugas kami untuk melindungi hak suci kami atas tanah pusaka peninggalan nenek moyang, dengan ini menyatakan diri kami dan negeri kami bebas dan merdeka dari penguasaan dan penjajahan regime asing Jawa di Jakarta...

...Perjuangan kemerdekaan kami penuh keadilan, kami tidak menghendaki tanah bangsa lain, bangsa Jawa datang merampas tanah kami, (paragraf akhir)”

Sehingga jika kita melihat deklarasi tersebut—dengan memahami bahwa Hasan Tiro sebagai *warlord* yang membimbing gerakan ini—maka konklusi yang paling jelas adalah bahwa GAM muncul lebih karena sentimen etnis atau ethno-nationalism dari pada perjuangan Islam sebagai entitas yang melekat dalam masyarakat Aceh.

Simpulan tersebut juga didasari atas beberapa tulisan Hasan Tiro yang merefleksikan superioritas Aceh dan menerjemahkan Aceh yang berada dalam bingkai NKRI sebagai bentuk superioritas Pemerintah RI (Jawa). Artikel Hasan Tiro berjudul *The Legal Status of Aceh Sumatera under International Law* yang terbit pada November 1980, menilai bahwa penyerahan kedaulatan Aceh dari Belanda kepada Indonesia pada tahun 1949 sebagai sesuatu perbuatan yang ilegal. Dasarnya adalah dalam resolusi PBB bahwa negara kolonialis wajib menyerahkan daerah jajahan kepada penduduk asli, sedangkan Indonesia baginya bukan penduduk asli Aceh (Pane, N.S 2001 : 70-71, Tiro, H. 1980)).³² Dalam tulisannya yang lain berbentuk buku dengan judul *The Drama of Achehnese History 1873-1978* yang ditulis pada 1978, berisi tentang penderitaan rakyat Aceh dan pengalamannya selama berada di tanah Aceh.

Sedangkan pemikiran Hasan Tiro yang lain ada dalam *Demokrasi untuk Indonesia*³³ yang salah satunya berisi penolakan terhadap Pancasila sebagai sebuah filsafat yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan menyatakan bahwa Islam yang justru menjadi filsafat dan ideologi negara. Tulisan yang terbit era pergolakan Darul Islam itulah yang barang kali juga membawa semangat kelslaman untuk melawan Jakarta, namun tidak menjadi penekanan dan alasan utama perlawanan. Karena pada fase selanjutnya Hasan Tiro tidak pernah mendasarkan

³² Hasan Tiro tidak hanya mendasarkan pada Resolusi PPB 2625 XXV, namun juga 'kitab-kitab' status Aceh dari Prancis dan Belanda sejak abad ke-19 termasuk terbitan-terbitan *New York Times* saat itu.

³³ Poin pokok atas buku ini adalah bahwa Hasan Tiro tidak sepakat dengan ketatanegaraan Indonesia yang unitaris karena menimbulkan dominasi suku, sehingga dia lebih memilih (dan mengusulkan) bentuk negara federal.

diri pada perjuangan penegakan syariah Islam dibalik Gerakan Aceh Merdeka yang dipimpinnya. Sehingga hal ini pula yang menjadi pembeda besar antara GAM dengan Darul Islam pimpinan Daud Beureueh, yang menjadi alasan bahwa Partai Aceh merupakan sekuen dari GAM, bukan DI/TII. Di akhir buku tersebut Hasan Tiro menyatakan bahwa bagian-bagian dari Indonesia akan memisahkan diri dengan sendirinya jika tidak menerapkan federalisme, karena inti buku tersebut akan konsep federalisme yang harus diterapkan di Indonesia, bukan kesatuan.

Aceh dibayangkan sebagai sebuah kesatuan entitas politik tersendiri yang tidak mempunyai kaitan apapun dengan Indonesia—pemerintahan yang selalu dipegang oleh orang Jawa—sehingga munculnya Indonesia adalah kolonialisasi tersendiri bagi Aceh. Petinggi GAM lebih membayangkan Aceh sebagai bangsa dengan kedaulatan masa kesultanan:

“...GAM meminta Kerajaan Inggris mengembalikan Aceh sesuai dengan perjanjian tahun 1630, antara Raja Aceh dengan wakil Kerajaan Inggris James Lancaster...” (Pane, N.S 2001: 134).”

Bahkan Muzakir Manaf—mantan panglima dan juru bicara GAM setelah Abdullah Syafei—menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan syariah, karena Islam sudah menyatu dengan keAcehan rakyat Nanggroe Aceh Darussalam sehingga tidak perlu formalisasi hukum

agama¹⁸. Jauh sebelumnya dalam sebuah risalah berjudul *Masa Depan Politik Dunia Melayu* (1965) Hasan Tiro menyatakan bahwa:

“...yang kita persaksikan sekarang di kampung halaman kita adalah suatu yang kekal Indonesia-Jawa...dan Undang Undang Dasar hanyalah apa yang disebut oleh fuhrer-fuhrer Jawa belaka”,
(Isa Sulaiman dalam Nurhasim 2008:69).

Hal ini menjadi jelas bahwa munculnya GAM lebih didasarkan pada identitas nasionalnya sebagai bangsa Aceh, bukan berada pada logika umat sebagaimana yang menjadi ruh gerakan Daud Beureueh. Sedangkan kesadaran nasionalisme etnis ini lebih banyak merujuk pada kesadaran historis ketika kesultanan Aceh—khususnya di bawah Sultan Iskandar Muda—yang merangkul segenap entitas rakyat Aceh³⁵. Karena secara faktual, masyarakat Aceh bukanlah hal yang tunggal sebagai sebuah suku bangsa, walaupun suku Aceh adalah yang terbanyak dibandingkan dengan suku-suku lainnya³⁶. Hal tersebut juga ditegaskan dalam bukunya *Aceh di Mata Dunia* (1968) yang mengatakan bahwa bangsa Aceh adalah bangsa yang daulat, merdeka, dan bebas dari penjajahan sepanjang abad yang telah didokumentasikan dalam literatur-literatur dunia.

³⁴ Hal ini disampaikan ketika perundingan damai antara GAM dan pemerintah Indonesia di Helsinki (Wijaya, A. 2010, komunikasi pribadi, 8 Februari). Agung Wijaya adalah aktivis DEMOS yang melakukan pendampingan GAM sampai ke Stockholm Swedia bersama Hasan Tiro dan petinggi GAM lainnya.

³⁵ Peta kekuasaan kesultanan Aceh tidak banyak berubah jika dibandingkan dengan perantara administratif propinsi Aceh saat ini (Lihat Peta daerah Kesultanan Aceh Gambar 2.1, seperti pada bab sebelumnya).

³⁶ Suku Aceh adalah 2/3 mendominasi Daerah Istimewa Aceh yang ada di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, dan sebagian di Aceh Selatan dan Aceh Barat. Sedangkan suku Tambang berada di Kabupaten Aceh Timur, suku

Kristalisasi identitas nasionalisme etnis ini di dasarkan pada tiga hal penting dalam sejarah Aceh sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, yaitu proses Islamisasi, zaman kejayaan Sultan Iskandar Muda, dan perlawanan terhadap Belanda³⁷. Identitas kulutral dan imajinasi historis tersebut yang menjadi dasar atas perlawanan terhadap ‘imperialisme’ Jawa bagi GAM— yang diawali dari jiwa perlawanan Hasan Tiro.

Tetapi poin pokok atas elaborasi ini adalah bahwa Hasan Tiro merupakan aktor sentral yang menerjemahkan—membangun dan menggunakan— relasi historis orang Aceh sebagai sebuah *supreme nation* sebagai dasar sentimen terhadap Pemerintah RI, yang kemudian mereproduksi terminus ‘kolonial Jawa’ atau Negara Kolonial Republik Indonesia (NKRI)³⁸. Artinya, walaupun signifikansinya sebagai motif GAM berada setelah HasanTiro, politik identitas bukanlah sebuah kausalitas kolektif atas deklarasi GAM 1976, melainkan

Pulo ada di kabupaten Aceh Singkil, suku anak Jane ada di perbatasan antara Aceh Selatan dan Aceh Barat. Suku Gayo ada di kabupaten Aceh Tengah dan kabupaten Aceh Tenggara. Suku Alas ada di kabupaten Aceh Tengah (Tekengon). Suku Simeulut berada di daerah Aceh Selatan, suku Singgar menempati pulau-pulau kecil di sebelah Aceh Selatan. Sedangkan suku pendatang banyak terletak di daerah pantai utara di Kabupaten Aceh Timur (Langsa) yang didominasi oleh suku Jawa, Cina, Batak Toba dan Minang (Sihbudi, Riza (eds.) 2001: 49).

³⁷ Terkait dengan hal ini Taufik Abdullah (dalam Alfian, I. 1985: 12) menjelaskan bahwa untuk mengerti dinamika Aceh dan pembentukan kesadaran kultural masyarakatnya paling tidak memerlukan empat hal pemahaman: 1) proses Islamisasi, 2) zaman keemasan Sultan Iskandar Muda abad XVII, 3) perang melawan Belanda 1873-1912, dan 4) revolusi Nasional 1945-1949. Namun bagi penulis, untuk konteks politik identitas hadirnya Gerakan Aceh Merdeka lebih didasarkan pada tiga faktor pertama, sedangkan faktor terakhir adalah lebih didasarkan bahwa Indonesia (Jakarta) dan Aceh mempunyai musuh bersama yaitu Belanda.

³⁸ Peristilahan ini seterusnya digunakan oleh para pemimpin, anggota, dan milisi GAM untuk menunjuk Pemerintahan RI. Penggunaan istilah yang masif inilah yang menjadi ukuran kita bahwa Hasan Tiro berhasil menggunakan sentimen kebangsaan sebagai dasar kebencian untuk sustainabilitas gerakan.

sebagai sebuah instrumen yang digunakan—dimunculkan, disebar, dan dibangun—Hasan Tiro untuk membangun gerakan dan menciptakan dasar militansi perlawanan. Karena fakta bahwa sumber dan narasi-narasi motivasi gerakan adalah dimulai dari penana-pena Hasan Tiro yang bertebaran dan disebar.

Kesenjangan Sosial dari Fakta Eksploitasi

Jika Hasan Tiro sebagai aktor sentral dalam gerakan dan identitas politik Aceh menjadi pijakan dan instrumen selanjutnya, lantas fakta empirik apa yang membangun sentimen kolektif bagi personalia GAM terhadap 'kolonialisme' Jawa? Maka di titik inilah kita perlu mengambil perspektif *social disparity* sebagai sebuah motif munculnya GAM. Bahwa GAM muncul karena ketimpangan sosial (pusat-daerah) dapat kita lihat melalui fakta eksploitasi sumber daya alamnya, namun hadirnya GAM untuk mewujudkan keadilan sosial barang kali perlu kita lihat kembali setelah dia bertransformasi dalam iklim demokrasi.

Terkait dengan hal ini Edward Aspinall (2005: 4) menyatakan bahwa pembangunan lahan Arun di Pidie yang menjadi sumber gas alam terbesar di dunia adalah faktor penting munculnya GAM. Karena hasil penjualan gas diserap oleh pemerintah pusat sedangkan hanya sedikit masyarakat lokal yang dilibatkan dalam proses industri sementara komunitas lokal memperoleh dampak negatif atas pertambangan tersebut. Seputar dasawarsa tahun 1970 sampai 1980, turbulensi pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka cenderung meningkat karena ditandai dengan adanya eksplorasi minyak dan gas alam di Aceh (Aceh Utara) yang dilakukan oleh pemerintahan

orde baru (FES 2010: 10 ; Nursalim. M. 2008: 71). Menurut Harry Kawilarang (2008: 153) meningkatnya pendapatan dari hasil produksi minyak bumi dari bumi Aceh era 1970-an dan 1980-an dengan nilai 1,3 dolar US tidak memperbaiki kondisi rakyat Aceh.

Sehingga alasan-alasan terkait dengan kolonialisasi oleh Jawa yang banyak dilakukan GAM dalam membangun gerakannya dapat kita temukan sebagai sebuah kausalitas atas fakta eksploitasi. Bagi Hasan Tiro dan anggota GAM, gerakan kemerdekaan adalah sebuah jalan untuk melakukan pembebasan dari kolonialisasi yang dibalut dengan eksploitasi sumber daya alam (oleh Pemerintah RI/Jawa), sehingga ketimpangan sosial dapat diselesaikan karena rakyat Aceh akan menikmati hasil buminya.

Aceh Utara pada akhir 1960-an ditemukan sumber gas alam di kawasan pemukiman masyarakat Arun sehingga penemuan ini diteruskan dengan dibangunnya pusat-pusat investasi besar berupa PT Arun (1974), PT Pupun ASEAN, AAF (ASEAN Aceh Fertilizer 1981), PT Pupuk Iskandar Muda (PIM 1982), PT Kertas Kraft Aceh (KKA-1985), dan sebuah MNC bernama Mobil Oil (Sihbudi, R. (eds.) 2001:44). Lebih lanjut, *setting* dunia waktu itu adalah krisis energi sehingga proses eksplorasi sumber daya dipercepat sehingga empat tahun kemudian di Blang Lancang tertanam sebuah pabrik pencairang minyak terbesar di dunia (Patji 1998: 20 dalam Moch.Nursalim 2008: 72). Karena perkembangan kawasan industri di wilayah tersebut, kemudian wilayah industri tersebut dikonsepsi menjadi sebuah wilayah dengan nama ZILS (Zona Industri Lhokseumawe).

Namun banyak daerah-daerah tertinggal yang belum ada listriknya, dari peta yang dibuat Microsoft Encarta daerah-daerah tersebut adalah Mamplan, Jineb, dan Peuyangsembilan (daerah perbatasan Aceh Pidie dan Aceh Utara), Bireun, Kreunggeukuh, Hagum Kutamakmur-Lhokseumawe, Lhoksukon, Simpang Unlim, Idi, dan Langsa (Aceh Timur), dan Kuta Bare (Aceh Barat) (Sihbudi, R. (eds.) 2001: 48).

Produk mobil oil yang diekspor seperti minyak mentah, LNG, LPG propane, dan LPG butane mempunyai nilai ekspor kurang lebih US\$ 6 juta per hari, sementara APBD Aceh hanya sekitar Rp 700 milyar (1997) atau sebanding US\$ 1 juta (Sihbudi, R. (eds.) 2001: 49). Hal ini menjadi fakta konkret bahwa alasan 'kolonialisasi' Jawa bagi GAM adalah mendasarkan pada eksploitasi sumber daya alam, yang kemudian dibenturkan dengan jasa Aceh pada perlawanan terhadap Belanda dan kesadaran historis sebagai sebuah kawasan kesultanan yang tangguh dari bentuk imperialisme sejak Portugis sampai Belanda.

Jauh sebelum adanya eksplorasi pada rezim Soeharto, terutama untuk wilayah Kuala Simpang dan Lhokseumawe pada dasarnya telah dieksplorasi pada era Hindia Belanda sejak tahun 1908 dan tahun 1928. Bahkan sejak abad XIV sudah diketahui adanya sumur minyak tanah di Peureulak. Pada tahun 1807 Belanda pernah akan melakukan eksplorasi minyak melalui Holland Perlak Petroleum Maatschappy, tetapi baru dapat dipungut hasilnya pada tahun 1908 tersebut. Sedangkan pada 1928 juga ditemukan lagi tiga sumur minyak di Rantau (Kuala Simpang) dan Tjunda (Lhokseumawe). Eksplorasi minyak ini pada awalnya dilakukan oleh NKPM

(Nederland Koninklijk Petroleum Maatschappij) yang mempunyai kantor di Pangkalan Brandan Sumatra Utara. NKPM ini melakukan eksplorasi di Tamian dan Aceh Barat setelah tahun 1928 (Sulaiman, I. dalam Nursalim, M. 2008: 72).

Ketimpangan Pemerintah RI (rezim orde baru) dan daerah (Aceh) ini juga dapat kita rekam di akhir pemerintahan Soeharto. Data APBN 1998 menunjukkan pemasukan negara sektor migas mencapai Rp 49.711.4 milyar yang terdiri dari hasil minyak sebesar 32.908.4 milyar dan Rp 16.802.4 milyar dari gas alam. Menurut Departemen Pertambangan dan Energi, dari total produksi minyak 10 persen atau Rp 3.290.86 milyar diantaranya berasal dari Aceh dan gas alam 43 persen atau Rp 7.225.05 milyar. Akhirnya total dana yang kembali ke Aceh dari Pusat adalah Rp.491.311.592.000 atau hanya 4,47 persen (Tippe, S. 2000: 45-48)

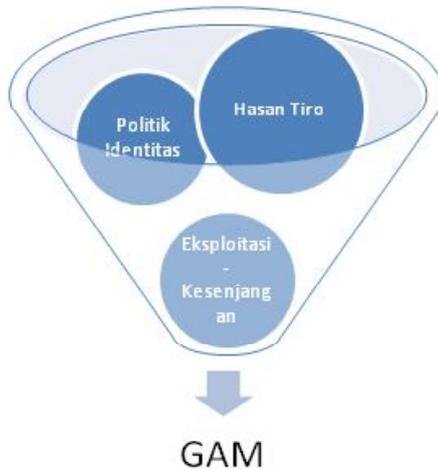
Tabel 3.1 Total dana yang kembali ke Aceh berdasarkan DIP

Tahun	Dana
Tahun 1992/1993	Rp 453.9 M
Tahun 1993/1994	Rp 522.2 M
Tahun 1994/1995	Rp 520.9 M
Tahun 1995/1996	Rp 573.8 M
Tahun 1996/1997	Rp 666.8 M

Sumber: Tippe, S. 2000: 49

Data tersebut menunjukkan bahwa sentimen pusat-daerah dibangun tidak hanya pada kesatuan identitas politik masyarakat Aceh, tetapi juga didukung dengan fakta eksploitasi yang dilakukan oleh rezim Soeharto. Sehingga GAM yang pada awal kemunculannya tidak banyak didukung, akhirnya berkembang sampai akhirnya diberlakukan Daerah Operasi Militer oleh pemerintahan Pemerintah RI.

Gambar 3.1. Visualisasi Motif Kemunculan GAM



Dari tiga perspektif alasan dan motif kemunculan GAM tersebut, maka Hasan Tiro adalah aktor sentral bagi terbentuknya kesadaran kolektif baru bagi identifikasi *local cleavage* yang terbentuk. Sementara fakta eksploitasi yang ada kita lihat sebagai struktur peluang politik bagi proses mobilisasi dan kristalisasi gerakan sebagai sebuah gerakan semesta yang melibatkan Aceh sebagai komunitas sosial. Sedangkan apa yang disebut dengan bangsa Aceh menjadi sebuah doktrin untuk membangun kesadaran kolektif-historis bagi keberlangsungan gerakan menjadi *local cleavage* pada tahapan selanjutnya.

Alhasil, jika kemunculan GAM adalah didasarkan pada tiga alasan tersebut—Hasan Tiro, Identitas Politik, dan Ketimpangan Sosial—apakah juga kemudian berpengaruh terhadap hadirnya Partai Aceh sebagai sebuah sekuen dari GAM? Apakah hadirnya Partai Aceh dimaknai sebagai bentuk transformasi

gerakan yang distimulasi oleh alasan-alasan tersebut, atau memang berbeda sama sekali walaupun mempunyai kesamaan aktor? Di titik inilah maka kita perlu melihat GAM selama kurung lebih 30 tahun—1976 sampai 2005—bukan sebuah organisasi dan entitas yang konstan. Karena dalam perkembangan selanjutnya, GAM dalam setiap fasenya menunjukkan karakter gerakan yang berbeda-beda.

Perjalanan GAM sebagai Organisasi

Pada awalnya Gerakan Aceh Merdeka yang dideklarasikan pada 4 Desember 1976 hanyalah berjumlah 19 orang (Wijaya, A. 2010, komunikasi personal, 8 Februari). Bahkan terlihat bahwa pada awalnya masyarakat Aceh anti-pati dengan GAM dan Hasan Tiro di dalamnya (Eda, F. 1999: 17)³⁹, namun karena tingkat represifitas rezim yang juga mengenai warga sipil akhirnya menstimulasi simpati terhadap GAM dan membangun gerakan yang semakin besar. Fakta personalia ini menunjukkan bahwa cleavage pada periode GAM bukanlah satu hal yang *given* datang dan tercipta begitu saja, melainkan diciptakan melalui tiga kerangka dasar motif dan alasan lahirnya GAM di atas, atau dapat kita katakan GAM memerankan fungsi sebagai sebuah aktor ‘cleavage-isasi’ Aceh. Dan untuk membuktikan GAM sebagai aktor pemeran fungsi cleavagi-isasi hanya dapat kita lihat dengan memahaminya sebagai sebuah organisasi gerakan.

Kemudian pasca rezim Soeharto tumbang 1998, GAM hampir mutlak mendapatkan dukungan rakyat Aceh hingga membersamai dengan aksi-aksi sipil melawan Jakarta dan berakhir dengan perundingan pasca

tsunami 26 Desember 2004. Sehingga GAM selama organisasi bukanlah satu hal yang stagnan, dan di titik inilah kita perlu melihat GAM menurut setiap fase pembedanya. Artinya, melihat GAM sebagai organisasi yang dinamis adalah penting karena kita akan meletakkan analisis transformasi berdasarkan karakter pokok yang tampak dari GAM, militeristik, dengan menunjukkan fakta atas karakter pokok tersebut.

Karena jika kita merentangkan riwayat panjang GAM dari proklamasi 1976 sampai berakhirnya⁴⁰ GAM pada 2005, maka kita akan menemukan aktivitas militeristik mendominasi lebih dari sepertiga atas hadirnya GAM di tanah Aceh. Artinya, karakter militeristik sebagai sebuah organisasi lebih dominan dibandingkan karakter sipil yang cenderung demokratis. Walaupun adanya karakter diplomasi adalah sebuah distingsi yang membedakan secara mutlak dengan gerakan pemberontakan di Aceh pada periode orde lama. Karakter diplomasi ini justru cukup menonjol ketika TNI berhasil (untuk sementara) meredam GAM sepuram 1980-an sampai 1990-an. Artinya, adanya karakter diplomasi dalam GAM adalah fakta yang tidak bisa dibantah sekalipun redaksi atas namanya berasosiasi dengan gerakan militer gerilya.

³⁹ Eda dan Dharma (1999) merekam gejala Aceh sepanjang tahun 1989-1999 dengan mengompilasi terbitan-terbitan dan kesaksian-kesaksian dalam satu bendel buku. Diceritakan bahwa sejumlah orang yang hadir pada peresmian jembatan Arakundo di Aceh Timur pada akhir Mei 1991 menggelar poster "Gara-gara Hasan Tiro, Negeri Rusuh, Bangsa Hancur", lihat dalam Majalah DR No.51/XXIX/8 Agustus 1998. Dalam wawancara Harian Republika 9 Agustus 1998, Prof.H.Ibrahim Alfian menyatakan bahwa GAM yang dipimpin Hasan Tiro merupakan tindakan mencari keuntungan pribadi dan membohongi Teuku M.Daud Beureueh dan rakyat Aceh dengan menjual hasil bumi untuk kepentingannya sendiri.

⁴⁰ Walaupun dengan aktor sama pasca MoU Helsinki 2005 dalam kemasan partai politik (lokal), GAM secara redaksi dan substansi sebagai organisasi sudah bubar dan dibubarkan.

Dalam hal ini Delsy Ronnie (2005: 26)⁴¹ mengklasifikasikan GAM dalam tiga fase:

1. Pemberontakan GAM pertama, tahun 1974-1980;
2. Pemberontakan GAM kedua, tahun 1989-1998;
3. Pemberontakan GAM ketiga, tahun 1999-2005. Secara lebih rigit jika merujuk pada Moch. Nurhasim (2008:10) terkait dengan fase pertumbuhan GAM, maka akan di dapat tabulasi sebagai berikut:

Tabel 3.2. Periodisasi GAM ala Moch. Nurhasim dan Isa Sulaiman⁴²

Periode	Karakter Gerakan	Sebaran
1976-1982	Periode kelahiran dan konsolidasi kekuatan yang ditandai dengan adanya bentuk-bentuk propaganda GAM kepada masyarakat.	Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Diperkirakan 500 orang.
1982-1989	Periode rekonsolidasi kekuatan yang ditandai dengan aksi-aksi kekerasan dan kekacauan dengan sasaran adalah aparatur keamanan	Terbatas di pegunungan dan perjuangan dilakukan melalui luar Aceh: Libya, Swedia, Singapura, dan Malaysia.
1989-2003	Periode pengembangan sayap militer, konflik bersenjata, dan perjuangan diplomatik pada 2003	Pasca jatuhnya Soeharto, GAM mempunyai perluasan wilayah ke kabupaten-kabupaten hampir di 17 kabupaten dengan jumlah pasukan 5000-15.000.

Sumber: Sulaiman 2001

⁴¹ Ronnie membagi 4 periode besar konflik atau pemberontakan yang terjadi di Aceh termasuk Darul Islam 1953 kemudian diikuti oleh tiga fase pemberontakan selanjutnya menurut kacamata studi konflik tersebut.

⁴² Perlu diketahui bahwa tabulasi yang disusun oleh Moch. Nurhasim adalah merujuk pada periodisasi yang dilakukan oleh Isa Sulaiman (2001).

Pembagian periode ala Delsy Ronnie dan deskripsi tabulatif ala Moch.Nursalim tersebut pada dasarnya belum cukup untuk menunjukkan GAM secara substantif—karakter organisasi, gerakan, dan kultur—sehingga kita perlu membahasnya secara lebih khusus. Di sisi lain kita perlu melakukan revisi atas pembagian waktu tersebut.

Setidaknya terdapat empat fase dalam riwayat GAM. Fase awal dapat kita sebut sebagai sebuah fase gerakan konsolidasi yang hanya sampai 1979 sejak proklamasi gerakan pada 1976. Penumpasan GAM oleh TNI menyebabkan kevakuman aktivitasnya di Aceh sehingga menjadi pertanda atas fase kedua, yaitu fase ketenangan yang berkisar lima tahun pasca fase konsolidasi. Sedangkan pengiriman milisi dalam pelatihan di Libia pada 1986 menjadi pertanda dimulainya fase militerisasi yang cukup sampai tahun 1999 karena DOM yang berakhir pada tahun tersebut adalah kausal dominan gerakan GAM menjadi sangat militeristik. Sedangkan fase setelahnya sampai 2005 adalah fase tersendiri yang menunjukkan karakternya yang baru karena memasuki fase perundingan sejak tahun 2000 oleh Pemerintah RI di bawah Abdurrahman Wahid, sekalipun secara eksternal diterapkan ‘pembersihan’ milisi GAM oleh Pemerintahan Megawati selama satu tahun.

Fase Konsolidasi (1976-1979)

Sebenarnya jika kita membuka kembali arsip, GAM sejak dideklarasikan dan pada fase konsolidasi adalah dipersiapkan untuk perjuangan bersenjata dan militeristik. Hal ini terlihat dalam catatan harian Hasan

Tiro yang ditulis pada 4 Desember 1976 bertepatan dengan hari deklarasi, sebagaimana berikut:

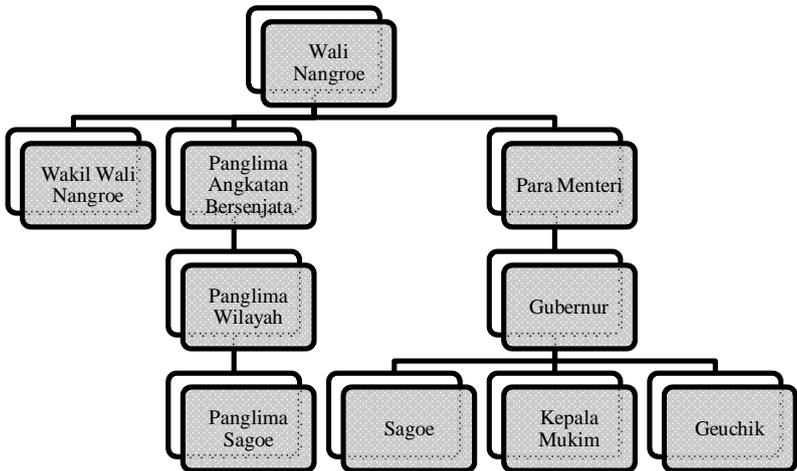
"...Successful armed struggle can only be waged by a people who are politically conscious and politically organized and mobilized. Our declaration of Independence is an instrument to achieve that; it is a preparatory step to a successful armed struggle. A Declaration of independence is not to signify the end of the struggle. It is instead to serve notice of its commencement, when our people have properly grasped the meaning and purposes of our Declaration of Independence, then no Javanese colonialist regime can prevent them from gaining that independence..." (Tiro, H. 1984: 21).

Sehingga memang GAM (Hasan Tiro) membangun basis di Aceh dan diplomasi internasional adalah antara lain mempersiapkan gerakan bersenjata. Pernyataan ini memberi penjelasan bahwa secara itikad GAM adalah gerakan bersenjata sekalipun dalam beberapa fase—kemunculan, ketenangan, dan proses perundingan—menunjukkan GAM sebagai gerakan sipil-diplomatik.

Fase awal kemunculan ini ditandai dengan peneguhan gerakan melalui proklamasi GAM pada 4 Desember 1976, perekrutan anggota dengan menggunakan jalur kekeluargaan, pembangunan basis kekuatan baik secara diplomasi dan militer. Fase ini kita lihat hanya sampai 1979 karena para deklarator GAM banyak yang terbunuh, tertangkap dan lainnya melarikan

diri ke luar negeri termasuk Hasan Tiro⁴³. Secara struktur organisasi, dalam fase ini, GAM telah memiliki struktur sipil dan militer, namun relasi yang dibangun untuk dua jenis struktur ini—terutama untuk struktur militer—adalah bentuk pengorganisasi komando. Sehingga terbentuklah struktur komando GAM sebagai berikut:

Gambar 3.2. Hierarki struktur komando GAM 1976-1982



Sumber: Mastuti, S. 2001: 161-175

Melalui model struktur ini kita memahami bahwa GAM sejak kemunculannya lebih menggunakan format komando—determinasi ketua atau pemimpin gerakan—untuk mengorganisasikan dirinya. Sehingga mekanisme perintah dari atas lebih dominan dibanding melalui pembangunan aspirasi yang muncul dari bawah.

⁴³ Sejak 1977 TNI mengetahui adanya sebuah gerakan yang dianggap separatisme di Aceh dan pada saat itulah dilakukan 'pembersihan' atas gerakan tersebut. Sehingga menyebabkan beberapa orang tokoh meninggal, tertangkap, dan yang lainnya memilih ke pengasingan di luar negeri.

Hal ini menjadi logis karena GAM sebagai organisasi gerakan informal yang sedang membangun basis kekuatan sehingga efektifitas menjadi prinsip dibandingkan demokrasi dalam pengelolaan organisasi.

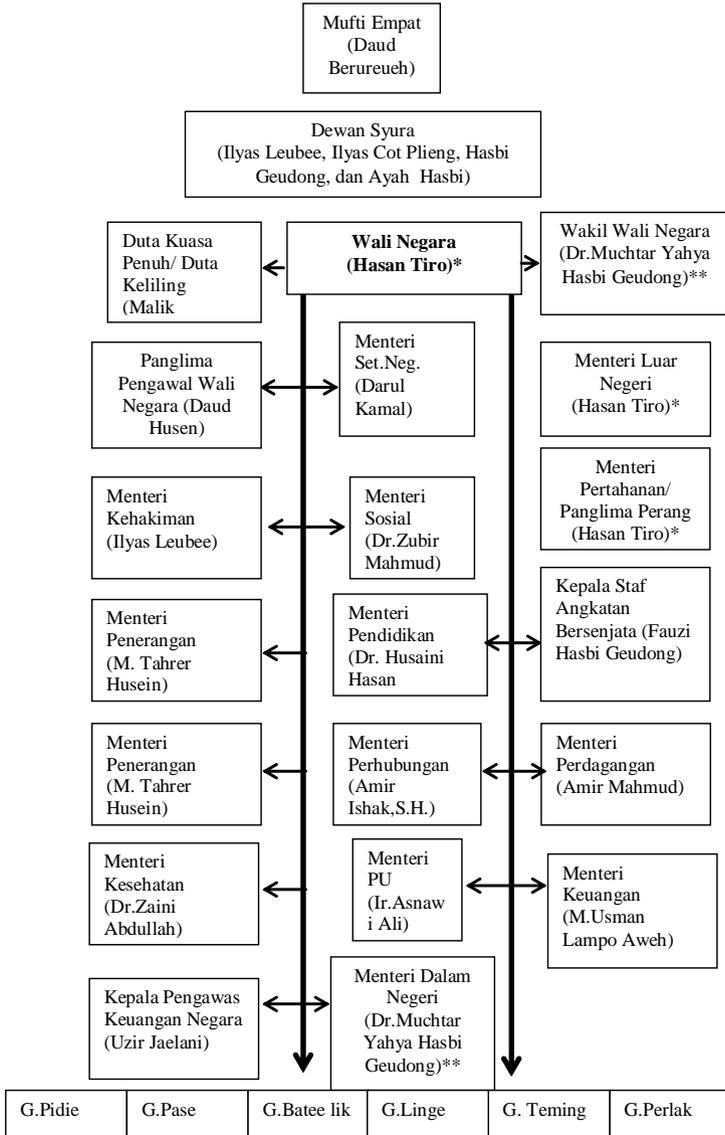
Struktur “Negara”

Namun kejelasan struktur GAM pada fase ini adalah justru ketika Hasan Tiro kembali ke Amerika Serikat untuk memenuhi studinya. Dalam struktur sipil GAM yang menyerupai struktur negara, terdapat sebanyak 15 menteri dalam kabinet tersebut dipimpin langsung oleh Hasan Tiro, dan hampir semuanya berkedudukan di Aceh kecuali Menteri Perdagangan Amir Mahmud yang sedang berada di Singapura.

Namun terkait dengan tanggal kesepakatan struktur tersebut (28 Mei 1977), tidak terdapat dalam buku harian Hasan Tiro *The Price of Freedom*. Dalam catatannya tersebut, sejak Januari 1977 sudah dipenuhi dengan narasi perang gerilya *vis a vis* dengan TNI. Struktur Pemerintahan Aceh Merdeka—sebagai struktur sipil—yang disepakati pada 28 Mei 1977⁴⁴ adalah sebagai berikut (Pane, N.S. 2001: 188):

⁴⁴ Sebanyak 15 menteri dalam kabinet tersebut dipimpin langsung oleh Hasan Tiro, dan hampir semuanya berkedudukan di Aceh kecuali Menteri Perdagangan yang ada di Singapura. Namun terkait dengan tanggal kesepakatan struktur tersebut (28 Mei 1977), tidak terdapat dalam buku harian Hasan Tiro *The Price of Freedom*. Dalam catatannya tersebut, sejak Januari 1977 sudah dipenuhi dengan narasi perang gerilya *vis a vis* dengan TNI. Sehingga di titik inilah kita untuk sementara tidak terperangkap pada sumber yang berbeda, karena aktor dan jabatan dalam struktur tersebut adalah sama dengan narasi yang disampaikan dalam catatan Hasan Tiro, sekali lagi hanya persoalan tanggal.

Gambar 3.3. Struktur Pemerintahan (Sipil) GAM Fase Konsolidasi



Selain menjelaskan keterbatasan personel, struktur 'kabinet' tersebut juga menjelaskan peran sentral dari Hasan Tiro yang selain sebagai kepala negara (wali nanggroe), menteri luar negeri, juga merangkap sebagai menteri pertahanan. Artinya Hasan Tiro menjalankan eksekusi atas kebijakan dan keputusan-keputusan sipil dan pada saat yang sama memberi komando atas gerakan senjata yang tengah dibangun—melalui komunikasi jarak jauh. Sementara pada bulan-bulan awal *day to day politics* pengurusan GAM di kendalikan oleh Dr. Muchtar Yahya Hasbi Geudong.

Membership

Terlihat dari struktur pemerintahan tersebut bahwa pada masa awal pembentukannya, GAM menggunakan pola rekrutmen berdasarkan ikatan persaudaraan dan kekerabatan. Hal ini ditunjukkan bahwa tokoh-tokoh tersebut adalah berasal dari daerah pantai utara Aceh khususnya Pidie, Aceh Timur dan Aceh Utara. Pola eksklusif dan tertutup ini menjadi sebuah pertanda penting yang membedakan fase konsolidasi dengan fase militerisasi selanjutnya. Lebih lanjut, Sri Mastuti (2001: 165) membagi elemen masyarakat pendukung GAM (fase konsolidasi) menjadi tiga kelompok:

Pertama, golongan intelektual dan profesional muda yang tidak berhasil atau tidak terekrut dalam jajaran birokrasi. Kelompok ini adalah pendukung utama GAM pada periode awal. Kebenaran atas simpulan Mastuti terhadap golongan ini bisa kita konfirmasi dengan melihat aktor dalam struktur pemerintahan GAM

di atas, dan beberapa orang diantaranya adalah bergelar sarjana bahkan doktor (Pane, N.S. 2001: 220).

Kedua, golongan ulama yang pada umumnya adalah pernah terlibat dalam DI/TII. Sehingga kelompok ini lebih didasari pada motivasi melanjutkan perjuangan syari'at Islam di bumi Aceh. Terkait dengan pengelompokan yang kedua ini, keterlibatan orang-orang eks-DI/TII juga dibenarkan oleh Neta S.Pane (2001) dalam *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka*. Ketiga adalah golongan masyarakat kampung yang berada di sekitar markas GAM di Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur. Kelompok ini adalah penyeter logistik dan pelindung anggota GAM dari kejaran TNI.

Klasifikasi Mastuti terkait dengan pengelompokan ketiga pendukung GAM tersebut menunjukkan bahwa pada fase ini, struktur militer yang ada hanyalah berfungsi defensif daripada ofensif. Yaitu untuk melindungi pemerintahan sipil yang sedang dibangun.

"...pasukan yang dibentuk bukanlah diperuntukkan bagi operasi ofensif. Angkatan (bersenjata) GAM lebih ditujukan untuk kepentingan defensif, bahkan dapat dikatakan defensif pasif. Mereka hanya melakukan kegiatan untuk mendukung misi-misi sipil GAM seperti pencari logistik dan pengibar bendera. Pasukan GAM senantiasa menghindari diri untuk bentrok dengan pasukan TNI" (Pane, N.S. 2001: 167).

Gerakan Gerilya

Karakter militer yang pasif dan lebih mengedepankan cara-cara sipil (diplomasi ke luar dan propaganda ke dalam [Aceh]) pada fase ini adalah juga menjadi karakter pembeda yang tajam dibandingkan dengan fase militeristik selanjutnya. Karena pembangunan basis gerakan dan anggota adalah hal pertama yang harus dilakukan oleh GAM sebagai gerakan yang baru saja muncul.

"Because we are not yet fighting but organizing support on mass bases and mobilizing the masses in the countryside, building solidarity groups with the undergrounds in in the villages and cities..." (Tiro, H. 1984).

Sedangkan perihal metode, struktur, dan prinsip gerakan gerilya sebagai basis militernya akan terlihat jika kita memperhatikan catatan (pengakuan) Hasan Tiro berikut ini:

"...Although I am the Defence Minister, and Supreme Commander, I gave full power to Army Commander Daud Husin in all tactical operations: he is at liberty to make his own plans and go into actions as long as they are not in contradiction with our general strategy: - We are still in the political and preparatory stage of the armed struggle and we want to remain in this stage as long as necessary. Therefore, all our military movements and actions must be subordinated to this strategy.- All actions must be conducted within the strict discipline of a

defensive guerilla warfare (cetak tebal oleh penulis): 1) *The Acehnese Army should always keep to the hills. This will nullify Javanese superiority in armored vehicles, naval and air forces.* 2) *The Acehnese Army should hover always in the enemy's neighborhood, ambushing him, preventing him from gaining any permanent base, becoming an illusive but powerful shadow on the horizon, diminishing the "glamor" of the Javanese colonialist troops.* 3) *Time and surprise are the two most vital elements: understand all lines of expectations and lines of surprises. No attack without surprise!* 4) *Engagements must be executed at the place and at the time of our choosing, despite enemy provocations.* 5) *When enemy advances we retreat and harass him when he returns.* 6) *Engagement with the enemy should only be done when we are sure of winning, that is of having superior force at the point of engagement.* 7) *Our present objectives are to cripple enemy's communications and economy and to destroy his foreign backers' confidence.* 8) *Our safety lies in the secrecy of our movement at all time and in the mobility of our forces. The enemy should never know where our forces are.* 9) *Our strategy is defensive; our tactic is swift offensive against the enemy whenever an opportunity presents itself..."* (Tiro, H. 1984: 73-74).

Hasan Tiro adalah Menteri Pertahanan sekaligus Komandan Tertinggi menyerahkan komando lapangan pada Daud Husen, artinya fase ini secara organisasional sudah mengenal dan menerapkan mekanisme representasi gerakan. Sedangkan point strategi dari 1 sampai 9 adalah instruksi detail Hasan Tiro bagi gerakan gerilya secara defensif. Instruksi ini menjelaskan bahwa model gerakan perang gerilya sudah dilakukan sejak GAM berdiri. Namun pada saat yang sama, catatan ini membuktikan atas kultur kepemimpinan komando di GAM khususnya perwajahan dirinya sebagai gerakan bersenjata.

Keterbatasan Teritori

Sedangkan jika kita melihat struktur pemerintahan yang disepakati pada 26 Mei 1977, maka kita dengan jelas melihat bahwa daerah kekuasaan GAM masih sangat terbatas. Hal ini ditunjukkan dengan hanya ada 6 gubernur atau daerah yang dipimpin oleh seorang dengan jabatan gubernur, yaitu Pase, Pidie, Batee Ulik, Perlak, Teming, dan Linge. Bahkan sumber lain menyatakan hanya lima daerah yang dikuasai GAM⁴⁵:

“...GAM had only governors for Pase, Batee Ulik, Perlak, Teming, and Linge. The other provinces were slated to be added once Gam had more than imaginary control over at least some of their territory, although in practice from 1976 to 1979 GAM never had any influence

⁴⁵ Karena Justin V.Hustings sebagaimana pemaparannya cukup mendasarkan pada teritori, sedangkan tabulasi struktur pemerintahan yang kita olah dari laporan Neta S.Pane juga memasukkan Pidie sebagai wilayah tersendiri yang dipimpin oleh Gubernur.

outside of Pidie, Aceh Utara (North Aceh), and Aceh Timur (East Aceh)...” (Hastings, J.V. 2010: 26)

Fakta ini menunjukkan bahwa GAM pada fase konsolidasi lebih bersifat lokal jika kita melihat melalui perspektif teritorial yang secara empirik dikuasai sekalipun mengklaim dirinya adalah Gerakan Aceh Merdeka yang hanya mencakup tiga wilayah Aceh (Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur).

“...By now all the people in Tiro Region knew that I was back, in the mountains somewhere, and they are 100 percent beside me with whatever they have. All the people in the Tiro Region, men and women, became adherents of the NLFAS - by what sociologists might refer to as membership by identification, that is by their complete identification with me and my family...” (Tiro, H. 1984: 22)⁴⁶

Sehingga daerah pantai barat seperti Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh, Tenggara, Aceh Tengah, Singkil, dan pulau Seumeuleu tidak termasuk GAM pada fase ini. Selain faktor kekerabatan baik keluarga Tiro maupun para eks-Darul Islam Daud Beureueh yang banyak berada daerah pantai timur Aceh, menurut Neta S. Pane (2001: 192) juga diuntungkan oleh letak geografis yang memungkinkan masuknya informasi dan komunikasi. Dan fakta ketimpangan sosial di kawasan tersebut juga menyumbang pada psikologi sosial untuk mendukung gerakan. Hal ini sekaligus mempertegas

⁴⁶ Tertulis tanggal 5 Desember 1976 atau satu hari setelah proklamasi.

bahwa pola rekrutmen yang dilakukan adalah bersifat kekerabatan dan kekeluargaan sehingga tidak mampu menjangkau jaringan daerah-daerah di pantai selatan Aceh.

Dalam narasi selanjutnya, GAM berhenti bergerak karena sudah diketahui oleh pemerintah sehingga sejak seputar tahun 1979⁴⁷ sampai 1988 praksis hampir tidak ada gerakan GAM yang secara transparan terdengar oleh publik. Eksistensi GAM dianggap selain sebagai gerakan separatis bagi Pemerintah RI⁴⁸, juga kehadirannya memberikan efek destruktif bagi Aceh (Tiro, H. 1984: 228; Pane, N.S 2001: 162-164)⁴⁹. Hal ini pulalah yang memicu gubernur Aceh saat itu (Ibrahim

⁴⁷ Hasan Tiro dengan meminta ijin wakil wali nanggroonya Dr.Zaini pada akhir bulan Maret 1979 akhirnya pergi ke Swiss dan kemudian menetap di sana dengan tetap melakukan misi-misi diplomasi dan propaganda internasional. Sedangkan Abdullah Syafei—yang kemudian menjadi panglima GAM termasyhur era 1999-an—pergi ke Libia untuk membangun jaringan militer. Sementara beberapa tokoh yang ada dalam struktur pemerintahan GAM terbunuh oleh TNI dan sebagian masuk jeruji penjara. Lihat dalam Neta S.Pane.(2001)., hlm. 67-70. Lebih spesifik, dalam catatan hariannya Hasan menulis *"I signed a Decree stipulating that in my absence the State of Aceh Sumatra shall be governed by the Council of Ministers headed by a Prime Minister and with several Deputy Prime Ministers who, in case of death will replace one another in succession. The Prime Minister is Dr Muchtar Hasbi with Tengku Ilyas Leube as First Deputy, Dr Husaini Hasan the Second Deputy, Dr Zaini Abdullah the Third Deputy, and Dr Zubir Mahmud, the Fourth Deputy.*

⁴⁸ Terkait dengan pelabelan 'separatis' bagi gerakan ini, TNI pada tahun 1978 membuat selebaran bertuliskan *"jika saudara ingin agar daerah aman dan tenteram, cari dan tangkap hidup atau mati tokoh-tokoh pengacau liar Hasan Tiro seperti tergambar di sini"*. Dalam selebaran tersebut terpampang foto 9 tokoh GAM: Hasan Tiro, Dr.Muchtar Hasbi, Daud Paneuk, Ir.Asnawi, Ilyas Leubee, Dr. Zaini Abdullah, Dr.Husaini, Mr. Amir Ishak, dan Dr.Zubair Machmud.

⁴⁹Tengku Abdullah Syafei adalah orang pertama yang pergi ke Libia pada 1978 untuk membuka hubungan dengan pihak militer Libia. Sedangkan Hasan Tiro pergi ke Stocholhm Swiss pada 1979 karena TNI terus menekan GAM dan menetap di sana. Lalu kemudian pemimpin Libia membuka pelatihan militer bagi seluruh gerakan separatis di dunia pada tahun 1985. Sedangkan angkatan pertama kader GAM yang dilatih di Tripoli—bersama dengan 500 gerakan separatis lainnya—selesai pada tahun 1986 dan pulang ke Aceh. Di titik inilah sebenarnya GAM mulai melakukan gerakan militer secara ofensif dan meninggalkan posisi defensif seperti fase awal berdirinya.

Hasan) melaporkan kondisi daerahnya di awal tahun 1989 kepada Soeharto. Saat itulah kemudian Pemerintah RI memberlakukan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer yang dalam bahasa militer adalah Operasi Jaring Merang. Sehingga pada momentum *reinforcement* Pemerintah RI inilah GAM terkondisikan masuk ke dalam fase ketenangan sebelum akhirnya masuk pada fase militerisasi. Fase ketika TNI hampir secara total 'menenangkan' GAM dengan menahan, mengusir, dan perang bersenjata terhadap elit dan kombatan GAM, ketika Aceh dalam 5 tahun tenang dari hingar-bingar gerakan *secession*.

Fase Ketenangan (1980-1985)

Apa yang disebut dengan fase ketenangan adalah sebuah fase 'gelap' bagi GAM di Aceh, banyak dari para analis yang melewatkan fase ini sebagai sebuah fase tersendiri bagi riwayat perjalanan organisasional GAM. Sehingga penting bagi kita untuk menghadirkannya sebagai salah satu dinamika gerakan *insurgency*. Karena kembali lagi bahwa genealogi berbicara perbenturan kuasa dalam setiap patahan waktu kejadian yang membangun fakta 'sekarang'.

Penggempuran yang dilakukan TNI sejak 1977 sementara GAM sedang mengkonsolidasikan diri membangun basis massa, sehingga cukup banyak petinggi GAM yang melarikan diri ke luar negeri dan tewas di bawah timah panas TNI. Sehingga praktis, aktivitas GAM antara tahun 1980 sampai 1985 di bumi Aceh terhenti. Operasi militer Indonesia terutama oleh pasukan elite TNI-AD, Kopassus, sejak 1976 sampai 1989 telah berhasil membuat gerakan Aceh Merdeka (AM)

masuk ke dalam babak gerakan bersejata di bawah tanah (Ishak, O.S. 2001: 30). Sedangkan pada periode yang sama banyak oknum yang mengatasnamakan GAM membuat kerusuhan dan tindakan kriminal meresahkan rakyat Aceh.

“sebab sebelum dia (Abdullah Syafei) pulang (1983), cukup banyak tokoh senior GAM tewas dan tertangkap dalam berbagai operasi yang dilakukan TNI. Situasi ini membuat perlawanan GAM menjadi tak seimbang...di pihak lain TNI makin gencar memburu anggota GAM. Gencarnya operasi TNI tersebut membuat sejumlah tokoh GAM yang masih hidup merasa cemas. Sebagian besar dari mereka lalu lari menyelamatkan diri ke luar negeri, terutaram ke Malaysia dan Thailand. Kekuatan separatis itu makin rapuh tatkala munculnya berbagai pengkhianatan anggotanya, yang akhirnya membuat GAM terpecah”(Ishak, O.S. 2001: 88).

Hilangnya para tokoh GAM tersebut seperti yang terjadi pada beberapa tokoh berikut ini sebagai contoh. Wakil wali negara Dr. Muchtar Hasbi—sebagai tangan kanan Hasan Tiro—meninggal dalam serbuan aparat TNI di Kuala Simpang pada 1980 menjelang Idul Fitri. Sementara itu, Menteri Sosial Zubir Mahmud juga tewas terbunuh oleh aparat TNI. Panglima II GAM Wilayah Pase Ismail Ben juga dikabarkan tewas. Perburuan terhadap orang-orang GAM terus dilakukan oleh TNI. Hingga akhirnya ketua dewan Syura Ilyas Leubee berhasil disergap oleh aparat keamanan saat menuju Jeunib di Aceh Utara pada April 1982, dan

beberapa nama lainnya yang tidak terdokumentasi dan terpublikasi. Sehingga banyak dari para sisa anggota (dan elit) GAM yang masih berada di Aceh lebih memilih untuk bersembunyi dan mimilih diam.

Selain itu Pemerintahn RI (rezim Soeharto) tidak hanya 'menyisir' GAM di bumi Aceh, namun juga melakukan propaganda-propaganda internasional pada periode ini. Pada tahun 1982 Pemerintah RI mempublikasikan kematian Hasan Tiro melalui buku terbitan Amerika Serikat berjudul *Indonesia Handbook*. Sementara demikian majalah terkenal Kanada *Crescent International* menyatakan bahwa Hasan Tiro terlihat sedang berjalan-jalan di beberapa kota di Amerika Serikat dan Eropa (asnlf.net 2010). Lebih lanjut, pada tahun 1984 Pemerintah RI kembali menyatakan bahwa Hasan Tiro telah meninggal, sementara pada saat yang sama Hasan Tiro sedang berbicara di Parlemen Portugis (asnlf.net 2010). Dari propaganda-propaganda Pemerintah RI tersebut, jelas GAM tidak melakukan respon secara langsung sekalipun elit GAM termasuk Hasan Tiro berada di pengasingan.

Narasi tersebut memberi penjelasan bahwa secara faktual periode ini adalah periode 'mati suri' bagi GAM di tanah perjuangannya Aceh. Namun aktivitas diplomasi dan propaganda internasional tetap berlangsung di pengasingan—khususnya di Eropa dan Amerika. Aktivitas Hasan Tiro yang memberikan ceramah di Parlemen Portugis tahun 1984, penerbitan tulisan *The Legal Status of Acheh Sumatera under International Law* pada 1980 dan beberapa lainnya, dan pembangunan jaringan perlawanan yang dilakukan Abdullah Syafei adalah bukti atas kerja diplomasi.

Abdullah Syafei sebelumnya membangun jejaring dengan elemen pelawanan (separatis) di Filipina, Srilangka, Kazakhstan, Afganistas, dan lama bermukim di Libia ((Tiro, H. 1984: 229; Pane, N.S. 2001: 84-88).

Artinya, justru pada periode ini kita melihat massifikasi gerakan diplomasi yang menjadi karakter pembeda dengan gerakan Darul Islam era Daud Beureueh. Hal ini pula yang memberi refleksi atas apa yang dulu pernah dilakukan oleh Sultan Ali Mansyur Syah yang mengutus Sidi Muhammad menjejaki daratan Eropa, maupun perjalanan Abd ar-Rahman az-Zahir yang mampu membenturkan kerajaan-kerajaan di Eropa Barat bahkan daratan Amerika.

Aktivitas di luar bumi Aceh pada akhirnya menghasilkan 'buah tangan' ketika GAM pada periode 1986 mampu mengirimkan sisa-sisa anggotanya ke Libia untuk menjalani latihan militer, dan di titik ini pula yang menandai GAM masuk pada fase militerisasi. Sedangkan pada 1991 GAM atau Aches-Sumatra National Liberation Front mendapatkan kursi Komisi HAM di PPB yang kemudian digunakan sebaik-baiknya oleh Hasan Tiro (1993). Penanda penting atas fase ini adalah gerakan diplomasi GAM yang justru terlihat paling menonjol, sementara gerakan propaganda dan gerilya di Aceh yang mati suri adalah penanda lain atas fase ini.

Fase Militerisasi (1986-1999)

Jika dalam banyak studi selalu ditarik garis simpul bahwa pengembangan sayap militer GAM dimulia pada 1989 atau bertepatan dengan DOM, maka di sini kita menggunakan terminologi militerisasi yang dimulai sejak adanya pelatihan militer pada 1986 di Libia (Sulaiman, I. 2001, Nurhasim, M. 2008; Ronnie, D. 2005). Baru setelah diberlakukannya DOM (Daerah Operasi Militer) atau Operasi Jaring Merah pada 1989⁵⁰ oleh pemerintah Pemerintah RI, DOM menjadi *external enforcement* yang memungkinkan GAM hampir secara menyeluruh berada di ranah gerakan militeristik (Pane, N.S. 2001: 172-174). Sehingga menenggelamkan gerakan sipil sebagaimana yang terstruktur dalam Gambar.No.X bab sebelumnya. Sementara gerakan diplomasi⁵¹—yang menjadi strategi GAM dan yang membedakannya dengan karakter perang Sabil DI/TII—terus dilakukan Hasan Tiro dan beberapa tokoh di Swiss dan negara lain.

⁵⁰ Neta S. Pane mengisahkan bahwa pada tahun 1989 tersebut seorang anggota Kopassus yang desertir berpangkat kopral tiba-tiba muncul sebagai Panglima Perang GAM dengan menamai dirinya sebagai Robert. Singkat cerita, Robert—dan teman-temannya para desertir Kopassus dan para preman dari Medan—yang selalu membawa nama GAM ini melakukan kekacauan, pemerasan dan teror di seputar Aceh Utama dan khususnya di kota Lhokseumawe. Sementara para tokoh GAM bingung dan kemudian memburunya, ada dugaan bahwa Robert senagaja disupkan oleh oknum TNI untuk menampilkan wajah buruk GAM dan kemudian menjadi legitimasi untuk ‘membersihkan GAM. Gubernur Aceh (saat itu) Ibrahim Hasan yang merasa terganggu akibat GAM yang diciptakan oleh Robert akhirnya melaporkan situasi daerah kepada Presiden Soeharto.

⁵¹ Terkait dengan hal ini, “dalam diplomasi internasional, GAM meminta Kerajaan Inggris mengembalikan Aceh sesuai dengan perjanjian tahun 1630, antara Raja Aceh dengan wakil Kerajaan Inggris James Lancaster, untuk melicinkan hal ini GAM telah meminta bantuan PBB.” (Tengku Abdullah Syafei). Pernyataan ini di dapat oleh Neta S.Pane (2001: 134), riset dilakukan seputar tahun 1999. Walaupun pada kenyataannya PBB tidak pernah mengabdikan permintaan tersebut.

Kebijakan dan represifitas rezim Soeharto melalui TNI telah menciptakan—dan secara tidak langsung menggeser—karakter pengorganisasian GAM menjadi lebih militan dan lebih besar karena GAM menjadi kanal tunggal resistensi bagi rakyat Aceh terhadap Pemerintah RI. Hal ini seperti terlihat dalam kesaksian berikut:

“Sewaktu ayah saya disiksa sampai mati oleh sekumpulan tentara Jawa, pikiran saya penuh dengan kebencian terhadap orang Jawa, dan saya berpikir untuk balas dendam kepada mereka dengan bergabung dalam GAM” (Mantan anggota Inong Balee) (Hadiwinata, B.S. (eds) 2010: 116).

Sekali lagi—walaupun tidak disadari baik oleh pihak Pemerintah RI maupun pihak GAM—militerisasi GAM diuntungkan dengan tindakan militeristik TNI. Militerisasi gerakan ini ditunjukkan dengan pelatihan (kaderisasi) militer—yang menjadi diferensiasi penting atas fase konsolidasi dan demiliterisasi—lalu dilanjutkan pembentukan varian pasukan, meluasnya basis teritori gerakan, dan pergeseran pendulum kepemimpinan. Sehingga kita perlu mengupas beberapa poin pokok tersebut untuk melihat GAM sebagai gerakan bersenjata. Dalam hal ini fase militerisasi ini kita akan banyak merujuk pada catatan-catatan Neta S.Pane (2001) karena selain melakukan korenspondensi pada periode ini, Pane juga berhasil menembus elit militer GAM ring I (Panglima Abdullah Syafei).

Pelatihan Militer

Adanya pelatihan militer bagi anggota GAM dan pusat-pusat pelatihan militer adalah pertanda pokok bagi fase militerisasi. Hal ini penting untuk memberi penegasan bahwa pelatihan difokuskan sebagai bentuk atas proses militerisasi sehingga rekrutmen anggota gerakan yang dibangun adalah rekrutmen untuk menjadi seorang milisi GAM⁵². Pusat pelatihan ini ada di berbagai tempat seperti di kaki Gunung Halimun Aceh Pidie, di Gunung Seulawah Aceh Besar, atau di kawasan kecamatan Jeunieb di perbatasan Aceh Pidie dan Aceh Utara (Fakhrurrazi. 2008: 73-79).

Selain membangun pelatihan militer di Aceh, GAM juga membangun kerjasama dengan Libia dalam proses militerisasi gerakan ini (Pane, N.S. 2001: 162-163).

"...latihan terhadap pemuda-pemuda Aceh ke Libia memang ada. Itulah kelihaihan politik kami dalam menyembunyikan perjuangan, termasuk perjuangan dalam memberikan didikan militer di Libia kepada kader-kader kami" (Pane, N.S. 2001: 164).

Pada 1999 GAM menarik pasukan elit (5000 orang) yang telah dilatih di Libia. Pada fase militerisasi ini sedikitnya ada sekitar empat angkatan yang dilatih di Libia, angkatan 1987 (angkatan pertama), angkatan

⁵² Pada tahun 2005, sekitar sepersepuluh sampai sepertiga perempuan terlibat dalam pasukan bersenjata, pasukan gerilya, atau gerakan pembebasan bersenjata di 55 negara, termasuk di Aceh. Hal ini mencakup sejumlah besar perempuan yang memiliki peran-peran pendukung (juru masak, pengangkut, pengirim pesan, dan lain-lain) atau perempuan-perempuan yang bergantung kepada gerilyawan (istri, janda, anak perempuan, dan lain sebagainya).

1995, angkatan 1996, angkatan 1997, angkatan 1998. Ada juga yang dilatih di Filipina Selatan (Moro) sebanyak 115 orang (Pane, N.S. 2001: 152-153).

Pelatihan militer menjadi sebuah distingsi pokok yang membedakan GAM dari fase lainnya, karena hal tersebut menjadi penjelas atas bentuk “militer-isasi” atau memiliterkan gerakan. Karena sebagaimana dalam elaborasi fase konsolidasi GAM dari awal memang disiapkan dalam *armed struggle*. Sehingga di titik inilah DOM menjadi struktur peluang politik bagi GAM yang benar-benar digunakan untuk membangun gerakan atas simpati rakyat

Basis Teritori

Karena anggota yang terus membengkak, GAM akhirnya memiliki tujuh wilayah sebagai basis pertahanan dan perlawanan militer, yaitu:

1. Pase Pantebahagia;
2. Peureulak;
3. Tamiang;
4. Batee Illiek;
5. Pidie;
6. Aceh Darussalam;
7. Meureum Daya⁵³.

⁵³ Data ini didasarkan pada hasil korespondensi Neta S.Pane (2001) yang banyak bersumber pada GAM era pra-reformasi atau tahun 1990-an sampai 1998-an. Karena GAM pada fase selanjutnya memiliki 17 wilayah (terdapat 17 panglima wilayah) yang pada awalnya didasarkan pada struktur teritori era kesultanan, sehingga disebut 17 wilayah kultural atau perlawanan.

Dari ketujuh basis wilayah tersebut, setiap wilayah terdiri dari sejumlah desa, kecamatan, dan kabupaten (Pane, N.S. 2001: 136). Artinya ketujuh wilayah tersebut tidak didasarkan pada daerah administrasi sebagaimana tatanan kabupaten dan kota, melainkan didasarkan pada penguasaan daerah kultural (Wijaya, A. 2010, komunikasi personal, 8 Februari)⁵⁴. Wilayah tersebut sejalan dengan gerakan gerilya sebagai metode perjuangan bersenjata, karena

"...Perang Gerilya lebih tepat berupa mempertahankan kampung halaman, membela sanak-keluarganya sendiri, bergolak di daerah kediaman sendiri. Dimana factor-faktor rakyat adalah factor sendi, maka pembagian daerah-daerah gerilya harus bersendikan pada kesatuan-kesatuan rakyat, yang terutama berupa kesukubangsaan..."(Nasution, A.H. 1984: 103)

Masuknya wilayah Aceh Darussalam sebagai basis gerakan militer GAM menjadi pertanda atas kekuatan GAM yang hampir penuh pada fase ini. Karena fase konsolidasi GAM hanya mampu menjangkau wilayah pantai utara Aceh, sedangkan ibu kota (Banda Aceh/Kutaraja) pada periode ini masuk di bawah panglima wilayah Aceh Darussalam. Namun dalam perkembangannya, sejak Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM) menjadi Tentaran Negara Aceh (TNA), telah terdapat 17 wilayah gerakan (Nasution, A.H. 1984: 103). Namun tetap bahwa wilayah ini tidak berdasarkan struktur teritori yang dibangun oleh Pemerintah RI,

⁵⁴ Sebagai contoh Panglima Wilayah Pase Pantebahagia mencakup wilayah eks-Kerajaan Samudera Pase yaitu Aceh Utara dan sebagian Aceh Timur, Panglima Wilayah Meureuhon Daya membawahi sejumlah kecamatan di Aceh Besar dan Aceh Barat,

seperti wilayah Aceh Dayek termasuk di dalamnya adalah Aceh Besar, Sabang, Kehen atau wilayah Langsa termasuk Aceh Tenggara, Biruen

Variasi Pasukan dan Struktur Militer

Dari setiap basis wilayah tersebut dipimpin oleh seorang panglima wilayah. Sedangkan elemen pasukan pendukungnya terdiri dari:

1. pasukan intelijen;
2. pasukan tempur biasa;
3. karades (pasukan elit);
4. polisi;
5. pasukan Inong Balee;
6. laskar Tjut Nya' Dhien.

Inong Balee adalah janda-janda korban DOM yang suaminya dibunuh oleh oknum TNI, sedangkan Laskar Tjut Nya' Dhien adalah gadis-gadis Aceh yang hidup dan matinya telah dibaktikan untuk GAM—sebagian dari mereka adalah korban perkosaan oknum TNI dan sebagian yang lain karena orang tua atau kerabat mereka menjadi korban DOM (Nasution, A.H. 1984: 135-136).

Variasi pasukan tersebut menjadi mungkin karena banyaknya jumlah pasukan, dan menjadi pertanda bahwa GAM 'bersungguh-sungguh' mengarahkan gerakannya dalam gerakan bersenjata. Di sisi lain, gerakan gerilya yang dilakukan memberi keuntungan untuk melakukan agitasi dan rekrutmen anggota.

"...Karena itu pemeliharaan pasukan gerilya adalah semata-mata oleh rakyat. Rakyat menyiapkan perbekalannya, menyiapkan mekanannya. Rakyat bersedia menjadi suruhan-suruhan untuk perhubungannya..." (Nasution, A.H. 1984: 31)

Tengku Abdullah Syafei⁵⁵ yang sekembalinya dari Libia seputar tahun 1983 kemudian dipercayakan untuk melakukan penataan militer (Neta S. Pane 2001, h.88). Singkat cerita, akhir atas penataan tersebut menghasilkan struktur militer GAM sebagai berikut:

1. Ketua GAM (Hasan Tiro) sebagai panglima tertinggi militer, panglima perang GAM yang merangkap ketua komando pusat angkatan GAM,
2. Panglima Wilayah yang membawahi daerah kabupaten,
3. Wakil Panglima Wilayah,
4. Komando Operasi bertugas mengkoordinasikan rencana operasi militer,
5. Juru Bicara yang merangkap sebagai penerangan wilayah,

⁵⁵ Ketika seputar deklarasi kemerdekaan, Abdullah Syafei—lahir pada 1953—lebih dikenal sebagai kader Partai Demokrasi Perjuangan di daerah kecamatan Lumbutu, Aceh Pidie. Bergabung dengan GAM baru seputar akhir tahun 1977, dan pada 1978 melarikan diri bersama sejumlah kader muda GAM untuk menghindari TNI. Dalam pelarian inilah Abdullah Syafei 'terdampar' dan membangun jaringan di Libia dengan kelompok separatis dan perlawanan seperti Moro di Filipina, Macan Tamil Srilangka, pejuang Palestina, Kazakhstan, dan gerilyawan Afghanistan. Sehingga seputar tahun 1980 Syafei sempat menjadi penasihat militer panglima perang Kazakhstan yang sedang memperjuangkan kemerdekaan dari Uni Soviet.

6. Panglima Meurabo (Muda) yang membawahi kecamatan, dan panglima Sagoe yang membawahi sejumlah desa (Pane, N.S. 2011: 84-88).

“Pada dasarnya sebagian besar pasukan dan panglima GAM bermarkas di hutan belantara Bukit Barisan yang membelah Aceh dari ujung utara ke selatan. Hutan rimba dan medan yang berat membuat mereka sulit dilacak TNI. Meski demikian, secara rutin para panglima itu mengkoordinasikan tugas-tugasnya kepada Panglima Perang Angkatan GAM (Abdullah Syafei)” (Pane, N.S. 2011: 84-88)

Rekrutmen dan Membership

Sedangkan untuk rekrutmen anggotanya pada fase militerisasi ini adalah dengan melalui jalur tertutup tetapi sudah tidak mendasarkan diri pada jaringan persaudaraan dan kekerabatan. Namun yang paling membedakan dengan fase konsolidasi adalah bahwa pada periode ini GAM tidak ‘mencari’ melainkan ‘menerima’ dan menyeleksi calon anggota. Terdapat beberapa jalur rekrutmen yang ada yaitu: melalui sejumlah pondok pesantren, lewat tokoh-tokoh eks-Darul Islam, lewat tokoh-tokoh ulama garis keras, kelompok-kelompok mahasiswa yang fanatik, keluarga korban DOM, dan jalur-jalur lain.

Terkait dengan hal ini dalam penelusuran Neta S.Pane sepanjang Desember 1999, setidaknya di setiap desa terdapat 10 sampai 15 pemuda yang menjadi anggota GAM. Pemuda ini terdiri dari tiga kategori yaitu pemuda binaan, kader, dan tokoh intelektual.

Pemuda binaan adalah mereka yang masih dalam pembinaan intensif dari tokoh GAM karena belum mau atau diijinkan orang tuanya dengan praktik perjuangan GAM. Para kader adalah pemuda-pemuda dari pedesaan yang secara berkala aktif melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan kebijakan GAM termasuk latihan militer. Tokoh intelektual adalah kader-kader yang mapan sehingga setiap hari bersinggungan dengan organisasi dan ikut memainkan kebijakan GAM.

"Kandidasi"

Sedangkan apa yang disebut dengan kandidasi dalam gerakan militer adalah pengangkatan seorang anggota untuk memimpin pasukan yang lebih besar yang dalam konteks GAM disebut Panglima.

"Dalam mengangkat seorang panglima, tokoh-tokoh GAM tak pernah memandang usia seseorang. Mereka lebih melihat sejauh mana orang itu punya pengaruh dan disegani di daerahnya." Pane, N.S. 2011: 38)

Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Panglima Wilayah GAM Aceh Darussalam, Nur Idris baru berusia 27 tahun. Usia yang lebih muda terlihat pada Panglima Sagoe Krueng Sabe, Aceh Barat, yaitu Deddy yang baru berusia 25 tahun.

Kualifikasi jabatan yang mendasarkan pada popularitas atau pengaruh seseorang terhadap sebuah kawasan basis militer menjadi sebuah distingsi dalam gerakan gerilya GAM. Karena dalam banyak kasus pengangkatan panglima atau kenaikan jabatan seorang pasukan tempur lebih mendasarkan pada kapasitas

tempur dan prestasi tempurnya, bukan pada popularitas seseorang. Sangat mungkin, mekanisme kualifikasi—popilaritas dan pengaruh—ini digunakan untuk memastikan berjalannya struktur komando dan terdistribusinya kebijakan-kabijakan dari hierarki tertinggi sampai yang terkecil.

Lahirnya Faksi

Sejak tahun 1997, terdapat GAM Hasan Tiro dan MP GAM yang berselisih terkait dengan misi perjuangan GAM ataupun visi negara Aceh Merdeka. Markas besar GAM di perkampungan Aceh di Norsborg, Stockholom, Swedia sehingga ada dua markas besar, satu adalah versi Hasan Tiro dan satu lagi versi MP GAM yang dikendalikan oleh Zaini Abdullah dan Syarif Goran Usman. Untuk memudahkan komunikasi, GAM Hasan Tiro membuka markas di Thailand. MP GAM membuka hubungannya di Malaysia yang dipimpin oleh Dr. Husaini Hasan dan Singapura dipimpin Meuntro Malek. Untuk wilayah Amerika GAM membuka markas di kota Kansas yang dipimpin Musanna Abdul Wahab. Namun catatan penting di sini adalah bahwa untuk perjuangan lapangan di Aceh, GAM di bawah satu pimpinan yang dipercayakan oleh kedua kubu tersebut yaitu Tengku Abdullah Syafei. Panglima Perang GAM Tengku Abdullah Syafei⁵⁶ adalah pimpinan militer GAM yang dipercaya oleh dua kubu GAM yaitu kubu Hasan Tiro dan kubu MP GAM. Sedangkan kedua kubu tersebut bisa kita tafsir hanya berada pada wilayah konsepsi dan

⁵⁶ Markas besar dari panglima perang ini ada di sekitar perbatasan Aceh Pidie dan Aceh Utara dan selalu berpindah-pindah. Di markas besar ini paling tidak terdapat 500 pasukan tempur, 100 intel, 150 polisi, 100 *karades* (pasukan elit), dan 150 pasukan *Inong Balee* (janda korban DOM). Pasukan ini hampir dilengkapi dengan senjata AK-47 dan M-16.).

diskursus karena pasokan dana dan senjata tetap diberikan bagi perjuangan di Aceh (melalui Abdullah Syafei) (Pane, N.S. 2011: 129-130).

Fakta atas adanya faksi ini menunjukkan bahwa semakin besar GAM sebagai sebuah gerakan 'perlawanan', maka semakin sulit dalam pengelolaannya. Karena munculnya faksi menjadi pertanda atas keroposnya sebuah relasi komando dalam struktur elit GAM. Namun karakter *warlord* yang melekat pada Hasan Tiro akhirnya mengeliminasi faksi MP GAM—terlihat dalam pertemuan Stavenger Norwegia 2002 pada Bab berikutnya—dan memang secara faktual, Pemerintah RI 'mimilih' kubu Hasan Tiro—terlihat dalam fase perundingan selanjutnya—yang memang menjadi *historical enemy* sejak 1976.

Sekalipun demikian kita tidak bisa membayangkan bahwa struktur komando militer GAM—yang pada fase militerisasi berada di bawah panglima perang Abdullah Syafei—mempunyai praktik pengorganisasian militer yang rapi.

"...sesama eks-Libia pun tidak bisa kompak...hal ini membuat cara kerja komando daerah militer GAM di tingkat panglima wilayah ke bawah sangat tergantung dari perasaan masing-masing panglima. Tak jarang panglima Sagoe saling bentur satu sama lain. Jadi jangan heran jika di Aceh sejak tahun 1999 terlalu sering ditemukan mayat tak dikenal di tepi jalan..."
(Pane, N.S. 2011: 229).

Keterangan ini penting karena memberi penegasan GAM sebagai gerakan gerilya. Gerakan gerilya mempunyai kecenderungan gerakan yang sporadis karena sangat bergantung pada peluang dan kondisi lapangan. Di sisi lain, keterangan ini menjadi alasan terjadinya perbenturan antara GAM-TNI, dan kerusuhan-kerusuhan pasca perundingan-perundingan yang mendominasi—karena belum sampainya atau ketidakpatuhan pada keputusan pusat komando—dan menjadi pertanda dimulainya fase demiliterisasi.

Tabel 3.3 Perbandingan gerakan Fase Konsolidasi dan Fase Militerisasi⁵⁷

Varian/ Karakter	Konsolidasi	Militerisasi
Waktu Efektif	1976-1979	1986-1999
Perjuangan	Defensif-propaganda	Militeristik-bersenjata
Teritori	Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie	Seluruh wilayah Aceh
Kepemimpinan	Determinasi <i>Warlord</i>	Split Leadership
Rekrutmen	Tertutup-Keluargaan	Tertutup-Selektif
Kaderisasi	Kekerabatan	Popularitas-Pengaruh

Namun dalam akhir fase ini tahun 1999, banyak juga panglima yang meninggal seperti Panglima Wilayah Meureuhon Daya Abdul Mutalib atau Abu Arafah, Panglima Nagan Aceh Barat T.Usman, Panglima Teunom, Panglima Meureubo Benyamin Yusuf, Panglima GAM Simeuleue Khalis, Panglima Sagoe Ulee Rubek Hamdani (Pane, N.S. 2011: 119).

⁵⁷ Tidak dimasukkannya fase tenang dalam tabulasi perbandingan fase konsolidasi dan fase militerisasi adalah karena fase tenang hanya bekerja di ranah propaganda internasional sementara pengorganisasi di bumi Aceh mengalami kemandegan sehingga hal ini tidak bisa memenuhi varian-varian sebagai sebuah organisasi gerakan yang dapat diperbandingkan.

Fase Demiliterisasi (2000-2005)

Pembilahan antara fase militerisasi dan fase demiliterisasi di dasarnya didasarkan pada tiga alasan pokok. Pertama adalah konteks eksternal dimana pemerintah Indonesia mencabut status DOM⁵⁸ di Aceh. Kedua adalah berhentinya aktivitas militerisasi gerakan seperti rekrutmen milisi, pelatihan dan pengiriman kader ke Libia. Ketiga adalah bergabungnya GAM dalam aktivitas perlawanan sipil dan masuknya GAM ke dalam meja-meja perundingan dengan pemerintah Indonesia.

Dicabutnya DOM pada 7 Agustus 1998 oleh panglima ABRI Jenderal Wiranto pada dasarnya adalah penggantian label terhadap gerakan militer di Aceh. Pemerintah Indonesia kemudian mengirimkan beberapa operasi di bawah komandan Polri, yaitu seperti Pasukan Penindak Rusuh Massa (PPRM), Operasi Wibawa, dan Operasi Cinta Meunasah. Operasi ini pada akhirnya justru mengakibatkan jumlah kasus pelanggaran HAM meningkat tajam antara tahun 1998 sampai 1999 di bawah pemerintahan B.J. Habibie. Bahkan Neta S. Pane (2001: 269-323) mengisahkan seputar tahun 1999 sampai 2001—setelah dicabutnya Daerah Operasi Militer—sering terjadi konflik dan tindak kekerasan, pembunuhan, baik yang tidak diketahui maupun yang disebabkan oleh GAM ataupun TNI.

⁵⁸ Pemberlakuan status darurat militer pada pemerintahan Presiden Megawati melalui Keputusan Presiden No.18/2003 pada tanggal 19 Mei 2003 sampai dengan 18 Mei 2004 (satu tahun) tidak mengakibatkan peningkatan aktivitas militeristik seperti pelatihan atau pengiriman pasukan ke Libia, atau perekrutan pasukan secara besar-besaran. Sehingga garis demargasi ke dua fase tersebut—militerisasi dan demiliterisasi—lebih didasarkan pada aspek pengelolaan organisasi di internal GAM.

“Terjadi kekerasan dan pelanggaran HAM sepanjang tahun 1999. Habibie berjanji menghentikan kekerasan pada Maret 1999, padahal 3 Mei 1999 di Aceh Utara militer Indonesia melakukan pembantaian massa sipil Simpang KKA dengan korban laki-laki, perempuan, dan anak-anak 39 jiwa. Dan pada 23 Juli 1999 militer Indonesia juga melakukan operasi militer dalam bentuk pembantaian terhadap Tengku Bantaqiah beserta 55 santri di Beutong Ateuh, Aceh Barat.” (Ishak, O.S. 2001: 57).

Perlawanan Sipil, Mencoba Beradaptasi

Walaupun kemudian Habibie mengunjungi Aceh pasca dihentikannya DOM⁵⁹. Alhasil tuntutan rakyat Aceh semakin mengkristal hingga munculnya perlawanan di luar misi kemerdekaan yang dibawa GAM. Mahasiswa dan kelompok Non Governmental Organization atau NGO membentuk Sentral Informasi Referendum Aceh atau SIRA sebagai jalur sipil namun mempunyai roh perlawanan terhadap pemerintah RI yang tidak jauh berbeda dengan GAM. Hal ini yang kemudian menggiring pada sebuah simpulan adanya tiga gerakan di Aceh pada periode ini.

“Dalam atmosfir kehidupan politik di Aceh ada 3 bentuk gerakan politik, yaitu gerakan damai rakyat sipil yang menuntut referendum;

⁵⁹ Dalam kunjungannya pada 26 Maret 1999, Presiden B.J. Habibie membuat 9 Janji pada rakyat Aceh (Ahmad Farhan Hamid dalam Moch. Nurhasim) sebagai tindak lanjut terhadap pemberlakuan DOM.

gerakan bersenjata RI untuk Negara Kesatuan; dan gerakan bersenjat AM (Aceh Merdeka) untuk kemerdekaan Aceh." (Ishak, O.S. 2001: 34).

Titik klimaks dari gerakan sipil tersebut adalah dengan adanya Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum (SU MPR) pada tanggal 8 November 1999⁶⁰. Tidak berselang satu bulan dari gerakan sipil yang menghimpun lebih dari 1 jutaan masyarakat Aceh, milad GAM ke-23 dilaksanakan pada 4 Desember 1999 (Tippe, S. 2001:24). Di tahun inilah pemimpin menerima gagasan referendum dari gerakan sipil yang memuncak (Edward Aspinall 2007). Artinya gagasan kemerdekaan (kedaulatan Aceh) menjadi kabur karena konsekuensi referendum adalah menerima hasil atas keinginan rakyat—atas dua opsi yang akan dipilih: merdeka atau NKRI—bukan visi kemerdekaan *an sich* yang diperjuangkan GAM.

Terkait dengan periode menjelang millenium tersebut, dikisahkan oleh Neta S. Pane (2001) selanjutnya bahwa pada milad GAM ke-23 tersebut Abdullah Syafei menyerukan kepada simpatisan dan masyarakat Aceh untuk tidak mengibarkan bendera GAM. Hal ini ditujukan agar tidak memancing gerakan TNI untuk membantai rakyat Aceh. Keterangan ini bisa kita lihat bahwa keputusan dan tindakan GAM—melalui Abdullah Syafei—tersebut menjadi penegasan atas bentuk demiliterisasi GAM pasca dicabutnya DOM. Sedangkan pada saat yang sama kita membaca bahwa keputusan

⁶⁰ Banyak dari para pengamat dan analis menyatakan bahwa Tuntutan referendum banyak distimulasi oleh kebijakan B.J. Habibie dalam menyelesaikan kasus Timor Timur.

'berdamai' dengan TNI (Pemerintah RI) tersebut adalah bentuk kompromi dan adaptasi GAM dengan gerakan sipil yang marak pada waktu itu. Walaupun demikian, hal tersebut tidak berlangsung lama karena benturan GAM-TNI kembali terjadi sebagaimana dikisahkan oleh Neta S.Pane (2001: 210) berikut,

"Prajurit TNI dan GAM sepanjang hari di awal tahun 2000 terus bertikai dan melakukan kontak senjata. Puncaknya pada 6 Februari 2000 Bandar Udara Malikulsaleh Lhokseumawe Aceh Utara—pintu gerbang investor asing masuk ke Aceh—dibakar sekelompok orang tak dikenal. Kemudian berlanjut pada bentrokan senjata di Sigli Aceh Pidie pada tengah malam"⁶¹.

Perundingan: Jalan Baru

Fase demiliterisasi GAM pada tingkatan selanjutnya ditunjukkan dengan ditempuhnya jalur perundingan (Ishak, O.S. 2001). Perundingan yang pertama kali ini diprakarsai oleh presiden Abdurrahman Wahid. Perundingan pada 15 Mei 2000 tersebut menghasilkan kesepakatan antara RI dan GAM sebuah penandatanganan Jeda Kemanusiaan yang diberlakukan dari 2 Juni 2000 sampai 15 Januari 2001⁶². Di titik ini kita bisa memastikan bahwa jalur militeristik bagi GAM bukanlah hal yang tunggal, dan seolah GAM menyatakan

⁶¹ Selain karena faktor TNI, keterangan ini menunjukkan struktur komando yang tidak rapi sebagaimana simpulan kita dalam fase militerisasi GAM pada bab sebelumnya.

⁶² Kesepakatan ini dijembatani oleh Henry Dunant Centre atau HDC. Walaupun dalam praktiknya kekerasan masih terjadi di Aceh. Lebih lanjut, lihat dalam Ikrar Nusa Bhakti (penyunting). 2008. *Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar., hlm.18-19.

diri ke *khittah*-nya dalam gerakan diplomasi—sebagaimana semangat awal Hasan Tiro.

Sebelumnya pada 11 April 2001, Gus Dur menetapkan Instruksi Presiden No. IV/2001 tentang langkah-langkah menyeluruh dalam penyelesaian kasus Aceh (Bhakti, I.N. (ed.) 2008: 18-19). Sehingga memang gagasan perundingan tersebut pada dasarnya adalah varian dari inpres bulan April.

Gagasan otonomi khusus pertama-tama juga dilontarkan oleh Gus Dur namun baru dapat diundangkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputeri melalui UU No.18/2001 tentang Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Syariat Islam untuk Aceh (Bhakti, I.N. (ed.) 2008: 101). Akhirnya pada 9 Desember 2002 Pemerintah RI—dibawah Megawati—dan GAM di Geneva Swiss menandatangani Kesepakatan Penghentian Permusuhan atau *Cossation of Hostilities Agreement* atau CoHA, kesepakatan ini secara praksis adalah bentuk gencatan senjata kedua belah pihak.

Karena kondisi Aceh terus bergolak akibat CoHA sulit diimplementasikan baik pengingkaran yang dilakukan oleh milisi GAM (TNA) maupun Pemerintah RI (TNI). Akhirnya pada 19 Mei 2003 Presiden Megawati Soekarnoputeri mengeluarkan Keputusan Presiden No.28 tahun 2003 yang menandai status darurat militer di wilayah Aceh yang berakhir sampai 18 Mei 2004.

Namun yang menarik atas struktur eksternal pemerintahan RI Megawati adalah bahwa fakta demiliterisasi dan strategi defensif semakin jelas jika kita memperhatikan *release* 'menyambut' status darurat

militer adalah bukan ditujukan pada persiapan bertempur (bersenjata) namun justru menginstruksikan pada gerakan-gerakan sipil. Hal ini terlihat dari penekanan release yang diberi garis miring dalam situsnya www.asnlf.net⁶⁴, sebagaimana berikut:

"...Mogok umum akan dilaksanakan pada jam dan tanggal pemerintah kolonialis Indonesia mengumumkan operasi militernya, apapun nama operasi yang diberikan. Seluruh intansi dan instalasi milik pemerintah kolonialis Indonesia harus dikosongkan, kecuali rumahsakit. Seluruh pompa bensin dan bahan bakar harus ditutup. Masyarakat di kampung-kampung, apabila tidak ada operasi militer dapat tetap menjalankan aktivitasnya, namun harus dengan kewaspadaan yang tinggi...(cetak miring oleh penulis)".⁶⁵

Pergantian rezim Pemerintahan RI pasca pemilu 5 Juli 2004, justru memperpanjang fase ini. Karena pada rezim-rezim pemerintah pasca reformasi, inisiatif perundingan atau negosiasi selalu dilontarkan oleh pihak pemerintah RI dan hampir dari semua gagasan damai tersebut disetujui oleh GAM. Hal ini menandakan

^{63/64} Jika kita membuka situs tersebut, maka kita akan memahami bahwa organisasi sipil diluar jalur pertempuran berjalan. Karena laporan militer dari medan perang di tanah Aceh dari hari perhari bahkan per jam tersarp rapi dalam situs tersebut dan dapat diakses oleh khalayak. Namun jika kita mempelajari laporan yang masuk dan dilampirkan dalam situs, maka kita akan menarik garis simpul bahwa pendokumentasian tersebut baru dilakukan tahun 2003 dan berakhir pada Juli 2005. Karena tidak ada laporan diluar antara awal 2003 sampai pertengahan 2005.

⁶⁵ Release ini tertanggal pada 18 Me1 2003 yang juga tersarp dalam dokumen GAM pada situs tersebut.

sekaligus mempertegas bahwa karakter gerakan GAM pada fase ini lebih memilih jalur sipil sedangkan jalur militer tetap berlangsung untuk mendukung atau menekan proses perjuangan di perundingan—untuk merdeka. Walaupun tidak bisa disamakan, GAM pada fase ini seolah kembali pada fase konsolidasi dimana gerakan sipil—propaganda, diplomasi, gerakan simbolik—lebih ditonjolkan sementara sayap militer berfungsi defensif untuk memastikan gerakan sipil berjalan pada jalurnya (asnl.net 2011)⁶⁶.

Reformasi Gerakan: Sebuah Reorientasi

Elaborasi di atas adalah menjelaskan konteks eksternal dari Pemerintah RI yang menunjukkan perilaku GAM untuk menempuh jalur-jalur perundingan diluar jalur militer-gerilya. Namun pada saat yang sama pada tanggal 19 sampai 21 Juli 2002 telah diselenggarakan pertemuan penting yang menandai restrukturisasi organisasi GAM. Pertemuan ini akhirnya menghasilkan apa yang disebut dengan Deklarasi Stavanger atau *The Stavanger Declaration*⁶⁷. Beberapa poin pokok terkait dengan kelembagaan GAM atas kesepakatan tersebut adalah:

⁶⁶ "...gabungan 6 tim pasukan TNI Kostrad Yon 511/Badak Hitam, mengepung dan menyerang dengan melepaskan tembakan-tembakan ke arah **posisi defensif pasukan TNA** Sagoe Idi Kuta Daerah IV Idi Wilayah Peureulak di Kampung Lhok Meureue Kecamatan Darul Ikhsan, Aceh Timur... Pada hari Senin, 18 Juli 2005 pukul 22:00, pasukan TNI mengepung dan menyerang dengan melepaskan tembakan-tembakan ke arah **posisi defensif pasukan TNA** di Kampung Meunasah Blang Panté (Panté Kiroe) Kecamatan Matang Kuli, Aceh Utara."

⁶⁷ Arsip atas deklarasi ini juga terlampir dalam situs GAM www.yoniflinud330.mil.id. Karena menurut deklarasi tersebut, situs GAM adalah hasil kesepakatan dari pertemuan di Stavanger, Norwegia pada 21 Juli 2002 sebagaimana diktum berikut: "*That the State of Aceh sets up an information database open to the public worldwide, as soon as it is feasible.*"

“...That the Chief of State, Wali Neugara, Teungku Dr. Muhammad Hasan di Tiro, has promoted: 1) Teungku Malik Mahmood, Minister of State, as the new Prime Minister of the State of Aceh. 2) Teungku Dr. Zaini Abdullah, as also the Minister of Foreign Affairs. 3) The current Information Officer of ASNLF as the Director General of the Department of Information...

...That Acehnese abroad shall increase diplomatic efforts in order to improve international relations of the State of Aceh especially in the following countries: the Scandinavian nations, the European Union nations, the North American nations, Australia and the Pacific nations. That the AGAM forces is now called Tentera Neugara Aceh (Aceh National Armed Forces)...”⁶⁸

Deklarasi di Norwegia tersebut seolah ingin mengatakan bahwa GAM sudah menyatu dengan entitas Aceh, karena Hasan Tiro sebagai kepala ‘Negara Aceh’ bukan GAM. Sedangkan hadirnya Malik Mahmud sebagai Perdana Menteri menjadi pretensi atas kepemimpinan GAM pasca Hasan Tiro ke depan. Penegasan struktur perdana menteri ini adalah yang pertama dari deklarasi 1976 sampai 2002, namun jika kita perbandingan dengan fase konsolidasi, Perdana Menteri yang dijabat Malik Mahmud tidak jauh berbeda dengan Wakil Wali Nanggroe yang dulu dijabat Dr. Muchtar

⁶⁸ Beberapa poin pokok lainnya adalah terkait dengan nama dan simbol negara Aceh, identitas masyarakat Aceh, pendidikan, dan relasi dengan pihak-pihak lain.

Yahya Hasbi Geudong. Yaitu untuk menjalankan roda keseharian organisasi sementara Hasan Tiro tetap mempunyai hak veto atas keputusan-keputusan PM.

Sedangkan arah organisasi sebagaimana kita lihat, diplomasi dan menarik simpati internasional lebih dikedepankan di bandingkan dengan gerakan militer, karena dalam deklarasi tersebut perubahan nama dari AGAM menjadi TNA adalah satu-satunya hal yang terkait dengan gerakan militeer, artinya tidak ada instruksi atau keputusan dengan substansi militerisasi gerakan. Propaganda internasional yang dituju adalah dari negara-negara Eropa, Amerika Utara, Australia, maupun di kawasan Pasifik. Format tersebut menjelaskan bahwa GAM mereorganisasi dirinya untuk memperkuat gerakan di luar jalur militer.

"...Panglima TNA juga mengulang komitmen penuh TNA untuk patuh kepada Pemerintahan Sipil Negara Aceh dalam melaksanakan segala tugas yang dibebankan kepadanya..." (Manaf, M. 2003).

Pernyataan sikap penglima TNA Muzakir Manaf yang disampaikan oleh Juru bicara Komando Pusat Militer TNA Sofyan Dawon tersebut menunjukkan bahwa gerakan dan strategi militer berfungsi sebagai *supporting instrument* atas organisasi sipil yang di bangun GAM dipengasingan, sekaligus juga mempertegas berjalannya relasi komando antara elit di pengasingan dengan elit di lapangan. Fungsi militer tidak saja dijadikan sebagai instrumen penopang fungsi hankam, tetapi juga dijadikan instrumen penopang fungsi sosial politik (Maliki, Z. 2000: 89).

Di sisi lain bencana tsunami yang menerjang Aceh pada 26 Desember 2004 dengan jumlah korban meninggal sebanyak 128.123 orang, sekitar 37.062 orang hilang, seolah menjadi sebuah stimulus alam dan kemanusiaan yang memungkinkan GAM *mengambil* jalur perundingan. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya draft nota kesepakatan oleh Malik Mahmud (GAM) dan Hamid Awaludin (RI) pada 15 Agustus 2005 sebagai pertanda titik klimaks transformasi GAM yang lebih dari separuh perjalanannya sebagai gerakan separatis menggunakan cara militeristik. Determinasi alam tersebut sebagaimana terlihat dalam alenia ketiga pengantar Nota Kesepakatan Helsinki,

“...Para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pasca tsunami tanggal 26 Desember 2004 dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan...”
(Departemen Komunikasi dan Informatika RI, Badan Informasi Publik 2005).

Akhirnya, benang merah atas elaborasi ini adalah adanya tiga hal besar sebagai relasi kausal transformasi GAM pada fase ini, dan satu hal besar yang memungkinkan GAM mempunyai kanal transformasi. Faktor kausal pertama adalah '98 effect atas tumbanganya Soeharto yang memberi konsekuensi meluapnya semangat demokratisasi (implisit liberalisasi politik) di penjuru negeri termasuk kawasan Aceh. Gerakan sipil dengan membawa semangat referndum di Aceh adalah fakta yang tak terbantahkan atas hal ini, dan di titik inilah GAM 'terperangkap' dalam kubangan demokrasi. Kedua, status darurat militer Mei 2003 sampai Mei 2004 yang

mendesak GAM untuk berpikir kembali karena banyak kehilangan banyak milisi dan tokohnya. Faktor kausal ketiga adalah bencana tsunami yang selain berdampak internal bagi hilangnya anggota dan pimpinan, tetapi juga membangun orientasi baru bagi elit GAM untuk berbicara tentang kemanusiaan. Sedangkan perundingan Helsinki yang dimulai sejak Januari sampai Agustus 2005, menjadi medium tunggal bagi GAM sebagai kanal transformasinya untuk menegosiasikan dan mengkonversi visi kemerdekaan, serta mengkondisikan adanya ruang baru pasca bergabung dengan RI dalam tatanan demokrasi.

Sedangkan secara organisasional, persentuhan GAM dengan rakyat Aceh adalah perwajahnya sebagai sebuah gerakan bersenjata daripada eksistensi struktur sipil⁶⁹. Karena pembagian riwayat GAM dalam tiga fase tersebut menunjukkan dua basis gerakan GAM, yaitu politik-diplomasi dan gerakan militer-pertahanan. Terkait dengan hal ini Neta S.Pane (2011: 115-116) menerangkan bahwa

"...GAM memberi garis tegas bahwa pihak militernya maupun panglima militernya tidak boleh berpolitik. Tugas kekuatan militer GAM hanya bertempur, bergerilya, dan menghancurkan kekuatan TNI. Urusan politik dan diplomasi menjadi urusan Hasan Tiro di Swedia..."

⁶⁹ From early 1999, many Acehnese believed the momentum toward independence was unstoppable. One of the largest mass mobilisations in Indonesian history took place in November 1999. Hundreds of thousands gathered outside Banda Aceh's Baiturrahman Mosque to demand an independence referendum. Armed rebellion was also better organised in Aceh than elsewhere. At its peak the Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka, or GAM) controlled 70 percent of the countryside.

Pengorganisasian GAM banyak didasarkan pada tatanan gerakan militer untuk mengorganisasi resistensi rakyat Aceh terhadap Jakarta. Praktis, pengorganisasian GAM secara masif dilakukan dalam gerakan militeristik sebagaimana penjelasan detailnya dalam fase militerisasi. Artinya transformasi GAM di lapangan Aceh adalah transformasi dari gerakan bersenjata.

Kesimpulan

Gerakan Aceh Merdeka tidak bisa kita lihat sebagai sebuah *single moment* sebagai sebuah fakta *insurgency movement* di Indonesia. Karena eksistensinya sejak proklamasi gerakan pada 1976 sampai 2005 atau hampir 30 tahun mengalami beberapa fase gerakan dengan karakter yang berbeda-beda. Sehingga GAM sebagai sebuah entitas gerakan yang dinamis dapat kita peras dalam tabulasi berikut.

Tabel 3.4 Paparan GAM Sebagai Organisasi Yang Berdinamika Dalam Beberapa Fase

Varian/ Karakter	Konsolidasi	Tenang	Militerisasi	Demiliterisasi
Waktu Efektif	1976-1979	1980-1985	1986-1999	2000-2005
Perjuangan	Defensif propaganda	Diplomasi	Offensive Militeristik-bersenjata	Defensif Militeristik-diplomasi
Teritori	Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie	-	Seluruh wilayah Aceh	Aceh
Kepemimpinan	Determinasi <i>Warlord</i>	Determinasi <i>Warlord</i>	Split Leadership	Patron-Demokratik
Rekrutmen	Tertutup-Keluargaan	-	Tertutup-Selektif	Tertutup-Massif
Kaderisasi	Kekerabatan	-	Popularitas-Pengaruh	Popularitas

Namun tidak bisa di bantah bahwa kelahiran GAM sebagai sebuah gerakan perlawanan terhadap otoritas pusat hadir karena tiga perspektif dasar: Hasan Tiro sebagai *warlord* gerakan; kesadaran identitas kebangsaan sebagai bangsa Aceh yang berdaulat di bawah tafsir Hasan Tiro; dan fakta kesenjangan sosial yang terjadi di Aceh.

Sedangkan dari tiga persepektif ini, interpretasi bangsa Aceh sebagai bangsa yang berdaulat dan bukan bagian dari Hindia Belanda adalah *core motivation* yang mengilhami gagasan *secession* selanjutnya. Argumen ini didasarkan pada fakta propaganda gerakan yang konsisten terkait dengan isu Acehnesese tersebut, yaitu sejak proklamasi gerakan pada 4 Desember 1976 sampai masuknya GAM pada fase demilitersisasi era ketika Indonesia berada pada sebuah *circumstance* demokratisasi. Artinya GAM sebagai sebuah organisasi gerakan hadir untuk mengantarkan pada realisasi ide Aceh sebagai sebuah bangsa yang berdaulat. Dan dalam proses pengantaran ide pemisahan inilah GAM bukan sebuah gerakan dengan karakter yang konstan.

Studi genealogis ini akhirnya menemukan GAM berada pada empat fase penting yang pada dasarnya membedakan karakter gerakan satu-sama lain. Pembagian empat fase ini menjadi distingsi studi atas studi-studi lainnya yang hanya membagi perjalanan GAM dalam tiga fase (Moch. Nurhasim 2007, Isa Sulaiman 2001, Delsy Ronny 2005). Dari keempat fase tersebut, fase ketenangan, fase dimana GAM 'tidak hadir' dalam konstelasi bersenjata di Aceh, justru merupakan fase yang paling penting bagi GAM untuk melakukan kerja diplomasi di luar negari. Sedangkan dua fase

lainnya—fase konsolidasi 1976-1979 dan fase militerisasi 1986-1999—GAM menampakkan wujudnya dengan jelas sebagai gerakan militer atau dalam konteks *insurgency movement* adalah gerakan dengan metode perang gerilya.

Hal ini bukan berarti bahwa pada fase demiliterisasi 2000-2005, GAM bergerak tanpa senjata. Pergerakan GAM sebagai gerakan bersenjata pada fase yang terakhir ini cenderung pasif, karena GAM memasuki strategi-strategi negosiasi dan diplomasi. Di titik inilah kita meletakkan analisis bahwa *circumstance* demokratisasi Indonesia mempengaruhi pada gerakan perlawanan di Aceh yang cenderung menggunakan jalan sipil seperti referendum, negosiasi, dan diplomasi, sementara pasukan kombatan berfungsi defensif. Di sisi lain terjadi pola umum bahwa, karakter kebijakan militeristik yang dilakukan rezim Jakarta berpengaruh pada militansi gerakan GAM yang semakin kuat, sementara demiliterisasi yang dilakukan rezim Jakarta—Abdurrahman Wahid dan Susilo Bambang Yudhoyono—seperti gencatan senjata, negosiasi dan perundingan damai berimplikasi pada tereduksinya semangat perlawanan gerakan.

Namun, kita tidak bisa melepaskan relasi kausal atas pembersihan gerakan melalui jalur militer—era Soeharto dan Megawati—merupakan prakondisi yang mendorong upaya perundingan untuk menegosiasikan kembali gerakan. Di sisi lain, GAM secara internal juga mengalami reformasi gerakan dengan adanya Deklarasi Stavanger di Norwegia pada 2002. Poin penting atas isi deklarasi ini adalah penekanan gerakan pada ranah sipil, pasukan bersenjata yang defensif, dan pengelolaan Aceh yang demokratis. Artinya, selain faktor rezim dan

prakondisi alam—bencana tsunami—kanalisasi akhir dari gerakan perlawanan GAM juga dipengaruhi oleh *political will* elit gerakan melalui fakta Deklarasi Stavenger tersebut.

Dalam kerangka analisis yang lebih besar, terjadi kristalisasi cleavage yang diperankan oleh GAM terutama pada akhir fase militerisasi sampai berakhirnya GAM secara anti-klimaks pada Agustus 2005. Cleavage ini terbangun karena GAM akhirnya bukan organisasi gerombolan pemberontak dengan ide pemisahan, melainkan menjadi gerakan representasi dan satu-satunya kanal bagi pertentangan rakyat Aceh terhadap pusat (Pemerintah RI di Jakarta) yang koersif. Sehingga dalam perspektif eksternal, GAM menjadi aktor yang mampu menghadirkan lahirnya partai lokal dari ruang relasi konflik pusat-periferi atau nasional-lokal sebagai artikulasi dan konversi local cleavage yang mengkristal mempersamai tumbangnya rezim despotik Soeharto. Walaupun secara internal, transformasi ke dalam bentuk lembaga kepartaian adalah sebuah usaha 'pengamanan' politik bagi elit GAM yang akan kita kupas dalam beberapa bab selanjutnya.

TITIK BALIK TRANSFORMASI

Local cleavage yang diperankan oleh GAM merupakan sebuah perjuangan teritori sebagaimana pada batas-batas politik Aceh Gambar 2.1, sehingga dalam kerangka konseptual Lipset-Rokkan pertentangan tersebut berada pada garis konflik centre-periphery atau pusat-daerah. Namun ketidaksepakatan pada formasi dan dominasi negara berakhir pada anti-klimaks karena perjuangan GAM selama hampir 30 tahun tidak berakhir pada pemisahan yang disebut oleh GAM dengan kata merdeka. Di sisi lain akhir yang anti-klimaks tersebut kita lihat sebagai sebuah *translation* atas *local interest* Aceh (GAM) sebagai sebuah cleavage. Sehingga bab ini menjadi penting untuk melihat relasi kausal apa saja yang memungkinkan terbentuknya penerjemahan cleavage tersebut dengan apa yang kita sebut sebagai transformasi.

Transformasi GAM akhirnya didorong oleh tiga faktor yang mempunyai relasi kausalitas. Pertama adalah status darurat militer yang diterapkan oleh Megawati karena akhirnya menghilangkan beberapa tokoh GAM baik karena terbunuh maupun dipenjara. Kausalitas pertama ini menunjukkan karakter rezim negara yang represif sebagai faktor pendorong bagi transformasi GAM. Kedua adalah bencana tsunami karena selain

menghilangkan beberapa tokoh GAM juga menjadi faktor vital untuk membangun kesadaran damai atas konflik yang berkepanjangan. Ketiga adalah perundingan di Helsinki yang kemudian konsepsi *self-government* dan partai lokal di dalamnya menjadi hal krusial yang tidak bisa ditawar. Hal ini menunjukkan bahwa karakter 'terbalik' rezim SBY dari karakter rezim Megawati (dan Soeharto) menjadi faktor penarik bagi transformasi GAM yang memungkinkan adanya kanal transformasi. Sehingga kita perlu memahami ketiga faktor eksternal tersebut untuk membaca dinamika dan motif transformasi secara internal (GAM) yang berimplikasi pada wujudnya dalam bentuk lembaga kepartaian.

Dampak Status Darurat Militer

Kekacauan yang melanda negeri Serambi Mekah terus berlanjut (asnlf.net 2011)⁷⁰. Dan atas dasar fakta kerusuhan dan benturan militer baik dari Teuntara Neugara Atjeh (Tentara Negara Aceh) atau TNA maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI), presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2003. Kepres ini yang kemudian menandai diberlakukannya status darurat militer di Aceh pada tanggal 18 Mei 2003 dan berakhir pada 19 Mei 2004. Atas kebijakan Pemerintah RI ini GAM menafsir bahwa Pemerintah RI mengajak (kembali) berperang dengan milisi-milisi yang tergabung di TNA. Hal ini terlihat dalam press release yang dikeluarkan Pusat Informasi Militer TNA tertanggal 18 Mei 2003 dengan judul 'RI

⁷⁰ Pada dasarnya pada akhir bulan April 2003 akan diadakan *Joint Council* antara GAM dan Pemerintah RI yang dimediasi oleh Hendry Dunant Center atau HDC. Namun jika melihat pernyataan Tgk. Sofyan Ibrahim Tiba, pertemuan tersebut gagal karena pihak Pemerintah RI merasa tidak pas dengan HDC.

Memaksa Perang Kolonial II Terhadap Bangsa Aceh⁷¹. Namun pada saat yang sama status darurat militer ditumpangi dengan kampanye ideologis yang terlihat dengan adanya “ikrar kesetiaan” bagi siapapun masyarakat Aceh (Aspinal, E. 2011). Karena kita mengambil perspektif GAM maka kebijakan Pemerintah RI adalah bentuk re-kolonialisasi bagi Aceh.

Gerakan militer TNI yang mendasarkan pada status darurat tersebut dapat kita lihat gambarannya melalui deskripsi berikut:

“...pihak RI menerapkan Darurat Militer (DM) yang telah berlangsung 6 hari di Aceh, Hari ini (Sabtu, 24/05/2003), pengempuran secara besar-besaran oleh TNI dengan melibatkan kendaraan lapis baja Tank Amphibi dan Artileri Mortir ditembakkan ke perbukitan kawasan perkampungan penduduk sipil di kecamatan Bandar Baru, Geulumpang Tiga, Padang Tiji, Mila dan Delima-Pidië. Sebelumnya 5 unit Kapal Perang TNI dari arah laut dan Helikopter telah menggempur kawasan perkampungan penduduk sipil di Pulo Aceh-Peukan Bada, Aceh Besar. Akibatnya, ada 20 mayat warga sipil telah ditemukan...” (asnlf.net 2011).

⁷¹ Dalam *release* tersebut, dinyatakan pertama-tama bahwa sebab atas status darurat militer yang dikeluarkan Pemerintah RI adalah gagalnya perundingan (*Joint Council*) di Tokyo. Tersirat dalam *release* bahwa pada dasarnya delegasi GAM dan pihak-pihak internasional—duta besar Yunani (Mewakili Uni Eropa), Dubes AS, Bank Dunia, dan Duber Jepang—sudah hadir namun Pemerintah RI membatalkannya.

Keterangan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara TNA Tgk. Sofyan Dawod dalam press release 24 Mei 2003 yang diarsip secara rapi oleh GAM. Sedangkan jika kita mempelajari arsip-arsip laporan militer di lapangan sepanjang pemberlakuan status darurat militer dari 2003 sampai 2004 yang terlampir dalam situs www.asnlf.net, maka hampir semua laporan tersebut menyatakan bahwa korban atas operasi TNI pada periode itu adalah warga sipil. Sehingga memang akan sulit untuk mengidentifikasi dan menarik bukti faktual atas melemahnya GAM akibat status darurat ini. Namun dalam kesempatan berbeda kita bisa mengambil pernyataan atas kemungkinan GAM mengambil jalan perundingan sebagaimana berikut,

“meskipun harus diakui pula akibat darurat militer sebagian kekuatan GAM terpojok, dan sebagian lain telah ditahan, sehingga hasil ini pun turut mendorong pihak GAM untuk memikirkan alternatif lain selain perang”
(Nurhasim, M. 2008: 115).

Di sisi lain, sebuah laporan juga secara ‘jujur’ menyatakan bahwa anggota TNA menjadi korban atas status darurat militer tersebut, dan deskripsi gerakan TNI yang mendesak aktor-aktor penting TNA.

“...7 April 2004. Pukul 20.00, Brimob Polresta Banda Aceh menangkap seorang anggota TNA Sofyan ben Khairuman (25), warga Kp. Tiengkeum, Darul Imarah. Sofyan ditangkap di kampung tersebut sampai sekarang

keberadaannya belum diketahui...30 April 2004. Pukul 19.00, Aparat gabungan TNI Kopassus dan KODIM menangkap keluarga Panglima GAM Wil. Aceh Rayek Tgk Muharram : 1. Ainal Mardhiah benti Ishak (65), ibu, 2. Marhaban ben Idris (28) adik, keduanya asal Kp. Cot Lamkuweh, Kec. Meuraxa, 3. Cut Khairani benti T.M. Saleh (20), istri, 4. T.M. Saleh (60), mertua, keduanya asal Kp Meunasah Mesjid, Lampuuk, kec. Lhoknga. Semua korban sudah berulang kali disiksa, ditangkap dan dilepas kembali. Kemudian ditangkap kembali dengan ancaman agar Tgk. Muharram segera menyerahkan diri..."

Sedangkan jika kita merujuk pada data yang disampaikan oleh Pemerintah RI barang kali status darurat militer menjadi terang sebagai sebuah faktor yang memungkinkan GAM mengambil langkah perundingan. Sebagaimana dikutip dalam Kristen E. Schulze (2004) bahwa "menurut data TNI, selama darurat militer sebanyak 1.963 anggota GAM terbunuh, 2.100 tertangkap, dan 1.276 menyerahkan diri" (Schulze, K.E. 2004). Sehingga hal ini menjelaskan bahwa bagaimanapun juga, periode satu tahun 'pembersihan' GAM yang dilakukan oleh Megawati tersebut memberikan implikasi serius bagi kekuatan *militia* GAM di Aceh. Atas alasan ini pula jalur-jalur sipil seperti perundingan dan propaganda internasional menjadi sebuah jalan aman yang juga menjadi titik tolak transformasi GAM pada periode selanjutnya.

Alam yang Menyeru Perubahan

Tsunami pada 26 Desember 2004 adalah diluar kendali, kontrol, dan agenda GAM maupun Pemerintah RI. Namun bencana alam tersebut memberi arti yang signifikan ke arah transformasi GAM. Karena bencana tersebut 'memaksa' GAM untuk memikirkan kembali perlawanan kepada pemerintah RI dan mengubah jalur tuntutan kemerdekaan dari berperang di hutan menjadi berdialog di meja perundingan.

"...Pihak GAM tergugah atau terpanggil karena rakyat di Aceh menderita akibat musibah, masak mereka tidak mau berdamai...waktu itu seorang juru runding GAM mengatakan begini: demi rakyat Aceh kami harus menganggalkan ideologi perjuangan untuk merdeka..." (Nursalim, M. 2007: 106)

Hal ini didasari pada fakta-fakta kemanusiaan pasca bencana ini⁷². Akibat dari bencana tsunami lainnya adalah perubahan demografis yang disebabkan oleh angka kematian yang tinggi, orang hilang, dan meledaknya pengungsi (Ikrar Nusa Bakti (ed.) 2008: 48). Bencana tsunami menyebabkan—menurut Dinas Sosial Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam—jumlah korban meninggal sebanyak 128.123 orang, sekitar 37.062 orang hilang, dan 479.820 orang menjadi pengungsi dan jumlah kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal sebanyak sekitar 100.000 KK (Ikrar Nusa Bakti (ed.) 2008: 49).

⁷² Karena tingginya jumlah korban dan tingkat kerusakan. Tsunami Aceh kemudian ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai bencana nasional.

Sedangkan jika kita mengambil dari perspektif internal GAM, jelas bahwa bencana ini juga semakin melemahkan kekuatan GAM karena tokoh dan kombatan yang ada di lapangan pun juga hanyut dalam gulungan gelombang tsunami. Sebagai contoh adalah Sofyan Sarifudin Tiba—ahli hukum (profesor hukum) yang dimiliki GAM⁷³—yang meninggal akibat tsunami. Setelah pimpinan, milisi, dan beberapa tokoh GAM terbunuh maupun masuk bui akibat status darurat militer Megawati, tsunami yang menerjang wilayah pantai utara memaksa GAM untuk memperhitungkan kembali posisi dan strateginya terhadap Pemerintah RI.

Sehingga tsunami menjadi sebuah *natural determination* selain karena faktor-faktor internal (elit) maupun eksternal (Pemerintah RI dan Internasional), yang menstimulasi dan mempercepat transformasi GAM. Hal ini terlihat dari kalimat pengantar dalam MoU Helsinki.

“...Para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pasca tsunami tanggal 26 Desember 2004 dapat mencapai kemajuan dan

⁷³ pengakuan Nur Dzuli—salah satu juru runding GAM di Helsinki—dalam Moch. Nursalim (2008: 120). Bahkan dalam arsip yang ada di situs GAM—www.asnlf.net—terlihat bahwa Sofyan Ibrahim Tiba adalah salah seorang penting GAM yang beberapa kali mewakili GAM untuk mencoba perundingan dengan pemerintah RI seperti periode ketika dimediasi oleh *Hendry Dunant Centre*. Hal ini terlihat dalam laporan berjudul ‘Laporan Pelecehan dan Eksepsi Tgk. Sofyan Tiba’, “...Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Sofyan Ibrahim Tiba, umur 56 tahun, Juru Runding GAM, yang sekarang ini berstatus Tahanan Kejaksaan yang dititipkan pada Rutan Polda Aceh...”, tertanggal 29 Juli 2003.

keberhasilan..." (Departemen Komunikasi dan Informatika RI, Badan Informasi Publik 2005: 1)⁷⁴

Tafsir atas kalimat tersebut seolah menandakan bahwa perundingan dan kesepakatan damai (permanen) antara GAM dan Pemerintah RI adalah demi alasan kemanusiaan pasca bencana tsunami. Di titik inilah maka kita melihat bahwa tsunami bukan sekedar bencana alam yang hanya mampu dilihat dari perspektif geologis dan humanisme, namun secara eksplisit dia menjadi faktor eksternal penting yang berpengaruh bagi *political will* elit GAM untuk menegosiasikan kembali gerakannya. Sehingga kita perlu memahami GAM sebagai gerakan yang dikendalikan oleh elit—*warlordisme*—melalui perundingan Helsinki sebagai titik klimaks transformasi GAM.

Alhasil, laporan BRA (Agustus 2007) menyebutkan bahwa penduduk miskin di Aceh adalah 2.065.525 jiwa atau 48,92% dari total penduduk 4.222.251 jiwa. Lebih lanjut kemiskinan tersebut terletak di wilayah pedesaan. 77% penduduk Aceh tinggal di wilayah pedesaan. Ada 6 kabupaten dengan tingkat angka kemiskinan penduduk tertinggi: Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Bireuen, Aceh Tenggara, dan Aceh Selatan (bhakti, I.N. (eds) 2008: 73). Sebagaimana kita tahu bahwa pedesaan adalah basis gerakan GAM dan secara spesifik ke-enam kawasan tersebut merupakan basis GAM sejak pertama kali dideklarasikan 1976. Artinya, lepas dari dua

⁷⁴ Alenia III dalam pengantar Nota Kesepakatan Pemerintah RI dan GAM di Helsinki Finlandia pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2005 a.n. Hamid Awaludi (Menteri Hukum dan HAM RI) dan a.n. Malik Mahmud (Pimpinan GAM). Jumlah alenia dalam MoU Helsinki tersebut hanya 4 paragraf, dan secara eksplisit tsunami Aceh menjadi alasan spesifik di luar narasi normatif paragraf lainnya dalam nosa kesepakatan tersebut.

fakta dominan—tsunami dan status darurat militer—yang menstimulasi orientasi gerakan GAM dengan Pemerintah RI pasca rezim Soeharto, alur panjang konflik dan kebijakan militeristik beberapa rezim Pemerintahan di Indonesia secara simultan telah mereduksi kapasitas sosial GAM dan masyarakat Aceh di belakangnya dengan adanya data tersebut. Oleh karena itu, tawaran kembali untuk berunding pada awal tahun 2005 dimanfaatkan dengan baik oleh GAM untuk menegosiasikan gerakannya.

Proses Helsinki, Sebuah Kanal Transformasi

Setelah ‘pembersihan” GAM oleh Megawati melalui status darurat militer dan bencana tsunami yang menggiring pada isu kemanusiaan dan berefek internal bagi GAM, tidak heran jika kemudian GAM mengamini langkah damai yang diusulkan Pemerintah RI (pemerintahan SBY-JK). Dan langkah inilah yang benar-benar digunakan oleh GAM sebagai kanal atas transformasi dirinya. Sehingga kita perlu memahami bagaimana kanal ini dilalui oleh GAM sebagai dasar analisis terhadap alasan-alasan dan gagasan transformasi dirinya menjadi sebuah partai lokal yang kuat di bumi Aceh kemudian hari. Untuk keperluan tersebut, kita menggunakan banyak data dan arsip Moch. Nurhasim (2008) atas hasil studinya terkait arsitektur kanal transformasi ini.

Kanal yang dimaksud adalah Perundingan Helsinki yang berakhir pada titik tolak transformasi melalui penandatanganan MoU 15 Agustus 2005. Perundingan Helsinki menjadi sebuah *political opportunity structure* yang memungkinkan GAM mempunyai

struktur kesempatan politik untuk mengkonversi gagasan kemerdekaan (*self-determination*) dan mengkondisikan adanya ruang yang dapat diakses oleh GAM dalam tatanan demokrasi. Untuk menuju titik transformasi tersebut, GAM berhelat kuat dalam lima kali perundingan⁷⁵, dan kelima sesi perundingan ini perlu kita telusuri detailnya untuk melihat alasan dan motif serta pilihan-pilihan yang pada akhirnya memungkinkan GAM bertransformasi menjadi sebuah organisasi kepartaian (Nursalim, M. 2008: 117-188).

Perundingan pertama, Sikap yang Sama

Perundingan pertama ini berlangsung antara tanggal 27 sampai 29 Januari 2005. Dalam perundingan Helsinki pihak GAM diwakili oleh Malik Mahmud (Perdana Menteri), Zaini Abdullah (Menteri Luar Negeri), Nur Dzuli (anggota GAM dari Malaysia), Bachtiar Abdullah dan Nurdin Abdurrahman (dari Australia). Sehingga nama-nama ini menjadi identifikasi pertama aktor-aktor elit determinan transformasi dalam GAM, yang dikemudian hari menjadi 'tokoh' senior GAM sehingga suaranya berpengaruh atau paling tidak dipertimbangkan dalam kebijakan dan keputusan lembaga ketika partai politik menjadi kanal gerakan GAM. Sedangkan perwakilan dari RI adalah Hamid Awaludin (Menkumham), Sofyan Djalil (Menkoinfo), Farid Husein (Deputi), Usman Basja (Deputi), dan I Gusti Wesaka Puak (Deplu RI).

⁷⁵ Untuk bab ini kita akan banyak merujuk pada data-data dan catatan Moch. Nursalim yang dianggap penulis cukup berhasil merekam perundingan. Walaupun demikian dalam analisis ini kita meletakkan perspektif GAM sebagai sebuah entitas organisasi.

Poin penting yang dapat kita ambil dari perundingan pertama adalah bahwa RI tetap menginginkan Aceh dalam NKRI dengan paket Otonomi khusus, sedangkan GAM tetap menginginkan kemerdekaan dan tidak mengenal otonomi khusus. Sehingga perundingan ini sering disebut sebagai perundingan penjajakan dasar dan belum menghasilkan kesepakatan apapun⁷⁶. Artinya gagasan partai lokal memang bukan sebuah konsepsi yang sudah disiapkan sebelumnya karena GAM datang dengan 'tangan kosong' kecuali sebuah visi yang sama, kemerdekaan atau *self-determination*

Perundingan kedua, Sebuah Turning Point

Perundingan kedua berlangsung tanggal 21-23 Februari 2005. Kembali lagi beberapa tuntutan GAM yang sudah disampaikan pada perundingan pertama, muncul lagi dalam hari pertama dari perundingan kedua ini. Tuntutan tersebut adalah:

1. tidak bersedia menggunakan terminologi otonomi khusus⁷⁷ dan menuntut pemberlakuan status quo;
2. memberlakukan gencatan senjata atau *cease fire*, menghadirkan polisi Internasional, dan Aceh sebagai *determilitarized Zone*;

⁷⁶ Dikisahkan bahwa Martti Ahtisaari sempat marah kepada pihak GAM karena perundingan yang esensinya adalah penerimaan otonomi khusus sedangkan pihak GAM bersikeras atas tuntutan kemerdekaan. Sejak perundingan pertama ini GAM melalui Malik Mahmud sudah mengundang tim penasehat yaitu Damien Kingsbury dosen senior Pembangunan Internasional di Deakin University, Melbourne, sekalipun hal ini ditentang oleh perwakilan RI karena masalah Aceh adalah domestik bukan internasional, sedangkan GAM menginginkan masalah Aceh perlu internasionalisasi.

⁷⁷ Terkait dengan hal ini M. Nur Dzuli menyatakan bahwa "...dalam konteks Aceh kata-kata otonomi itu sudah kotor, apa yang dikatakan otonomi itu sudah bermaksud lain, segala yang tidak, janji-janji palsu. Jadi kami tidak mau lagi menggunakan istilah itu..."

3. pembebasan semua tahanan politik;
4. masalah Aceh adalah masalah internasional.

Namun keempat tuntutan GAM tersebut pada hari berikutnya mengkristal menjadi apa yang disebut *self-government*. Tuntutan untuk merdeka atau *self-determination* menjadi ternegosiasikan dengan konsep *self-government* yang diusulkan oleh Martti Ahtisaari⁷⁸. Isi konsepsi ini adalah pertama untuk penghentian permusuhan atau *end of hostilities* seperti gencatan senjata, pasukan kembali ke barak, keterlibatan polisi internasional yang independen, Aceh sebagai zona damai, dan penarikan pasukan TNI-Pori non-organik dari Aceh. Kedua adalah perihal partai politik dan pemilu yang menjamin adanya peluang politik bagi mantan GAM, amnesti bagi anggota GAM, kebebasan hukum bagi semua rakyat Aceh untuk kembali ke Aceh, adanya partai lokal dan mantan GAM ikut dalam pemilu, pemantauan independen untuk pemilu. Ketiga adalah persetujuan formal dimana DPR perlu mendapat persetujuan dari pemerintahan Aceh dalam membuat keputusan tentang Aceh, adanya konstitusi Aceh dan Wali Nanggroe, adanya garansi internasional untuk konstitusi Aceh dan *Acheh Act*.

⁷⁸ *Self-government* pada awalnya diusulkan oleh Martti Ahtisaari untuk menegosiasikan kutub kemerdekaan di pihak GAM (dan kutub otonomi khusus di pihak RI), terminologi tersebut kemudian diadaptasikan dengan konseptualisasi yang dibawa oleh Damien Kingsbury dan Nurdin Abdurrahman.

Walaupun perundingan kedua ini tidak menghasilkan kesepakatan apapun, namun kita bisa menarik kesimpulan bahwa dari konsepsi *self-government*—yang lebih menyiratkan Aceh sebagai negara federal dari sekedar daerah otonom—tersebut, wacana partai lokal sudah muncul sebagai batu loncatan GAM dalam konteks iklim demokrasi yang juga dituntut pasca kesepakatan perundingan. Marti Ahtisaari menjadi aktor yang memunculkan sebuah redaksi *self-governemnt*, sementara Damien Kingsbury—konsultan perwakilan GAM—menjadi aktor penting yang mampu mengkonversi ambisi self-determination menjadi *self-government* (dalam kerangka nasional RI) dengan partai lokal menjadi jaminan bagi GAM untuk ‘bergerak’.

“Pembentukan partai politik lokal adalah solusi demokratis dan praktis karena sejarah telah membuktikan bahwa masalah Aceh tidak bisa diselesaikan secara militer” (Nursalim, M. 2008: 163)

Sehingga titik picu transformasi GAM justru dimulai bukan dari *warlord* (Hasan Tiro) atau elit GAM (perwakilan), namun lebih distimulasi oleh aktor dari luar yang dalam hal ini adalah Marti Ahtisaari (mediator) dan Damien Kingbury (konsultan). Konsepsi *self-government* implisit partai lokal di dalamnya sama sekali tidak adalah dalam riwayat motif semangat perjuangan GAM termasuk wacana-wacana dan propaganda yang dimunculkannya. Artinya, partai lokal meneras dari sebuah negosiasi perdamaian, bukan atas dasar motif semangat demokratisasi politik, dan perundingan pada Februari 2005 ini menjadi titik tolak penting bagi GAM

atas transformasi dirinya dan konstelasi politik lokal pada umumnya.

Dalam catatan Moch. Nursalim (2008: 154) selanjutnya, agenda perundingan selanjutnya adalah terkait dengan persoalan partai politik lokal, pemilu lokal, amnesti, perekonomian dan keamanan. Namun "...pada perundingan tahap ketiga dan keempat, masalah yang sensitif adalah agenda *self government* dan partai politik lokal sebagai instrumen penting yang diperjuangkan pihak GAM..."

Perundingan Ketiga: 'Mengamankan' Partai Lokal

Sebagaimana agenda perundingan yang telah disepakati pada perundingan kedua di atas, perundingan pada 12-16 April 2005 ini membahas beberapa topik isu yaitu partai lokal, pemilu lokal, perekonomian, (termasuk *revenue*, perpajakan), *security agreement* seperti Aceh sebagai *demilitarized/Peace Zone*, demobilisasi dan reintegrasi GAM, Amnesti dan pelanggaran HAM, dan *outside monitoring* atau pelibatan pemantau internasional.

"...pembahasan yang paling alot adalah persoalan partai lokal karena pihak Indonesia tidak dapat mengabaikan secara langsung dalam perundingan, sebab bertentangan dengan Undang Undang No. 12/ 2003 tentang Partai Politik. Namun, pihak GAM tetap menuntut adanya partai lokal sebagai salah satu sarana perwujudan implementasi self-government atau pemerintahan sendiri yang akan berjalan di Aceh..." (Nursalim, M. 2008: 165)

Namun determinasi elit dalam titik tolak transformasi GAM menjadi terlihat jika kita memperhatikan pernyataan Bakhtiar Abdullah yang disampaikan di Majalah TEMPO edisi 08/XXXIV/ 18-24 April 2005, sebagaimana berikut:

"...Bakhtiar Abdullah (juru bicara GAM yang juga perwakilan di Helsinki) mengungkapkan bahwa pembentukan partai lokal merupakan hal politik GAM dan hak dasar warga Aceh...partai lokal adalah wadah bagi semua masyarakat Aceh untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Jika partai lokal terbentuk, tidak menutup kemungkinan para pemimpin GAM yang kini bermukim di Swedia pulang ke Aceh...la yakin anggota GAM yang berada di Aceh akan mematuhi keputusan tertinggi GAM yang berunding di Helsinki." (Nursalim, M. 2008: 164)

Sehingga walaupun titik picu transformasi dimulai oleh aktor luar, elit GAM (lima orang perwakilan) tetap menjadi aktor determinan yang memastikan GAM bertransformasi melalui prakondisi konsep partai lokal. Karena partai lokal menjadi sebuah konsepsi yang tidak bisa ditawarkan. Pernyataan Bakhtiar Abdullah tersebut memberi ruang tafsir bahwa (elit) GAM menjadi 'aman' dengan hadirnya partai lokal. Karena konsepsi partai lokal memberi ruang supremasi aktor-aktor GAM untuk 'berkuasa' di bumi Aceh daripada harus berlelah melalui jalur partai nasional.

Alhasil, perundingan ketiga ini berhasil menyepakati beberapa poin—selain perihal partisipasi politik dan keamanan—seperti eksplorasi atas partisipasi lokal dalam pemilu, kedua belah pihak tidak melakukan pergerakan pasukan selama proses perundingan berlangsung, atau terkait dengan transparansi dalam hal pendapatan dan alokasi dana antara pemerintah Pemerintah RI dan pemerintah Aceh.

Perundingan keempat, 'Barter' Kepentingan

Sedangkan perundingan keempat terjadi pada tanggal 26-31 Mei 2005. Terkait dengan perundingan pada tahap ini, Moch Nurhasim menyatakan bahwa:

"Persoalan partai lokal masih menjadi persoalan yang rumit akrena bagi GAM partai lokal memiliki arti penting...pihak GAM telah memberikan alasan untuk mencapai pemerintahan sendiri tidak mungkin dilakukan tanpa adanya partai lokal di Aceh...karena self-government dan partai lokal yang dibahas sejak putaran ketiga hingga putaran kelima merupakan agenda yang amat mendasar bagi GAM.." (Nursalim, M. 2008: 168-169).

Sehingga partai lokal di titik ini menjadi sebuah konsepsi barter yang tidak bisa digantikan dengan konsepsi lainnya (seperti otonomi khusus) atau entitas lainnya. Pemerintah RI 'meminta' kembali Aceh sebagai bagian dari NKRI dengan menerima *self-government* implisit partai lokal di dalamnya, sedangkan GAM meminta partai lokal—sekalipun hal ini merupakan satu dari beberapa varian konsep *self-government* yang

diajukan—dengan ‘meleburkan’ diri dalam integrasi nasional RI dan kembali mengakses barang publik pemerintah RI sebagai warga negara Indonesia.

Artinya partai lokal menjadi sebuah kompensasi pokok yang harus diberikan RI kepada GAM, dan dalam hal ini menjadi harga mati bagi GAM. Hal ini menjadi lebih jelas bahwa akhirnya partai lokal merupakan satu-satunya bentuk konversi GAM yang dipersiapkan dalam kerangka perundingan damai. Perundingan keempat ini berakhir dengan kesepakatan untuk menyusun dokumentasi dan capaian-capaian yang telah dihasilkan (tuntutan GAM dan RI) sebagai dasar penyusunan draf MoU yang dikerjakan oleh CMI sebagai fasilitator.

Perundingan Kelima: Keharusan Partai Lokal

Karena pemerintah RI melalui perwakilannya tetap berada pada pendirian bahwa partai lokal tidak bisa diakomodasi dalam undang-undang RI, maka pada tanggal 12-17 Juli 2005 ini pembahasan terkait partai lokal tetap menjadi pembahasan panas pada putaran akhir⁷⁹. Perundingan terkait dengan partai lokal pada akhirnya telah menyebabkan perdebatan tajam antara pihak GAM dan RI bahkan mengancam perundingan putaran kelima bubar (Nursalim, M. 2008: 178).

GAM pada putaran kelima ini tetap menghendaki adanya partai lokal dan pemerintahan sendiri. Partai politik lokal menjadi perdebatan yang paling rumit dalam perundingan ini.

⁷⁹ Perwakilan RI mengusulkan bahwa partai lokal bisa diganti dengan partai nasional yang ada di daerah namun pihak GAM tetap menolaknya.

“karena itulah inti dari self-government adalah partai politik lokal yang akan menjadi instrumen bagi GAM untuk terjun dalam dunia politik khususnya dalam pemilu lokal dan pemilihan kepala daerah secara langsung di Aceh...sebagaimana disebutkan oleh Malik Mahmud, Bachtiar Abdullah, dan Damien Kingsbury, tanpa adanya partai politik lokal yang menjadi wadah bagi eks-GAM, tentu akan sulit mengharapkan perubahan politik di Aceh” (Nursalim, M. 2008: 178).

Alhasil, draft akhirnya disepakati yang kemudian dikenal dengan MoU Helsinki (Nursalim, M. 2008: 174). Momentum vital atas transformasi GAM sebagai sebuah organisasi dapat kita lihat dari butir kesepakatan pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia, berikut ini:

“Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan

memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut." (Departemen Komunikasi dan Informatika RI 2005: 3).

Jika melihat riwayat perundingan Helsinki, maka muara atas simpulan alasan transformasi GAM adalah sebagai determinasi elit yang distimulasi oleh aktor eksternal. Di sisi lain, perundingan ini membimbing kita pada muara konklusi bahwa partai lokal—yang digadang sebagai bentuk transformasi GAM—muncul secara 'tidak sengaja' dalam perundingan damai. Secara lebih umum, partai lokal yang akhirnya diejawentahkan dalam praktik politik di Indonesia lahir dari rahim konflik dan menetas melalui perundingan damai.

Transformasi dari gerakan separatis menjadi gerakan politik dalam yuridiksi NKRI adalah ketentuan kuat elit GAM—dibawah Hasan Tiro⁸⁰—bukan karena aspirasi ataupun tuntutan simpatisan dan rakyat Aceh. Artinya, jika transformasi tercipta karena determinasi elit⁸¹, barang kali bentuk transformasi selanjutnya atau

⁸⁰ Sebagaimana elaborasi dalam Bab III tentang fase-fase GAM, adanya faksi MP GAM—sebagai turbulensi elit GAM di pengasingan—yang memang tidak berpengaruh pada gerakan di Aceh pada dasarnya memungkinkan adanya gerakan baru pasca Helsinki. "Pasca perjanjian 2005, terdapat perayaan-perayaan ulang tahun masyarakat Aceh yang ada di luar negeri (Skandinavia). Salah satunya adalah Dr. Husein yang menyatakan bahwa orang Aceh yang ada sekarang (di Indonesia) adalah pengkhianat karena melakukan perjanjian dengan Indonesia.", wawancara dengan Syafruddin (aktivis referendum asal Aceh Timur) dan Chandra (aktivis referendum asal Aceh Besar) pada tanggal 28 Oktober 2010. Sehingga hal ini perlu kita tegaskan bahwa 'GAM' yang kita rujuk adalah dibawah asuhan Hasan Tiro. Karena adanya faksi ini bukan tidak mungkin kekhawatiran Pemerintah RI akan perwujudan Partai Aceh selanjutnya kemudian diplintir sebagai batu loncatan untuk merealisasikan ide besar terkait dengan *secession* atau pemisahan diri dari NKRI.

⁸¹ Transformasi GAM menjadi Partai Aceh (untuk selanjut) adalah sebuah sekuen determinasi elit jika kita membuka kembali diktum dalam deklarasi Stravanger di Norwegia pada 21 Juli 2002.

bertahan-tidaknya ditentukan oleh elit. Sehingga di titik inilah kita perlu memahami dan mendalami proses transformasi GAM menjadi sebuah partai politik (lokal) yang harus beradaptasi dengan tatanan demokrasi, beradaptasi dari genggam peluru (*bullet*) menjadi bergenggam suata (*ballot*).

Kesimpulan

Bab ini secara detail telah menunjukkan kepada kita bahwa perundingan Helsinki pada 2005 menjadi titik balik bagi hadirnya partai lokal di Indonesia setelah empat dasawarsa absen dan konstelasi pemilu setelah pemilu 1955. Karena munculnya redaksi 'partai lokal' dan gagasan yang ada di dalamnya tereksplorasi justru karena adanya perundingan damai GAM-Pemerintah RI. Artinya partai lokal hadir justru dari terciptanya ruang relasi konflik pusat-daerah, bukan terletak pada asumsi demokratisasi seperti tuntutan dari *grassroot* atau kehendak negara (pemerintah pusat).

Lebih spesifik, merujuk pada kritik Sartori (1987) terhadap Lipset dan Rokkar (1967) bahwa terdapat aktor dalam cleavage dan aktor tersebut bisa saja salah menerjemahkan cleavage dalam sistem politik, aktor cleavage yang direpresentasi oleh negosiator GAM di Helsinki menerjemahkan GAM sebagai *local cleavage* yang masuk dalam tatanan demokrasi dengan partai lokal. Artinya, proses *translaion* Aceh (yang dimotori GAM) sebagai *local cleavage* menjadi partai lokal bukan merupakan collective will rakyat Aceh yang dulu dibangun dari kesadaran kolektif sebagai sebuah bangsa berdaulan sejak proklamasi 4 Desember 1976.

Penerjemahan (artikulasi dan konversi) cleavage hadir secara *top down* dari level elit ke anggota dan entitas sosial Aceh

Komitmen GAM yang tidak bisa di tawar untuk memasukkan partai lokal sebagai diktum kesepakatan selama perundingan memperjelas bahwa (elit) GAM mempersiapkan instrumen kekuasaan yang memungkinkannya untuk tetap 'menguasai' Aceh pasca-reintegrasi disepakati dan berjalan. Artinya Partai Aceh yang kemudian hadir dalam konstelasi pemilu dan narasi politik di Aceh berawal dari meja perundingan di Helsinki. Narasi ini mengkonfirmasi kerangka teoritik terkait dengan genealogi kemunculan partai yang hadir karena adanya ruang relasi konflik nasional-lokal atau pusat-daerah.

Namun demikian, kanal titik balik transformasi tersebut tercipta karena struktur peluang politik rezim yang memungkinkannya. Setelah pemilu 2004 usai, Pemerintahan RI yang pada awalnya berada di bawah Megawati dengan karakter militeristik dalam memperlakukan GAM akhirnya bola kekuasaan berada pada rezim Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla yang kemudian memperlakukan GAM melalui langkah-langkah sipil seperti perundingan damai. Walaupun perlu kita ketahui bahwa langkah sipil seperti perundingan damai pernah (dan pertama kali) ditempuh oleh presiden Abdurrahman Wahid sejak Pemerintahan RI berada pada era post-Soeharto 1998. Artinya, karakter rezim berpengaruh pada gagasan partai lokal, atau jika kita sederhanakan kedua premis tersebut: maka karakter rezim menciptakan struktur peluang politik sebuah

transformasi gerakan bersenjata menjadi lembaga kepartaian.

Sedangkan jika kita masuk melalui perspektif internal GAM, maka dua momentum penting yang akhirnya membuat GAM untuk menegosiasikan gerakannya adalah pemberlakuan Darurat Militer dari Mei 2003 sampai Mei 2004 dan di susul dengan bencana tsunami Aceh yang terjadi pada Desember 2005. Hal ini beralasan karena selain fakta detail terkait kekuatan GAM yang melemah drastis dan munculnya isu kemanusiaan, perundingan Helsinki dimulai pada bulan Januari 2005 atau tidak lebih berselang satu tahun sejak dua momentum tersebut berimplikasi besar bagi GAM dalam hal kekuatan gerakan maupun orientasi gerakan.

PARTAI ACEH: PENERJEMAHAN *LOCAL* *CLEAVAGE* DALAM SISTEM POLITIK

GAM dalam *environment* pasca tumbangnya orde lama dan bencana tsunami secara internal kemudian mengorientasikan otonomi luas dan *self-government* untuk menuju sebuah kesepakatan damai. Lebih jauh sebenarnya tuntutan otonomi luas dan pemerintahan sendiri tersebut adalah untuk memastikan penguasaan GAM atas tatanan sosial politik di Aceh—untuk menjamin adanya perbaikan di Aceh yang selama ini dianggap telah dikendalikan oleh Jakarta. Sehingga partai lokal adalah sebuah instrument strategis untuk merealisasikannya.

Selain karena alasan kekuatan internal GAM di bumi Aceh⁸², gagasan partai lokal sedikit banyak juga dipengaruhi oleh euforia demokratisasi dan liberalisasi politik pasca tumbangnya Soeharto (Schultze 2004). Sebagaimana elaborasi fase demiliterisasi di atas, bahwa '98 effect (semangat demokratisasi) tidak hanya merasuki

⁸² Edward Aspinall mencatat bahwa periode sebelum tsunami), GAM menguasai lebih dari 70 persen wilayah Aceh. Sedangkan sumber lain menyatakan bahwa pada 2001, GAM menguasai wilayah desa di Aceh sebesar 80 persen.

gerakan-gerakan sipil di Jakarta dan kota-kota di Jawa. Gerakan referendum yang meledak pada 1999 oleh elemen mahasiswa dan LSM di Aceh adalah bentuk lain euforia demokratisasi (Aspinall, E. 2007)⁸³. Sehingga GAM dalam kalimat yang berbeda adalah terperangkap dalam sebuah kubangan demokrasi dari yang dulunya sebuah bekuan es otoritarianisme orde baru. Oleh karena itu mekanisme kepartaian adalah kanal yang tak terhindarkan, namun dengan mengkonversinya sebagai kekuatan lokal—penguasaan dan dominasi lokal—maka mampu memastikan sustainabilitas akses politik bagi GAM, jadilah redaksi dan konsepsi partai politik lokal sebagai satu hal yang ‘cocok’ bagi GAM.

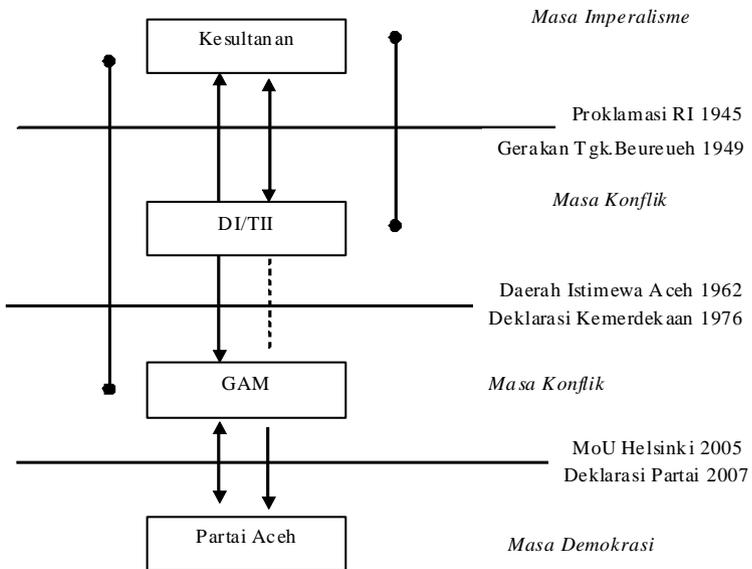
Artinya penjelasan tersebut bermuara pada kesimpulan sederhana, bahwa kemunculan (terciptanya) Partai Aceh—sebagai sebuah transformasi dari GAM—tidak terlepas dari sebuah periode tersendiri, yaitu apa yang disebut dengan periode demokrasi dalam riwayat politik RI. Di titik inilah kita perlu merekam kembali jejak sejarah atas elaborasi genealogi sebelumnya sehingga Partai Aceh hadir di tengah-tengah masyarakat Aceh, dan wacana nasional.

Hadirnya Partai Aceh yang berawal dari ‘ketidaksengajaan’ dalam perundingan damai—karena gagasan ini muncul dari aktor di luar subjek konflik dan

⁸³ Terkait dengan semangat demokrasi yang dilakukan oleh para pejuang referendum Aceh tersebut, terlihat dari elaborasi Aspinall sebagai berikut: “*That movement grew out of the wider anti-Suharto student activism of the late 1990s, where all spoke the language of democracy, rejecting militarism and campaigning for human rights and political freedoms. The Acehnese pro-referendum students said leaving Indonesia would be an escape from army abuses. They talked about independence not as a birthright, but as something to be determined through a democratic vote. Muhammad Nazar always said that if a majority voted to stay with Indonesia, he would respect that choice.*”

tanpa desain apapun sepanjang hampir 30 tahun GAM beroperasi di bumi Aceh—membuat dirinya terputus dan tak mempunyai garis relasi genealogis dengan Aceh pra-GAM. Genealogi tersebut akan menjadi lebih jelas jika kita melihat visualisasinya sebagaimana skema di bawah.

Gambar 4.1. Skema Genealogi Partai Aceh



Keterangan garis relasional:

- ⌋ : menunjukkan bentuk pengaruh
- ↕ : relasi pengaruh kultural
- ↓ : relasi pengaruh struktural
- ⋮ : relasi tanpa pengaruh
- : batas periode

Skema di atas berusaha untuk menunjukkan relasi historis hadirnya Partai Aceh berdasarkan momentum-momentum sebuah periode waktu. Partai Aceh mempunyai relasi yang kuat dengan GAM baik secara kultural maupun struktural namun sama sekali tidak terhubung dengan masa atau era sebelum GAM (Darul Islam dan masa Kesultanan Aceh). Sementara GAM mempunyai relasi kultural dengan kesultanan Aceh karena semangat perlawanan GAM didasarkan pada fakta sejarah kesultanan yang kemudian juga berimplikasi pada motif dan karakter gerakan, namun GAM mempunyai relasi yang sangat lemah atau tidak mempunyai relasi (pengaruh) dengan Darul Islam di Aceh. Sementara Darul Islam pimpinan Daud Beureueh mempunyai relasi kultural dengan era kesultanan.

Sehingga jika kita cermati, baik Darul Islam pimpinan Daud Beureueh maupun GAM pimpinan Hasan Tiro sama-sama mempunyai relasi kultural dengan kesultanan Aceh. Namun yang menjadi catatan di sini adalah, bahwa relasi kultural antara kedua gerakan ini sama sekali berbeda. Darul Islam mempunyai relasi kultural dengan era kesultanan sebagai sebuah komunitas muslim sehingga substansi tatanan sosial dan kehidupan berIslam menjadi pengaruh gerakan ini. Sementara GAM 'mengambil' relasi kultural dengan era kesultanan sebagai sebuah kesatuan bangsa (Aceh) dengan substansi tatanan politik-kenegaraannya dan hubungan dengan (negara) bangsa lainnya atau dunia internasional. Sehingga Islam bagi GAM adalah sudah selesai bagi Aceh, sementara identitas politik bangsa Aceh yang kemudian harus diperjuangkan.

UUPA: Ramuan Kepentingan

Alhasil setelah satu tahun pasca kesepakatan Helsinki, disahkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada awal Agustus 2006 menjadi payung hukum—sekaligus pintu gerbang—bagi kanal demokrasi di Aceh, khususnya bagi GAM (Wijaya, A. 2011, komunikasi personal, 9 Februari)⁸⁴. Terbitnya UU PA ini menjadi sebuah verifikasi atas simpulan Apinall bahwa “*The new democratic mood in post-Suharto Indonesia seeped into the mindset of the Acehnese independence fighters*” (Aspinall, E. 2007). Hal ini ditunjukkan pada fakta bahwa GAM mengajukan poin-poin ke dalam draft yang telah disusun oleh Universitas Syahkuala dan Universitas Malikulsaleh atas permintaan Pemerintah daerah di bawah Abdullah Puteh untuk membuat draft UU PA (Aspinall, E. 2007; Törnquist, O., Prasetyo, S.A; Birks, T. (eds.) 2010: 304).⁸⁵ Sehingga UU PA yang sudah ada atau UU No.11 Tahun 2006 adalah hasil terbitan dari ramuan ‘3’ versi tersebut. Artinya, UU PA dipenuhi oleh kompromi kepentingan dari GAM, masyarakat sipil, dan pemerintah.

⁸⁴ Undang Undang Pemerintahan Aceh (UU PA) atau sering disebut Law on the Governing of Aceh (LoGA) oleh analis luar Indonesia yang disahkan pada 1 Agustus 2006 tersebut, menurut pernyataan Agung Wijaya adalah bahwa draft UU PA yang sebelumnya dipresentasikan pasca piagam Helsinki ternyata adalah *copy paste* dari UU Papua, sehingga pada waktu itu GAM memberi ultimatum pada DPRD saat itu untuk merancang UU tersebut secara bersama dengan melibatkan GAM dan elemen masyarakat sipil. Draft tersebut kemudian dibahas dalam pansus di DPRD Aceh dan di serahkan dan disahkan di DPR RI.

⁸⁵ Walaupun setelah disahkannya UU PA ini, beberapa kalangan masyarakat sipil (implisit GAM) menyangkan adanya reduksi konsep self-government dalam pasal 7 sampai pasal 11.

Walaupun beberapa kalangan masyarakat sipil (Agung Wijaya 2011; Muriza Hamzah dalam Olie Tornquist 2010) menilai bahwa terjadi pereduksian konsep *self-government* dalam undang-undang tersebut, sebenarnya secara redaksional peristilahan yang digunakan dalam UU PA merefleksikan atas konsepsi *self-governemnt*. Jika kita cermati penggunaannya dalam mengkonversi lembaga-lembaga negara di Aceh maka kita akan sulit menemukan redaksi 'pusat' dan 'daerah'. Sebagai misal, lembaga legislatif di Aceh disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk tingkat provinsi, sementara untuk tingkat kabupaten-kota disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), berbeda dengan daerah lain di Indonesia yang menggunakan nomenklatur 'Daerah' untuk menyebutkan lembaga legislatif tingkat lokal. Seperti juga penyelenggara pemilihan umum di Aceh disebut dengan Komite Independen Pemilihan (KIP) sehingga tidak ada peristilahan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sedangkan Pemerintah Pusat di Jakarta cukup disebut dengan 'Pemerintah', dan Aceh sebagai sebuah provinsi dengan kepala daerah gubernur disebut dengan 'Pemerintah Aceh'. Artinya jika kita melihat bahasa sebagai sebuah relasi kuasa, maka redaksi-redaksi yang digunakan dalam UU PA ini adalah kemenangan bagi GAM karena kata 'pusat-daerah' bagi GAM menunjukkan relasi subordinasi.⁸⁶

⁸⁶ Dalam bab sebelumnya (Titik Balik Transformasi), sejak negosiasi Helsinki yang pertama sampai terakhir GAM menolak menggunakan kata (dan konsepsi) 'otonomi' karena bagi mereka kata otonomi tetap menunjukkan 'penguasaan' Jakarta atas Aceh.

Di sisi lain, pemilihan kepala daerah secara langsung dengan 'dijinkannya' calon independen serta prasyarat pembentukan partai politik lokal adalah distingsi yang menjadi substansi dalam Undang Undang Pemerintahan Aceh ini (Majalah Nanggroe 2010: 13-16)⁸⁷. Karena UU PA menjadi payung hukum dan panduan atas 'percobaan' demokratisasi prosedural yang agak berbeda di Indonesia—pemilihan langsung, calon independen, dan partai lokal⁸⁸. Berdasarkan pengalaman di beberapa negara, Helge O. Larsen (2005) menyatakan bahwa pemilihan langsung atau *direct election—of mayor* (walikota/ bupati) dalam studi kasus Larsen—adalah sebuah bentuk cara mentransformasi kepemimpinan politik di tingkat lokal (Larsen, H.O dalam Berg, R.; Rao, N. (ed.) 2005: 195)⁸⁹. Karena hal ini mempunyai konsekuensi pada pembentukan 'kabinet' di level lokal, seperti rekrutmen dalam jabatan publik adalah didasarkan pada dukungan politik ketika berlangsung pemilihan kepala daerah.

⁸⁷ Walaupun demikian, satu tahun menjelang pemilihan kembali gubernur (2011), politisi di DPRA dan beberapa kalangan sipil mewacanakan untuk meninjau kembali perihal calon perseorangan dalam UU tersebut. Sehingga hal ini membimbing kita pada sebuah garis simpul yang mempertegas bahwa UUPA merupakan kompromi atas tiga aktor yang dalam hal ini adalah GAM. Karena satu semester setelah pilkada 2006—tepatnya pada Juli 2007—GAM baru memiliki partai sebagai kanal politiknya.

⁸⁸ Pada periode tersebut Aceh menjadi satu-satunya kawasan di Indonesia yang untuk pertama kalinya melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung dengan hadirnya calon independen, yang kemudian diikuti (diterapkan) dalam pilkada di daerah-daerah lain. Karena pada tahun-tahun sebelumnya kepala daerah dipilih melalui penunjukan (pemilihan gubernur dibawah UU No.5 Tahun 1974) dan pemilihan oleh lembaga legislatif (dibawah UU No.22 Tahun 1999).

⁸⁹ Selain penguatan eksekutif, transformasi kepemimpinan politik lokal di negara-negara Eropa Barat khususnya kawasan Skandinavia dan Amerika adalah juga bentuk kelembagaan dewan kota (committee atau council) yang bergerak kearah bentuk presidensialisme atau parlementeralisme.

“Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.... Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) diajukan oleh: a. partai politik atau gabungan partai politik b. partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal; c. gabungan partai politik dan partai politik lokal; dan/atau d. perseorangan (cetak tebal oleh penulis)”(UU No.11 Tahun 2006 Pasal 65 ayat 1, Pasal 67 ayat 1).

Alhasil, pemilihan kepala daerah secara serentak—gubernur dan bupati/walikota—pada 11 Desember 2006 menjadi kanal penting bagi GAM untuk membangun justifikasi politik di Aceh. Dari 20 jumlah kursi kepala daerah (19 kursi bupati/wali kota, dan 1 kursi gubernur) yang diperebutkan, GAM dalam hal ini mendapatkan 9 kursi kepala daerah implisit di dalamnya adalah kursi gubernur.

Sementara itu partai politik lokal menjadi instrumen ‘sakti’ sebagai organisasi politik di Aceh yang mampu mengantarkan elit Aceh ke kursi legislatif maupun eksekutif, sebagaimana dalam kutipan pasal berikut ini:

Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota. (pasal 1 ayat 14, UU PA).

dalam UU PA terdapat perbedaan antara partai politik dan partai politik lokal, hal ini tidak hanya secara definitif melainkan digunakan dalam semua diktum regulasi tersebut (UU PA Pasal 1). Artinya untuk menyebut partai politik nasional cukup digunakan redaksi 'partai politik, sehingga menegaskan kompromi *self-government* masuk dalam konsepsi kepartaian di Aceh, karena berusaha mereduksi relasi pusat-daerah dengan mengeliminasi 'nasional'.

Sebelum diterbitkannya UU PA—regulasi ini menjadi semacam 'konstitusi' bagi Aceh sebagai sebuah daerah khusus—Pimpinan GAM membentuk Majelis Nasional pada Oktober 2005 sebagai badan yang berwenang untuk mengurus politik. Majelis Nasional adalah sebagai lembaga yang menyatukan seluruh sumber daya politik dan ekonomi GAM ((Bhakti, I.N. (ed.) 2008: 146). Sedangkan Komite Peralihan Aceh (KPA) didirikan pada Desember 2005 yang berfungsi untuk memantau proses demobilisasi dan reintegrasi mantan kombatan GAM.

Sedangkan baru pada 2 Mei 2006, gubernur NAD menerbitkan Surat Keputusan Gubernur No.330/106/2006 tentang pembentukan Badan Reintegrasi Damai Aceh atau BRA sebagaimana amanat MoU Helsinki⁹⁰. Tugas pokok BRA adalah menyatukan kembali berbagai elemen masyarakat Aceh yang telah renggang akibat konflik berkepanjangan melalui pendekatan agama, pendidikan, sosial, politik dan budaya; serta memutus siklus mata rantai konflik melalui pendekatan ekonomi ((Bhakti, I.N. (ed.) 2008: 162-164. Walaupun BRA dipenuhi dengan tumpukan dana reintegrasi⁹¹, menurut Blair Palmer (2007) fungsi dan tugasnya menemui beberapa kendala teknis seperti ketidakjelasan sasaran secara person per person, faktor administratif, dan kendala teknis di lapangan.

Sehingga terkait dengan BRA ini, GAM memanfaatkannya dengan menjadikan kader atau anggotanya sebagai pengurus lembaga sampiran ini—BRA mendapatkan dana dari APBN dan APBD. Sehingga akhirnya BRA dibajak oleh GAM sebagai 'bonus' pasca perjanjian damai Agustus 2005. Namun hal ini menjadi mungkin karena perwujudan dan realisasi kesepakatan Helsinki menjadi lebih mulus karenanya (Handono, I. 2010, komunikasi personal, 10 Februari).

⁹⁰ BRA menjadi instrument fasilitator untuk merealisasikan kesepakatan reintegrasi dalam MoU Helsinki khususnya pada pasal: 3.2.4. "langkah-langkah tersebut (reintegrasi) mencakup pemberian kemudahan ekonomi bagi mantan pasukan GAM, tahanan politik, dan masyarakat yang terkena dampak. Suatu dana reintegrasi di bawah kewenangan Pemerintah Aceh akan dibentuk". Dana pasal 3.2.5. "pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh dengan tujuan untuk memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak."

⁹¹ Eksistensi BRA juga mendapatkan perhatian dari analisis luar negeri dengan melihat Aceh sebagai daerah rekonsiliasi berbiaya mahal. "From a total fund pool of US\$150 million, cash payments of approximately \$3500 were to be given to GAM combatants, \$1400 for GAM non-

Turbulensi Internal

Jika pada periode akhir fase militerisasi muncul faksi dalam GAM—walaupun faksi MP GAM hanya ada di tingkatan elit sipil, tidak sampai ke level akar rumput dan kombatan di medan tempur Aceh—maka kita akan menemukan hal yang sama pada satu tahun pasca-Helsinki. Setelah diterbitkannya UU PA yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan berdasarkan pada amanat MoU Helsinki 1.2.3⁹², pada 11 Desember 2006 akhirnya diselenggarakan pilkada langsung secara serentak untuk memilih 20 kepala daerah (19 kursi bupati/wali kota, dan 1 kursi gubernur). GAM dalam hal ini mendapatkan 9 kursi kepala daerah implisit di dalamnya adalah kursi gubernur (Aspinall, E. 2011)⁹³. Namun dibalik ‘kesuksesan’ GAM memperoleh kursi eksekutif tersebut, terdapat turbulensi politik di internal.

Ketentuan dalam UU PA sebagai hasil dari salah satunya kompromi GAM tersebut memuat aturan teknis calon perseorangan yang dapat diajukan sebagai calon perseorang dalam pemilihan gubernur.

combatants (or ‘civilian GAM’), \$1400 for political prisoners, \$700 for ‘surrendered GAM’ (those who surrendered before the MoU), and \$1400 for members of anti-separatist groups (Blair Palmer, 2007).

⁹² Pasal ini berbunyi “Pemilihan lokal yang bebas dan adil akan diselenggarakan dibawah undang undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh untuk memilih Kepala Pemerintah Aceh dan pejabat terpilih lainnya pada bulan April 2006 (cetak miring oleh penulis) serta untuk memilih anggota legislatif Aceh pada tanggal 2009”. Artinya penyelenggaraan pilkada Aceh pada Desember 2006 sebenarnya terlambat tujuh bulan dari ketentuan (kesepakatan) awal.

⁹³ Namun sampai akhir tahun 2007 dimana pilkada diselenggarakan di Aceh Selatan GAM (KPA) kembali memenangkan perolehan kursi, sehingga GAM menguasai 10 kursi kepala daerah yaitu Sabang, Lhokseumawe, Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie, Bireuen, dan Aceh Selatan. Lihat juga dalam artikel The ISAI Aceh Research Group. *Regional Election in Aceh*, dalam Olle Tornquist, Stanley Adi Prasetyo; Teresa Birks (ed.). 2010. *The Role of Democracy for Peace and Reconstruction*. Jogjakarta: PCD Press Indonesia., hlm.168-179.

“Calon perseorangan harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan untuk pemilihan bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota.” (UU PA, pasal 67 ayat 2).

Ketentuan tersebut sudah barang tentu dapat dipenuhi GAM karena dalam fase demiliterisasi, GAM sudah mempunyai basis kekuasaan di 17 wilayah kultural di Aceh (seluruh Aceh). Namun yang menjadi persoalan adalah untuk menjawab pertanyaan ‘siapa’.

Untuk menghadapi pemilihan gubernur pada 11 Desember 2006, GAM mengadakan sebuah rapat besar yang disebut *Duek Pakat Bansa Aceh Sigom Donja* yang ditujukan sebagai bahan pertimbangan dalam kandidasi calon gubernur yang diajukan GAM Bhakti, I.N. (ed.) 2008: 148). Pemilihan calon secara internal ini menunjukkan sebuah ‘prakondisi’ transformasi struktural yang dilakukan GAM dengan mengadopsi mekanisme-mekanisme demokratis sebelum akhirnya lembaga kepartaianan menjadi finalisasi dirinya. Alhasil, ‘konvensi’ tersebut menghasilkan hasil voting kandidasi gubernur sebagaimana berikut:

Tabel 5.1. Hasil voting rapat besar *Duek Pakat*

Bakal calon gubernur		Bakal calon wakil gubernur	
Kandidat	Suara	Kandidat	Suara
Nashiruddin	39	M Nazar	31
Hasbi Abdullah	34	Humam Hamid	24
Irwandi Yusuf	9	Iqwil	12
Humam Hamid	2	Nashiruddin	7
M Nazar	2	Shadia M	4
Iqlil	0	Irwandi Yusuf	3
Shadia M	0	Hasbi Abdullah	3
Adnan Beuransah	0	Adnan Beuransah	1

Sumber: Bhakti, I.N. (ed.) 2008: 148

Turbulensi sudah terlihat ketika calon gubernur terpilih dari GAM Nashiruddin—salah seorang negosiator perundingan CoHA—memutuskan dirinya tidak bersedia diajukan menjadi calon gubernur dari GAM. Sehingga pemilih suara terbanyak nomor dua—yang dalam hal ini adalah Hasbi Abdullah—adalah yang dijagokan oleh GAM. Sedangkan M.Nazar tetap memilih maju dalam pilkada yang dalam voting tersebut memenangkan kursi calon wakil gubernur dari GAM. Namun persoalan muncul ketikan M.Nazar tidak bersedia maju bersama Hasbi Abdullah. Karena menurut M. Nazar, “Hasbi dianggap tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan tidak cukup strategis dalam menarik dukungan pemilih karena sama-sama berasal dari Pidie”. Di sisi lain, *Majalah Acekita* edisi Juni 2006 mengabarkan bahwa

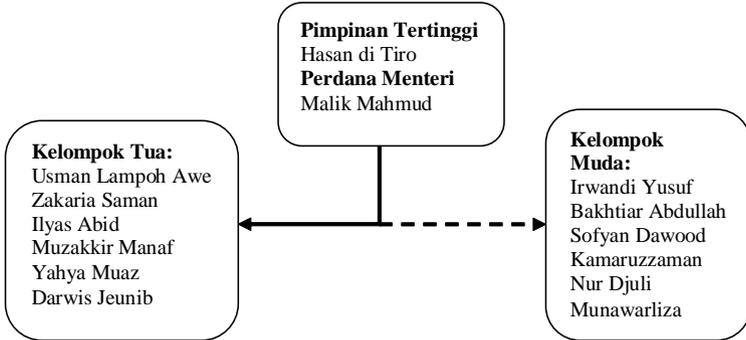
“Skenario memasang Hasbi Abdullah dengan Humam Hamid sebagai duet GAM dan non-GAM sudah terlihat sejak awal. Humam yang telah resmi didukung Partai

Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai kandidat gubernur melakukan beberapa kali pertemuan dengan kubu Hasbi. Pertemuan tersebut di kediaman Tengku Usman Lampoh Awe yang juga dihadiri langsung oleh Malik Mahmud” (Bhakti, I.N. (ed.) 2008: 147).

Di titik inilah kita menyaksikan determinisme elit (senior) GAM dalam pengambilan kebijakan politik. Karena rapat Komisi Peralihan Aceh atau KPA yang langsung dipimpin Malik Mahmud memutuskan untuk mendukung pasangan Humam-Hasbi yang kemudian disebut dengan *tagline* ‘H2O’ atau Humam Hasbi Oke. Pasangan ini juga didukung penuh oleh pimpinan Majelis Nasional yaitu Usman Lampoh Awe, Zakaria Saman, dan Ilyas Abid (Bhakti, I.N. (ed.) 2008: 149).

Sementara itu kelompok muda yang pada awalnya mendukung Nashiruddin namun yang bersangkutan tidak bersedia, akhirnya pasangan Irwandi-Nazar menjadi representasi atas kepentingan kelompok muda GAM. Di titik inilah terjadi dua faksi dalam GAM ketika menghadapi pemilihan kepala daerah khususnya dalam pemilihan gubernur.

Gambar.5.1. Skema Pemetaan Faksi Dalam GAM Dalam Menghadapi Pilkada 2006



Sumber: Bhakti, I.N. (ed.) 2008: 147

Pada titik ini kita bisa menarik benang merah bahwa terjadi peleburan determinasi elit di tubuh GAM. Penentuan calon gubernur yang diajukan GAM melalui perundingan (konvensi) dan munculnya '*sempalan*' diluar ketentuan senior, menegaskan bahwa kekuasaan elit telah tersebar dengan porsi yang berbeda-beda. Sehingga kewibawaan tradisional—sebagaimana fase konsolidasi GAM—yang memungkinkan elit GAM menjadi determinasi tunggal tidak berpengaruh signifikan dalam kubangan demokratisasi di Aceh. Hal ini semakin terlihat jika kita menyimak hasil pilkada gubernur pada akhir 2006 tersebut.

Tabel 5.2. Tabulasi Perolehan Suara Pemilihan Gubernur/
Wakil Gubernur Aceh

Calon	Perolehan
Ir.H.Iskandar Hoesin, M.H	111.553/5,54%
Drs. M. Saleh Manaf, B. Sc	
H.Tamlicha Ali	80.327/3,99%
Drs. Harmen Nuriqmar	
Drs.H.A. Malik Raden	281.174/13,97%
MM.H. Sayed Fuad Zakaria, SE	
DR.Ir.A.Humam Hamid, MA	334.484/16,62%
Drs.Hasbi Abdullah, M.Si	
H.M.Djali Yusuf	65.543/3,26%
Drs.H.R.A Syaugas Rahmatillah, MA	
drh. Irwandi Yusuf, M.Sc	768.745/38,20%
Muhammad Nazar, S.Ag	
Ir.H.Azwar Abubakar, MM	213.566/10,61%
M.Nasir Djamil, S.Ag.	
Drs. Ghazali Abbas	156.978/7,80%
Drs. H. Salahuddin Al Fata	

Sumber: Fadhil, R.F. *(eds) 2007: 39

Tabulasi tersebut menunjukkan bahwa pasangan Irwandi-Nazar atau dikenal dengan *tagline* IRNA memperoleh suara jauh dari tujuh pasangan lainnya termasuk pasangan ‘resmi’ yang diajukan oleh GAM (KPA) Humam-Hasbi lebih dari dua kali lipat⁹⁴. Fakta elektoral ini menunjukkan—sekaligus mempertegas—bahwa elit GAM (tokoh di Aceh maupun

⁹⁴ Setelah kekalahannya dalam kursi eksekutif pemerintah Aceh, Hasbi Abdullah melalui Partai Aceh akhirnya terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Kemudian dirinya terpilih sebagai ketua DPRA. Terkait dengan informasi ini lihat dalam *Arah Perjuangan PA di Parlemen: Mungkinkah PA Berjuang untuk Kepentingan Golongannya?*, Majalah Nangroe edisi 23, 28 Oktober 2009. Namun demikian, sekalipun Irwandi adalah lawan politik bagi Hasbi, tidak mempengaruhi rivalitas kelembagaan antara eksekutif dan legislatif karena kita perlu melihat struktur logika kepartaian dimana Hasbi berada dalam koridor PA, dan pada saat yang sama politik legislatif adalah berbicara konsensus bukan komando seorang pimpinan atau ketua.

di Swedia) tidak ada yang mempunyai pengaruh tunggal. Humam-Hasbi yang didukung tokoh-tokoh senior GAM seperti Zaini Abdullah, Usman Lamo, Awe, Malik Mahmud—sekalipun tidak secara tegas dan eksplisit—bahkan direstui oleh Hasan Tiro di Swedia, tidak menjamin kemenangannya. Struktur elit dalam GAM menjadi tidak determinan sebagaimana fase militerisme dan konsolidasi, struktur elit mengalami pelumeran dalam sebuah kubangan demokrasi di Aceh. Bahwa semangat persamaan hak dan kesetaraan dalam substansi demokrasi sedikir banyak mempengaruhi logika kekuasaan dalam relasi kultural elit GAM.

Dalam kesimpulan yang lebih sederhana, demokratisasi Aceh—implisit GAM di dalamnya—menjadi faktor atas faksionalisasi di internal GAM. Karena jika kita kembali pada elaborasi GAM fase militerisasi, faksi yang muncul adalah lebih pada pengelolaan organisasi. Sementara faksi yang muncul kali ini lebih berbicara motif kekuasaan sebagai akses atas fakta elektoral yang ada. Dan pada saat yang sama kultur senioritas—dan patronasi—dalam GAM belum bisa beradaptasi dalam tatanan demokrasi yang menuntut adanya partisipasi (dari elemen elit GAM kelompok muda).

Partai Lokal

Setelah penyelenggaraan pilkada gubernur pada akhir tahun 2006 yang menguras energi Aceh dalam konstelasi politik—yang berimplikasi politik bagi GAM—elemen masyarakat di Aceh akhirnya baru ‘sempat’ merealisasikan praktik partai lokal sebagaimana diatur

dalam UUPA awal tahun 2007⁹⁵. Berdasarkan amanat MoU Helsinki, UU PA akhirnya memuat aturan teknis-definitif penyelenggaraan partai lokal di Aceh. Sebagaimana didefinisikan dalam UU PA, bahwa partai lokal cukup terdiri dari warga negara yang berdomisili di Aceh, sehingga tidak mengatur dengan apa yang disebut 'putra daerah' atau siapapun yang dianggap sebagai Acehnese. Dalam prosedur demokrasi lokal, partai lokal menjadi kendaraan dalam pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.⁹⁶

Akhirnya jika kita membuka kembali lembar riwayat inisiatif dan faktor hadirnya redaksi 'partai lokal' pasca tumbangnya Soeharto, maka kita akan menemukan sebuah jalan yang berbeda dengan membuka kembali lembar sejarah hadirnya partai lokal era pemilu 1955. Titik simpul atas eksistensi partai lokal di Aceh adalah sebagai sebuah relasi kausal atas motif perdamaian karena dia muncul dalam sebuah paket konsep *self-government*. Berbeda dengan hadirnya partai lokal menjelang pemilu 1955, karena motif kemunculannya adalah semangat demokratisasi, lebih tepatnya adalah percobaan demokrasi dan akomodasi pluralitas dalam kanal politik.

⁹⁵ Menurut Aryos Nevada (mantas aktivis SIRA dan fungsionaris PRA), Partai Rakyat Aceh (PRA) adalah partai lokal yang pertama kalinya muncul, wawancara dengan Aryos Nevada pada 24 Maret 2011. Semenara itu, dalam catatan Murizal Hamzah (dalam Olle Tornquist 2010: 320-326) terlihat bahwa PRA dideklarasikan pada 3 Maret 2011, dan kemudian satu hari setelahnya 4 Maret 2011 dideklarasikan Partai Bersatu Aceh (PBA). Kedua partai ini akhirnya lolos verifikasi dan menjadi peserta pemilu 2011.

⁹⁶ Untuk menyebutkan lembaga legislatif ditingkat provinsi, digunakan nomenklatur Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Provinsi (DPRD Provinsi), sedangkan untuk menyebutkan lembaga legislatif di tingkat Kabupaten/Kota digunakan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) bukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota).

Herbert Feith (dalam *Demos* 2009) membagi partai peserta pemilu 1955 menjadi empat golongan besar: 1) Partai besar, 2) Partai menengah, 3) Partai kecil berskala nasional, 4) Partai kecil berskala lokal. Dua golongan partai terakhir inilah yang bisa dikategorikan sebagai partai lokal berdasarkan kedaerahan/kesukuan. Sedangkan menurut Anhar Gonggong (2009), parlok pada pemilu 1955 terdapat dua jenis:

1. Partai dengan nama suku : Partai Dayah, Partai Bugis Makasar
2. Partai dengan nama orang: "Partai Haji Ambrar Dalek, Dkk." Partai ini bernafas Islam di Sulawesi Selatan.

Partai lokal pada masa itu bercita-cita untuk kepentingan lokal namun dalam kerangka Indonesia. Parlok: punya sense kedaerah sehingga perjuangannya bisa langsung diaktualisasi dan spesifik (*Demos* 2009).

Sementara praktik penyelenggaraan partai lokal era reformasi terlihat dari aturan teknis penyelenggaraan partai politik lokal seperti terlihat dalam diktum UU PA berikut ini:

"Partai politik lokal harus mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) di kabupaten/kota dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan. (pasal 75 ayat 8)...Untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya, partai politik lokal peserta pemilu harus: a) memperoleh sekurang-kurangnya 5% (lima persen) jumlah kursi DPRA; atau b) memperoleh sekurang-

kurangnya 5% (lima persen) jumlah kursi DPRK yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah kabupaten/kota di Aceh.” (UU No. 11 Tahun 2006 Pasal 90)

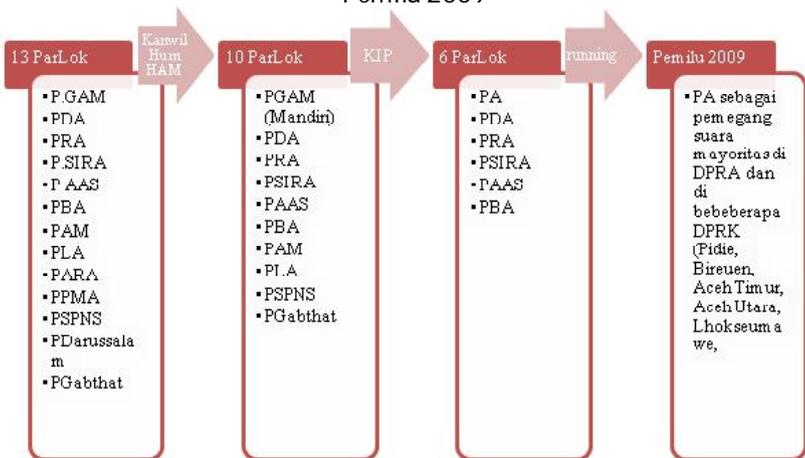
Artinya gagasan dan praktik penyelenggaraan partai lokal muncul dari semangat perdamaian, yang secara kebetulan berada dalam sebuah fase demokratisasi yang sangat masif pasca tumbanganya Soeharto. Berbeda dengan praktik partai lokal yang muncul era pemilu 1955, karena didasarkan pada akomodasi tuntutan untuk berdemokrasi. Sehingga perbedaan semangat ini memberi efek pada tata aturan penyelenggaraan partai lokal sebagaimana diatur dalam UU PA tersebut yang mempunyai kecenderungan lebih ketat. Partai lokal di Aceh lahir rahim konflik dan kemudian menetas dari cangkang kesepakatan damai.

Dengan kata lain, asumsi normatif bahwa partai lokal yang hadir di era reformasi pemilu 2009 sebagai bentuk alternatif aktor intermediari yang selama ini putus—oleh partai nasional—dalam menyambung relasi *society-state*, pada dasarnya kurang tepat. Praktik partai lokal di Aceh sebagai satu-satunya praktik parlok di Indonesia setelah lebih dari 4 dasawarsa terakhir ini adalah lebih sebagai sebuah ‘produk’ atau solusi atas konflik pusat-daerah. Sehingga pembayangan bahwa parlok merupakan penyelamat pilar demokrasi setelah absennya partai nasional tidaklah tepat dalam konteks studi ini. Hal inilah yang menyebabkan kecenderungan penyelenggaraan partai lokal di Aceh lebih ketat jika

dibandingkan dengan pengalaman partai lokal era pemilu 1955 (Demos 2009)⁹⁷.

Namun demikian, pasca pilkada selesai akhir tahun 2006, sedikitnya terdapat 13 parpol yang mendaftarkan di Kanwil Departemen Hukum dan GAM Aceh, dan pembentukannya berlangsung lama karena beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dari 13 partai local tersebut, yang lolos verifikasi sebagai partai adalah 10 partai. Dari 10 partai yang mendaftar pemilu 2009 akhirnya hanya 6 parpol yang lolos dari verifikasi Komisi Independen Pemilihan (Demos 2009). Secara lebih spesifik, dapat kita visualisasikan sebagaimana skema berikut.

Gambar 5.2. Skema alur verifikasi partai lokal di Aceh menuju Pemilu 2009



Sumber: Demos 2009

⁹⁷Regulasi partai lokal yang ketat ini dirasakan oleh Sekretaris Partai Serambi Persada Nusantara Serikat (PSPNS) Muhammad Hanafi, “partai kami tidak lolos karena tidak mampu memenuhi target dua per tiga di setiap kabupaten”. Persyaratan yang ketat juga disampaikan oleh mantan Ketua Komisi Independen Pemilihan Muhammad Mustafa.

Dari enam partai lokal yang *running* dalam pemilu 2009, partai yang pertama-tama muncul (dideklarasikan) sebenarnya adalah Partai Rakyat Aceh (PRA) pada 3 Maret 2007, berselang satu hari sebelum hadirnya Partai Daulat Aceh (PDA) pada 4 Maret 2007. Sehingga hal ini menjadi pertanda bahwa GAM secara total berusaha dalam sebuah tatanan demokrasi sehingga tidak melakukan 'sabotase politik' bagi hadirnya elemen sosial yang mendahuluinya untuk memperkenalkan partai lokal sebagai alternatif politik pasca kesepakatan perdamaian Agustus 2005.

Partai Aceh: Bukti Transformasi

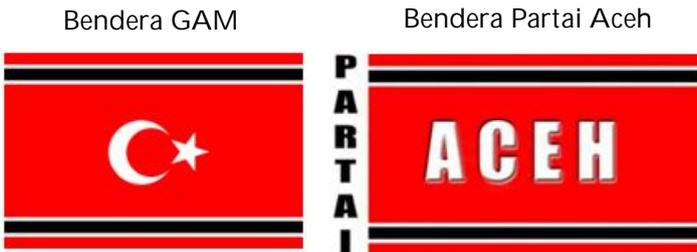
Paling tidak, terdapat dua alasan faktual bahwa Partai Aceh adalah bentuk transformasi dari GAM, yaitu personalia dan atribusi partai. Jika kita melihat struktur personalia yang ada di Partai Aceh adalah maka sulit kita bantah bahwa Partai Aceh adalah kanal politik bagi elit maupun anggota GAM. Struktur kepengurusan yang terdaftar dalam pemilihan umum 2009 menampakkan sebuah fakta bahwa mantan panglima GAM Muzakkri Manaf adalah ketua umum partai tersebut, sedangkan pada saat yang sama Muzakir Manaf adalah ketua Komite Peralihan Aceh. Sementara Muhammad Yahya menjadi Sekretaris Jendral partai. Seperti juga Kauzar yang dulunya menjadi kombatan GAM di hutan, kemudian menjadi ketua bidang pendidikan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (Handono, I. 2011, komunikasi personal, 10 Februari)⁹⁸. Artinya orang-orang

⁹⁸ Kauzar adalah salah seorang ketua departemen dan salah satu pemikir dalam Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh. Kemungkinan dia adalah departemen propaganda atau pendidikan.

yang bergabung atau direkrut dalam Partai Aceh adalah mereka yang dalam bahasa lain sebagai satu komunitas perjuangan.

Sedangkan sebelum munculnya Partai Aceh sebagai badan hukum, partai tersebut bernama Partai GAM. Sekalipun melakukan adaptasi terhadap regulasi kepartaian yang ada, perubahan lambang dan atribut dari GAM menjadi partai tidaklah signifikan, yaitu penggantian (pembubuhan) nama partai untuk mengganti lambang bulan-bintang, sementara bendera mempunyai warna dan motif yang sama.

Gambar 5.3. Perbandingan Bendera (Atribut) Atas Transformasi GAM Menjadi Partai Aceh



Kedua bendera GAM dan Partai Aceh tersebut menunjukkan pergeseran simbol yang signifikan. Sehingga membuka ruang rafsir bagi kita bahwa Partai Aceh tetap membawa semangat *self-determination* (jika tidak bisa disebut dengan merdeka), atau kedua adalah berusaha untuk menunjukkan kepada publik Aceh

Pada masa pra MoU, Kauzar sebagai orang gerakan bertentangan dengan bapaknya yang merupakan petinggi Golkar di Aceh dalam garis politik. Sehingga dia sempat menggalang aksi masa untuk menentang keputusan DPRD Aceh (saat itu) yang juga melibatkan perang bapaknya dalam memutuskan konun tentang syariah.

bahwa Partai Aceh adalah metamorphosis dari GAM sehingga perubahan simbol yang tidak signifikan membantu dalam penjagaan simpati warga (sebagai voters).

Apalagi dalam fase awal pendiriannya ketika dideklarasikan pada 7 Juli 2007, Partai Aceh yang ada saat ini adalah bernama Partai GAM dengan ketua umum adalah Malik Mahmud (mantan Perdana Menteri GAM).

“GAM membentuk Partai GAM yang pada mulanya diketuai oleh Tgk. Malik Mahmud (Perdana Menteri GAM), tetapi tidak berapa lama kemudian kepemimpinannya digantikan oleh Tgk. Muzakkir Manaf (mantan Panglima GAM)” (Hamid, A.F. 2008: 248).

Karena desakan dari Departemen Hukum dan HAM sebagai pemegang otoritas verifikasi partai politik, lalu kemudian diubah menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri. Karena perubahan nama tersebut tetap merujuk pada nomenklatur yang sama dengan sebelumnya, lalu kemudia akhirnya berakhir dengan nama Partai Aceh. Sehingga riwayat atribusi pendirian partai—perihal nama, lambang, dan struktur aktor—ini menunjukkan sebuah benang merah Partai Aceh adalah bentuk transformasi GAM.

Di sisi lain, relasi kelembagaan antara GAM dan Partai Aceh secara eksplisit termaktub dalam regulasi internal Partai Aceh. Sebagaimana dalam regulasi internal bernomor No:1st/ DPA/ PA/ IV/ 2009 tentang Pemerintahan Partai Aceh secara eksplisit dinyatakan bahwa peraturan tersebut dikeluarkan salah satunya atas pertimbangan “Surat Mandataris Pimpinan Politik

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam proses pembentukan Partai Politik yang berbasis lokal di Aceh yang diamanatkan kepada Jahja Tengku Mu'ad atau disebut juga Muhamad Yahya tanggal 27 Februari 2007". Sementara Ketua Umum partai dan Sekretaris Jendral pada tahap awal pendiriannya adalah "dipilih dan ditunjuk oleh Pimpinan Politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM)".⁹⁹ Sehingga hal ini menjadi terang benderang bahwa Partai Aceh merupakan perwujudan lain dari GAM dalam tatanan demokrasi di Aceh.

Penampakan transformasi kepartaian pasca tumbanganya Soeharto yang bisa menjadi refleksi atas transformasi GAM-menjadi-Partai Aceh adalah partai Golkar dengan apa yang disebut paradigma baru¹⁰⁰. Konsekuensi organisasional atas 'paradigma baru' ini adalah perombakan struktur organisasi partai golkar: pertama adalah penghapusan dewan pembina (yang diketuai oleh Soeharto) karena sejak munas golkar 1978 telah menjadi institusi internal yang 'sangat kuat'¹⁰¹. Kedua, pemutusan jalur pendukung Golkar yang pada orde baru dikenal dengan ABRI, Birokrasi, dan Golkar (ABG). Jalur A diputus walaupun militer (AD) dalam sejarah kelahiran dan pertumbuhan sangat istimewa dan

⁹⁹ Lihat dalam pasal 6 dan pasal 12 Undang Undang Partai Aceh No:1st/ DPA/ PA/ IV/ 2009 tentang Pemerintahan Partai Aceh

¹⁰⁰ Menurut Akbar Tandjung apa yang disebut dengan paradigma baru adalah Golkar dibangun dengan nilai-nilai baru selaras dengan tuntutan reformasi dan menjadikan dirinya sebagai partai politik yang terbuka (inklusif), mandiri (independen), demokratis, moderat, solid, mengakar dan reponsif terhadap permasalahan masyarakat, bangsa, dan negara dengan melaksanakan fungsi-fungsi partai politik secara konsisten.

¹⁰¹ Ibid., hlm.98-101. Lebih lanjut dalam munaslub Golkar 1998, (komisi A) menyepakati perombakan struktur dengan merubah AD/ ART dengan: penghilangan struktur Dewan Pembina di tingkat DPP, Dewan Pertimbangan di tingkat DPD I dan Dewan Penasehat Golkar di tingkat DPD II, karena ketiga unsur tersebut menjadi sumber persoalan golkar. Dewan pembina dianggap terlalu dominan dan sangat eksekutif.

penting. Karena Golkar menyetujui RUU Politik terhadap netralitas birokrasi (PNS) dan institusi TNI dan Polri.¹⁰² Dengan melihat transformasi Golkar ini, maka garis merah yang dapat kita tarik terkait dengan transformasi GAM menjadi Partai Aceh, adalah apa yang disebut dengan Aspinall sebagai 'mindset demokrasi' pasca Soeharto. Artinya, baik GAM maupun Golkar melakukan perubahan sebagai bentuk adaptasi terhadap euforia demokratisasi era reformasi.

Namun dalam konteks GAM, baik berdasarkan data faktual maupun logika analisa transformasi gerakan, ditemukan bahwa setidaknya terdapat dua kesulitan dalam menghadapi transisi dari bullet ke ballot, yaitu¹⁰³:

1. Adanya saling kecurigaan terhadap orang luar (khususnya dari Jawa) maupun kecurigaan satu sama lain di internal GAM dan aktor politik Aceh.
2. Adaptasi dari kultur komando yang *top-down* menjadi demokrasi dimana terdapat perbedaan pendapat, perdebatan untuk sebuah kesepakatan.

Secara internal terdapat 'kegagalan' dari transformasi GAM yang iklimnya tertutup menjadi PA yang iklimnya terbuka (demokratis), yaitu kecurigaan dan sulit untuk berbicara atau mengungkapkan pernyataan¹⁰⁴. Paling tidak kesulitan inilah yang terlihat mewarnai dalam proses pendirian Partai Aceh sebagai sebuah bentuk transformasi dari GAM.

¹⁰² Ibid., hlm. (102-103).

¹⁰³ berdasarkan hasil pendampingan yang dilakukan DEMOS terhadap demokratisasi di Aceh. Lihat dalam video Demos. 2009. *Mencari Peluang Demokrasi di Aceh*.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Agung Wijaya pada 8 Februari 2011.

Dari 'GAM' ke 'Partai Aceh': Sebuah Kompromi

Kesulitan itulah yang dihadapi ketika GAM menginisiasi sebuah partai lokal sebagai kanal politik bagi elit dan anggotanya. Muhammad Yahya (Sekjend. Partai Aceh) menyatakan bahwa perubahan nama partai dari Partai GAM hingga akhirnya menjadi Partai Aceh adalah bentuk penyesuaian, lebih lanjut 'penyesuaian' ini juga dipengaruhi oleh keterlibatan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar GAM menyesuaikan diri dengan ketentuan hukum dan prosedur verifikasi *(Demos 2009).

Perlu kita ketahui bahwa dalam proses verifikasi, pemerintah melalui Kanwil Departemen Hukum dan HAM sebagai pemegang otoritas verifikasi peserta pemilu mengajukan keberatan atas nama partai yang dideklarasikan pada 7 Juli 2007, yaitu bernama Partai GAM¹⁰⁵ yang lengkap dengan lambang dan bendera GAM. Bagi pemerintah¹⁰⁶ dengan menamai partai seperti itu—dan menggunakan bendera maupun lambang GAM—telah dianggap menyalahi kesepakatan perdamaian di Helsinki dan membangkitkan kembali bara konflik (Bhakti, I.N. (ed.) 2008: 155). Alhasil, akhirnya nama partai diubah dengan mendeskripsikan kata 'GAM', sehingga bernama Partai Gerakan Aceh Mandiri artinya jika disingkat akan membentuk nomenklatur yang sama dengan nama partai sebelumnya yaitu 'Partai GAM'. Namun "mereka (pemerintah) keberatan dengan kata 'gerakan' dalam nama Partai Gerakan Aceh Mandiri (Partai GAM).

¹⁰⁵ Nama 'GAM' adalah sebuah akronim sehingga tidak mempunyai kepanjangan kata atau bentuk sebuah singkatan dari kata/frase.

¹⁰⁶ Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata sejak awal berkeberatan dengan nama partai Partai GAM.

Apa yang disebut penyesuaian tersebut akhirnya mencapai klimaks di detik akhir (menjelang satu bulan) *deadline* verifikasi partai peserta pemilu 2009 setelah lolos dari meja Depkumham pada 23 Mei 2008, dengan nama Partai Aceh. Secara diplomatik Adnan Beureuensyuaah—salah satu pendiri partai yang kemudian menjadi juru bicara Partai Aceh—menyatakan “kita akhirnya mengubah nama dan bendera demi untuk melanggengkan perdamaian”. Proses penamaan ini menunjukkan kesulitan yang pertama, yaitu sifat saling curiga¹⁰⁷.

Sedangkan dalam perspektif internal GAM, pendirian partai ini memunculkan kontroversial di dalam tubuh GAM. Faksi yang muncul pada pemilihan gubernur akhir 2006 lalu kemudian kembali muncul ketika partai ini didirikan namun dengan aktor dan bentuk faksi yang tidak terkonsolidasi. Setelah deklarasi pada Juli 2007, aktor-aktor dalam faksi kelompok muda seperti Sofyan Dawod (Juru Bicara GAM di Aceh), Irwandi Yusuh, atau Munawaliza berkeberatan dengan nama dan lambang GAM yang digunakan sebagai nama dan lambang partai. Sofyan Dawod dalam sebuah liputan menyatakan “itu kan simbol rakyat, kok digunakan untuk partai”. Alhasil dalam daftar nama pengurus yang sampai di Departemen Hukum dan HAM, nama-nama dalam pemetaan faksi kelompok muda sebagaimana Gambar 5.4. diatas tidak ada dalam struktur kepengurusan partai.

¹⁰⁷ Muhammad Yahya (petinggi GAM yang ditunjuk oleh ‘pimpinan politik GAM’ sebagai Sekjend. Partai) menyatakan bahwa kecurigaan Jakarta terhadap nama partai (nomenklatur ‘GAM’) adalah tidak perlu karena “kita berdasarkan perjanjian Helsinki sudah masuk dalam NKRI”.

Sehingga selain persoalan nama, turbulensi internal juga disebabkan dalam penempatan jabatan dalam Partai Aceh yang ditunjuk oleh pemimpin politik GAM. Dalam prinsip pengorganisasian Partai Aceh dinyatakan secara eksplisit bahwa dalam tahap awal pembentukan partai jabatan ketua umum dan sekretaris jenderal ditunjuk oleh pimpinan politik GAM¹⁰⁸. Artinya kita tidak terkejut jika nama Muzakkir Manaf yang masuk dalam faksi kelompok tua akhirnya menjadi ketua umum partai. Karena jika kita masuk lebih detail dalam riwayat proses pendirian partai hingga menjadi peserta pemilu 2009, Malik Mahmud—yang pada awalnya dipilih sebagai ketua Partai GAM—akhirnya memilih mengundurkan diri dan menunjuk Muzakkir Manaf sebagai penggantinya (Bhakti, I.N. (ed.) 2008: 168-172)¹⁰⁹.

Sementara itu, mekanisme *top-down*—sebuah fakta dari diteruskannya kultur komando—dalam penunjukan Jahja Tengku Mu’ad atau Muhammad Yahya sebagai sekretaris jenderal partai terlihat dari bahan pertimbangan pembuatan peraturan internal partai (tentang Pemerintahan Partai Aceh): “Surat Mandataris Pimpinan Politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam proses pembentukan Partai Politik yang berbasis lokal

¹⁰⁸ Lihat dalam Undang Undang tentang Pemerintahan Partai Aceh—aturan internal partai di bawah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga—yang khusus mengatur struktur kepengurusan partai.

¹⁰⁹ Malik Mahmud (mantan PM GAM) dalam proses pendirian partai hingga akhirnya menjadi peserta pemilu, adalah orang Aceh yang tidak mempunyai kewarganegaraan Indonesia melainkan berkewarganegaraan Singapura sehingga tidak secara hukum tidak bisa menjadi pengurus partai (eksekutif). Pergantian ini dilakukan ketika bersamaan dengan perubahan nama partai dari Partai GAM menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri. Baru setelah kematian Hasan Tiro pada awal Juni 2010, Malik Mahmud bersama dengan Zaini Abdullah dan Zakaria Saman bertemu Menteri Hukum dan HAM di Jakarta pada 21 Juni di tahun yang sama untuk ‘mengembalikan’ dirinya sebagai warga negara Indonesia.

di Aceh yang diamanatkan kepada Jahja Tengku Mu'ad atau disebut juga Muhamad Yahya tanggal 27 Februari 2007". Sedangkan aktor pimpinan politik GAM yang dimaksud tidak lain adalah Hasan Tiro dan Malik Mahmud sendiri (Bhakti, I.N. (ed.) 2008: 181).

Model komando yang *top-down strick* dalam pembentukan partai inilah yang menjadi kausal turbulensi internal selain karena problem nama partai. Deskripsi ini menunjukkan apa yang disebut sebagai kesulitan kedua transformasi gerakan bersenjata menjadi gerakan politik, yaitu adaptasi kultur komando dalam sebuah iklim yang demokratis.

Adanya fakta kesulitan-kesulitan dalam pembentukan partai hingga menghadirkan turbulensi di internal GAM, maka garis simpul yang bisa kita tarik adalah ketidaksengajaan politik. Parta lokal yang menjadi dasar konseptual berdirinya Partai Aceh muncul diluar agenda politik GAM dalam perundingan Helsinki. Sehingga hal ini berimplikasi pada logika adaptasi daripada demokratisasi politik lokal di Aceh. Logika adaptasi inilah yang kemudian berakhir pada turbulensi internal GAM/PA karena kelembagaan partai dibangun bukan berdasarkan konsensus organisasi melainkan sebagai bentuk penyesuaian terhadap tata kelola dan keharusan administratif lembaga kepartaian yang diatur UUPA sebagai terjemahan kesepakatan damai atau kerelaan GAM untuk mengalah dengan Pemerintah RI.

Kesimpulan

Bab ini menjelaskan alur dan dinamika yang terjadi sejak setelah kesepakatan Helsinki sampai akhirnya Partai Aceh menjadi partai peserta pemilu 2009 dan secara faktual merupakan bentuk transformasi GAM sebagai sebuah lembaga kepartaian. Undang Undang Pemerintahan Aceh—sekalipun adalah ramuan dari tiga kepentingan: GAM, Pemerintah RI, Masyarakat Sipil—berhasil menerjemahkan gagasan *self-government* yang mereduksi otoritas pemerintah pusat baik secara simbolik (penggunaan kata dan redaksi regulasi) maupun substantif. Regulasi inilah yang mendasari secara teknis penyelenggaraan partai lokal di Aceh dan menjadi satu-satunya regulasi yang mengatur banyak hal terkait penyelenggaraan pemerintahan di Aceh sehingga lebih mirip sebagai sebuah konstitusi.

Sementara itu setelah UUPA masuk dalam fase implementasi, GAM mengalami dua kali turbulensi internal hingga terbentuknya Partai Aceh sebagai partai sah peserta pemilu: turbulensi menjelang pemilihan gubernur Aceh 2006 dan turbulensi ketika proses pendirian Partai Aceh. Turbulensi ini yang akhirnya menghasilkan faksionalisasi di tubuh GAM (PA) berimplikasi pada konstelasi politik di Aceh kedepan.

Munculnya faksi dalam pemilihan gubernur Aceh dan dinamika internal dalam pembentukan partai menjelaskan bahwa transformasi GAM bersifat elitis. Artinya kehendak untuk berintegrasi melalui 'barter' partai lokal berawal dari orientasi politik dan determinasi elit GAM. Sehingga hal ini berimplikasi pada konflik elitis di kemudian hari. Sedangkan pada saat

yang sama, dinamika internal menunjukkan adanya pergeseran paradigma gerakan yang disatukan melalui gagasan secession menjadi berada pada kebingungan orientasi pasca-reintegrasi dan masuk dalam kubangan demokrasi.

Fakta faksionalisasi ini mengkonfirmasi kritik Geovanni Sartori (1976) terhadap tesis Lipset dan Rokkan (1967). Jika kita meletakkan munculnya Partai Aceh dalam logika cleavage lokal versus cleavage nasional, maka Partai Aceh merupakan transformasi di tatanan politik atau sebuah bentuk pelembagaan konflik pusat-daerah. Sartori menggagas bahwa adanya kemungkinan aktor dalam transformasi cleavage ini yang membuat kesalahan dalam menerjemahkan cleavage ke dalam ranah politik.

Sehingga fakta turbulensi internal dalam GAM selain mengkonfirmasi pada kritik Sartori terhadap tesis Lipset dan Rokkan bahwa terjadi kesalahan aktor cleavage (elit GAM) dalam menerjemahkan kepentingannya pasca-*secession* dalam ranah demokrasi politik, juga menjelaskan bahwa bukan GAM yang berganti baju (bertransformasi) melainkan personalia (elit) GAM yang berganti baju ke dalam Partai Aceh karena *secession* sebagai sebuah *core motivation* bagi GAM akhirnya hilang sama sekali kecuali ekspresi 'penentangan' terhadap otoritas pemerintah pusat yang terjadi kemudian hari. Transformasi menyisakan kepentingan berkuasa atau paradigma *power* bagi elit GAM.

PARTAI ACEH: TRANSFORMASI UNTUK SEBUAH KERJA POLITIK

Sebelum jauh melangkah untuk menerawang bentuk transformasi dari sebuah 'prakondisi' panjang sebagaimana elaborasi bab sebelumnya, penting bagi kita untuk memahami transformasi paradigmatis atas Partai Aceh sebagai satu bentuk adaptasi GAM dalam tatanan demokrasi. Sehingga kita perlu *me-review* sedikit terkait GAM sebagai sebuah paradigma gerakan. Sebagaimana dalam elaborasi BAB III, pada dasarnya semangat pemisahan diri—dari bagian NKRI— atau *secession* adalah bentuk balutan atas *core motivation* yang diterjemahkan Hasan Tiro dan kemudian dianut oleh anggota/milisi GAM. Motivasi inti tersebut adalah apa yang disebut dengan bangsa Aceh atau *Acehnese* yang mendasarkan diri pada imaji era kesultanan sebagai sebuah bangsa. Baru kemudian *Acehnese* ini dibalut dengan *secession* dan untuk melakukannya maka diperlukan GAM, sehingga GAM akhirnya mempunyai tugas untuk memobilisasi rakyat Aceh dalam gerakan perlawanan terhadap Pemerintah RI.

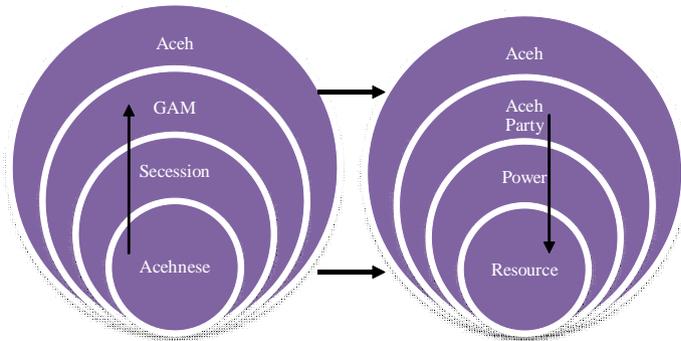
perwujudan bentuknya melalui Partai Aceh sebagai sebuah organisasi kepartaian. Dalam banyak catatan pengorganisasi Partai Aceh yang akan dijelaskan selanjutnya, *Acehnese* seolah hilang begitu saja yang digantikan dengan semangat perebutan sumber daya atau *resources*¹¹⁰ (Bhakti, I.N. (ed.) 2008: 166-167; Nivada, A. 2010). Sehingga kekuasaan adalah jalan pertama untuk memperolehnya, dan Partai Aceh menjadi satu-satunya kanal untuk memperoleh kekuasaan dalam tatanan demokrasi di Aceh (bagi GAM). Akhirnya Partai Aceh memobilisasi rakyat Aceh sebagai sebuah *voters* bukan bagian dari gerakan layaknya GAM. Singkat cerita, *paradigmatic transformation* ini terlihat sebagaimana visualisasi berikut.

Pergeseran paradigma ini juga mendasari pada hadirnya partai politik tanpa ideologi selain sebagai dirinya sebagai organisasi pencari kekuasaan. Namun kita tidak bisa melepaskan Partai Aceh dari genealogi kemunculannya yang berada pada ruang relasi konflik nasional-lokal. Artinya, sekalipun terjadi pergeseran paradigma yang mengkristal sebagai ideologi partai, Partai Aceh mengekspresikan kerja politiknya tidak jauh

¹¹⁰ Bukti atas argumen ini adalah bahwa eksistensi Pulo Gadeng sebagai perusahaan raksasa di Aceh pasca-konflik merupakan perusahaan yang dikelola oleh keluarga Muzakir Manaf (Ketua Umum Partai Aceh) yang kemudian memposisikan Muzakir Manaf sebagai Direktur Utama perusahaan tersebut. Sebelumnya ekspansi Pulo Gadeng kemudian meluas yang kemudian mempunyai beberapa anak perusahaan seperti PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Samudra Niaga, PT Matangkuli Perdana, PT Krueng Kureutou, PT, Pandu Buana Nusantara, CV Aneuk Piranha, dan CV Mawar Sejati. Artinya Pulo Gadeng yang pada awalnya berada di ranah bisnis impor mobil bekas Singapura dan ekspor biji pinang ke Malaysia, akhirnya meluas ke beberapa ranah bisnis. Terdapat juga perusahaan yang 'dihuni' mantan petinggi militer GAM seperti Aceh World Trade Center (AWTC) Dagang Holding, PT Aneuk Nanggroe Expedition Bireuen, PT Megah Mulia, dan PT Halimun Meugah Raya.

dari sentimen lokal-nasional sebagaimana kerangka teoritik bahwa ruang relasi konflik genealogi partai berpengaruh pada ekspresi politik partai. Berikut ini adalah skema pergeseran paradigma dari GAM menjadi Partai Aceh atau dapat kita sebut sebagai transformasi paradigmatis yang berbicara pada pergeseran ideologi.

Gambar 6.1. Visualisasi transformasi paradigmatis dari GAM menjadi Partai Aceh

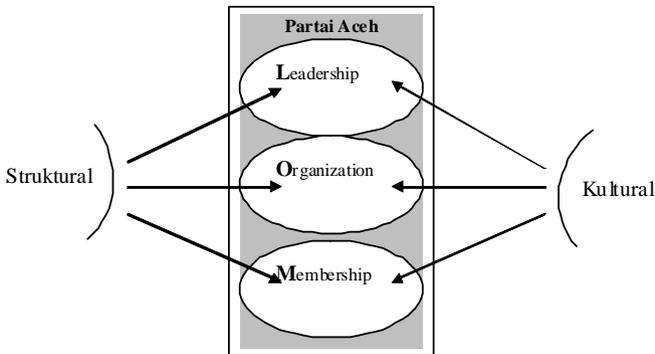


Penjelasan lebih lanjut atas Gambar 6.1. adalah bahwa selain pergeseran paradigma, terjadi pembalikan alur sekuen motif. GAM dibentuk sebagai sebuah organisasi yang mengantarkan pada *secession* sebagai sebuah ide, sementara pemisahan diri atas NKRI dibangun di atas imajinasi kebangsaan Aceh atau *Acehnese*. Sementara Partai Aceh muncul sebagai satu-satunya kanal kekuasaan, dan kekuasaan bagi mantan GAM diperoleh sebagai alasan penguasaan kapital. Artinya penguasaan sumber daya muncul dari hadirnya lembaga kepartaian (lokal) sebagai produk 'ketidaksengajaan' sebuah kesepakatan damai, dan GAM hadir didasari atas tafsir bangsa Aceh yang penuh dengan visi pemisahan (secara sengaja).

Pengorganisasian Partai, Menerawang Bentuk Transformasi

Transformasi paradigmatik itulah yang kemudian berimplikasi pada bentuk transformasi pengorganisasi partai. Sehingga untuk lebih dalam, kita akan melihat bagaimana Partai Aceh dikelola sebagai sebuah organisasi politik dalam tatanan demokrasi. Dalam hal ini, terdapat dua cara untuk melihat transformasi GAM menjadi Partai Aceh sebagai sebuah organisasi, yaitu dimensi kultural dan struktural. Dengan melihat transformasi tersebut pada akhirnya akan menggiring kita pada sebuah kesimpulan atas apa yang berubah dan tidak berubah dari sebuah gerakan perlawanan di Aceh.

Gambar 6.2. Visualisasi Kerangka Analisis Transformasi GAM Menjadi Partai Aceh Sebagai Sebuah Organisasi.



Secara teknis, transformasi kultural ditunjukkan dengan melihat motif berdirinya GAM dengan motif dibentuknya Partai Aceh. Tentunya untuk melihat dimensi ini kita akan banyak memperbincangkan

terminus-terminus *warlordism* dan perilaku elit partai, yaitu seperti bagaimana mekanisme pengambilan keputusan, penguasaan sumber daya, dan pemikiran dan gagasan-gagasan para petinggi organisasi dalam dua konteks lembaga yang sama sekali berbeda zaman. Transformasi kultural—termasuk apa yang tidak berubah dari tradisi pengelolaan GAM—akan berimplikasi pada transformasi struktural.

Transformasi struktural sendiri kita lihat bagaimana elemen-elemen organisasi partai dibentuk dan melakukan fungsinya. Seperti skema *multilevel organization* dari tingkat pusat sampai ranting, rekrutmen anggota termasuk alasan kualifikasi, mekanisme, dan penempatan atas fungsinya. Hadirnya elemen-elemen organisasi partai lainnya juga perlu kita lihat sebagai sebuah bentuk transformasi itu sendiri yang pada dasarnya merupakan adaptasi terhadap konteks demokrasi lokal.

Transformasi Kultural

Jika kita melihat kembali alasan munculnya pemberontakan (pembebasan) dengan Deklarasi GAM pada Agustus 1976 yang berakhir pada akumulasi dari tiga alasan pokok (sebagaimana elaborasi Bab III):

1. Identitas politik—yang telah mengalami ‘sedimentasi’ folklore orang Aceh—sebagai orang aceh atau Acehese atau ke-Aceh-an.
2. Ketimpangan distribusi sumber daya antara pusat dan daerah, sejak ditemukannya ladang minyak dan gas alam 1970-an.

3. Faktor *warlordism* yang menstimulasi pemberontakan dan 'pemeliharaan' ekonomi aristokrat Aceh.

Maka kita akan bermuara pada satu kesimpulan bahwa alasan kelahiran tersebut bisa jadi sangat berpengaruh dengan bagaimana partai (PA) dikelola: *warlordisme* berimplikasi pada determinasi elit dan diikuti kultur komando dalam pengambilan keputusan di PA; identitas keAcehan berimplikasi pada rekrutmen anggota dan kandidat dalam partai, dan pembebasan hasil sumber daya alam dari mekanisme bagi hasil ke pusat menjadi penguasaan kapital oleh elit lokal dan menjadi kanal finansial partai yang berakhir sebagai orientasi baru. Namun pertanyaannya adalah bagaimana bentuk konkret relasi antara motif GAM dan kemunculan PA sebagai transformasi dirinya?

Sehingga di titik inilah analisis transformasi kultural secara lebih jauh kita perlukan. Untuk mengingat sedikit GAM sebagai sebuah organisasi pemberontakan atau pembebasan, Kristen E. Schulze (2005) menyatakan bahwa "*GAM's ideology is parochial, intolerant, and ethnically exclusive. Its actions are undemocratic, discriminatory, and in violation of international humanitarian law. GAM has not respected the rights of non-combatants*"¹¹¹. Kata *GAM's ideology* dalam elaborasi Schulze tersebut adalah lebih pada arti kultural, bukan ideologi dalam arti secara definitif. Sekalipun terlihat sebagai *cynical*

¹¹¹ Lebih lanjut Kristen E Schulze menyatakan bahwa "*During the period of martial law in 2003-2004 GAM was responsible for some 300 kidnappings. The hostages were not members of the Indonesian security forces but civilians — civil servants, teachers, businessmen, journalists, and wives of security forces members.*

argument, hasil studi Schulze dapat kita fungsikan untuk mengukur sejauh mana transformasi kultural yang terjadi pada pengorganisasian Partai Aceh.

Kepemimpinan: Ambiguitas Transformasi

Hal yang paling mudah untuk menunjukkan pola kepemimpinan partai adalah menyimak kembali turbulensi internal GAM ketika dihadapkan pada fase krusial bagi Partai Aceh, yaitu proses pembentukan partai. Bahwa penunjukan Muzakkir Manaf sebagai ketua Partai Aceh oleh *Manthro*¹¹² Malik Mahmud (mantan Perdana Menteri) ketika terjadi perubahan nama partai dari Partai GAM menjadi Partai Aceh dan karena alasan yuridis akibat problem kewarganegaraan Malik Mahmud (sebagai 'orang' Singapura). Hal ini merupakan pertanda penting atas bentuk kepemimpinan partai yang mewarisi *leadership culture* sebelum perjanjian damai. Begitu juga dalam penunjukan Muhammad Yahya sebagai Sekretaris Jendral partai oleh 'Pimpinan Politik GAM'.

Fakta bahwa tidak adanya protes yang signifikan atas keputusan penempatan jabatan ini sebenarnya mencerminkan karakter patronase dalam kepemimpinan partai. Pembentukan pimpinan partai—Ketua Umum dan Sekjen—yang dilakukan melalui penunjukan oleh 'Pimpinan Politik GAM' (Schulze, K. E. 2005)¹¹³, bukan melalui proses demokratis seperti yang banyak dilakukan

¹¹² *Manthro* adalah nama aceh untuk menyebut perdana menteri GAM yang masih berpengaruh sampai sekarang, yaitu Malik Mahmud.

¹¹³ Redaksi 'pimpinan politik GAM' digunakan dalam aturan internal pengorganisasi Partai Aceh untuk merujuk pada petinggi-petinggi sipil GAM seperti Hasan Tiro dan Malik Mahmud.

oleh partai-partai (nasional), menunjukkan bertahannya determinasi elit dalam struktur elit GAM.

Lebih lanjut dalam *day to day politics*, seperti aktivitas rapat, pelatihan, dan bentuk-bentuk kegiatan kepartaian lainnya, suara Muzakkir Manaf dan Muhammad Yahya menjadi begitu determinan. Contoh atas hal ini adalah seperti dicontohkan oleh Isnu Handoro. Pernah dalam sebuah rapat antarbidang dalam Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh, dimana masing-masing ketua bidang (13 bidang) bertemu sehingga terjadi perbenturan program dan perspektif dan berakhir pada *deadlock*, alhasil Ketua Umum partai Muzakkir Manaf hadir dan peserta rapat serta merta mengaimini keputusan dan apa yang dikatakan Muzakkir Manaf (Handono, I. 2011, komunikasi personal, 10 Februari). Begitu juga ketika Muhammad Yahya masuk dalam sebuah bidang dan melakukan intervensi didalamnya. Walaupun memang secara formal, tidak ada aktor personal dalam Partai Aceh yang mempunyai kekuasaan determinan dalam keputusan-keputusan PA.

“Namun secara informal, orang-orang seperti Malik Mahmud, Muzakar Manaf atau Yahya Mahmud—yang terkadang bergabung dalam satu forum—cukup menentukan keputusan-keputusan yang diambil PA), terutama Malik Mahmud karena dianggap orang paling ‘tua’ setelah hasan di Tiro.” (Handono, I. 2011, komunikasi personal, 10 Februari).

Walaupun tidak semua keputusan menggunakan mekanisme kultur komando¹¹⁴, cerita di atas menunjukkan masih kuatnya kultur patronase dalam kepemimpinan partai.

Apa lagi menurut Murizal Hamzah (dalam Törnquist, O.; Prasetyo, S.A.; Birks, T.(eds.) 2010) yang melihat adanya perbedaan antara Partai SIRA dengan Partai Aceh sebagai dua partai yang berangkat dari gerakan 'perlawanan'. Hamzah menyebutkan bahwa Partai Aceh menggunakan komando kepemimpinan GAM sedangkan SIRA tidak menggunakan mekanisme komando. Komparasi ini penting, karena membimbing pada logika bahwa GAM terbiasa dalam gerakan militer yang membutuhkan efektifitas, sementara SIRA adalah himpunan aktivis dan elemen prodemokrasi yang oleh karenanya *democratic party* telah *embeded* dalam transformasinya.

Artinya memang masih ada kultur komando yang terkadang masuk dalam rutinitas pengelolaan partai. Ketua atau sekjend bisa memberi keputusan terhadap sebuah departemen atau divisi dalam struktur kepengurusan, walaupun departemen tersebut sudah diberi tugas dan otoritas terhadap bidang yang diampunya. Di sisi lain sistem komando tersebut secara 'naluriah' masih dipakai karena person-person yang duduk dalam jabatan struktur kepengurusan tersebut masih ragu terhadap tugas yang diembannya Törnquist, O.; Prasetyo, S.A.; Birks, T.(eds.) 2010). Sehingga model kepemimpinan seperti ini menjadi ambigu ditengah

¹¹⁴ Seperti pada proses kandidasi yang menggunakan panitia seleksi

adaptasi partai dalam tatanan demokrasi, kultur komando 'dipaksa' oleh rendahnya kapasitas kader partai. Determinasi elit partai dan model komando yang melengkapinya menjadi fakta atas ambiguitas transformasi dalam Partai Aceh.

Pengorganisasian

Jika Katz dan Mair mengkonseptualisasikan tiga perwajahan partai: eksekutif, legislatif, dan organisasi partai itu sendiri, maka partai sebagai organisasi adalah perwajahan pertama bagi partai politik sebelum hadirnya di eksekutif maupun legislatif. Di titik inilah kita perlu melihat lebih jauh perwajahan Partai Aceh sebagai organisasi.

Panitia Sembilan: Organ Demokratisasi Partai

Lebih lanjut, pijakan faktor popularitas inilah yang menyebabkan penentuan anggota legislatif yang diusung PA bukan didasarkan pada garis komando dari atas melainkan diusulkan dari bawah yang dilakukan oleh sebuah mesin partai bernama *Panitia Securing* (Panitia Sembilan) yang merepresentasikan 9 elemen masyarakat Wijaya, A. 2011, komunikasi personal, 8 Februari). Panitia Sekuring (Panitia Sembilan) merupakan panitia yang dibentuk oleh PA untuk menentukan kader atau orang yang akan dicalonkan dalam bursa pileg di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Elemen-elemen masyarakat yang merepresentasikan dalam Panitia sembilan yaitu: tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh KPA, representasi perempuan, akademisi, dan elemen dari PA sendiri. Selain adanya mesin politik berupa 'panitia pemilihan'

ini, PA juga diuntungkan pada fakta bahwa “dalam kasus ini banyak orang yang datang untuk dicalonkan PA, namun PA juga mendekati orang yang populer di daerah setempat pemilihan” (Wijaya, A. 2011, komunikasi personal, 8 Februari; Handono, I. 2011, komunikasi personal, 10 Februari).

Di titik ini garis simpul yang bisa kita tarik adalah praktik demokrasi Partai Aceh diterjemahkan dalam proses kandidasi partai khususnya untuk kursi legislatif. Di sisi lain, sistem daftar terbuka pada pemilu 2009 memberi pengaruh pada mekanisme demokratis calon DPRK dari bawah. Artinya aturan pemilu dan kepartaian juga membentuk pola pengorganisasian partai khususnya dalam proses kandidasinya. Namun pada saat yang sama, hal ini menunjukkan pragmatisme partai karena logika selama orang itu populer—dan setuju sebagai calon partai—maka tidak peduli kader atau bukan seorang dapat dicalonkan oleh partai.

Profesionalisasi Partai

Bentuk profesionalisasi partai terlihat dari adanya fakta bahwa PA membatasi kadernya yang merupakan ex-kombatan tidak lebih dari 20% dari total kader yang duduk di DPRA—terdapat 33 orang kader yang menjadi anggota DPRA (Handono, I. 2011, komunikasi personal, 10 Februari). Alasan logis atas kebijakan pembatasan ekspresi politik ex-kombatan adalah sumber daya milisi GAM yang banyak tidak siap disandingkan dengan aktivis atau politisi dalam dewan (Handono, I. 2011, komunikasi personal, 10 Februari). Sementara itu terdapat kesepakatan di internal PA bahwa yang duduk sebagai pengurus PA dari tingkat pusat

(Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh) sampai di tingkat ranting (DPR) tidak boleh menjadi pejabat atau menduduki kursi lembaga Negara (eksekutif, legislative, dan badan-badan birokrasi) (Undang Undang Partai Aceh No:1st/ DPA/ PA/ IV/ 2009). Sehingga jika ada yang mau mencalonkan diri dalam bursa pemilihan, harus ada restrukturisasi kepengurusan partai di daerah tersebut (Undang Undang Partai Aceh No:1st/ DPA/ PA/ IV/ 2009). Hal ini berbeda jika kita membuka kembali GAM fase konsolidasi sampai fase militerisasi yang dipenuhi dengan perangkapan jabatan baik dalam struktur sipil maupun struktur militer.

Fakta organisasional ini menunjukkan partai Aceh sebagai sebuah organisasi politik yang diakui secara yuridis dalam tatanan demokrasi sedang melakukan proses profesionalisasi sebagai sebuah partai. Hal ini penting bahwa pengalaman pemilu 2009 sebagai sebuah medan tempur pertama kalinya bagi Partai Aceh sebagai partai lokal mampu mengakselerasi transformasi dari gerakan bersenjata yang lekat dengan karakter *informal organization*-nya.

Keanggotaan: Sebuah Inklusivitas?

Dari temuan hasil studi, pada dasarnya kata kunci untuk memeras bentuk transformasi keanggotaan GAM menjadi Partai Aceh adalah inklusivitas. Partai Aceh menjadi sebuah organisasi politik yang inklusif dari 'bentuk awalnya' sebelum kesepakatan damai sebagai sebuah organisasi yang cenderung eksklusif. Secara keanggotaan atau *membership*, Partai Aceh cenderung inklusif. Hal ini dapat dilihat melalui rekrutmen keanggotaan yang tidak mendasarkan pada anggota,

kepemilikan relasi, atau siapapun yang mengharuskan diri pro-GAM. Namun yang menjadi satu-satunya kualifikasi kultural yang dipakai adalah siapapunya merupakan *Acehnese* atau *Aceh people*, yang secara definitif berarti orang Aceh yang mempunyai semangat etno-nasionalisme (mengidentifikasi diri sebagai orang Aceh dengan tatanan nilai dan kultur di dalamnya) (Wijaya, A. 2011, komunikasi personal, 9 Februari). Sebagai catatan, etno-nasionalisme ini tidak didasarkan pada oposisi benar dengan Jawa, tetapi lebih pada identitas keAcehan seseorang.

Bentuk inklusivitas atas transformasi keanggotaan PA (dari GAM) adalah dicerminkan oleh beberapa fakta *personalia* dalam partai yang pada dasarnya tidak lazim ketika pada masa perjuangan (sebelum kesepakatan damai) (Wijaya, A. 2011, komunikasi personal, 9 Februari):

1. Juru Bicara partai di wilayah Aceh Tenggara adalah seorang pendeta.
2. Salah seorang anggota dewan di Aceh Tengah adalah seorang Kolonel.
3. Beberapa calon anggota dewan adalah dari orang Jawa.

Terkait dengan keterbukaan, fakta *personalia split* dalam kepengurusan partai mempertegas hal ini. Seperti tiga contoh dalam elaborasi inklusivitas di atas, bahwa terdapat pendeta, kolonel, dan orang Jawa sebagai fungsionaris partai di beberapa kabupaten. Namun jika kita menyambung relasi dengan motif gerakan GAM, maka fakta transformasi ini sedikit banyak menggugat

motif bahwa GAM muncul atas reproduksi sentimen etno-nasionalisme.

Temuan ini akhirnya bermuara pada titik simpul bahwa sentimen etno-nasionalisme (Aceh yang Islam, anti-Jawa implisit TNI) merupakan sebuah struktur kognisi yang digunakan Hasan Tiro sebagai alat mobilisasi gerakan. Transformasi GAM menjadi Partai Aceh justru mengkonfirmasi bahwa *Acehnese* yang dipropagandakan Hasan Tiro untuk membangun gerakan *secession* adalah sebuah perangkat mobilisasi. Artinya jika kita melihat kembali naskah deklarasi 4 Desember 1976 maka kita akan menemukan sentimen anti-Jawa yang selalu berdampingan dengan elaborasi Aceh sebagai bangsa. Artinya GAM yang dimobilisasi Hasan Tiro dibangun karena sentimen terhadap etnis-Jawa yang selalu berada pada titik kendali negara di Jakarta, sementara Hasan Tiro menafsir *Acehnese* sebagai landasarn kultural masyarakat Aceh untuk bergabung dengan gerakan.

Namun menurut Aryos Nevada (2011, komunikasi personal, 24 Februari), Partai Aceh pada awal pendiriannya—seputar pertengahan tahun 2007—bersifat eksklusif sehingga peluang masuknya masyarakat diluar ‘garis perjuangan’ kecil. Di sisi lain, sebagai sebuah partai yang berada di bawah regulasi dan payung hukum Partai Aceh dituntut untuk terbuka.

Terkait dengan keanggotaan, Juru Bicara PA menyatakan bahwa “kalau orang KPA sudah pasti merupakan anggota Partai Aceh, namun orang orang Partai Aceh belum tentu mantan GAM.” Hal ini mempertegas bahwa Partai Aceh menjadi satu-satunya

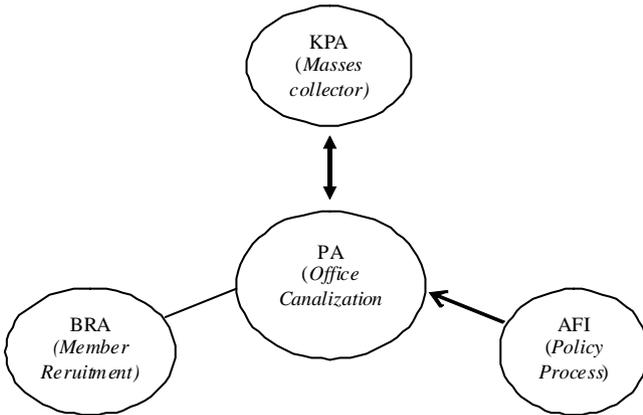
kanal politik bagi anggota GAM, dan menunjukkan inklusivitas PA dengan membuka keanggotaan diluar 'garis perjuangan'. Sekalipun pada saat yang sama dimana GAM banyak melakukan rekrutmen berdasarkan ikatan keluarga seperti yang terjadi pada kalangan elit era Hasan Tiro yang mempunyai keterikatan keluarga di kecamatan Tiro, Pidie, dan model tersebut masih diadopsi di PA (Handono, I. 2010, komunikasi personal, 10 Februari).

Benang merah atas *membership* PA adalah pada dasarnya motif keanggotaan yang sama—hanya berdasarkan kualifikasi *Acehnese*—tetapi mempunyai sistem rekrutmen yang berbeda antara GAM dan PA karena GAM berada pada iklim perang gerilya sehingga mengharuskan dirinya secara tertutup dan PA berada pada perang suara di iklim yang demokratis yang mengharuskannya secara terbuka.

Transformasi Struktural

Sebelum masuk pada elaborasi struktur internal partai, penting bagi kita untuk memetakan struktur-struktur elemen diluar partai yang juga menjadi alasan 'kemenangan' partai dan pengorganisasiannya. Karena pada dasarnya transformasi kultural sebagaimana elaborasi di atas juga dipengaruhi oleh fakta adanya struktur ekseternal ini. Dalam hal ini, paling tidak terdapat tiga lembaga strategis di Aceh yang mempunyai relasi baik searah maupun resiprokal bagi Partai Aceh, yaitu: Komite Peralihan Aceh, Badan Reintegrasi Aceh, dan sebuah LSM bernama Aceh Future Institute. Elemen-elemen organisasi ini akhirnya membangun relasi triangulasi bagi Partai Aceh.

Gambar 6.3. Visualisasi relasi struktur eksternal Partai Aceh



Keterangan relasional

- ↕ : relasi kelembagaan resiprokal dan kausalitas
- ↑ : relasi kelembagaan kontributif
- | : relasi bukan kelembagaan, personal

Sebagaimana penjelasan di awal bahwa dua bulan setelah kesepakatan MonU Helsinki, Komite Peralihan Aceh dibentuk sebagai 'cawan' yang menampung mantan combatan GAM (milisi yang tergabung di TNA).

*"KPA merupakan unsur bekas militer GAM, sedangkan Partai Aceh adalah wadah politik yang dibentuk oleh GAM. Oleh karena itu, kalau orang KPA sudah pasti merupakan anggota Partai Aceh, namun orang-orang Partai Aceh belum tentu mantan GAM."*¹¹⁵

¹¹⁵ Fakta terkait KPA ini juga terlihat dari relasi ex-kombatan dengan PA sebagaimana dikisahkan oleh Isnur Handono (2011) bahwa panglima belum tentu menjadi pengurus

Komite Peralihan Aceh merupakan tempat berkumpulnya para mantan panglima GAM dan milisi-milisi yang ada di bawahnya, sekaligus pada saat yang sama menjadi sebuah lembaga yang tak terpisahkan dengan Partai Aceh. KPA menjadi lembaga yang mengakomodasi milisi GAM dan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan kesepakatan Helsinki untuk meneruskan dan mengakomodasi tuntutan atau dukungan para bekas milisi GAM (Handono, I. 2010, komunikasi personal, 10 Februari). Signifikansi peran KPA ini teruji dalam pemilihan umum sebagai pengorganisasi massa.

Selain adanya Komisi Peralihan Aceh yang mempunyai relasi interdependensi bagi GAM, hadirnya BRA juga berpengaruh bagi Partai Aceh. Pengaruh ini dapat kita tarik dari fakta personalia dalam BRA yang dipenuhi oleh orang-orang GAM.

“BRA atau Badan Reintegrasi Aceh sebenarnya berisi orang-orang yang tidak jauh beda dengan yang ada di KPA dan PA. dari struktur kepengurusannya terdapat sekitar 90% adalah orang-orang Partai Aceh (Handono, I. 2010, komunikasi personal, 10 Februari).

BRA mempunyai ranah kerja yang lebih luas dari bidang kemanusiaan bagi korban tsunami, korban GAM, pembangunan ekonomi, dan program reintegrasi lainnya seperti: bidang HAM, pendidikan, sosial.

PA di daerah komandonya dulu adalah di Nagan Raya yang merupakan kabupaten yang dulu berada dibawah panglima Tengku Juragan. Tengku Juragan bukan pengurus PA namun sekarang menjabat sebagai ketua DPRK di Nagan Raya. Namun keberadaan dan perannya terhadap PA di sana cukup determinan.

Sehingga hal ini memberi konsekuensi bagi BRA yang secara informal bermanfaat bagi PA karena berfungsi potensial untuk kaderisasi dan rekrutmen anggota. Di sisi lain BRA adalah semacam lembaga sampiran Negara yang mendapatkan dana dari APBN dan APBD dimana sebagian besar dana tersebut 'dipersembahkan' kepada GAM (Palmer, B. 2007)¹¹⁶. Sehingga garis simpul yang dapat kita tarik dari BRA terhadap PA adalah relasi 'prakondisi' dan ruang baru kaderisasi bagi Partai Aceh.

Sementara itu, Aceh Future Institute (AFI) merupakan LSM yang dipimpin oleh Tengku Yahya Mahmud (sekjend PA) yang akhirnya menjadi *thinktank* bagi Partai Aceh (Handono, I. 2010, komunikasi personal, 10 Februari). Karena beberapa alasan: lembaga tersebut diisi oleh beberapa elit GAM (termasuk juga ketua PA). Sedangkan *project* yang dikerjakan lembaga tersebut adalah merancang Aceh masa depan dalam berbagai aspek seperti tata ruang kota, pendidikan, social, dalam bentuk *masterplan*. Sehingga AFI bisa jadi adalah dapur kebijakan PA dalam memperlakukan Aceh. Di dalam AFI tersebut juga terdapat staf dan bidang layaknya lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya. Seperti Fox dalam partai Demokrat atau CSIS ketika menjadi lembaga 'di' Golkar dulu. Sehingga AFI secara structural tidak terkait dengan PA namun secara cultural sangat erat karena hasil-hasil kerja yang dilakukan AFI 'dipakai' oleh PA. Seebagai contoh adalah beberapa Program Legislasi Daerah (prolegda) atau konun yang digodog di di AFI

¹¹⁶ Terkait pembagian dana ini, Blair Palmer (2007) menjelaskan bahwa "from a total fund pool of US\$150 million, cash payments of approximately \$3500 were to be given to GAM combatants, \$1400 for GAM non-combatants (or 'civilian GAM'), \$1400 for political prisoners, \$700 for 'surrendered GAM' (those who surrendered before the MoU), and \$1400 for members of anti-separatist groups".

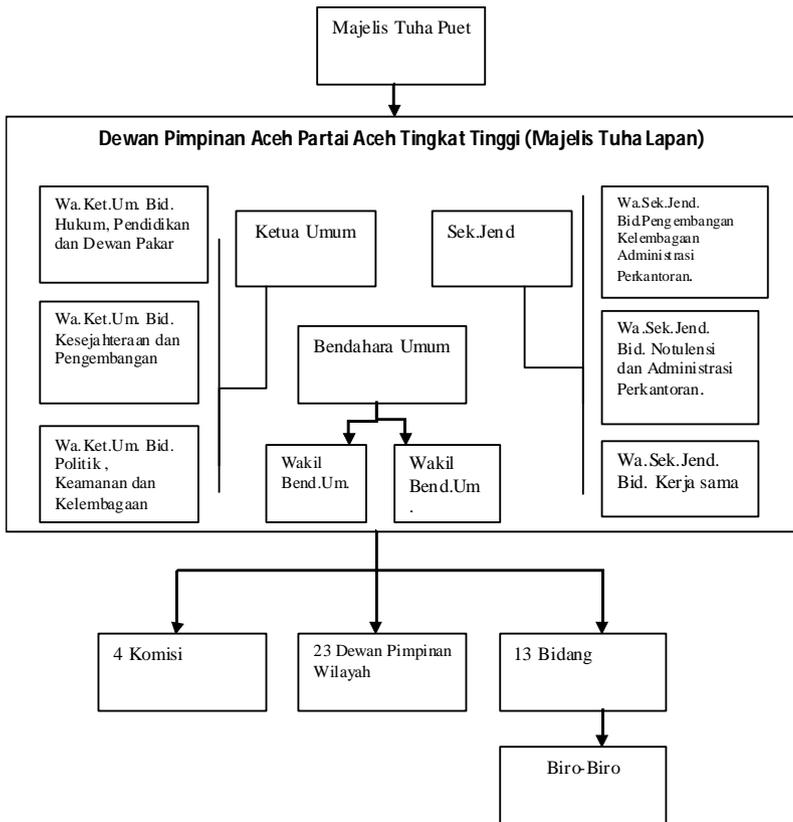
sehingga disidang-sidang parlemen adalah formalitas lembaga legislative.

Hubungan Partai Aceh dengan tiga elemen strategis ini—KPA, BRA, AFI—pada akhirnya membangun *triangle relation* atau relasi segitiga. Relasi ini menunjukkan kita pada sebuah garis simpul bahwa PA lahir dan berkembang bukan sebagai sebuah entitas politik yang tunggal, melainkan didukung oleh instrumen-instrumen lain atau *supporting organization* yang berada dan bekerja diluar ranah politik. Organisasi-organisasi ini berfungsi untuk membangun dan mengembangkan pipa politik kekuasaan Aceh melalui Partai Aceh.

Sedangkan tatanan internal organisasi partai terlihat dalam Undang Undang Partai Aceh No:1st/DPA/PA/IV/2009 tentang Pemerintahan Partai Aceh¹¹⁷. Sehingga kita perlu meramunya dalam relasi kuasa kepengurusan sebagaimana berikut:

¹¹⁷ Undang Undang tentang Pemerintahan Partai Aceh ini adalah regulasi internal partai yang berada di bawah AD/ART partai, lebih lanjut dalam apa yang disebut Undang Undang Pemerintahan Partai ini hanyalah mendeskripsikan tatanan organisasional partai secara struktural seperti elemen, fungsi, relasi, dan tujuannya.

Gambar 6.4 Skema Struktur Kelembagaan Partai Aceh



Sumber: Peraturan Partai Aceh No. Ist/DPA/PA/IV/2009

Sebagaimana tercantum dalam aturan internal partai yang kita bahasakan pada visualisasi di atas, paling tidak terdapat 13 bidang dalam struktur organisasi Partai Aceh:

1. Bidang Organisasi dan Kelembagaan.
2. Bidang Pendidikan dan Kaderisasi.
3. Bidang Keuangan dan Logistik.
4. Bidang Ekonomi, Perdagangan dan Industri.
5. Bidang Informasi dan Komunikasi.
6. Bidang Hukum dan HAM.
7. Bidang Sosial dan Kemasyarakatan.
8. Bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi.
9. Bidang Pelestarian Alam dan Lingkungan Hidup.
10. Bidang Adab dan Kebudayaan.
11. Bidang Kesehatan.
12. Bidang Perhubungan.
13. Bidang Pertanian dan Kehutanan.

Sedangkan keempat komisinya adalah :

1. Komisi Investasi dalam Negeri.
2. Komisi Keamanan dan Ketertiban.
3. Komisi Evaluasi dan Kinerja Anggota Legislatif Partai.
4. Komisi Intelijen Partai.

Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Tingkat Tinggi terdiri dari ketua umum dan wakil-wakil ketua umum, sekretaris jenderal dan wakil-wakil sekretaris jenderal, bendahara umum dan wakil-wakil bendahara umum. Sedangkan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Tingkat Aceh terdiri dari ketua umum dan wakil-wakil ketua umum, sekretaris jenderal dan wakil-wakil sekretaris jenderal, bendahara umum dan wakil-wakil bendahara umum dan ketua-ketua bidang dan ketua biro-

biro yang merupakan bagian Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh yang bertanggung jawab menjalankan tugas-tugas sesuai fungsi dan wewenang masing-masing. Sementara itu apa yang disebut dengan Pimpinan Partai Aceh adalah terdiri dari ketua umum, sekretaris jenderal.

Struktur Kepengurusan, Sebuah Logika Kepemimpinan

Terlihat pula dalam bagan tersebut, bahwa Majelis Tuha Puet Aceh adalah Majelis Tertinggi tingkat Aceh sedangkan Majelis Tuha Lapan Aceh adalah sebuah majelis yang menghimpun unsur-unsur Dewan Pimpinan Aceh Partai. Struktur 'Dewan Penasehat' ini walaupun tidak mempunyai determinasi eksplisit bagi partai, namun sangat berpengaruh. Dewan Pertimbangan/ Dewan Penasihat (Majelis Tuha Puet) ini berpengaruh terhadap keputusan-keputusan PA. Karena "elemen ini berisi sesepuh dan petinggi GAM"¹¹⁸. "Orang-orang seperti Malik Mahmud, Bahtiar Abdullah tidak masuk struktur kepengurusan partai, tetapi sangat berpengaruh terhadap keputusan-keputusan partai" (Handono, I. 2010, komunikasi personal, 10 Februari). Karena setiap kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh PA (DPP partai) harus dikonsultasikan dulu ke Dewan tersebut (Handono, I. 2010, komunikasi personal, 10 Februari). Artinya prinsip pengambilan keputusan yang ada di PA tidak jauh berbeda dengan yang ada di GAM, namun secara teknis berbeda.

¹¹⁸ Dalam banyak pemberitaan dan korespondensi, sesepuh GAM paling tidak merujuk pada dua nama: Hasan Tiro dan Malik Mahmud. Sementara Agung Wijaya menyebutkan bahwa petinggi GAM ada empat: Hasan Tiro, Malik Mahmud, Zaini Abdullah, dan Bakhtiar Abdullah.

Fakta ini menunjukkan bahwa selain dalam perspektif kultural, dalam perspektif struktural, struktur elit Partai Aceh tidak berubah sebagai sebuah hasil transformasi kelembagaan dari GAM. Pemimpin Politik yang dulu berada di pengasingan kemudian dikonversi dalam struktur “Dewan Penasehat” Partai.

Pengorganisasian: Keharusan Administratif

Untuk membangun dan mengelola basis massa, jelas Partai Aceh harus memastikan dirinya hadir di setiap penjuru Aceh. Di titik inilah analisis terhadap *multilevel organization* yang dibangun menjadi penting. Berdasarkan skema relasi kuasa kepengurusan partai di atas, paling tidak terdapat 23 dewan pimpinan wilayah adalah¹¹⁹ :

1. Dewan Pimpinan Wilayah Kota Banda Aceh berkedudukan di Banda Aceh;
2. Dewan Pimpinan Wilayah Aceh Barat berkedudukan di Meulaboh;
3. Dewan Pimpinan Wilayah Aceh Barat Daya berkedudukan di Blang Pidie;
4. Dewan Pimpinan Wilayah Aceh Besar berkedudukan di Kota Janthoe;
5. Dewan Pimpinan Wilayah Aceh Jaya berkedudukan di Calang;
6. Dewan Pimpinan Wilayah Aceh Tamiang berkedudukan di Kuala Simpang;

¹¹⁹ Dalam regulasi yang sama—undang-undang Partai Aceh No: Ist/ DPA/ PA/ IV/ 2009—belum ada Dewan Pimpinan Wilayah Kabupaten Simeulue karena sedang dalam proses pemekaran, artinya pada awalnya secara tertulis hanya terdapat 22 DPW.

7. Dewan Pimpinan Wilayah Aceh Tengah berkedudukan Takengon;
8. Dewan Pimpinan Wilayah Aceh Tenggara berkedudukan di Kuta Cane;
9. Dewan Pimpinan Wilayah Aceh Timur berkedudukan di Idi Rayeuk;
10. Dewan Pimpinan Wilayah Aceh Utara berkedudukan di Lhoksukon;
11. Dewan Pimpinan Wilayah Aceh Selatan berkedudukan di Tapak Tuan;
12. Dewan Pimpinan Wilayah Bireuen berkedudukan di Bireun;
13. Dewan Pimpinan Wilayah Bener Meriah berkedudukan di Redelong;
14. Dewan Pimpinan Wilayah Gayo Lues berkedudukan di Blang Kejeren;
15. Dewan Pimpinan Wilayah Kota Langsa berkedudukan di Langsa;
16. Dewan Pimpinan Wilayah Naga Raya berkedudukan di Jeram;
17. Dewan Pimpinan Wilayah Pidie berkedudukan di Segli;
18. Dewan Pimpinan Wilaya Pidie Jaya berkedudukan di Meureudu;
19. Dewan Pimpinan Wilayah Kota Lhokseumawe berkedudukan Lhokseumawe;
20. Dewan Pimpinan Wilaya Kota Sabang berkedudukan di Sabang;
21. Dewan Pimpinan Wilayah Aceh Singkil berkedudukan di Singkil;

22. Dewan Pimpinan Wilayah Kota Subulussalam berkedudukan di Subulussalam
23. Dewan Pimpinan Wilayah Simeulue berkedudukan di Sinabang

Ke-23 Dewan Pimpinan Wilayah tersebut menjelaskan bentuk transformasi dan adaptasi pengorganisasian struktur wilayah jika kita melihat kembali struktur wilayah pada beberapa fase GAM¹²⁰. Pada masa fase konsolidasi (1976-1979) GAM hanya mempunyai enam orang gubernur—hanya di kawasan daerah pantai utara-timur Aceh—sementara pada fase militerisasi GAM mempunyai tujuh panglima wilayah yang kemudian berkembang pada fase demiliterisasi menjadi 17 wilayah perlawanan (seperti tatanan konsen daerah otonom era kesultanan Iskandar Muda). selain karena basis massa yang meledak pasca militersisasi (1999) hingga sampai keseluruhan penjuru Aceh, GAM (Partai Aceh) 'dipaksa' oleh struktur regulasi kepartaian (UU PA) akhirnya untuk mempunyai pimpinan wilayah berdasarkan daerah administratif, yaitu 23 kabupaten dan kota, bukan berdasarkan daerah perlawanan atau kulural. Perubahan tatanan *multilevel organization* inilah yang juga kita sebut sebagai sebuah bentuk transformasi struktural, karena konsekuensi prosedural.

¹²⁰ Struktur partai politik di era orde baru membatasi kegiatan politik di tingkat desa karena ada kebijakan politik massa mengambang. Struktur kepartaian di era reformasi menjangkau dari tingkat pusat hingga tingkat pedesaan. (Akbar Tandjung, 100-101).

Selain berubahnya struktur multilevel organisasi, dari visualisasi struktur kepengurusan partai kita dapat menarik benang merah bahwa struktur militer GAM dileburkan dalam model struktur dewan wilayah kepengurusan Aceh yang diatur secara sipil. Di sisi lain struktur 'negara' sebagai struktur sipil GAM kemudian dikonversi menjadi bidang-bidang dan dewan pimpinan partai. Namun yang menjadi catatan adalah bahwa perubahan dan peleburan ini hanya terjadi di ranah struktur, sedangkan secara personalia tidak dilakukan perombakan. Karena para petinggi GAM yang dulunya duduk di jajaran sipil GAM diakomodasi dalam sebuah lembaga bernama Majelis Tuha Puet sebagaimana dijelaskan di atas.

Keanggotaan: Keterbukaan Struktur

Secara struktural, keanggotaan dalam Partai Aceh cenderung lebih terbuka dibandingkan dengan keanggotaan GAM. Keterbukaan ini pertama ditunjukkan dalam rekrutmen anggota yang terbuka selain alasan administratif tetapi juga logika politik kepartaian dalam pembangunan basis suara. Sedangkan keterbukaan kedua ditunjukkan dalam struktur kepengurusan partai itu sendiri. Tiga fakta penting dalam perspektif kultural keanggotaan dapat kita lihat dalam kerangka struktural. Yaitu juru bicara partai di wilayah Aceh Tenggara adalah seorang pendeta; salah seorang anggota dewan di Aceh Tengah adalah seorang Kolonel; dan beberapa calon anggota dewan adalah dari orang Jawa. Secara struktural hal ini menjadi logis karena transformasi dalam bentuk lembaga kepartaian mensyaratkan suara terbanyak untuk dikatakan sebagai

pemenang. Artinya GAM yang bertransformasi menjadi sebuah lembaga kepartaian menggunakan logika ini, sekalipun dalam perspektif kultural hal ini adalah sebuah anomali.

Sebagai sebuah organisasi, hal yang sama antara GAM dan Partai Aceh adalah dasar dari mekanisme kandidasi yang dalam bentuk GAM adalah pengangkatan seorang anggota menjadi panglima. Yaitu sama-sama mendasarkan diri pada aspek popularitas. GAM sebagaimana dapat kita simak kembali pada fase militerisasi, pengangkatan seorang anggota menjadi panglima (Sagoe, Muda, atau Wilayah) adalah didasarkan pada tingkat popularitas atau pengaruh pada sebuah kawasan perlawanan (Pane, N.S. 2001). Sedangkan dalam pencalonan seorang kandidat untuk maju dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif dari partai Aceh adalah berdasarkan tingkat popularitas dan pengaruhnya di daerah pemilihannya (Wijaya, A. 2011, komunikasi personal, 9 Februari).¹²¹

Sekalipun menunjukkan fakta pengorganisasian yang sama, hal ini cukup logis bagi GAM sebagai organisasi perlawanan maupun bagi Partai Aceh sebagai organisasi dalam tatanan demokrasi. GAM memerlukan pemimpin daerah atau panglima yang mampu memobilisasi massa sebanyak-banyaknya dalam gerakan, sedangkan Partai Aceh memerlukan kandidat sebagai wakil rakyat yang mampu menggalang suara sebesar-besarnya. Karena yang perlu kita catat adalah bahwa

¹²¹ Sehingga untuk mengetahui tingkat popularitas seorang bakal calon yang akan diajukan partai, Partai Aceh membentuk Panitia Sembilan yang berfungsi untuk menyeleksi kandidat tersebut. Oleh karena itu banyak ditemukan kandidat yang bukan berasal dari GAM.

konteks popularitas ini tidak berlaku dalam struktur kepengurusan partai walaupun menjadi pertimbangan (terkhusus dalam jabatan ketua umum partai).

Alhasil, transformasi pengorganisasian dari GAM menjadi Partai Aceh dapat kita visualisasi melalui tabel berikut:

Tabel 6.2 Bentuk transformasi organisasi dari GAM menjadi Partai Aceh

Variabel Transformasi	GAM	Partai Aceh	Keterangan
Karakter	Eksklusif	Inklusif	
Paradigma	<i>Acehnese-Secession-GAM</i>	<i>PA-Power-Resources</i>	Terbalik
Kepemimpinan	Terpusat	Tersebar	Struktur elit sama
Decision Making	Komando/ top-down	Patronase, <i>tend to democratic</i>	Dalam kandidasi dan <i>daily politic</i>
Multilevel Organization	17 wilayah kultural	23 wilayah administrative	Transformasi administratif
Sifat Organisasi	Informal-sporadis	Formal-profesional	
Rekrutmen	Tertutup	Terbuka	
Kandidasi	Pragmatis	Pragmatis	Berdasarkan popularitas
Motif Anggota	Sukarela	Kekuasaan	

Akhirnya, berdasarkan elaborasi bentuk transformasi dan tabulasi GAM ke Partai Aceh tersebut di atas, kita perlu menarik sebuah kerangka besar transformasi gerakan bersenjata menjadi sebuah lembaga kepartaian. Transformasi gerakan bersenjata (gerilya) menjadi sebuah lembaga kepartaian mempunyai kecenderungan pada tidak berubahnya struktur elit dalam gerakan. Hal ini menjadi justifikasi atas simpulan bahwa transformasi menjadi lembaga kepartaian dari

gerakan pemberontakan adalah bentuk *survive* atas personalia elit dalam gerakan. Simpulan ini merupakan revisi atas argumen Kevin E. Grisham dan Byran Martin (2008) bahwa transformasi (perubahan) gerakan adalah stimulasi pragmatisme anggota, dan pendalaman atas argumen Adham Saouli (2003) yang menyatakan bahwa grup-grup politik dirubah oleh kenyataan dunia dan kondisi-kondisi yang mereka temui sebagai usaha untuk *survive*.

Sekalipun demikian, bentuk-bentuk adaptasi kelembagaan dan varian-varial kultur gerakan adalah sebuah keniscayaan dalam transformasi gerakan bersenjata menjadi lembaga kepartaian. Karena adaptasi tersebut tidak lain adalah bagian dari bentuk *survive* itu sendiri. Perubahan organisasional dan tetap bertahannya struktur elit menjadi penampakan dalam transformasi gerakan pemberontakan bersenjata menjadi organisasi kepartaian.

Menguji Kemampuan Partai

Berdasarkan pengumuman Komisi Pemilihan Umum pada 7 Juli 2008, akhirnya terdapat enam partai politik lokal yang berkontestasi dalam pemilu legislatif Aceh dan 34 partai nasional yang memperebutkan suara di seluruh Indonesia pada April 2009¹²². Partai lokal yang dimaksud adalah Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Daulat

¹²² Perlu diketahui bahwa pasca kesepakatan Helsinki pada Agustus 2005, lembaga legislatif di Aceh hanya menjadi atribut kelembagaan negara karena aktivitas legislasi untuk menghasilkan produk legislasi 'ditahan' untuk sementara waktu. Hal ini sesuai dengan MoU Helsinki Bab Partisipasi politik pasal 1.2.4. "sampai tahun 2009 legislatif (DPRD) Aceh tidak berkewenangan untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan apapun tanpa persetujuan Kepala Pemerintahan Aceh."

Aceh (PDA), Partai SIRA, Partai Aceh, Partai Aceh Aman Sejahtera, dan Partai Bersatu Aceh. Fakta elektoral ini mengembalikan memori pengalaman praktik lokal pada 40 tahun silam ketika pemilu 1955 diselenggarakan. Namun, dalam perspektif studi ini, fakta elektoral ini ingin mengatakan bahwa setiap partai lokal di Aceh—sebagai eksperimentasi pertama—harus berhadapan dengan 34 partai nasional dan lima partai lokal lainnya untuk memperebutkan kursi legislatif di Aceh (DPRA dan DPRK). Artinya medan kompetisi yang jamak tersebut juga berlaku bagi Partai Aceh.

Namun yang juga perlu kita perhatikan adalah *environment* yuridis pemilu 2009. Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah diterapkannya sistem daftar terbuka atau *opened list system*. Hal ini berbeda dengan sistem pemilu 2004 yang menggunakan sistem daftar tertutup, yang memberi peluang bagi partai politik untuk memilih calonnya sendiri duduk di kursi. Sementara itu, sistem daftar terbuka (suara terbanyak) sebagaimana pemilu 2009 memberi konsekuensi untuk mereduksi otoritas partai karena kandidat dipilih oleh rakyat bukan partai. Artinya, sistem pemilu 2009 jelas juga berpengaruh pada perolehan suara (kandidat) partai politik, sehingga hal ini juga berlaku pada bagaimana Partai Aceh membangun mesin politiknya.

Singkat cerita, pemilihan umum legislatif pada April 2009 menghasilkan perolehan suara bagi partai politik sebagaimana berikut.

Tabel 6.3. Tabulasi Hasil Pemilihan dan Distribusi Kursi Pemilu Legislatif 2009 untuk Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

Daerah Pemilihan	Partai Politik Nasional			Partai Politik Lokal			Prosentase PA
	Partai	Suara (%)	Kursi	Partai	Suara (%)	Kursi	
Aceh 1 (Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar)	PD	15,58	2	PA	31,37	3	
	Golkar	9,73	1				
	PKS	7,78	1	PDA	5,37	1	
	PAN	5,75	1				
Aceh 2 (Pidie, Pidie Jaya)	PD	4,25	1	PA	74,54	6	
	Golkar	2,5	1				
Aceh 3 (Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya)	PD	12,60	1	PA	39,97	3	
	Golkar	6,48	1				
	PPP	5,16	1				
	PAN	5,03	1				
	PKS	4,06	1				
Aceh 4 (Bireuen, Bener Meriah, Central Aceh)	PD	9,65	1	PA	45,38	5	
	Golkar	5,98	1				
	PPP	4,96	1				
	PKPI	4,91	1				
Aceh 5 (Lhokseumawe, Aceh Utara)	PD	7,97	1	PA	67,98	7	
	PKS	2,39	1				
	Golkar	2,38	1				
Aceh 6 (Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang)	PD	17,06	2	PA	49,38	5	
	PKS	3,93	1				
	Golkar	3,80	1				
	PPP	2,42	1				
Aceh 7 (Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Subulussalam)	Golkar	23,95	2	PA	8,33	1	
	PD	8,36	1				
	PAN	8,10	1				
	PKB	7,35	1				
	Patriot	4,82	1				
Aceh 8 (Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simeulue)	PD	10,65	1	PA	40,39	3	
	PAN	5,10	1				
	PBB	4,40	1				
	PPP	4,19	1				
Total			35			4	

Akhirnya Partai Aceh hampir menguasai separuh dari jumlah kursi di DPRA, PA menguasai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA dengan perolehan suara sebesar 46,91 persen atau 1.007.173 dari total 2.146.845 suara, dan dominan di hampir seluruh

DPR kabupaten/kota di Aceh (serambinews 2010). Partai Aceh mampu menempatkan anggotanya sebanyak 33 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Namun sumber lain mengatakan bahwa dari kursi yang didapat terlihat bahwa Partai Aceh memperoleh suara 48 persen suara dari 69 kursi yang diperebutkan (kabarindonesia.com 2010).

Kemenangan Partai Aceh sebagai partai yang hampir dominan di Aceh tidak terlepas dari struktur organisasi internal dan struktur eksternalnya. Secara internal PA tidak memperkenankan adanya perangkapan jabatan dari (calon) anggota legislatif di partai, artinya setiap kader partai diarahkan untuk memfokuskan diri pada kerja-kerja politiknya. Sehingga secara teknis jika ada pengurus yang akan mencalonkan diri sebagai anggota dewan maka akan terjadi penggantian jabatan di struktur pengurus partai.

Selain profesionalisasi kerja kader, kemenangan PA juga tidak terlepas dari pembangunan basis masa secara kelembagaan. Walaupun ulama di Aceh mengklaim menyalurkan ekspresi politiknya melalui HUDA atau Himpunan Ulama Dayah karena HUDA secara cultural menjadi partai atau bergabung (inisator) dengan Partai Daulah Aceh (PDA)¹²³, terdapat ulama diluar HUDA yang membentuk organisasi sendiri dan secara terang-terangan bergabung dan mendukung PA (Wijaya, A. 2011, komunikasi personal, 9 Februari). lebih lanjut nama organisasi ulama ini adalah Majelis Ulama Nanggro Aceh atau MUNA yang dideklarasikan pada

¹²³ Walaupun demikian, para ulama HUDA menolak menyatakan bahwa mereka adalah *underbow* sekaligus *founding fathers* PDA.

30 Juli 2008 dengan 60 anggota yang dipimpin oleh Tengku Ali Basyah (Törnquist O.; Prasetyo, S.A; Birks, T. (eds.) 2010: 324). Terdapat juga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang memerankan MUI—MPU adalah inisiator MUI—sehingga cenderung ke forum dan relasi ke (politik) nasional (Törnquist O.; Prasetyo, S.A; Birks, T. (eds.) 2010: 324).

Sedangkan struktur eksternal partai adalah yang paling banyak membantu perolehan suara partai. Singkat kata, Komite Peralihan Aceh (KIP) yang menjadi 'tempat berkumpul' para milisi GAM khususnya panglima-panglima GAM berpengaruh besar pada penggalangan masa di Aceh.

“Sofyan Dawod adalah panglima GAM yang tidak mau bergabung dengan PA karena setelah masa damai (pasca MoU), dia memilih menjadi warga sipil biasa. Namun tergabung dalam KPA karena eks kombatan tergabung dan diakomodasi dalam KPA, namun perannya masih signifikan dapat digunakan PA untuk memperoleh suara dalam pemilu” (Handono, I. 2011, komunikasi personal, 10 Februari).

Untuk kebutuhan analisis ini, kita perlu menggabungkan beberapa data dan arsip yang ada. *Pertama*, sebagaimana hasil studi Aspinall (2007) bahwa GAM menguasai sekitar 80% tanah pedesaan di Aceh. *Kedua*, Irene Teresa Gayatri (2008) menyatakan bahwa 77% penduduk Aceh tinggal di pedesaan, artinya mayoritas penduduk Aceh berada di bawah 'kekuasaan' GAM.

Ketiga, hasil korespondensi Neta S. Pane (2001) memaparkan struktur komando panglima GAM sebagai berikut: Ketua komando pusat angkatan GAM sebagai struktur militer tertinggi, lalu panglima wilayah (bersama wakil panglima wilayah) yang membawahi daerah kabupaten, Komando Operasi bertugas mengkoordinasikan rencana operasi militer, juru bicara yang merangkap sebagai penerangan wilayah, kemudia Panglima Meurabo (Muda) yang membawahi kecamatan, dan Panglima Sagoe yang membawahi sejumlah desa.

Keempat, struktur komando tersebut menyesuaikan dengan struktur hierarkhi sistem pemerintahan di Aceh yang dipakai sejak zaman Kesultanan. T.Syamsudin (1980) menjelaskan struktur pemerintahan sebagai berikut. Pertama-tama *gampong* adalah hierarkhi yang paling bawah dari sistem pemerintahan Aceh dan susunan pemerintahan gampong terdiri dari Keucik—yang memimpin jalannya pemerintahan gampong, menjaga adat dan hukum agar dipatuhi warga—dan dibantu oleh wakilnya yang disebut *Wakil* (Suny, I. 1980:122-123). Kumpulan gampong disebut dengan *mukim* dan kepala dari setiap mukim disebut *Imum*. Imum mengurus soal keagamaan dan menentukan juga soal pemerintahan sehingga kedudukannya adalah atasan dari *gampong-gampong* (Suny, I. 1980:122-123). Sehingga kumpulan arsip ini akan bermuara pada garis simpul bahwa KPA menjadi sebuah *supporting organization* yang sangat signifikan bagi kausalitas kemenangan Partai Aceh tersebut di atas sekalipun menggunakan *multilevel organization* berdasarkan daerah administratif.

Sedangkan dari perspektif *voting behavioral*, maka Partai Aceh diuntungkan posisinya sebagai sebuah transformasi dari aktor kunci konflik Aceh. Perilaku memilih masyarakat Aceh sangat dipengaruhi oleh psikologi sosial post-konflik. Hal ini terlihat dari hasil studi Leena Avonius (2007).

"In Aceh, the feeling that the Indonesian state has done terrible injustices is still very strong. Many Acehnese feel that they have been targeted simply because they are Acehnese." (Avonius, L. 2007)

Sehingga fakta sosial ini bermuara pada perilaku memilih masyarakat Aceh yang juga bisa kita dasarkan pada pernyataan Bel Hillman (2009) secara lebih relevan dengan konteks Partai Aceh, dia menyatakan "Ada semacam persepsi dalam masyarakat bahwa kalau PA kalah, konflik akan merebak kembali. Masyarakat Aceh tak ingin adanya konflik," (serambinews.com 2010).

Artinya, kemengan Partai Aceh tidak sekedar berdasarkan faktor struktural (mesin partai) dan kultural—relasi dengan KPA implisit para panglima GAM—partai saja. Partai Aceh sebagai sebuah transformasi GAM yang menjadi aktor sentrum pada konflik 29 tahun menjadi sebuah prakondisi yang secara tidak sengaja membentuk perilaku memilih masyarakat Aceh, berada pada orientasi perdamaian. Orientasi perdamaian inilah yang kemudian diletakkan kepada PA (GAM) untuk dua alasan yang kontradiktif: tidak lagi membuat kekacauan di Aceh, dan diharapkan mampu menjaga perdamaian sebagai aktor sentral di Aceh.

Akhirnya, sebanyak 69 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh implisit 33 orang kader Partai Aceh di dalamnya dilantik pada 30 September yang kemudian menjadi pertanda resmi dimulainya kerja-kerja politik bagi jajaran senator tersebut. Kerja politik bagi bentuk metamorfosis gerakan bersenjata telah dimulai, dan semoga “mereka dapat menjalankan amanah dengan baik, dan saya berharap bisa berbuat baik untuk Indonesia, khususnya bagi pembangunan di Aceh” (Majalah Nanggroe 2009). Semoga.

Kesimpulan

Setelah kita selesai melihat alasan, motif, dan prakondisi lainnya atas transformasi GAM sebagai gerakan pemberontakan terorganisir menjadi Partai Aceh sebagai ekspresi partai lokal, maka bab ini menunjukkan bentuk transformasi tersebut melalui analisis paradigmatik dan analisis organisasi.

Adanya bentuk transformasi paradigmatik bagi GAM akhirnya menyisakan motivasi kekuasaan dalam logika kepartaian. Sehingga secara organisasional Partai Aceh sebagai bentuk dari hasil transformasi gerakan *insurgency* mengalami adaptasi administratif seperti *multilevel organization* yang mengikuti tatanan struktur administratif pemerintahan Aceh dan juga struktur kepengurusan dalam organisasi partai. Di sisi lain transformasi paradigmatik tersebut menggiring Partai Aceh masuk dalam cara-cara kerja *gathering voters* seperti dalam pembentukan panitia sembilan untuk menentukan calon legislatif yang paling populer di sebuah daerah pemilihan, dan juga berimplikasi pada bentuk

profesionalisasi lembaga seperti tertib jabatan dan seleksi kapasitas yang ketat.

Namun terjadi kontinuitas struktur elit yang determinan dalam GAM di Partai Aceh sehingga karakter kerja partai masih menyisakan determinasi elit dalam keputusan-keputusan strategis partai seperti kandidat gubernur dan penempatan jabatan pimpinan partai. Sehingga yang terjadi adalah pelembagaan struktur elit dalam organisasi partai. Kontinuitas struktur elit ini menegaskan bahwa Partai Aceh berukan 'baju baru' bagi elit GAM untuk melakukan kooptasi pengaruh di Aceh dengan basis massa ex-anggota GAM.

Artinya, pisau analisis untuk melihat transformasi GAM menjadi Partai Aceh dengan melihat tiga elemen organisasi (*leadership, organization, dan membership*) secara struktural dan kultural menghasilkan sebuah pola umum transformasi gerakan pemberontakan bersenjata menjadi sebuah organisasi kepartaian: adaptasi administratif dan logika *voters gathering* dengan tetap mempertahankan struktur elit yang telah mapan sebelumnya.

Di sisi lain, struktur elit GAM yang tidak mengalami pereduksian pengaruh di Aceh justru menjadi mesin pendulang suara bagi Partai Aceh untuk melakukan kerja politiknya dalam pemilihan umum. Petinggi militer GAM—dan eks-kombatan—yang terakomodasi dalam Komite Peralihan Aceh menjadi eksternal struktur yang memungkinkan Partai Aceh sebagai *leading party*. Fakta elektoral pemilu legislatif 2009 menunjukkan kemenangan telak Partai Aceh. Sedangkan

dalam pemetaan perolehan suara, daerah pedesaan terutama di pantai utara Aceh merupakan lumbung potensial bagi Partai Aceh dan hal ini mengkonfirmasi bekerjanya struktur eksternal yang mengakar berdasarkan logika kultural masyarakat Aceh sejak era kesultanan.

PENUTUP

Kesimpulan

Sebagai sebuah hasil studi genealogis, Partai Aceh sebagai sebuah organisasi politik dan realisasi dari konsepsi partai politik lokal merupakan bentuk *translation*—artikulasi dan konversi—atas *local cleavage* yang terbentuk dari dinamika Aceh sebagai sebuah kawasan perlawanan yang konfliktual. Hal ini menjelaskan bahwa GAM pada akhirnya membentuk Aceh sebagai *local cleavage* yang masuk dalam ruang relasi konflik pusat-daerah, sehingga gagasan partai lokal adalah sebuah bentuk penerjemahan atas artikulasi *local cleavage* dalam sistem politik yang mapan dibayangkan sebelumnya.

Namun sebelum jauh kita elaborasi temuan hasil studi ini, pertanyaan penting yang perlu kita tarik sebagai simpulan adalah kenapa Aceh era GAM berhasil melakukan *translation* menjadi lembaga kepartaian (partai lokal), sedangkan era Darul Islam yang juga merupakan eksperimentasi Aceh sebagai *local cleavage* gagal untuk melakukan *translation* ke dalam lembaga kepartaian atau tidak mengalami proses *translation* karena berakhir anti-klimaks dengan menerima formasi

negara sekuler? Terdapat dua perspektif penting untuk menjawabnya. Pertama hal tersebut terkait dengan motif dan alasan gerakan (tuntutan) yang berbeda, pemenuhan untuk merdeka atau memisahkan diri (*secession*) mampu menciptakan garis konflik pusat-daerah yang lebih tebal dibandingkan tuntutan *privilage* seperti syariah. Kedua karakter rezim negara berpengaruh bagi proses kanalisasi penerjemahan *local cleavage* ke dalam sistem politik yang mapan. Dalam konteks ini, *circumstance* demokratisasi dan karakter rezim konsolidatif memungkinkan adanya proses translasi terhadap *cleavage* dibandingkan *circumstance* republikanisme anti-imperialisme dan karakter rezim nasionalis yang cenderung doktriner.

Di sisi lain eksistensi Partai Aceh sebagai sebuah bentuk transformasi gerakan, sama sekali tidak mempunyai relasi struktural maupun kultural dengan Aceh pra-GAM. Karena tidak bisa kita bantah bahwa Partai Aceh adalah bentuk transformasi dari Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, sementara itu GAM mempunyai relasi kuat dengan Aceh pra-republik. Sehingga di titik inilah kita dapat melepaskan simpul-simpul benturan kuasa dalam alur genealogi Partai Aceh.

Dalam penelusuran historis, era kesultanan Aceh khususnya pada era kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, telah dibangun tatanan struktur politik pada tatanan sosial masyarakat Aceh. Hal inilah yang kemudian membentuk—dan ditafsir—sebagai apa yang disebut dengan bangsa Aceh atau *Acehnese*. Fakta historis inilah yang menjadi lantai dasar bagi hadirnya kesadaran kolektif untuk membangun gerakan *secession—collective*

consciousness dan *willing to act*—sebagai unsur bagi sebuah cleavage. Pembentukan dan tafsir atas identitas kebangsaan inilah yang kemudian menjadi *ideology background* bagi GAM dan mengalami pembuyaran identitas dalam bentuk dirinya sebagai Partai Aceh. Di sisi lain, pada era pra-republik ini pula terdapat dua fakta penting yang membangun relasi kausal atas hadirnya perlawanan di Aceh setelah hadirnya republik pada Agustus 1945, yaitu fakta adanya strategi diplomasi dan perang suci dalam rangka perlawanan terhadap kolonial.

Infrastruktur budaya masyarakat Aceh yang mendasarkan diri—dan dibangun dalam hitungan abad era kesultanan—pada *syariah* (ajaran Islam) telah membentuk imajinasi kultural yang menjadi *core motivation* atau ideologi bagi gerakan pasca-republik, yaitu Darul Islam yang dipimpin oleh Daud Beureueh. Sementara perang Sabil atau perang suci yang dilakukan oleh kesultanan Aceh terhadap Belanda selama 40 tahun sejak 1873 secara langsung menjadi karakter gerakan Darul Islam di Aceh yang berakhir pada 1962 dengan sebuah paket 'otonomi khusus' bernama Daerah Istimewa Aceh.

Munculnya GAM pada 1976 oleh Hasan Tiro—sebagai aktor Darul Islam namun dengan motif baru—menunjukkan benturan kuasa dalam genalogi partai. Gerakan yang sempat *disengkuyung* (didukung dengan keterlibatan langsung) oleh ex-Darul Islam tersebut akhirnya 'dimenangkan' oleh Hasan Tiro sehingga membawa semangat pemisahan diri atau *secession* bukan lagi pada perjuangan *syariah*. Pemisahan diri ini didasarkan pada imaji kebangsaan atas tatanan sosial politik Aceh era kesultanan, sehingga apa yang disebut

dengan etno-nasionalisme dalam konteks ini adalah tafsir atas sejarah pra-republik yang mengkristal menjadi identitas politik bagi masyarakat Aceh. Hal inilah yang kemudian menjadi *core motivation* bagi GAM. Sementara itu, fakta berkembangnya diplomasi pada era kesultanan baik dalam rangka perlawanan kolonial maupun pembangunan kerajaan, secara tidak langsung telah menjadi karakter tersendiri bagi GAM.

Artinya, walaupun gerakan Daud Beureueh dan Hasan Tiro berada pada *core motivation* yang berbeda untuk membangun kesadaran kolektif masing-masing gerakan, kedua gerakan ini merupakan bentuk perwajahan *local cleavage* yang berada pada ruang relasi konflik pusat-daerah baik karena tafsiran atas dominasi otoritas negara maupun karena sentimen kultur: Islam versus Sekuler dan *Acehnese versus Javanese*.

Setelah hampir 30 tahun melakukan perlawanan, adanya kebijakan militeristik Pemerintah RI, bencana Tsunami, dan gagasan damai melalui perundingan Helsinki 2005, telah mengkonversi gagasan pemisahan diri atau *secession* menjadi apayang disebut dengan *self-government*. Dalam konsepsi yang terakhir inilah kemudian redaksi 'partai lokal' muncul, sebuah redaksi yang kemudian secara eksplisit menandai hadir bentuk *translation* GAM sebagai *local cleavage* dalam tatanan sistem politik demokrasi

Artinya partai lokal dalam periode ini lahir dari rahim konflik dan menetas melalui cangkang perundingan damai yang secara konseptual berada pada garis konflik *centre-periphery* ala Lipset-Rokkan. Dengan kalimat yang berbeda, partai lokal yang muncul setelah

empat dasawarsa sejak pemilu 1955 hadir bukan atas dasar *political will* demokratisasi melainkan akibat dari sebuah 'ketidaksengajaan' politik perdamaian. Argumen ini didasarkan pada analisis aktor: GAM, Pemerintah RI, dan aktor mediator perdamaian. GAM sejak kemunculannya oleh Hasan Tiro sampai pada perundingan pertama oleh lima delegasi elit GAM tidak pernah membayangkan apalagi mendesain dirinya menjadi partai lokal. Sedangkan konsepsi otonomi khusus yang dibayangkan oleh Pemerintahan RI dari Abdurrahman Wahid sampai Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah memasukkan diktum partai lokal di dalamnya. Melainkan, justru aktor mediator—Martii Ahtisari (mediator perundingan Helsinki) dan Damien Kingsbury (konsultan perundingan pihak GAM)—di luar subjek konflik yang akhirnya mengusulkan dan mengkonseptualisasikan terkait substansi atas pemaknaan partai lokal sebagai 'barter' politik bagi GAM atas desakan integrasi yang diminta Pemerintah RI.

Namun demikian *circumstance* rezim SBY yang berada pada era demokratisasi dan pendekatan negosiasi untuk menyudahi konflik Aceh tetap menjadi *environment* bagi hadirnya partai lokal karena perundingan Helsinki menjadi satu-satunya kanal yang memungkinkannya hadir—sekalipun sebagai gagasan 'barter' perdamaian. Terkait dengan *circumstance* ini, pola yang dapat kita tarik adalah bahwa negosiasi atau perundingan dalam pendekatan rezim menjadi sebuah struktur peluang politik atas titik balik transformasi gerakan bersenjata, sementara pendekatan militeristik—berdasarkan pola Soeharto, Habibie, dan Megawati—justru menjadi katup buntu munculnya struktur peluang politik sebuah

transformasi gerakan menjadi lembaga kepartaian. Hal ini mengkonfirmasi atas hasil studi transformasi kepartaian yang ada di belahan dunia lain yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti rezim, sistem politik (pemilu), dan demokratisasi (Eric Shaw 1994, Kevin Grisham dan Byran Martin 2008, Alan Ware 2004). Sari panti atas argumen ini adalah bahwa partai lokal hadir 'dari'—dan bukan 'untuk'—demokratisasi di Aceh pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Selanjutnya, partai lokal sebagai sebuah redaksi dalam kesepakatan damai akhirnya dikonseptualisasikan melalui UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA yang kemudian menjadi dasar yuridis dan teknis penyelenggaraan partai lokal di Aceh. Alhasil penyelenggaraan parlok yang lahir dari konflik mempunyai kecenderungan lebih ketat—karena dilihat sebagai konsekuensi damai—dibandingkan penyelenggaraan parlok yang lahir dari semangat demokratisasi seperti periode 1955 yang cenderung lebih longgar. Namun regulasi inilah yang memungkinkan hadirnya Partai Aceh sebagai bentuk transformasi dari GAM.

Alhasil, secara paradigmatic, transformasi GAM menjadi Partai Aceh adalah sebuah adaptasi dalam tatanan demokrasi yang kemudian menggeser paradigma *Acehnese-Secession-GAM* menjadi *PA-Power-Resources*. Sehingga *paradigmatic transformation* ini berimplikasi pada penyelenggaraan dan pengelolaan organisasi kepartaian baik secara struktural dan kultural. Secara struktural atau kelembagaan, transformasi tersebut dilakukan secara sepenuh hati karena dua alasan pokok: konsekuensi administratif dan adaptasi orientasi

perjuangan dari rakyat sebagai bagian gerakan menjadi rakyat sebagai *voters*. Sedangkan secara kultural, transformasi GAM menjadi Partai Aceh dilakukan secara ambigu karena fakta adanya struktur elit yang sama antara GAM dan PA pada akhirnya memreproduksi relasi yang tidak jauh berbeda antara elit pimpinan dengan anggota.

Studi atas transformasi GAM menjadi Partai Aceh menguatkan bahwa tersedianya akses politik merupakan formula perdamaian antara gerakan pemberontakan—dengan motif masing-masing motif yang berbeda—dan negara (Pemerintah). Hal ini seperti yang terjadi pada Sinn Fein di Irlandia Utara maupun *Partie Quebecois* di Kanada (ICG Report 2008), atau transformasi kepartaian Hezbollah di Lebanon (Grisham dan Martin 2008). Namun hasil studi ini melengkapi simpulan transformasi dari sebuah gerakan bersenjata menjadi partai politik, yaitu secara organisasional terjadi perubahan (adaptasi) namun transformasi tersebut tidak merubah struktur elit dalam gerakan.

Namun demikian, hasil transformasi tersebut berimplikasi positif pada perolehan suara partai pada Pemilu 2009 karena beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal tersebut adalah pengelolaan faksi yang muncul sejak pemilihan gubernur Aceh pada Desember 2006; profesionalisasi keorganisasi partai; dan adaptasi logika *voters* yang mengubah corak gerakan eksklusif menjadi inklusif. Sedangkan faktor eksternal adalah adanya elemen formal dan kultural di luar PA yang secara langsung dan tidak langsung membangun lumbung suara bagi partai; dan psikologi sosial

masyarakat Aceh pasca-konflik telah membentuk *voting behavior* yang menguntungkan bagi Partai Aceh.

Elaborasi di atas dapat kita simplifikasi sebagai berikut:

1. Era kesultanan Aceh telah membentuk landasan bagi Aceh sebagai *local cleavage* yang berimplikasi pada motif dan karakter gerakan baik bagi NII Aceh dibawah Daud Beureueh dan GAM dibawah Hasan Tiro.
2. Kemunculan dan praktik partai lokal di Aceh merupakan bentuk *translation* dari Aceh sebagai *local cleavage* yang terkanalisasi melalui ruang relasi konflik pusat-daerah yaitu perundingan damai, sehingga partai lokal yang lahir sebagai konsekuensi konflik cenderung diatur lebih ketat.
3. Partai Aceh mempunyai relasi genealogis dengan GAM namun nihil dengan Negara Islam Aceh. Di sisi lain baik GAM maupun NII Aceh mempunyai relasi genealogis dengan Kesultanan Aceh, baik dalam motif maupun karakter gerakan.
4. Partai Aceh akhirnya mengalami transformasi organisasional secara total namun setengah hati secara kultural sebagai konsekuensi pergeseran paradigma gerakan.
5. Transformasi Partai Aceh dan konteks genealoginya berimplikasi pada perolehan suara dalam Pemilu 2009 sebagai partai pemenang.

Sebagai sebuah kajian aktor intermediari khususnya terkait studi kepartaian yang masih 'perawan', tentunya tarikan garis simpul atas studi ini memungkinkan perlunya beberapa agenda riset selanjutnya. *Pertama* adalah memahami praktik pengorganisasian partai lokal seperti fokus studi pada ranah leadership, kandidasi, faksionalisasi, atau *membership* yang terjadi pada partai lokal di Aceh. *Kedua* adalah memetakan lebih jauh konstelasi politik partai lokal baik dalam kerang lokal maupun kontestasi dengan partai peserta pemilu implisit partai nasional di dalamnya. Ketiga adalah studi terkait perilaku memilih atau *voting behavior* masyarakat atau pemilih pasca-konflik, termasuk di dalamnya adalah pemetaan *social cleavage* yang mendasari basis sosial eksistensi partai lokal.

Proyeksi

Temuan dan simpulan terkait dengan genealogi dan transformasi Partai Aceh di atas akhirnya mampu memnggiring kita pada tiga proyeksi penting ke depan: pertama adalah masa depan Partai Aceh dalam kontestasi politik lokal, kedua adalah memproyeksi masa depan demokrasi di Aceh, dan ketiga adalah melihat kemungkinan munculnya gagasan dan praktik partai lokal baru di bagian lain dari Indonesia. Hal ini penting karena pendekatan genealogis berfungsi untuk memetakan benturan-benturan kuasa yang 'akan' terjadi setelah melihat pola umum yang 'telah' terjadi. Sehingga bab ini berfungsi untuk memenuhi tugas aksiologis atas hasil studi ini bagi pembangunan demokrasi dan lembaga kepartaian di Indonesia.

Partai Aceh Esok Hari

Sekalipun Partai Aceh berangkat dari sebuah organisasi gerakan dengan cara kerja militeristik di Aceh, transformasi paradigmatik dari gagasan *secession* menjadi *power* justru menimbulkan kegamangan ideologi partai. Paradigma kekuasaan—dan mengeliminasi imajinasi bangsa Aceh berdaulat melalui gagasan pemisahan diri—akhirnya menggeser motivasi rekrutmen anggota yang militan sebagai bagian dari gerakan menjadi rekrutmen massif-pragmatis sebagai terjemahan motivasi perolehan suara atau *voters*.

Artinya, walaupun mesin partai terus bekerja untuk memperoleh anggota dan simpatisan sebanyak-banyaknya, kegamangan ideologi tersebut menyumbang munculnya faksionalisasi di tubuh elit partai (ex-elit GAM) karena masing-masing elit berusaha untuk memastikan dirinya memperoleh *resource* melalui penguasaan jabatan publik di Aceh. Bukti atas penjelasan ini adalah turbulensi internal yang terjadi menjelang pemilihan gubernur pada Desember 2006 lalu sehingga membelah elit GAM dalam dua kelompok: elit kamu tau dan elit kaum muda (lihat dalam sub-bab *Turbulensi Internal*).

Sehingga tidak heran jika menjelang pemilihan kepala daerah (implisit gubernur) 2011, faksionalisasi di tubuh partai kembali tampak di mata publik. Terkait dengan turbulensi politik menjelang pemilihan gubernur 2011, qanun atau perda 'anti-calon independen' yang akhirnya disetujui DPRA, selain sebuah pelanggaran yuridis karena menafikan putusan MK yang tetap

mengizinkan calon independen sebagaimana dalam diktum UUPA, dalam pemetaan fraksi, Partai Aceh adalah partai yang sejak awal menginginkan tidak adanya calon independen dalam pilkada Aceh. Hal ini berbenturan dengan semangat lima tahun silam masyarakat politik (terutama kombatan GAM) yang pada pemilihan gubernur 2006 menghendaki adanya calon independen dan menjadi satu-satunya daerah yang pertama kali 'punya' calon independen. Kini Aceh berusaha menjadi satu-satunya daerah yang akan menghapus kanal kekuasaan di luar jalur lembaga kepartaian.

Hal ini terjadi karena dua hal penting, pemetaan parlemen dan pemetaan internal Partai Aceh. Dalam pemetaan politik di parlemen, Partai Aceh menguasai 33 kursi dari total 69 kursi, artinya PA cukup menggandeng satu fraksi untuk memenangkan pemungutan suara dalam sebuah keputusan legislatif. Sedangkan DPRA sendiri hanya mempunyai empat fraksi yaitu fraksi PA, fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, dan fraksi gabungan partai. Di titik inilah menjadi logis suara DPRA untuk menerbitkan qanun 'anti-calon independen' adalah suara Partai Aceh atas kendali suara di parlemen. Sedangkan dalam pemetaan internal Partai Aceh yang melandasi terbitnya qanun penghapusan calon independen adalah pengelolaan faksi yang tidak pernah terselesaikan sejak terbentuknya partai pada awal 2007 lalu. Faksi yang terjadi saat ini antara Zaini-Muzakkir dengan Irwandi-dkk merupakan sekuen atas faksi yang terjadi dalam pencalonan gubernur Aceh 2006 silam: yaitu antara Hasbi Cs dan Irwandi Cs. Singkat kata, penghapusan calon independen dalam pilkada Aceh adalah untuk menutup

pipa jalur kekuasaan bagi para elit GAM sehingga tidak memecah suara dan terkanalisasi melalui satu pipa: Partai Aceh.

Dalam pemetaan pengaruh elit pada kasus terakhir ini, Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf merupakan elit partai (ex-GAM) yang mempunyai pengaruh determinan di internal partai (khususnya mantan anggota dan simpatisan GAM) namun tidak begitu kuat di tingkat masyarakat Aceh nonGAM. Sedangkan Irwandi Yusuf sebagai panglima lapangan sebelum perjanjian damai mempunyai basis massa yang cukup kuat di tingkat masyarakat Aceh secara umum¹²⁴. Artinya, jika perbenturan kuasa di internal partai terus mengkristal maka berpotensi pada perolehan suara partai baik dalam pemilihan eksekutif maupun legislatif.

Sebagaimana dalam temuan studi ini, transformasi GAM menjadi Partai Aceh yang berhenti pada adaptasi administratif dan *organizational transformation* dengan tetap mempertahankan struktur elit yang determinan sehingga adaptasi yang dilakukan menjadi gagap dalam iklim demokrasi yang menuntut partisipasi dan penyerapan aspirasi. Jika hal ini tetap dipertahankan sebagai sebuah kultur dan mekanisme kerja internal partai, maka berpotensi pada munculnya 'partai faksi' dengan Partai Aceh sebagai partainya induknya. Partai Aceh akan bernasib seperti Golkar dengan

¹²⁴ Hasil survei terhadap calon gubernur menjelang pemilihan gubernur 2011 menunjukkan bahwa 38,84 persen responden memilih Muhammad Nazar, Irwandi Yusuf 12,48 persen, Sulaiman Abda 7,25 persen, M Nasir Djamil 7,25 persen, Malek Mahmud 6,96 persen, Darni M Daud 5,51 persen, Ahmad Humam Hamid 4,35 persen, Mawardy Nurdin 3,77 persen, Aminullah Usman 2,61 persen, Zaini Abdullah 2,32 persen, seraf Farid Wajdi 2,03 persen. Tarmizi Karim (0,58 persen), Gazali Abbas (0,58 persen), Muzakkir Manaf (0,29 persen), dan Surya Paloh (0,29 persen). Dihimpun dari berbagai sumber.

hadirnya Gerindra, Hanura, dan Nasional Demokrat akibat konflik elit, sehingga berakhir pada turunnya perolehan suara pada pemilu selanjutnya. Dengan catatan, proyeksi ini akan terjadi jika transformasi yang terjadi tidak disertai oleh *political will* elit partai untuk beradaptasi pada tuntutan demokratisasi di internal partai.

Prospek Demokrasi di Aceh

Kasus yang paling mudah untuk melihat prospek demokrasi di Aceh adalah adanya silang sengkabut penyelenggaraan pilkada 2011 karena DPRA dengan dipelopori oleh Partai Aceh menghapus adanya calon independen dalam pilkada. Perilaku politik yang ditampilkan oleh elit ex-GAM pada dasarnya menunjukkan defisit demokrasi yang terjadi di Aceh. Beberapa tanda yang mencirikan adanya defisit demokrasi menurut Sunil Bastian dan Robin Luckham (dalam I Ketut Putra Erawan, 2007) adalah tidak bekerjanya lembaga politik formal sehingga warga negara menjadi 'pemisra' dalam proses politik yang ada. Hal tersebut, masih menurut Bastian dan Lickham, merupakan titik krusial kedua yang menjadi pertama defisit demokrasi setelah tidak berfungsinya kesetaraan hak dan matinya status warga negara karena diskriminasi dan kegagalan jaminan konstitusi. Artinya demokrasi Aceh berada pada titik krusial kedua defisit demokrasi, sementara organisasi sipil tidak bisa menjadi aktor penyeimbang untuk berhadapan dengan kekuatan politik yang ada.

Secara praktik, demokrasi yang lahir dari meja perundingan damai menjadi ruang baru bagi elit GAM untuk memastikan dirinya tetap 'berkuasa' di Aceh. Dengan menguasai lebih dari separuh kursi kepala daerah yang ada di Aceh, dan hampir separuh dari kursi parlemen Aceh, maka Partai Aceh menjadi satu-satunya entitas politik yang mampu mengendalikan demokrasi di Aceh. Karena sejak pemilihan kepala daerah pasca-konflik pada akhir 2006 sampai terakhir 2007, GAM memperoleh 11 kursi kepala daerah (bupati/walikota) dan satu kursi gubernur.

Sedangkan berdasarkan hasil pemilu 2009 lalu, hanya Partai Daulat Aceh sebagai partai lokal yang memperoleh satu kursi di parlemen Aceh (DPRA). Sementara itu, partai lokal lainnya khususnya Partai SIRA yang menjadi kanal politik bagi aktivis pro-demokrasi sejak gerakan sipil referendum 1999, tidak memperoleh kursi satupun di parlemen Aceh. Sedangkan jika dua partai besar yang berhasil membentuk fraksi karena perolehan kursinya, Partai Demokrat (10 kursi), Partai Golkar (8 kursi), dan partai nasional lainnya yang mendapat kursi di parlemenn Aceh jelas merupakan bentuk *multilevel organization* sebagai partai nasional. Artinya kebijakan partai nasional di Aceh sedikit banyak dipengaruhi oleh arah kebijakan partai di pimpinan pusat.

Fakta elektoral ini menggiring kita pada pemahaman bahwa keputusan yang dihasilkan oleh DPRA adalah tidak terlepas dari agenda politik Partai Aceh di dalamnya. Sedangkan implementasi atau eksekusi atas qanun atau keputusan politik DPRA juga diakomodasi jajaran eksekutif karena berkuasa melalui

pipa yang sama: Partai Aceh. Dengan pemahaman ini, masa depan demokrasi di Aceh berada di bawah kendali Partai Aceh karena penguasaan legislatif dan eksekutif. Sehingga menyaksikan silang sengkabut calon independen menjelang pemilihan gubernur Aceh pada November 2011 mendatang, sebenarnya kita sedang menyaksikan sebuah fakta pembajakan demokrasi atau *hijacking democracy* yang justru dilakukan oleh partai lokal berkuasa di Aceh.

Hijacking tersebut terlihat ketika Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA akhirnya memutuskan untuk tidak ada calon independen dalam pilkada Aceh terutama adalah pemilihan gubernur beberapa bulan ke depan. Keputusan tersebut dimenangkan oleh Partai Aceh (partai lokal) dengan suara abstain fraksi-fraksi dari partai nasional yang 'mengijinkan' calon independen. Qanun atau perda 'anti-calon independen' yang akhirnya disetujui DPRA, selain sebuah pelanggaran yuridis karena menafikan putusan MK yang tetap mengijinkan calon independen sebagaimana dalam diktum UUPA, dalam pemetaan fraksi, Partai Aceh adalah partai yang sejak awal menginginkan tidak adanya calon independen dalam pilkada Aceh. Hal ini berbenturan dengan semangat lima tahun silam masyarakat politik (terutama kombatan GAM) yang pada pemilihan gubernur 2006 menghendaki adanya calon independen dan menjadi satu-satunya daerah yang pertama kali 'punya' calon independen. Kini Aceh berusaha menjadi satu-satunya daerah yang akan menghapus kanal kekuasaan di luar jalur lembaga kepartaian.

Pertengkar politik ini menjadi begitu nampak ketika gubernur Aceh Irwandi Yusuf (mantan panglima GAM) tidak mau menandatangani qanun DPRA terkait tidak adanya calon independen dalam pilkada tahun ini. Sehingga yang terjadi adalah pesimisme demokrasi bagi masyarakat Aceh dan masyarakat Indonesia pada umumnya karena perbenturan elit politik di Aceh berimplikasi pada matinya fungsi partisipasi dan gagasan hak konstitusional warga negara untuk ikut terlibat dalam proses politik seperti pemilihan kepala daerah. Pertarungan elit politik di Aceh tersebut sebenarnya menunjukkan adanya defisit demokrasi di Aceh, sedangkan pada saat yang sama menunjukkan bahwa Partai Aceh (GAM) bukanlah sebuah entitas politik yang tunggal.

Hal ini terjadi karena dua hal penting, pemetaan parlemen dan pemetaan internal Partai Aceh. Dalam pemetaan politik di parlemen, Partai Aceh menguasai 33 kursi dari total 69 kursi, artinya PA cukup menggandeng satu fraksi untuk memenangkan pemungutan suara dalam sebuah keputusan legislatif. Sedangkan DPRA sendiri hanya mempunyai empat fraksi yaitu fraksi PA, fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, dan fraksi gabungan partai. Di titik inilah menjadi logis suara DPRA untuk menerbitkan qanun 'anti-calon independen' adalah suara Partai Aceh atas kendali suara di parlemen. Sedangkan dalam pemetaan internal Partai Aceh yang melandasi terbitnya qanun penghapusan calon independen adalah pengelolaan faksi yang tidak pernah terselesaikan sejak terbentuknya partai pada awal 2007 lalu. Faksi yang terjadi saat ini antara Zaini-Muzakkir dengan Irwandi-dkk merupakan sekuen atas faksi yang terjadi dalam

pencalonan gubernur Aceh 2006 silam: yaitu antara Hasbi Cs dan Irwandi Cs. Singkat kata, penghapusan calon independen dalam pilkada Aceh adalah untuk menutup pipa jalur kekuasaan bagi para elit GAM sehingga tidak memecah suara dan terkanalisasi melalui satu pipa: Partai Aceh.

Pembajakan demokrasi dengan fakta berlarutnya konflik elitis para mantan panglima GAM tidak terlepas atas adanya transformasi paradigmatis dari GAM menjadi Partai Aceh. Sebuah transformasi paradigma yang berangkat dari *Achehnese-Secession-GAM* menjadi logika terbalik berupa *PA-Power-Resource*. Sehingga hal ini berimplikasi pada logika elit untuk mendapatkan akses kekuasaan.

Alhasil yang kita persaksikan di Aceh saat ini adalah bukan pada GAM yang berganti baju menjadi PA, melainkan elit GAM yang berkanti baju dengan PA, bukan 'menjadi' tetapi 'memakai' PA. Karena 'ketidaksengajaan' transformasi via perundingan Helsinki tersebut berimplikasi pada kontinuitas struktur elit dimana apa yang disebut dengan pemimpin politik GAM menjadi aktor determinan dalam proses kandidasi pada tatanan demokrasi yang sekarang terus bergolak. Sehingga elit dan kader yang merasa penting dan mampu memperoleh akses kekuasaan di Aceh, menggunakan pipa kekuasaan di luar partai ketika dirinya tidak direstui oleh struktur elit yang mengendalikan PA. Fakta genealogis Partai Aceh inilah yang mermeri penjelasan pada kegalauan politik di Aceh saat ini.

Komisi Independen Pemilihan (Aceh) yang sekiranya menyelenggarakan pilkada gubernur dan

pilkada di 17 kabupaten/kota pada 14 November 2011 ke depan menjadi limbung karena 'pelanggaran' yuridis DPRA yang menafikan putusan MK atas berlakunya calon independen. Defisit demokrasi menampilkan perwajahan bahwa demokrasi akhirnya dibajak oleh elit politik yang semata berbicara pemeliharaan akses kekuasaan. Demokrasi yang terjadi akhirnya berhenti pada debat sirkulasi elit, menjadi sangat jauh dari gagasan demokrasi ekonomi yang menjadi tugas selanjutnya bagi sebuah kawasan pasca-konflik.

Menggagas Partai Lokal di Indonesia?

Dalam kacamata awam, hadir dan berjalannya praktik partai lokal di Aceh tentu mengguring pada sebuah pertanyaan harap: apakah mungkin di daerah lain bisa terdapat partai lokal? Hal ini wajar karena rakyat—dalam hal ini adalah konstituen—merasakan kejumudan atas fakta dan praktik politik partai (nasional) yang selama ini dipilih tanpa adanya alternatif lain dalam tatanan demokrasi post-Soeharto. Hadirnya partai lokal dalam konstelasi politik pemilu 2009 di Aceh kembali menginspirasi masyarakat politik Indonesia setelah juga munculnya calon independen dalam pilkada Aceh 2006 untuk pertama kalinya.

Partai lokal dibayangkan hadir sebagai sebuah gagasan baru proses demokratisasi pasca tumbangunya rezim Soeharto, dan kemunculannya pada pemerintahan SBY diasumsikan mampu menjadi aktor intermediari alternatif setelah partai nasional di anggap tak mampu lagi memerankan fungsinya sebagai lingkage antara negara dan masyarakat. Partai lokal hadir untuk menyambung terputusnya partai dengan konstituennya

selama ini, karena kelokalannya dibayangkan mampu mendekatkan diri dengan seluruh elemen pemilik suara. Sehingga tidak salah jika kemudian gagasan partai lokal diwacanakan sebagai sebuah gagasan nasional yang mampu hadir di daerah-daerah lain di Indonesia akibat absennya peran partai nasional selama ini.

Namun, hasil studi ini menunjukkan bahwa lahirnya dan berlakunya praktik partai lokal justru bukan pada alasan ‘penyambung lidah’ konstituen yang selama ini absen. Aceh sebagai satu-satunya kawasan—setelah lebih dari empat dekade sejak pemilu 1955—yang pertama kali menjadi ‘tempat tanggal lahir’ partai lokal menunjukkan sebuah pola dari pembayangan di atas, demokratisasi. Dan memang benar adanya bahwa hadirnya partai lokal di Aceh tidak terlepas dari arus demokratisasi sejak reformasi 1998 sehingga gagasan damai Helsinki 2005 yang mengilhami partai lokal muncul berada di dalam *framework* demokratisasi. Tetapi gagasan partai lokal sebagai alasan demokratisasi—mengembalikan fungsi *linkage* partai politik—perlu kita diskusikan kembali di sini.

Sebagaimana temuan dalam studi ini, perlu kita ketahui bahwa redaksi ‘partai lokal’ baru untuk pertama kalinya muncul di atas meja perundingan damai GAM-Pemerintah RI di Helsinki pada Februari 2005, tepatnya pada perundingan kedua setelah perundingan pertama gagal karena GAM pada posisi merdeka dan Pemerintah I pada posisi integrasi dengan otonomi khusus. Lebih detail, gagasan partai lokal justru muncul dari Damien Kingsbury (akademisi Australia) sebagai konsultan politik GAM dalam perundingan, sedangkan gagasan tersebut merupakan varian dari gagasan *self-government*

yang diusulkan Martii Ahtisari (mantan presiden Finlandia) sebagai mediator perundingan untuk memecah kebuntuan pada posisi yang kaku baik GAM dengan ide merdekanya maupun Pemerintah RI dengan ambisi integrasinya. Lalu kemudian, gagasan partai lokal dipertahankan terus menerus sampai perundingan kelima akhirnya disepakati, karena Pemerintah RI tidak punya cukup dasar yuridis untuk mengakomodasi gagasan partai lokal dan harus berhadapan dengan DPR RI.

Elaborasi terkait detail munculnya partai lokal di Aceh tersebut menggiring pada pemahaman kita bahwa partai lokal yang ada sekarang—dan menjadi satu-satunya kanal politik bagi personalia GAM—pada dasarnya tidak pernah dibayangkan baik oleh GAM maupun Pemerintah RI apalagi elemen di luar ke dua belah pihak. GAM yang membela mati-matian dalam perundingan terkait dengan partai lokal pun tidak pernah membayangkan atau mendesain dirinya akan bertransformasi—mengkonversi gagasan merdeka atau pemisahan diri—menjadi Partai Aceh sebagai partai lokal yang diperjuangkan di perundingan.

Dalam kerangka analisis yang lebih besar, partai lokal sebagai sebuah gagasan hadir dari perundingan damai sebuah kawasan konflik bernama Aceh. Partai lokal bukan berasal dari sidang parlemen negara maupun tuntutan akar rumput masyarakat lokal, keterlibatan pihak di luar subyek konflik (Damien Kingsbury dan Martii Ahtisari) menjelaskan bahwa partai lokal yang ada adalah bentuk 'barang barter' dalam perundingan perdamaian GAM-Pemerintah RI. Lebih jauh, perundingan perdamaian tersebut muncul karena

konflik yang berkepanjangan di Aceh sebagai konflik relasi pusat-daerah. Artinya, sekalipun tidak disadari, kondisi konflik sebuah kawasan—dalam hal ini adalah Aceh—merupakan prakondisi sekaligus struktur peluang politik lahirnya gagasan partai lokal.

Dengan kata lain, lahirnya partai lokal di Indonesia mempunyai potensi besar bagi sebuah daerah atau kawasan yang mempunyai konflik relasi pusat-daerah. Hal ini mengkonfirmasi tesis Seymour Martin Lipson dan Stein Rokkan (1987) bahwa lahirnya partai politik selain karena persepektif ekonomi dan ideologi adalah juga karena persepektif konflik antara pusat dan daerah. Hal ini pula yang terjadi pada Papua sebagaimana termaktub dalam UU No.21 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Papua bahwa diktum partai lokal pada dasarnya juga dapat digunakan oleh masyarakat Papua untuk mengagregasi kepentingannya. Karena dua kawasan yang cenderung mempunyai konflik relasi pusat-daerah sejak republik Indonesia muncul pada Agustus 1945 adalah Aceh yang berada di ujung barat dan Papua di ujung timur. Sehingga konsepsi Indonesia dari Sabang (Aceh) sampai Merauke (Papua) menjadi dasar untuk menegosiasikan hadirnya partai lokal di dua daerah tersebut sebagai sebuah kawasan yang rawan konflik pusat-daerah.

Alhasil, membaca kemungkinan hadirnya partai lokal sebagai sebuah gagasan nasional pada dasarnya kita perlu melihat kawasan-kawasan yang mempunyai konflik panjang dalam relasi pusat-daerah. Jika kita meletakkan gagasan partai lokal dalam meja-meja sidang parlemen, maka kita berada pada utopia politik

representasi, karena nalar politisi partai nasional jelas bahwa dengan hadirnya partai lokal akan berimplikasi buruk bagi eksistensinya dalam perolehan suara di daerah. Artinya, berdasarkan hasil studi ini, prospek hadirnya partai lokal justru dengan melihat potensi konflik sebuah daerah dengan pemerintah pusat.

DAFTAR REFERENSI

- Adi, R. 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Alfian, T.I. 1982, *Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Aceh (1945-1949)*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Pengembangan Permuseuman Daerah Istimewa Aceh, Aceh.
- Alfian, T.I. 1999, *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah*, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Banda Aceh.
- Ali, M. R.H. 2007, "Partai Lokal dan Masa Depan Partai Nasional" dalam *Rubrik Opini*, <http://www.acehforum.or.id/showthread.php?t=5851&page=1>.
- Ali, M. R.H. 2010, *Assessing GAM's Transformation After Hasan Tiro*, <http://acehinstitute.org/id/>
- Ambardi, K. 2009, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

- Arifin, H.B. 2003, *Sejarah Asal Mula GAM(1): Lahir karena Penindasan dan Pelecehan Tanah Adat*, 20 Mei, <http://www.balipost.co.id/balipostcetaK/2003/5/20/p2.htm>
- Aspinall, E. 2005, *Aceh/Indonesia: Conflict Analysis and Options for Systematic Conflict Transformation (Prepared for the Berghof Foundation for Peace Support, Australian National University, Canberra.*
- Aspinall, E. 2005, *Opposing Soeharto: Compromise, Resistance, and Regim Change in Indonesia.* Stanford University Press, California.
- Aspinall, E. 2008, *Basket Case to Showcase: How Indonesia's Democratic Transition Transformed Aceh*, <http://www.insideindonesia.org/feature-editions/basket-case-to-showcase>
- Aspinall, E.; van Klinken, Gerry (ed.) 2011, *The State and Illegality in Indonesia*, KITLV Press, Leiden.
- Avonius, L. 2007, *Waiting for Justice: Victims of Human Right Abuse in Aceh have not yet seen the legal processes they have been promised*, <http://www.insideindonesia.org/feature-editions/waiting-for-justice>
- Awwas, I. S. 2007, *Jejak Jihad SM. Kartosuwirjo: Mengungkap Fakta yang Didustakan*, Uswah, Jogjakarta.

- Berg, R.; Nirmala, R. (ed.) 2005, *Transforming Local Political Leadership*, Palgrave Macmillan, New York.
- Bhakti, I.N. (ed.) 2008, *Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*, Pustaka Pelaja, Yogyakarta.
- Buchori, M. 1994, *Transformasi, Suksesi, dan masalah-masalah Demokrasi*, IKIP Muhammadiyah, Jakarta.
- Budi, A. 2011, *Integralisme Ummah dan Citizenship: Pemikiran Politik Wahid Hasyim*, Jogjakarta.
- Bunte, M.; Uven, A. 2009, *Democratization in Post-Soeharto Indonesia*, Routledge, New York.
- Clifford, M. 2001, *Political Genealogy after Foucault: Savage Identities*, Routledge, New York.
- Danamik, A.T. 2010, *Hasan Tiro: Dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi Etno-Nasionalis*, Friederich Ebert Stiftung (FES) dan Aceh Future Institute (AFI), Jakarta.
- Davies, M. N. 1966, *Indonesia's War over Aceh: last stand on Mecca's Porch.*: Routlege, New York.
- Departemen Komunikasi dan Informatika RI 2005, *Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka*. Badan Informasi Publik, Jakarta.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1991, *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta.
- Dix, R.H. 1989, "Cleavage Structures and Party Systems in Latin America" dalam *Comparative Politics*, Vol.22, No.1. (Oct., 1989), pp. 23-37.
- Djawamaku, H. A. 2008, "Penasionalan Partai Politik Lokal. Dalam Modernisasi Partai Politik di Alam Demokrasi" dalam *Analisis CSIS*, Vol.37, No.2, Juni 2008.
- Djojosoekarto, A.; Sandjaja, U. 2008, *Transformasi Demokratis Partai Politik di Indonesia: Model, Strategi dan Praktek*, Kemitraan Partnership, Jakarta.
- Duverger, M. 1959, *Political Parties: Their Organization and Activity in The Modern State*, Methuen and Co.LTD, London.
- Duverger, M. 1984, *Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Duverger, M. 2007, *Sosiologi Politik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eda, F.W.; Dharma, S. S. 1999, *Aceh Menggugat, Sepuluh Tahun Rakyat Aceh di Bawah Tekanan Militer: Sebuah Kesaksian*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- Edkins, J.; Williams, N.V. 2010, *Teori-Teori Kritis: Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional*, Pustaka Baca, Yogyakarta.
- Eickelman, D.F. 1998, *Politik Muslim: Wacana Kekuasaan dan Hegemoni dalam Masyarakat Islam*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Erawan, I.K.P. 2007, "Rekonseptualisasi Reprensetasi bagi Indonesia" dalam *Working Paper*, Partnership of Governance Meeting Room, 20 September 2007, Jakarta.
- Erb, M.; Sulistiyanto, P.; Faucher, C. 2005, *Regionalism in Post-Soeharto Indonesia*, RoutledgeCurzon, New York.
- Erdman, G. 2007, "The Cleavage Model, Ethnicity, and Voters Alignment in Africa: Conceptual and Methodological Problems Revisited" dalam *GIGA Working Paper No. 63*, German Institute of Gloval and Area Studies, Hamburg.
- Esterberg, K.G. 2001, *Qualitatife Methods in Social Research*, Lowell. University of Massachusetts.
- Faisal, S. 2001, *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fakhrurrazi 2008, *Peran Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA) dalam Proses Diarmamanet, Demobilitation, dan Reintegration (DDR) di Aceh Pasca Perjanjian Helsinki 2005*, tesis MA, Universitas Gadjah Mada.

- Faucher-King, F. 2005, *Changing Parties: An Anthropology of British Political Party Conference*, Palgrave Macmillan, New York.
- Feith, H. 1954, "Toward Elections in Indonesia" dalam *Pacific Affairs*, Vol. 27, No. 3 (Sep., 1954), pp. 236-254, University of British Columbia.
- Gaffar, A. 2006, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Gray, J.L.; Starke, F. A. 1991, *Organizational Behavior: Concepts and Application*, Charles E. Merrill Publishing Company, Colombus, Ohio.
- Grisham, K.; Martin, B. 2008, "Political Party or Not?: Transformation of Rebellious Movements in the Middle East", *Paper dalam The Western Political Science Association*, 20 Maret, Manchester Hyatt, San Diego, California.
- Hadiwinata, B.S. (eds) 2010, *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka: dari Kotak Peluru ke Kotak Suara, Sebuah Kisah Sukses Program Transformasi Kombatan di Aceh*. Friederich Ebert Stiftung-Indonesia Office, Jakarta.
- Hall, R.H. 1996, *Organizations: Structure, Process, and Outcomes*, Fifth Edition, Printed Hall-International (UK) Limited, London.
- Hamid, A.F. 2008, *Partai Politik Lokal di Aceh: Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*, Kemitraan, Jakarta.

- Haris, S. (ed.) 2007. *Partai dan Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia: Studi Partai-Partai di DPRD Kabupaten/Kota*, LIPI Press, Jakarta.
- Haris, S. 2006, "Partai Lokal dan Pemilu Daerah" dalam *Kompas*, 12 April 2006.
- Hastings, J.V. 2010, *No Man's Land: Globalization, Territory, and Clandestine Groups in Southeast Asia*, Cornell University Press, New York.
- Heidar, K. 2006, *Party Membership and Participation*, Sage Publications, New Delhi, India.
- Ishak, O.S. (eds) 2001, *Suara dari Aceh: Identifikasi Kebutuhan dan Keinginan Rakyat Aceh*, Yappika, Jakarta.
- Ishak, O.S. 2009, *PA Harus Waspada Ancaman dari Dalam*, 30 April <http://www.harian-aceh.com/banda-raya/banda-aceh/2430-otto-syamsuddin-ishak-pa-harus-waspada-ancaman-dari-dalam.html>.
- Ismail, M.G. 1997, *Pasai dalam Perjalanan Sejarah: Abad ke-13 sampai Awal Abad ke-16*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Isra, S. 2005, "Partai Politik Lokal" dalam *Rubrik Opini, Koran Tempo*, 22 Juli <http://www.tempo.co/read/news/2005/07/22/05564233/Partai-Politik-Lokal>

- Jackson, K.D. 1989, *Kewibawaan Tradisional, Islam, dan Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat*. Grafiti, Jakarta.
- Jafar, R.F. (eds.) 2007, *Pengawasan dan Penegakan Hukum Pilkada Aceh 2006*, Kemitraan, Jakarta.
- Jakobi, T.A.K. 1998, *Aceh dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945-1949 dan Peranan Teuku Hamid Azwar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jones, H.; MacGregor, S. 1998, *Social Issues and Party Politics*, Routledge, London.
- Jones, S. 2009, *Aceh on A Knife's Edge: There Are Big Dangers Declaring Success Too Soon*, <http://www.insideindonesia.org/weekly-articles/aceh-on-a-knifes-edge>.
- Katz, R.S.; Crotty, W. 2006, *Hand Book of Party Politics*, Sage Publications, London.
- Kriesi, H. 1998, *The Transformation of Cleavage Politics: The 1997 Stein Rokkan Lecture*, *European Journal of Political Research* 33: 165-185, Netherlands
- Kulu, T.P. 1980, *Hikayat Prang Sabi: Masa Perang Aceh Ngon Belanda*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta.

- Latif, Y. 2005, *Intelegensiansia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20*. Mizan, Bandung.
- Lexy J. M. 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung.
- Liddle, R. W. 1970, *Ethnicity, Party, and National Integration*, Yale University Press, New Haven, London.
- Lipset, S.M. 2007, *Political Man: Basis Sosial Tentang Politik*. Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Lipset, S.M.; Rokkan, S. 1967, *Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments*, Free Press, New York.
- Lombard, D. 1991, *Kerajaan Aceh: Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Majalah Defender 2006, *Tactic: Guerrilla Warfare*, Edisi 8, Juni 2006.
- Majalah Nanggroe 2009, *Mungkinkah PA Berjuang untuk Kepentingan Golongannya?* Edisi 23, 21 Oktober.
- Majalah Nanggroe 2009, *Tiga Tahun Penuh Kritik*, Edisi 22, 28 September.
- Majalah Nanggroe 2010, *Menuju Kursi Aceh Satu*, Edisi Juli-September 2010.

- Maliki, Z. 2000, *Birokrasi Militer dan Partai Politik dalam Negara Transisi*,: Yayasan Galang, Yogyakarta.
- Marks, G. and Wilson, C.J. 2000, *The Past in the Present: A Cleavage Theory of Party Response to European Integration*, Cambridge University Press., B.J.Pol.S 30, 433-459. United Kingdom.
- Marsden, W. 1999, *Sejarah Sumatra*, Remaja Rosdakarya Bandung, Bandung.
- Maruli, A. 2008, *DPRA Sahkan Kanun Partai Politik Lokal*, 14 Juni, <http://www.antaranews.com/view/?i=1213419431&c=NAS&s=>
- Mastuti, S. 2001, "Konflik Vertikal di Aceh: Studi Kasus Gerakan Aceh Merdeka (1976-1982" dalam *Kumpulan Makalah Diskusi Sejarah Lokal, Sub Tema: Pembangkangan Sipil dan Konflik Vertikal II*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 161-175.
- Morfit, M. 2007, *The Road to Helsinki: The Aceh Agreement and Indonesia's Democratic Development*, Marjinius Nijhoff Publishers, Washington.
- Nadir, A. 2005, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi: Studi atas Artikulasi Politik Nahdliyin dan Dinamika Politik dalam Pilkada Langsung di Kabupaten Gresik Jawa Timur*, Averroes, Malang.

- Nasution, A.H. 1984, *Pokok-pokok Gerilya (dan Pertahanan Republik Indonesia di Masa yang lalu dan yang akan datang)*, Angkasa, Bandung.
- Neto, O.A.; Cox, G.W. 1997, "Electoral Institutions, Cleavage Structures, and The Number of Parties" dalam *America Journal of Political Science*, Volume 41, Issue 1, pp. 149-174.
- Nordholt, H.S.; van Kinken, Gerry, 2007, *Politik Lokal di Indonesia*. KTLIV-Jakarta dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Nurhasim, M. 2008, *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka: Kajian tentang Konsensus Normatif antara RI-GAM dalam Perundingan Helsinki*. Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Palmer, B. 2007, *The Price of Peace: Reintegration Funds Have Caused Problems As Well As Solving Them*, <http://www.insideindonesia.org/feature-editions/the-price-of-peace>
- Pane, N.S. 2001, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka: Solusi, Harapan, dan Impian*, Penerbit PT Grasindo, Jakarta.
- Poguntke, T. 2002, "Parties Without Firm Social Roots? Party Organizational Linkage" dalam *Working Paper 13*, Keele European Parties Research Unit (KEPRU), United Kingdom.

- Reid, A. 1969, *The Contest for North Sumatra: Atjeh, The Netherlands and Britain 1858-1898*, Oxford University Press, London.
- Reid, A. 2005, *Asal Usul Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatra hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19*, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Ronnie, D. 2005, *Pengembangan Sistem Peringatan Dini sebagai Upaya Pencegahan Konflik di Dalam Pelaksanaan Kesepakatan Damai RI dan GAM di Helsinki 15 Agustus 2005*, tesis MA, Universitas Gadjah Mada.
- Roth, D. 2008, *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode*, Friederich-Nauman-Stiftung fur die Freiheit, Jakarta.
- Said, M. 1961, *Atjeh Sepandjang Abad: Djilid Pertama*, diterbitkan Pengarang Sendiri, Medan.
- Sarantakos, S. 1993, *Social Research*, Charles Sturt University, Rivenia.
- Sartori, G. 1984, *Parties and Party Systems: A Framework For Analysis*, Vol.I Cambridge University Press, Cambridge.
- Schulze, K.E. 2005, "Not A Romantic Movement" dalam *Inside Indonesia Magazine*, <http://www.insideindonesia.org/feature-editions/not-a-romantic-movement>.

- Shaw, E. 1994, *The Labour Party Since 1979: Crisis and Transformation*. Routledge, London.
- Siagian, M. 2008, *Partai GAM Menjadi Partai Aceh, Tepat Namanya, Tindakannya Bagaimana?*, 22 Mei, <http://beritasore.com/2008/05/22/partai-gam-menjadi-partai-aceh-tepat-namanya-tindakannya-bagaimana/>
- Siavelis, P.M.; Morgenstern, S. 2008, *Pathways to Power: Political Recruitment and Candidate Selection in Latin America*, The Pennsylvania State University Press, Pennsylvania.
- Sihbudi, R. (eds) 2001, *Bara dalam Sekam: Identifikasi Akar Masalah dan Solusi atas Konflik-Konflik Lokal di Aceh, Maluku, Papua, dan Riau*. Penerbit Mizan, Jakarta.
- Suny, I. (ed.) 1980, *Bunga Rampai Tentang Aceh*, Penerbit Bhratara Karya Aksara, Jakarta.
- Ta, T.P. 2009, *Mao Tze Tung: Peralihan dan Revolusi Demokrasi ke Sosialisme*. Kreasi Wacana, Bantul.
- Tandjung, A. 2007, *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, Gramedia, Jakarta.
- Tippe, S. 2000, *Aceh di Persimpangan Jalan*, Pustaka Cidesindo, Jakarta.

- Tiro, H.M. 1984, *The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Tengku Hasan di Tiro*, National Liberation Front of Aceh-Sumatra.
- Tiro, H.M. 1999, *Demokrasi Untuk Indonesia*, Teplok Press, Jakarta.
- Toer, P.A. 1999, Naskah Pidato pada Peluncuran Ulang Media Kerja Budaya, 14 Juli, Aula Perpustakaan Nasional, Jakarta.
- Tørnquist, O. ; Prasetyo, S.A. ; Birks, T. (eds.), 2010. *The Role of Democracy for Peace and Reconstruction*, PCD Press Indonesia, Jogjakarta.
- van Dijk, C. 1983, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, Penerbit Grafiti Press, Jakarta.
- van Houten, P. 2009, *Multi-Level Relations in Political Parties: Delegation Approach*. Vol. 15. No. 2 pp.137-156, Sage Publications, Los Angeles.
- Walter, B.F. 2009, *Reputation and Civil War: Why Separatist Conflicts Are So Violent*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Ware, A. 2004, *The American Direct Primary: Party Institutionalization and Transformation in the North*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Waspada.co.id 2009, *PA Tingkatkan Kapasitas Anggota Legislatif*, 28 Juni, <http://www.waspada.co.id/index.php?option=co>

m_content&view=article&id=28249:pa-
tingkatkan-kapasitas-anggota-
legislative&catid=13&Itemid=26

Webb, P.; Kolodny, R. 2006, *Professional Staff in Political Parties.*, Sage Publications Ltd., London.

Yin, R.K. 2006, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, PT Raja Grafindon Persada, Jakarta.

Regulasi

Undang Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

Undang Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang Undang Partai Aceh No.1st/ DPA/ PA/ IV/ 2009 tentang Pemerintahan Partai Aceh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

Dokumen Audio Visual

Demos 2009, *Video Mencari Peluang Demokrasi*, dokumentasi, Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, Jakarta.

Djarot, E. 1988, *Tjoet Nja' Dhien*, Film.

LAMPIRAN

Maklumat Ulama Aceh Menyambut Kemerdekaan RI

**MAKLOEMAT
DILAMA SELOEROEH ATJEH.**

—DINC—

Perang doenia kedoea jang maha dahajad telah tammat. Seharang di Barat dan di Timoor oleh 4 Keradjaan jang besar sedang diseroer-perdamatan doenia jang abadi oentoe kerselamatan machloek Allah. Dan Indonesia tanah toempah dariah kita telah dimakloemkan kemerdekaannya kepada seloeroeh doenia serta telah berdiri Repoeblik Indonesia dibawah pimpinan dari jang mocha maha pemimpin kita i. SOEKARNO.

Belanda adalah satoe keradjaan jang kecil serta miskin, satoe negeri jang kecil lebih kecil dari daerah Atjeh dan telah hanjaer leboer, meroka soedih bertindak melakoekan kedjianannya kepada tanah air kita Indonesia jang soedah merdeka satoe oentoe dihidjajnja kembali.

Kalau makloed jang dijanakan noe berhasil maka pastilah meroka akan memeras segala lapisan rakyat, merampas semoea harta benda negara dan harta rakyat dan segala ke-jaan jang telah kita ksempeolkan selama ini akan moesnah sama sekali. Meroka akan memperboedakkan rakyat Indonesia mendjadi hambanja kembali dan mendjulukan oesaha oentoe menhapoe Agama Islam kita jang soetti serta mentindis dan menghambat kemoelaaan dan kemakmoeran bangsa Indonesia.

Di Djawa bangsa Belanda serta laki tangannya telah melakoekan keganasannya terhadap Kemerdekaan Repoeblik Indonesia hingga terjadi pertemporan di beberapa tempat jang achimja kemerdekaan berada dipihak-kita. Soenggoehpoea begitoe meroka beloom djoeja insaf.

Sejanap lapisan rakyat telah bersatoe padoe dengan patoeh berdiri dibelakang maha pemimpin i. SOEKARNO oentoe menoenngoe perintah dan kewadjaan jang akan didjalankan.

Menoentoe bejakinan kami bahwa perdjoeangan ini adalah perdjoeangan soetti jang disoet **"PERANG SABIL"**.

Maka pertualah wahai bangsakoe, bahwa perdjoeangan ini adalah sebagai samboengan perdjoeangan dahoeloe di Atjeh jang dipimph oleh Almarhoem Tgk. Tjhr di Tiro dan pahlawan2 kebangsaan jang lain.

Dari sebab noe bangoenlah wahai bangsakoe sekalian, bersatoe padoe menjoesoeo bahoe mengajak langkah mudoe kemoeka oentoe mengajet dediaj perdjoeangan anak kita dahoeloe. Toendoeilah dengan patoeh akan segala perintah2 pemimpin kita oentoe kerselamatan Tanah Air, Agama dan bangsa.

KOETARADJA, 15 - 10 - 1945.

Arao nama Oelama Seloeroeh Atjeh.

Tgk. Hadji HASAN Kroecng Kale.	Tgk. M. DAOED Beureueh.	Tgk. Hadji DJAJAR SIDIN Lamdjabat.	Tgk. Hadji AHMAD HASBALLAH Indrapoet.
-----------------------------------	----------------------------	--	---

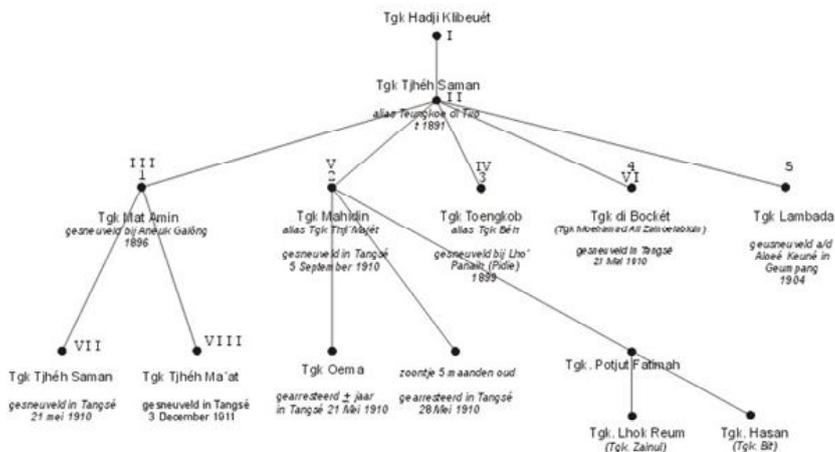
Dikeroboei oleh:
Jml. T. B. Residen Atjeh,
T. NJA' ARIF.

Disetoejoei oleh:
Jml. Keroea Comite Nasional,
TOEANKOE MAHMOED.

Sumber: Alfian, T.I 1999.

Silsilah Keluarga Hasan Tiro

STAMMBOOM DER TIRÓ - TEUNGKOEES. (THE FAMILY-TREE OF TENGKU DI TIRO)



(Reproduced from H. J. Schmidt, *Macechasse in Atrich*, p. 128)

Sumber: www.asnlf.net

Deklarasi GAM

PERNYATAAN ACHEH-SUMATRA MERDEKA

Acheh, Sumatra, Desember 4, 1976

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KEPADA BANGSA-BANGSA DI DUNIA,

Kami bangsa Aceh Sumatra, telah melaksanakan hak hak
kami

untuk menentukan nasib sendiri, dan melaksanakan tugas
kami untuk

melindungi hak suci kami atas tanah pusaka peninggalan
nenek moyang,

dengan ini menyatakan diri kami dan negeri kami bebas
dan merdeka dari

penguasaan dan penjajahan regime asing Jawa di Jakarta.

Tanah air kami Aceh, Sumatera, telah menjadi satu
negara yang bebas,

merdeka dan berdaulat selama dunia berkembang, Belanda
adalah penjajah

asing yang pertama datang mencoba menjajah kami ketika
ia menyatakan

perang kepada negara Aceh yang merdeka dan berdaulat,
pada 26 Mart

1873, dan melakukan serangan atas kami pada hari itu
juga, dengan

dibantu oleh serdadu-serdadu sewaan Jawa, apa kesudahannya serangan Belanda ini sudah tertulis pada halaman muka surat-surat kabar di seluruh dunia, surat kabar London "Times" menulis pada 22 April, 1873:

"Suatu kejadian yang sangat menarik hati sudah diberitakan terjadi di kepulauan Hindia Timur, satu kekuatan besar dari tentara bangsa Eropah sudah dikalahkan dan dipukul mundur oleh tentara anak negeri... tentara negara Aceh, bangsa Aceh sudah mendapat kemenangan yang menentukan. Musuh mereka bukan saja sudah kalah, tetapi dipaksa melarikan diri".

Surat kabar Amerika, "The New York Times" pada 6 Mei 1873, menulis:

"Peperangan yang berkubang darah sudah terjadi di Aceh, kerajaan yang memerintah Sumatra Utara, tentara Belanda sudah menyerang negara itu dan kini kita sudah mengetahui kesudahannya, serangan Belanda telah dibalas dengan penyembelihan besar-besaran atas Belanda, jenderal

Belanda sudah dibunuh, dan tentaranya melarikan diri dengan kacau balau.

Menurut kelihatan, sungguh-sungguh tentara Belanda sudah dihancurkan leburkan.

Kejadian ini telah menarik perhatian seluruh dunia kepada kerajaan Aceh yang merdeka dan berdaulat lagi kuat itu. Presiden Amerika Serikat, Ulysses S. Grant sengaja mengeluarkan satu pernyataan yang luar biasa menyatakan negaranya mengambil sikap neutral yang adil, yang tidak memihak kepada Belanda atau Aceh, dan ia meminta agar negara-negara lain bersikap sama sebab ia takut perang ini bisa meluas.

Para hari 25 Desember (hari natal), 1873, Belanda menyerang Aceh lagi, untuk kali yang kedua, dengan tentara yang lebih banyak lagi, yang terdiri dari Belanda dan Jawa, dan dengan ini mulailah apa yang dinamakan oleh majalah Amerika "Harper's magazine" sebagai "perang seratus tahun abad ini". Satu perang penjajahan yang paling berlumur darah, dan paling lama dalam sejarah manusia, dimana setengah dari bangsa kami sudah

memberikan korban jiwa untuk mempertahankan kemerdekaan kami.

Perang kemerdekaan ini sudah diteruskan sampai pecah perang dunia

ke-II, delapan orang nenek dari yang menandatangani pernyataan ini sudah

gugur sebagai syuhada dalam mempertahankan kemerdekaan kami ini.

Semuanya sebagai Wali Negara dan Panglima Tertinggi yang silih berganti

dari negara islam Aceh Sumatra.

Tetapi sesudah Perang Dunia ke-II, ketika Hindia Belanda katanya sudah

dihapuskan, tanah air kami Aceh Sumatra, tidaklah dikembalikan kepada

kami, sebenarnya Hindia Belanda belum pernah dihapuskan. Sebab

sesuatu kerajaan tidaklah dihapuskan kalau kesatuan wilayahnya masih

tetap dipelihara -sebagai halnya dengan Hindia Belanda, hanya namanya

saja yang ditukar dari "Hindia Belanda" menjadi "Indonesia" Jawa, sekarang

bangsa Belanda telah digantikan oleh bangsa Jawa sebagai penjajah, bangsa

Jawa itu adalah satu bangsa asing dan bangsa seberang lautan kepada

kami bangsa Aceh-Sumatera. Kami tidak mempunyai hubungan sejarah, politik, budaya, ekonomi dan geografi (bumi) dengan mereka itu. Kalau hasil dari penaklukan dan penjajahan Belanda tetap dipelihara bulat, kemudian dihadiahkan kepada bangsa Jawa, sebagaimana yang terjadi, maka tidak boleh tidak akan berdiri satu kerajaan penjajahan Jawa diatas tempat penjajahan Belanda. tetapi penjajahan itu, baik dilakukan oleh orang Belanda, Eropah yang berkulit putihm atau oleh orang Jawa, Asia yang berkulit sawo matang, tidaklah dapat diterima oleh bangsa Aceh, Sumatera.

“Penyerahan kedaulatan” yang tidak sah, illegal, yang telah dilakukan oleh penjajah lama, Belanda, kepada penjajah baru, Jawa, adalah satu penipuan dan kejahatan politik yang paling menyolok mata yang pernah dilakukan dalam abad ini: sipenjajah Belanda kabarnya konon sudah menyerahkan kedaulatan atas tanah air kita Aceh, Sumatera, kepada satu “bangsa

baru" yang bernama "Indonesia". Tetapi "Indonesia"
adalah kebohongan,
penipuan, dan propaganda, topeng untuk menutup
kolonialisme bangsa
Jawa. Sejak mulai dunia berkembang, tidak pernah ada
orang, apalagi
bangsa, yang bernama demikian, di bagian dunia kita ini.
Tidak ada bangsa
yang bernama demikian di kepulauan Melayu ini menurut
istilah ilmu
bangsa (ethnology), ilmu bahasa (philology), ilmu asal
budaya (cultural
anthropology), ilmu masyarakat (sociology) atau paham
ilmiah yang lain,
"Indonesia" hanya merek baru, dalam bahasa yang paling
asing, yang tidak
ada hubungan apa-apa dengan bahasa kita, sejarah kita,
kebudayaan kita,
atau kepentingan kita, "Indonesia" hanya merek baru,
nama pura-pura
baru, yang dianggap boleh oleh Belanda untuk
menggantikan nama
"Hindia Belanda" dalam usaha mempersatukan
administrasi tanah-tanah
rampasannya di dunia Melayu yang amat luas ini,
sipenjajah Jawapun tahu
dapat menggunakan nama ini untuk membenarkan mereka
menjajah

negeri orang di seberang lautan. Jika penjajahan Belanda adalah salah, maka penjajahan Jawa yang mutlak didasarkan atas penjajahan Jawa itu tidaklah menjadi benar. Dasar yang paling pokok dari hukum internasional mengatakan: "Ex Injuria Jus Non Oritur" - Hak tidak dapat berasal dari yang bukan hak, kebenaran tidak dapat berasal dari kesalahan, perbuatan legal tidak dapat berasal dari illegal.

Meskipun demikian, bangsa Jawa tetap mencoba menyambung penjajahan Belanda atas kita walaupun Belanda sendiri dan penjajah penjajah barat lainnya sudah mundur, sebab seluruh dunia mengancam penjajahan. Dalam masa tiga-puluh tahun belakangan ini kami bangsa Aceh, Sumatera, sudah mempersaksikan betapa negeri dan tanah air kami telah diperas habis-habisan oleh sipenjajah Jawa; mereka sudah mencuri harta kekayaan kami; mereka sudah merusakkan pencaharian kami; mereka sudah mengacau pendidikan anak kami; mereka sudah mengasingkan pemimpin-pemimpin

kami; mereka sudah mengikat bangsa kami dengan rantai
kezaliman, kekejaman, kemiskinan, dan tidak peduli: masa
hidup bangsa

kami pukul rata 34 tahun dan makin sehari makin kurang.
Bandingkan ini

dengan ukuran dunia yang 70 tahun dan makin sehari
makin bertambah,

sedangkan Aceh, Sumatera, mengeluarkan hasil setiap
tahun bagi

sipenjajah Indonesia-Jawa lebih 15 milyar dollar Amerika
yang semuanya

dipergunakan untuk kemakmuran pulau Jawa dan bangsa
Jawa.

Kami, bangsa Aceh, Sumatera, tidaklah mempunyai
perkara apa-apa

dengan bangsa Jawa kalau mereka tetap tinggal di negeri
mereka sendiri

dan tidak datang menjajah kami, dan berlagak sebagai
"Tuan" dalam rumah

kami, mulai saat ini, kami mau menjadi tuan di rumah
kami sendiri; hanya

demikian hidup ini ada artinya, kami mau membuat
hukum dan undang-undang

kami sendiri; yang sebagai mana kami pandang baik;
menjadi

penjamin kebebasan dan kemerdekaan kami sendiri; yang
mana kami

lebih dari sanggup; menjadi sederajat dengan semua
bangsa-bangsa di
dunia; sebagaimana nenek moyang kami selalu demikian,
dengan pendek:
Menjadi berdaulat atas persada tanah air kampung kami
sendiri.
Perjuangan kemerdekaan kami penuh keadilan, kami tidak
menghendaki
tanah bangsa lain- bukan sebagai bangsa Jawa datang
merampas
tanah kami, tanah kami telah dikaruniai Allah dengan
kekayaan dan
kemakmuran, kami berniat memberi bantuan untuk
kesejahteraan manusia
sedunia, kami mengharapkan pengakuan dari anggota
masyarakat bangsa-bangsa
yang baik, kami mengulurkan persahabatan kepada semua
bangsa
dan negara dari ke-empat penjuru bumi.

ATAS NAMA BANGSA ACHEH, SUMATERA, YANG
BERDAULAT.

Tengku Hasan Muhammad Di Tiro
Ketua, Angkatan Aceh, Sumatera Merdeka
dan Wali Negara.
Aceh, Sumatera, 4 Desember 1976

Foto dan Gambar



Hasan Tiro di Pengasingan (Stockholm, Swedia) dan Malik Mahmud bersama Nur Dzulu berdiskusi dengan Damien Kingsbury (Konsultan GAM dari Australia)



Delegasi GAM dalam Perundingan Helsinki dan para elit GAM di Stockholm



Muzakkir Manaf (Panglima AGAM) bersama dengan panglima wilayah bertemu Zaini Abdullah (pimpinan politik/menteri luar negeri GAM)



Pengibaran bendera GAM oleh milisi GAM atau Tentara Negara Aceh (TNA)

Perbandingan Peta Aceh



Peta era Kesultanan Aceh



Peta Aceh Era Republik Indonesia (Berdasarkan Departemen Pertahanan 2009)

**Lambang Partai dan Nama Partai Pada Awal Transformasi
GAM**



**Bendera (Lambang) Dan Nama Partai Setelah GAM
Bertransformasi Final Dalam Kontestasi Pemilu 2009**



**Pidato Malik Mahdud Pada Pertemuan Pimpinan
Partai Aceh**

(terjemahan dalam bahasa Indonesia,
naskah asli dalam bahasa Aceh)

Pidato Medjeulih Pembina dan Penasihat Partai Aceh

Alahamdulillahi Rabbil 'Alamin
Wassalutu, wassalamu 'ala saidil Mursalin
Wa'ala Alihi Wasahbihi Ajmain
Njang Ulôn Gaséh
Ketua Umum Partai Aceh
Sekretaris jendral Partai Aceh
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Aceh
Seluruh Dewan Pimpinan Partai Aceh Wilayah
Kabupaten/kota atau njang meuwakili
Seluruh Anggota DPRA yang berhadir
Seluruh Anggota DPRK yang berhadir
Hadirin dan hazirat yang Allah peumulia

Pada hari yang mulia ini, di dalam gedung yang sejuk ini, kita duduk bersepakat disini menyumbang pikiran untuk membuat struktur dan manajemen kerja serta administrasi partai aceh masa depan. Hari ini kita hadir disini karena kita semua saudara. Setiap berpikir kita satu hati. Sebab itu, anda yang didepan saya adalah anak-anak saya.

Nenek moyang kita di masa lampau telah memberi contoh untuk hari ini dan masa depan. **Hidup bersama dan makmur bersama**. Maka kita jaga amanah itu dengan selalu bersatu hati dan bermufakat (agar mencapai tujuan hidup dan makmur bersama). Ada lagi satu kalimat suci "**Bersama dalam duduk, berdiri, bermufakat dan berdoa**". Kita seperti seutas tali yang sambung menyambung, seperti sehelai benang yang dibuat kain, seperti sehelai benang yang dibuat kain.

Hai anak-anak saya,

Dalam fakta sejarah aceh, tidak ada satupun yang dapat kita lupakan sebagai ilmu. Ia adalah contoh dan teladan bagi perkara yang kita buat sekarang dan masa depan. Masa lalu adalah obor yang menerangi jalan ke masa depan.

Apakah kita yakin dapat membuat kemakmuran ekonomi dalam transisi rakyat hari ini ? Kalau dijawab tidak berarti anda kehilangan masih belum bisa mendapatkan makna dari sesuatu. Lupa utara selatan, kena penyakit amnesia atau gila. Tetapi kalau anda menjawab iya, berarti anda sebagai cucu nenek moyang merasa sebagai orang yang mulia, atau memiliki rasa "superiority complex" di dalam hati dan tubuh anda.

Anak-anak saya,

Sekarang ini kita periksa kembali semua kejadian dan peristiwa masa lampau. Jika kita melihatnya dalam kacamata sejarah, kita tudak akan merasa rugi dengan apa yang telah kita lakukan—semuanya dapat menjadi pelajaran. Semuanya adalah sebuah waktu yang bermakna "The finest moment" dalam sejarah negeri

aceh. Kita sudah melewati perang panjang lebih dari 30 tahun (sampai ada suatu proses perdamaian) dimulai pada 15 agustus 2005, kita mulai menyusun kebijakan dan solusi politik yang konkret diantara pihak politik yang berkepentingan, dibantu dengan mediator Marthi Arthisaari dan CMI (melalui 6 kali putaran perundingan) lahirlah MoU Helsinki diantara dua subjek terkait. Maka dari itu, kita tidak bisa tidak menerima proses tersebut sebagai alat perjuangan yang hebat. Tujuannya tidak lain membangkitkan ekonomi dan hukum yang menyangkut perkara-perkara itu.

MoU Helsinki adalah hasil karya yang tidak bisa dibuang begitu saja oleh semua rakyat Aceh. Ia lahir sebagai kesepakatan dan kesepahaman yang difasilitasi berbagai pihak diluar negeri AMM, CMI, EU, NATO, dan negara-negara besar seperti US, Jepang dan Inggris. Tanggung jawab kita semualah untuk menaati semua poin yang tertulis di dalamnya. Memastikan semua poin diimplementasi dan berjalan sampai aceh berdiri sebagai sebuah entitas politik, pemerintahan sendiri di Aceh. Ada yang tidak saya setuju pada proses revisi implementasi MoU Helsinki januari 2009 silam. Salah seorang anggota delegasi berkomentar : MoU tinggal sejarah—Mengapa kita masih terpengaruh dengan orang luar ?

MoU Helsinki adalah satu penentuan hukum yang mengikat, satu hakekat bahwa rakyat Aceh masih banyak yang tidak paham bentuk rupa pemerintahan sendiri yang kita dirikan. Dalam kronologi sejarah ada sebuah pemerintahan sendiri yang sudah berdiri di Jerman pada tahun 1808. Hari ini kita mengenal model pemerintahan sendiri ala Georgia ataupun Quebec di Kanada. Pemerintahan sendiri rakyat Aceh akan mengakomodai kepentingan kita semua dengan

pertimbangan kebaikan adat, budaya, sosial ekonomi dan sosial politik masyarakat.

Model perjanjian perdamaian Helsinki sudah mendunia. Model ini telah mulai dipelajari oleh negara-negara disekitar kita seperti Thailand dan Filipina. Semua itu difasilitasi oleh konferensi dan forum politik yang sudah dibuat untuk dihayati dalam-dalam. MoU Helsinki adalah alat untuk mencari solusi konkret menyelesaikan konflik dan politik melawan pemerintah.

Dalam pemilu legislatif kemarin, partai Aceh menadpat suara mayoritas dengan perolehan suara 1.007.000 suara. Dari 69 buah kursi di parlemen partai Aceh mendapat 33 kursi, menguasai 48 persen dari seluruh jumlah kursi yang ada. Hasil menakjubkan pemilu itu sudah diketahui seluruh dunia, sebab lawan partai aceh adalah 43 parpol nasional dan lokal. Bagi pengamat politik nasional dan internasional, kemenangan partai aceh adalah sebuah titik balik perubahan pola ekonomi politik untuk melahirkan satu manajemen aceh yang kuat di asia tenggara, asia, dan global seluruhnya.

Anak-anak saya,

Tugas kita belum selesai, musuh terbesar kita masih ada yaitu diri kita sendiri yang suatu hari bisa menjadi bumerang secara anti klimaks menghancurkan cita-cita suci ini.

Maka saya punya satu harapan untuk anda saudara-saudara saya supaya masing-masing mempunyai mandat dan tanggung jawab untuk mempercepat kemuliaan dan falsafah hidup aceh atas

kedudukan ilmu dan kenyataan di lapangan (membuat realita menuju idealitanya).

Partai Aceh akan selalu memelihara dan memperkuat proses rekonsiliasi dan reintegrasi pada negeri aceh dan indonesia umumnya. Begitu juga kita selalu tidak lupa untuk melangkah dan memajukan nilai-nilai dan konsep demokrasi yang praktis dan betul.

Kita selalu berkomitmen untuk membuat peta strategis yang komprehensif untuk pembangunan ekonomi mikro rakyat yang praktis. Juga akan mempertajam usaha perdagangan tingkat aceh, nasiona, internasional. Semuanya diharapkan akan bisa menambah pendapatan negara, pendapatan perkapita masyarakat dan dan peluang lapangan kerja bagi masyarakat. Konsep pembangunan yang kita pikirkan seperti rantai ekosistem alam, lingkungan, habitat dan tanah airnya—termauk bagi anak cucu di masa depan.

Selain pembangunan infrastruktur, kita tidak lupa membangun insan dan kualitas individu dalam usaha melahirkan lebih banyak modal manusia “human capital” untuk mendukung pembangunan. Disamping itu, dalam tujuan falsafah aceh, pendidikan mesti diselesaikan lebih dahulu sebelum perkara lain. Maka harus ada usaha untuk meperbaiki sistem dan konsep dasar pembangunan pendidikan aceh, perumusan kurikulum pendidikan agar anak-anak aceh punya kapasitas jasmani dan rohani.

Banda Aceh, 16 Juni 2010

Majelis Pembina dan Penasihat Partai Aceh

Ketua

Malik Mahmud

TENTANG PENULIS

Lahir 19 Maret 1989 di Sleman, Jogjakarta. Pernah dipercaya sebagai ketua umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah di SMA Muh.3 Jogja, pernah dipercaya sebagai Presiden Korps Mahasiswa Pemerintahan UGM 2009-2010; Staf Ahli Advokasi BEM KM UGM 2008/2009, salah seorang inisiator Parlemen Pemuda Indonesia pada 2009, aktif di Gerakan Tolak Komersialisasi Kampus (GERTAK) UGM 2010-2011, dan kini menjabat sebagai ketua Majelis Penasehat Forum Komunikasi dan Kerjasama Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Se-Indonesia pada 2011. Aktif menulis di beberapa media massa seperti *Sebuah Babak Baru Demokrasi* di SINDO, *Membangun Moralitas* di KOMPAS, *Politisasi versis Teknokratisasi* di SINDO, *Satu Abad*, *Turning Point Muhammadiyah* di Republika, *Ujian Nasional*, *Ritual Final yang Fanal* di Kedaulatan Rakyat, dan beberapa tulisan lainnya di media kampus, lokal, dan nasional. Presentator pada CORHICS International Conference, Paris 1 Sorbonne University, Paris-Prancis dengan judul *Corruption and Personalization of Political Party*, 7-9 September 2011. Sekarang menetap di Sleman, Jogjakarta.

PUBLIKASI YANG DITERBITKAN

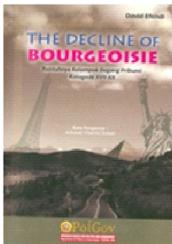
Jurusan Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM



Ferry Valdano Akbar, Konfrontasi Militer Merebut Irian Barat, 148 hlm, 14x21 cm, 2011

Pasca 10 tahun perjanjian KMB, pembicaraan mengenai status wilayah Irian Barat antara pihak Indonesia dan Belanda masih juga menemui jalan buntu. Padahal, dalam perjanjian KMB 1949 masalah Irian barat ini akan diselesaikan tidak lebih dari 1 tahun. Baik Belanda dan juga Indonesia memiliki kepentingan nasionalnya sendiri-sendiri.

Bagi Belanda yang negerinya hancur paska perang dunia 2, wilayah Irian Barat ini menjadi harapan baru sebagai sumber daya untuk kembali membangun perekonomian negaranya. Sedang bagi Indonesia hilangnya wilayah ini berarti sebuah serangan telak terhadap kedaulatan dan eksistensi NKRI. Bagi Bung Karno, Presiden Indonesia pada masa itu, perundingan yang berlarut-larut sudah tidak ada artinya. Sejak itulah Indonesia melakukan pembangunan kekuatan militer besar-besaran untuk merealisasikan hal itu. Tujuannya hanya satu, mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu pertiwi apapun caranya...



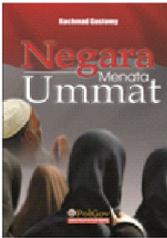
David Efendi, The decline of bourgeoisie: Runtuhnya kelompok dagang pribumi Kotagede XVII-XX, 276 hlm, 14,5x21 cm, 2010.

Perjalanan dan dinamika pedagang di Nusantara menjadi penting untuk melacak keberadaan borjuasi yang muncul di abad ke-19 dan ke-20. Kelompok borjuis ini lahir dan bermunculan di beberapa daerah (borjuasi etnis) yang kemudian bertemu dalam perdagangan Nusantara sebagai akibat dari perkembangan perdagangan dan pelayaran. Pelacakan kelas borjuasi ini juga dapat diawali dengan pembacaan terhadap kategori Clifford Geertz yang memilah tiga kelompok dalam masyarakat; yaitu golongan Abangan sebagai penduduk desa, kaum Santri sebagai kaum pedagang, dan Priyayi sebagai keturunan bangsawan atau birokrat.



Titik Widayanti, Politik Subaltern (Pergulatan Identitas Waria), 148 hlm, 14,5x20,5 cm, 2010.

Masih minimnya kajian subaltern di Indonesia menginspirasi penulis untuk menghadirkan studi tentang Pergulatan Identitas Waria yang dibingkai dalam politik subaltern. Keberadaannya sebagai komunitas subaltern sebenarnya memiliki berbagai dimensi yang sangat menarik untuk dikaji baik dari segi politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Buku ini mencoba mengawali kajian tentang waria dari perspektif politik, khususnya berkaitan dengan pembentukan dan pergulatan identitasnya sebagai komunitas subaltern.



Rachmad Gustomy; Negara Menata Umat, 242 hlm, 14x21 cm, 2010.

Pemikiran di balik buku ini berangkat dari olokan sambil lalu bahwa selama ini membaca 'masyarakat Islam' adalah sekedar mendefinisikan wacana tokoh besar yang diwawancarai. Baik ilmuwan, cendekia, ulama atau tokoh Islam yang dijadikan sampling analisis penelitian yang selama ini seakan mewakili "Rakyat Islam Indonesia": Siapa (?), bagaimana (?), seperti apa (?) mereka. Olokan itu menjadi refleksi serius bagi penulis, sehingga memunculkan sebuah ambisi untuk melihat konstruksi masyarakat Islam dalam relasi kekuasaan dengan negara. Penulis menemukan celah kecil, meminjam psikoanalisa pada identifikasi proses bawah sadar (sub-consciousness) yang ternyata masih membentuk pola tertentu.



Rizza Kamajaya; Transformasi Strategi Gerakan Petani, 192 hlm, 14x21 cm, 2010.

Pasca jatuhnya rezim otoritarian Order Baru, konstelasi politik di Indonesia diwarnai dengan munculnya berbagai organisasi rakyat dalam berbagai sektor, seperti buruh, nelayan, kaum miskin kota dan tentunya petani. Partisipasi politik yang macet selama kurun waktu 32 tahun telah menemukan momentum kebangkitannya. Dalam hal ini kehadiran organisasi rakyat yang dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk aktualisasi gerakan bawah tanah yang hidup secara sembunyi-sembunyi sewaktu rezim Orde Baru berkuasa.

Gerakan petani Batang menjadi salah satu kasus yang muncul di era transisi demokrasi. Melalui sebuah wadah kolektif perjuangan yang bernama Forum

Perjuangan Petani Batang atau disingkat FPPB, para petani Batang berusaha mengambil kembali tanah mereka yang diakuisisi negara ketika rezim Orde Baru berkuasa. Strategi reclaiming menjadi sebuah titik tolak petani untuk mewujudkan cita-citanya tersebut.

Purwo Santoso, Hasrul Hanif, AE Priyono; Securing the pace and the direction of Indonesian Democratization, 90 hlm, 13x21 cm, 2010

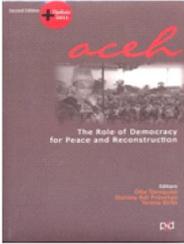


Buku ini berisi tentang desain asesmen demokrasi yang ditawarkan oleh Tim Fisipol UGM terkait dengan relasi *power*, *wealth* dan *democracy*. Model tersebut terkait dengan relasi *power* antara proses produksi kemakmuran dan distribusi kemakmuran yang seimbang. Buku ini berisi empat (4) buah chapter, pertama "*In search for alternative models of democracy for Indonesia*". Chapter kedua "*Power, wealth, and democracy: Reconstructing welfare-based power relations*". Chapter yang ketiga "*Action-reflection*" dan keempat berisi kesimpulan .

Bayu Dardias Kurniadi (ed.); Praktek Penelitian Kualitatif: Pengalaman dari UGM, 310 hlm, 14,5 x 20,7 cm, 2011

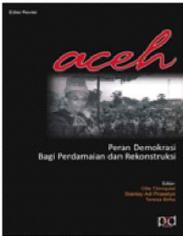


Buku yang ada dihadapan anda ini adalah kumpulan tugas mahasiswa Jurusan Politik dan Pemerintahan (JPP) Fisipol UGM pada semester lima (5) proses kuliah mereka. Tugas-tugas tersebut dipakai sebagai salah sat penilaian akhir dalam mata kuliah Metode Analisa Kualitatif yang diampu oleh Bayu Dardias Kurniadi, MA, M.Pub.Pol bersama Arie Ruhyanto, M.Sc. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa dituntut untuk mampu melakukan dua hal, pertama memahami prinsip dan konsep dasar metode penelitian kualitatif dan kedua mampu mengaplikasikan konsep-konsep tersebut ke dalam penelitian yang sebenarnya.



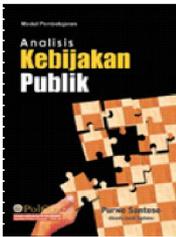
Olle Törnquist, Stanley Adi Prasetyo, Teresa Birks, George J. Aditjondro, Gyda Marås Sindre, The ISAI Aceh Research Group, Murizal Hamzah, The Aceh Participatory Research Team, Dara Meutia Uning; Aceh: The Role of Democracy for Peace and Reconstruction; 435 hlm, 15x21 cm, 2010.

Ketika tsunami pada akhir Desember 2004 semakin memperuncing perang saudara di Sri Lanka, Aceh justru mengalami transisi luar biasa dari situasi konflik dan bencana ke arah perdamaian. Provinsi di ujung Pulau Sumatera, yang telah berpuluh tahun berusaha memisahkan diri dari Indonesia itu, kini memulai era baru dalam pembangunan. Yang menarik, sebagaimana dituturkan dalam buku ini, keajaiban itu dimungkinkan oleh adanya proses demokratisasi. Untuk pertama kali, kombinasi intervensi internasional dan keterlibatan rakyat di tingkat lokal, akhirnya membuahkan hasil. Mengapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana proses tersebut bisa terus dipertahankan? Buku ini mengupas jawaban pertanyaan-pertanyaan penting tersebut.



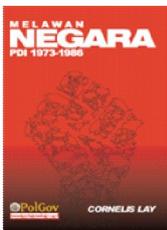
Olle Törnquist, Stanley Adi Prasetyo, Teresa Birks, George J. Aditjondro, Gyda Marås Sindre, The ISAI Aceh Research Group, Murizal Hamzah, The Aceh Participatory Research Team, Dara Meutia Uning; Aceh: The Role of Democracy for Peace and Reconstruction; 435 hlm, 15x21 cm, Versi Indonesia, 2011

Ketika tsunami pada akhir Desember 2004 semakin memperuncing perang saudara di Sri Lanka, Aceh justru mengalami transisi luar biasa dari situasi konflik dan bencana ke arah perdamaian. Provinsi di ujung Pulau Sumatera, yang telah berpuluh tahun berusaha memisahkan diri dari Indonesia itu, kini memulai era baru dalam pembangunan. Yang menarik, sebagaimana dituturkan dalam buku ini, keajaiban itu dimungkinkan oleh adanya proses demokratisasi. Untuk pertama kali, kombinasi intervensi internasional dan keterlibatan rakyat di tingkat lokal, akhirnya membuahkan hasil. Mengapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana proses tersebut bisa terus dipertahankan? Buku ini mengupas jawaban pertanyaan-pertanyaan penting tersebut.



Purwo Santoso dibantu Joash Tapiheru, Analisis Kebijakan Publik, 194 hlm, 15x22 cm, 2010

Selama ini ada kecenderungan dominasi perpektif modernis rasional-komprehensif dalam kajian analisis kebijakan. Sayangnya, dominasi perpektif ini telah mencapai level mendekati hegemonik sehingga menutup mata sebagian besar publik awam tentang keberadaan berbagai perspektif alternatif lain. Analisis kebijakan selama ini identik dengan kerumitan dan kompleksitas yang hanya bisa diatasi oleh mereka yang “ahli”. Mitos inilah yang ingin digugat oleh buku Analisa Kebijakan Publik ini. Melalui buku ini kami ingin menunjukkan bahwa analisis kebijakan bukanlah hal yang sedemikian rumit dan kompleks sehingga secara eksklusif diperuntukkan bagi para ahli. Meskipun penulisan modul ini ditujukan untuk menunjang perkuliahan mahasiswa strata 1, namun melalui modul ini kami ingin menunjukkan bahwa semua orang bisa melakukan analisis kebijakan.



Cornelis Lay, Melawan Negara: PDI 1973 – 1986, 15x22 cm, 2010

Perkembangan politik Indonesia selalu mencerminkan kondisi yang tampak diarahkan secara gamblang akan segera tunduk di hadapan kuasa negara. Mencitrakan negara sebagai magnet yang menarik setiap elemen apapun yang kuat berwatak besi, bahkan “mereka” yang berkarat untuk bersanding dengannya, dan lalu mengokohkan hegemoni negara. Namun, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di satu episode silam; 1973-1986, yang secara terperinci dikisahkan dalam buku ini, berkembang menjadi sebuah kutub yang tidak saja melawan kecenderungan, tetapi juga menguras lebih banyak energi penguasa lebih dari satu dasawarsa. Kajian spesifik tentang PDI ini mengungkapkan secara terang-terangan karakter sesungguhnya negara. Tidak hanya membongkar masa lalu, tetapi juga melawan limitasi teori dan perdebatan-perdebatan politik jaman Orde Baru yang terlanjur “mahfum” dipahami dari sudut pandang sentralitas yang mengandaikan negara kohesif dan solid.



Riswandha Imawan, Quo Vadis Demokrasi Indonesia, 15x22 cm, 2010

“...Dalam politik, konflik hanya sebatas perbedaan visi, bukan pribadi. Boleh saja kita berbeda pendapat, pandangan. Namun tidak berarti menghapus sama sekali persamaan yang ada di antara kita. Apalagi kita menganut konsep kekeluargaan dalam bernegara. Kita dibentuk oleh penderitaan yang sama, menghadapi tantangan yang sama, menghirup udara dan meminum air yang sama. Maka seharusnya tingkat toleransi manusia Indonesia menempati rangking tertinggi di antara bangsa-bangsa di muka bumi ini. Bagi ilmuwan politik, ketidakmampuan ini bisa dimaklumi. Mayoritas aktor politik kita adalah politisi karbitan. Mereka hadir dan dibesarkan di bawah payung popularitas orang lain..”